



Mahsun

INDONESIA dalam PERSPEKTIF POLITIK KEBAHASAAN



INDONESIA DALAM PERSPEKTIF POLITIK KEBAHASAAN

Prof. Dr. Mahsun, M.S.

D U M M Y

INDONESIA DALAM PERSPEKTIF POLITIK KEBAHASAAN

Prof. Dr. Mahsun, M.S.



Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
JAKARTA

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

Mahsun

INDONESIA DALAM PERSPEKTIF POLITIK KEBAHASAAN/ Mahsun

Ed. 1. --Cet. 1-- Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

xxxvi, 208 hlm., 21 cm

Bibliografi: hlm. 185

ISBN 978-979-769-xxx-x

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

I. Judul

xxx. x

Hak cipta 2015, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2015.XXXX RAJ

Prof. Dr. Mahsun, M.S.

INDONESIA DALAM PERSPEKTIF POLITIK KEBAHASAAN

Cetakan ke-1, Agustus 2015

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Desain cover oleh octiviena@gmail.com

Dicetak di Kharisma Putra Utama Offset

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwilinggung No. 112, Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Tel/Fax : (021) 84311162 – (021) 84311163

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id Http: //www.rajagrafindo.co.id

Perwakilan:

Jakarta-14240 Jl. Pelepah Asri 1 Blok Qj 2 No. 4 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara, Telp. (021) 4527823.

Bandung-40243 Jl. H. Kurdi Timur No. 08 Komplek Kurdi Telp. (022) 5206202. **Yogyakarta**-Pondok Sorangan

Indah Blok A-1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan Bantul, Telp. (0274) 625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungku

Harapan Blok. A No. 9, Telp. (031) 8700819. **Palembang**-30137, Jl. Kumbang III No. 10/4459 Rt. 78, Kel.

Demang Lebar Daun Telp. (0711) 445062. **Pekanbaru**-28294, Perum. De'Diandra Land Blok. C1/01 Jl. Kartama,

Marpoyan Damai, Telp. (0761) 65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Komplek Johor

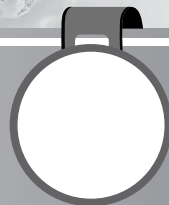
Residence Kec. Medan Johor, Telp. (061) 7871546. **Makassar**-90221, Jl. ST. Alauddin Blok A 14/3, Komp.

Perum Bumi Permata Hijau, Telp. (0411) 861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt. 17/07, Telp. (0511)

3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg. 100/v No. 5B, Denpasar, Bali, Telp. (0361) 8607995



PRAWACANA: POLITIK KEBAHASAAN DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN



Secara semantis, politik dimaknai sebagai segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara (KBBI, 2012: 1091). Berdasarkan batasan itu, politik kebahasaan merupakan kebijakan yang berisi perencanaan, pengarahan, dan ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar pengolahan keseluruhan masalah kebahasaan dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun politik kebahasaan dalam konteks keindonesiaan dimaknai sebagai kebijakan nasional yang berisi perencanaan, pengarahan, dan ketentuan yang dapat digunakan sebagai dasar bagi pengolahan keseluruhan masalah kebahasaan dalam rangka kehidupan berkeindonesiaan. Dalam hal itu, konsep kebahasaan mencakupi bahasa dan segala bentuk ekspresi yang menggunakan bahasa sebagai mediumnya, seperti kegiatan bersastra. Persoalannya, mengapa perlu politik kebahasaan? Sebegitu besarkah peran bahasa dalam kehidupan negara bangsa Indonesia?

Kalau berbicara negara bangsa, maka tidak dapat dilepaskan dari membicarakan unsur-unsur yang dapat mengikat komunitas yang membentuk negara bangsa itu menjadi satu kesatuan. Dengan kata lain, pembicaraan tentang negara bangsa, tidak dapat dilepaskan dari mempersoalkan elemen pembentuk nasionalisme negara bangsa tersebut. Sehubungan dengan itu, terdapat tiga elemen dasar pembentuk nasionalisme suatu negara bangsa, yaitu ras/suku bangsa, agama, dan bahasa.

Terdapat banyak negara yang mengikat komunitasnya dalam satu ikatan negara bangsa karena kesamaan ras, misalnya negara Afrika Selatan dengan politik Apartheidnya, atau negara lain yang sesungguhnya pada masa awalnya dibentuk di atas kesamaan ras, misalnya Amerika Serikat, yang sampai saat ini suku Indian mengalami keterpinggiran dan sisa-sisa anti ras kulit hitam masih menjadi isu utama gejala kemanusiaan di negara tersebut. Hal serupa juga terjadi di negara Australia yang menyisakan persoalan bagi suku bangsa Aborigin. Bagi bangsa Indonesia, mungkinkah ras dapat dijadikan fondasi dalam membangun negara bangsa? Dengan menganalogikan ras sama dengan suku bangsa dan berdasarkan bahasa lokal yang menjadi penanda suku bangsa di Indonesia terdapat 659 suku bangsa, maka persoalannya, suku bangsa manakah dari 659 suku bangsa itu yang dapat menjadi benang pengikat keindonesiaan? Katakan pilihan jatuh pada suku bangsa Jawa, karena suku bangsa ini jumlahnya sangat besar. Namun, dalam pengalaman Indonesia ketika gerakan memperkaya daya ungkap bahasa Indonesia sehingga mampu menjadi bahasa modern yang sejajar dengan bahasa dunia lainnya, para perekayasa bahasa melalui institusi kebahasaan pada kisaran tahun 1970-an sampai dengan tahun 1988, banyak menyerap kosakata bahasa Jawa dan muncullah kritikan yang cukup pedas. Dengan redaksi yang berbeda, tetapi esensinya sama, kritikan itu menyuarakan dengan lantang tolakan dominasi bahasa Jawa dengan menyatakan, “Terjadi proses penjawaan dalam bahasa Indonesia”. Kritikan

tersebut menggambarkan tolakan dominasi suku bangsa tertentu dalam membangun keindonesiaan. Artinya, elemen suku bangsa atau ras tidak mungkin menjadi fondasi dalam membangun nasionalisme Indonesia dan dari sinilah disadari betapa cerdasnya para pendiri bangsa untuk tidak memilih elemen tersebut sebagai fondasi dalam membangun nasionalisme Indonesia.

Begitu pula dengan elemen agama, ada banyak negara bangsa yang menjadikan agama sebagai elemen pengikat nasionalismenya. Bahkan nama agama itu dijadikan nama negaranya, misalnya Republik Islam Iran, yang menjadikan agama Islam sebagai fondasi dalam membangun nasionalisme negara bangsanya. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia terdapat enam agama yang diakui secara resmi oleh negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghuchu. Persoalannya, agama manakah yang akan menjadi fondasi atau benang pengikat dalam membangun nasionalisme keindonesiaan? Katakan, dipilih Islam karena agama ini adalah agama mayoritas. Pengalaman sejarah ketika rumusan sila pertama Pancasila di dalam Piagam Jakarta yang berbunyi: “Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluk-Pemeluknya”, minta dihapuskan sehingga muncullah bunyi Pancasila seperti dikenal sekarang: “Ketuhanan Yang Maha Esa” telah memberikan pelajaran pada bangsa ini bahwa betapa arifnya para pendiri bangsa untuk tidak memilih agama sebagai fondasi dalam membangun negara bangsa Indonesia. Itu sebabnya pula, sehebat apa pun gerakan yang ingin mengubah fondasi nasionalisme Indonesia atas dasar agama pasti akan mendapat tolakan yang kuat, sebagaimana gagalnya beberapa gerakan yang ingin membentuk negara agama, seperti yang dilakukan para separatis DII/TII.

Suatu hal yang menarik, adalah dipilihnya bahasa sebagai fondasi dalam membangun negara bangsa Indonesia. Hal itu terlihat dari kesadaran akan pengakuan atas kesatuan tanah air yaitu tanah air Indonesia, meskipun terdiri atas tidak kurang tujuh belas ribu

tanah air (pulau) dan kesatuan bangsa yaitu bangsa Indonesia, meskipun terdiri atas tidak kurang dari 659 suku bangsa. Suku bangsa yang berpencar-pencar yang mendiami pulau yang tujuh belasan ribu tersebut diyakini mampu direkatkan dengan sebuah bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Artinya, bahasa menjadi benang pengikat dalam membangun nasionalisme Indonesia. Dalam konteks ini, menjadi amat penting dan benar pengakuan mantan Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew dalam bukunya: *One Man's View of the World*, yang menyatakan bahwa pada tahun 1998, ketika runtuhnya kekuasaan Orde Baru, tidak ada satu orang pun pejabat di negara itu yang tidak meramalkan di Indonesia akan terjadi balkanisasi. Indonesia akan hancur berkeping-keping menjadi negara-negara kecil, boleh jadi akan mengikuti asalnya dari beberapa ratus kerajaan/kesultanan. Namun, apa yang terjadi, ramalan itu jauh dari kebenaran. Lalu apa yang membuat Indonesia masih bertahan seperti sekarang ini? Lee Kuan Yew menjawabnya dengan menyatakan bahwa Indonesia telah diwarisi satu hal yang tiada ternilai oleh para pendiri bangsanya, yaitu bahasa persatuan bahasa Indonesia. Di sinilah pentingnya peran bahasa nasional/persatuan suatu negara bangsa.

Terdapat banyak contoh negara bangsa yang membangun nasionalismenya di atas fondasi bahasa, misalnya India dan Pakistan, Cina, dan Israel. India dan Pakistan berusaha membedakan diri satu sama lain dengan menyatakan bahwa penutur bahasa India dan Pakistan merupakan penutur bahasa yang berbeda. Padahal, secara sosiolinguistik di antara mereka jika terjadi komunikasi satu sama lain dengan menggunakan bahasa masing-masing masih terdapat pemahaman timbal balik (*mutual intelligibility*). Namun, karena mereka telah berpisah menjadi negara bangsa yang berbeda, bahasa yang sama dibedakan demi identitas yang berbeda. India memberi nama bahasanya dengan nama bahasa Hindi, sedangkan Pakistan memberi nama bahasanya dengan nama bahasa Urdu. Bahkan lebih jauh dari itu, mereka berusaha membedakan diri satu sama lain dalam sistem ekspresi tulis. Apabila India dengan

bahasa Hindinya menggunakan aksara Dewanagari (Sanskerta), maka Pakistan dengan bahasa Urduanya menggunakan aksara Arab. Kasus sebaliknya terjadi pada Republik Rakyat Cina, yang memiliki 56 bahasa. Apabila penutur di provinsi Guandong berbicara dengan penutur di Provinsi Nanjing, Yunan dengan menggunakan bahasa masing-masing maka di antara mereka tidak terdapat pemahaman timbal balik, karena memang mereka masing-masing merupakan penutur bahasa yang berbeda. Namun, demi sebuah negara bangsa yang besar, bersatu, dan berdaulat semua bahasa itu disatukan dalam satu sistem bahasa tulis, yaitu dengan menggunakan aksara Han. Jadi, baik bahasa di Provinsi Guandong, Nanjing, maupun Yunan dan semua bahasa lain yang ada di wilayah negara tersebut tunduk pada satu sistem bahasa tulis, yaitu menggunakan aksara Han. Yang berbeda disamakan demi identitas satu negara bangsa yang utuh, kokoh, dan berdaulat.

Adapun kasus yang terjadi di Israel, ketika negara itu merdeka, hal yang pertama-tama dilakukan adalah menetapkan identitasnya agar berbeda dengan identitas negara-negara yang berbahasa Arab, seperti Arab Saudi, Palestina dan lain-lain.; berbeda dengan negara yang menggunakan bahasa Parsi, seperti Republik Islam Iran. Apa yang dilakukan adalah menghidupkan bahasa Ibrani yang telah punah ratusan tahun demi identitas negara bangsanya. Hal yang relatif sama dengan Israel adalah Indonesia. Apabila Israel menghidupkan bahasa yang sudah punah untuk menjadi identitasnya, maka Indonesia memaksa bahasa yang tidak pernah “mengandung” untuk melahirkan bahasa baru yang diberi nama bahasa Indonesia.

Sebagai negara bangsa yang dibangun di atas fondasi nasionalisme bahasa, Indonesia mengalami “gempuran” dari bahasa pula. Berbagai isu kebahasaan yang dihubungkan dengan politik kebangsaan, seperti yang muncul di belahan Timur, Barat, dan kawasan tengah Indonesia memberikan gambaran pada bangsa Indonesia betapa bangsa ini haruslah mengelola secara arif

keberagaman bahasanya dalam satu kebijakan strategis kebahasaan demi keutuhan NKRI.

Pada tahun 1884, seorang sarjana berkebangsaan Belanda bernama J.L.A Brandes, menulis disertasi doktornya dengan judul “*Bijdrage tot de Verglijkende Klankleer der Westersche Afdeeling van de Maleisch-Polynesische Taal-familie*” mengelompokkan semua bahasa di Indonesia ke dalam kelompok bahasa yang sama, yaitu kelompok Melayu Polinesia (Austronesia) dengan dua subkelompok, yaitu subkelompok Austronesia Barat dan subkelompok Austronesia Timur. Kedua subkelompok bahasa ini membelah dua wilayah Indonesia, sehingga membentuk garis yang secara linguistis dikenal sebagai garis Brandes. Wilayah garis Brandes bagian Barat mencakupi wilayah Barat mulai dari Sumatra, Jawa, Bali, sampai ke arah Timur: Pulau Sumbawa bagian barat (kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat) dan ke Utara Pulau Kalimantan. Wilayah garis Brandes bagian timur mencakupi: wilayah Pulau Sumbawa bagian Timur, Sulawesi, NTT, Maluku, Halmahera, sampai ke Papua dan Papua Barat. Ciri pembeda kedua subkelompok itu menurut Brandes adalah terdapat pada konstruksi yang menyatakan makna kepemilikan. Apabila pada wilayah Austronesia Timur konstruksi miliknya diawali dengan unsur pemilik lalu diikuti oleh unsur termilik, maka pada wilayah Austronesia Barat konstruksi itu dimulai dari unsur termilik dan diikuti unsur pemilik, bandingkan misalnya dalam bahasa Jawa: *kelambi ne Tono* ‘baju kepunyaan Tono’ (Austronesia Barat) dan bahasa Melayu: *hidung saya/kamu* dengan konstruksi milik dalam kelompok bahasa Austronesia Timur: bahasa Tarfia (Papua): *ik ni siwim* ‘kamu mempunyai hidung’ atau dalam bahasa Gresi (Papua): *age muyi* ‘saya (mempunyai) hidung’. Pendapat Brandes didukung oleh R. Blust (1971), hanya saja Blust merinci kembali kelompok Austronesia Timur ke dalam dua subkelompok: Austronesia Tengah dan Austronesia Timur. Namun, intinya kedua pakar Austronesia tersebut tetap mengelompokkan semua bahasa yang terdapat di Indonesia ke dalam satu rumpun bahasa yang disebutnya sebagai rumpun Austronesia.

Pada perkembangan selanjutnya, dalam buku yang berjudul “Bahasa-Bahasa di Indonesia (*Languages of Indonesia*)”, yang diterbitkan dalam seri bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tahun 2006 oleh *Summer Institute of Linguistics (SIL)*, cabang Indonesia, digambarkan bahwa di wilayah Indonesia terdapat 742 bahasa. Ketujuh ratus empat puluh dua bahasa itu, secara eksplisit, dikelompokkan paling tidak pada dua kelompok besar, yaitu kelompok Austronesia dan kelompok non-Austronesia. Untuk kelompok non-Austronesia di dalamnya terdapat kelompok bahasa yang berpusat di Nugini, yang oleh para ahli bahasa di kawasan itu disebut Filum Trans Nugini dan Papua Barat. Bahasa-bahasa tersebut banyak ditemukan di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat, sebagian di Maluku dan Maluku Utara, dan sebagian kecil di Nusa Tenggara Timur (khususnya NTT). Dari 269 bahasa di wilayah Papua dan Papua Barat yang masih aktif dituturkan terdapat 53 bahasa yang disebut masuk dalam kelompok Austronesia, sisanya adalah masuk kelompok non-Austronesia (filum Trans Nugini dan Papua Barat); sedangkan di Maluku dan Maluku Utara, dari 129 bahasa yang masih aktif digunakan terdapat 17 bahasa yang diklasifikasikan sebagai kelompok bahasa-bahasa Papua Barat dan 1 bahasa yang diklasifikasikan sebagai bahasa Trans Nugini, sisanya termasuk kelompok Austronesia. Adapun di wilayah Nusa Tenggara Timur, dari 73 bahasa yang masih aktif dituturkan terdapat 16 buah bahasa yang diklasifikasikan sebagai kelompok Trans Nugini, sisanya adalah bahasa Austronesia.

Adanya kelompok bahasa lain selain bahasa Austronesia di Indonesia oleh SIL bukanlah pandangan yang pertama kali, karena SIL sendiri mendasarkan pandangannya itu pada pandangan pakar-pakar sebelumnya, misalnya periksa Wurm (1978, 1982, dan 1983) atau Voorhoeve (1988 dan 1995). Penyebutan Trans Nugini dan Papua Barat, sebagai sebuah Filum tersendiri, dikontraskan dengan istilah Austronesia, yang oleh banyak pakar disebut kelompok bahasa yang dikategorikan sebagai rumpun. Antara kelompok

yang berstatus filum dengan rumpun, dalam kategori Swadesh, merupakan dua kelompok yang tidak berada dalam satu simpai relasi kekerabatan yang dekat. Oleh karena itu, kedua kategori kelompok bahasa ini berada pada rentang sejarah yang berbeda, tidak memperlihatkan keterpautan dalam satu kesamaan asal. Dalam konteks keindonesiaan dan dari segi psikologis, kondisi ini tidak dapat dijadikan modal emosional untuk memperlihatkan keterpautannya dalam satu relasi kekerabatan antarberbagai suku bangsa penutur bahasa-bahasa lokal di Indonesia. Dalam pada itu, kondisi ini dapat menjadi titik krusial bagi upaya integrasi bangsa. Lebih-lebih, jika dihadapkan pada realita bahwa di wilayah yang ditengarai terdapat bahasa selain rumpun bahasa Austronesia tersebut ditemukan banyak gejala sosial yang mengarah pada disintegrasi bangsa, seperti gerakan OPM (Organisasi Papua Merdeka) dan gerakan RMS (Republik Maluku Selatan), yang sampai saat ini riak-riaknya masih terasa dalam denyut nadi kehidupan bangsa Indonesia.

Berdasarkan pengamatan dan beberapa bukti kondisi sosial kekinian, pengelompokan bahasa-bahasa di Indonesia atas rumpun besar Austronesia dan Non-Austronesia memiliki keterkaitan dengan strategi geolinguistik-politis, yaitu pemanfaatan isu keberbedaan kelompok bahasa untuk tujuan politis. Sebut saja, Gerakan Melanesia Raya (minta merdeka) di Manokwari, 14 Desember 2010, yang terjadi sebulan setelah dilangsungkan konferensi internasional dengan Tema pada sampul depan buku panduannya berbunyi: *International Conference on Papuan Cultural Diversity in the Mozaic of Indonesian Cultural* (Keberagaman Budaya Papua dalam Mozaik Kebudayaan Indonesia) yang topik-topik makalahnya pada bagian dalam buku panduan diarahkan ke tema: “Keberagaman Budaya Papua di dalam Konteks Kebudayaan Melanesia” (*Papuan Cultural Diversity in its Melanesian Cultural Context: Intangible Cultural Heritage—Living Cultural, Social Practices, Rituals, Languages*). Penulis sendiri diminta untuk membawa

makalah dengan topik: *“Diaspora of Melanesian (Languages) in Indonesian, Specially in NTT, Maluccas, and Papua”*.

Konsep Melanesia yang dalam makalah Don Flassy dicanangkan mencakupi wilayah Papua, Papua Barat, Maluku sampai ke NTT dan mendapat dukungan dari para pakar asing yang hadir dalam konferensi tersebut (8-11 November 2010) ditangkap sebagai identitas linguistik-kultural yang dapat membedakan diri dengan sebagian besar suku bangsa lainnya di Indonesia. Itu sebabnya gerakan Melanesia Raya yang terus bergulir sampai sekarang berawal dari konferensi tersebut. Gerakan dengan isu Melanesia Merdeka disuarakan pertama kali di Manokwari tanggal 14 Desember 2010, sebulan setelah konferensi itu berlangsung, berlanjut sampai sekarang (tanggal 28 Mei 2015 terdapat demonstrasi yang bertema kemerdekaan Negara Melanesia yang dimotori oleh Komite Nasional Papua Barat/KNPB).

Strategi pengelompokan ulang bahasa-bahasa di Indonesia, meskipun Brandes telah mengelompokkannya ke dalam satu rumpun, diduga terdapat hubungannya dengan penggantian nama IRIAN dengan nama Papua. Nama IRIAN adalah nama pemberian Bung Karno, Presiden Pertama RI, ketika wilayah itu kembali ke dalam pangkuan ibu pertiwi. Nama IRIAN itu sendiri merupakan singkatan dari Ikut Republik Indonesia Anti Nederland. Penggantian nama Papua dengan nama IRIAN oleh Bung Karno dipandang memiliki nilai strategi geolinguistik-politis, yaitu untuk memutus mata rantai keterkaitan dan pemersatu secara emosional-kultural, khususnya bahasa, antara penduduk Irian Barat dengan komunitas di bagian timur Indonesia (Papua New Guinea), serta penduduk di negara Kepulauan Melanesia. Hal ini sepadan dengan pengakuan Dewan Rakyat Papua: Nocolas Jouwei, dalam acara Tokoh dan Peristiwa pada stasiun televisi Swasta TV-One, 18 Februari 2012, yang menyatakan bahwa, “Orang-orang Papua sengaja dipengaruhi dengan mengatakan bahwa mereka itu bukanlah orang-orang Melayu (Polinesia) atau Austronesia,

tetapi lebih dekat dengan orang-orang Polinesia, Mikronesia, dan Melanesia.” Itu sebabnya, menurut hemat penulis, penggantian nama Irian dengan nama Papua pada masa pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) merupakan kecelakaan sejarah untuk pertama kali sejak kembalinya Irian ke pangkuan ibu pertiwi. Kecelakaan sejarah selanjutnya, berlangsung di era sekarang ketika Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, memfasilitasi Festival Melanesia yang melibatkan wilayah Papua, Maluku, sampai NTT, yang wilayahnya mengikuti wilayah yang disebutkan Flassy dan Flassy dalam makalahnya pada konferensi tahun 2010 tersebut.

Isu Melanesia menjadi sangat menarik karena isu itu selain ditandai dengan penanda ras kulit hitam juga ditengarai oleh beberapa pakar bahasa wilayah itu sebagai penutur bahasa non-Austronesia, yaitu kelompok bahasa yang tidak serumpun dengan bahasa yang digunakan penduduk Indonesia lainnya yang bercirikan bahasa kelompok Austronesia. Padahal, sesungguhnya mereka yang mendiami Kepulauan Melanesia adalah penutur bahasa Austronesia (periksa Dyen, 1962 dan 1965; Murdock, 1964; Terrel, 1981). Bahkan penulis buku ini berpendapat bahwa persebaran penutur Austronesia berasal dari Papua, bukan dari Melanesia seperti dinyatakan Dyen tersebut atau dari Indocina seperti dinyatakan (Blust, 1982, 1993, dan 1996). Hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya konstruksi milik dengan penanda milik dalam konstruksi yang lebih panjang dan berstruktur aktif di Papua. Berdasarkan teori linguistik diakronis bahwa bahasa-bahasa manusia berkembang dari bentuk panjang/kompleks ke bentuk yang lebih sederhana (pendek), misalnya: aku > ku, kamu > mu dan lain-lain.; dan berdasarkan teori generatif transformasi bahasa-bahasa manusia berasal dari bentuk aktif sedangkan konstruksi pasif merupakan konstruksi yang muncul kemudian. Ditemukan konstruksi yang lebih panjang dan dalam bentuk aktif di Papua, sedangkan bahasa-bahasa di Formosa, seperti bahasa

Faiwan, Makazayazaya Paiwan, dan Paze; bahasa Tagalog di Filipina menggunakan konstruksi dalam bentuk pasif, memberikan gambaran bahwa penutur Austronesia tidak berasal dari Indocina sebagaimana diyakini saat ini melainkan dari Papua ke Indocina. Alasan bahwa Kepulauan Indocina merupakan kepulauan yang relatif kecil sehingga memungkinkan terjadi ledakan penduduk (*population pressure*) membuat mereka bermigrasi tidak dapat dibenarkan, karena migrasi pada masa lampau (kehidupan nomaden) tidak hanya disebabkan oleh ledakan penduduk tetapi dapat disebabkan oleh kebutuhan bahan makanan dan konflik internal sebagai akibat dari perebutan akses atas sumber daya alam sebagaimana ditunjukkan di Papua dengan perang antarsuku.

Selain isu Melanesia yang Non-Austronesia tersebut, juga di bagian Barat wilayah Indonesia berkembang isu Kemelayuan. Ada dua sub isu utama yang dihubungkan dengan isu Kemelayuan, yaitu: internasionalisasi bahasa Melayu dan kebudayaan Melayu Mahawangsa (Melayu Raya). Kedua sub isu itu kait-mengait satu sama lain. Sub isu kebudayaan Melayu Mahawangsa menjadi penopang untuk diterimanya sub isu internasionalisasi bahasa Melayu. Mengapa menjadi penopang, karena dengan diterimanya sub isu kebudayaan Melayu Mahawangsa, maka semua negara serumpun yang dicanangkan berada dalam satu kesatuan wilayah budaya Melayu Raya: Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Filipina, dan Laos, diharapkan dapat dengan mudah menerima gagasan untuk internasionalisasi bahasa Melayu.

Isu kemelayuan ini menjadi menarik karena yang mendengarkan-dengungkannya adalah warga Indonesia (di Kepulauan Riau dan di Provinsi Riau). Kuatnya resonansi penyuaran isu Kemelayuan ini ditandai dengan maraknya kegiatan akademik dan penjajagan kerja sama antarnegara yang bertujuan untuk menginternasionalkan bahasa Melayu. Beberapa contoh kegiatan akademik untuk memberi dukungan bagi upaya internasionalisasi bahasa Melayu dapat disebutkan berikut ini.

Dalam bukunya yang berjudul: “Tanah Air Bahasa Indonesia”, Ibrahim (2013), menyebutkan bahwa bahasa Indonesia merupakan nama baru yang diberikan pada bahasa Melayu, dan karena itu, tidaklah tepat diklasifikasikan bahasa Melayu sebagai bahasa daerah. Buku tersebut diterbitkan pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Perhelatan Tamadun Melayu yang melibatkan pakar dan budayawan negara serumpun: Malaysia dan Brunei Darussalam dan dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden RI Bapak Boediono yang juga dihadiri oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI serta Menteri Dalam Negeri RI. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada acara tersebut tidak hanya berupa kegiatan akademik tetapi juga kegiatan lomba budaya dan kesenian Melayu, kuliner Melayu, dan lain-lain. Setelah kegiatan itu, berbagai kegiatan yang mendorong ke arah internasionalisasi bahasa Melayu/Indonesia terus digalakkan, seperti: Seminar Internasional Budaya dan Bahasa Melayu di Universitas Riau (6-7 Desember 2014); Malam Silaturahmi dan Dialog Sosial Budaya Negara Serumpun dengan tema: “Gerakan Sosial Meningkatkan Budaya Membaca dan Peluang Bahasa Indonesia-Melayu Menjadi Bahasa Internasional ke-5 di Dunia” di Jakarta, 26 Januari 2015 yang dihadiri oleh Ketua DPD RI bersama Tan Sri Seri Utama Dr. Rais Yatim (Penasihat Sosial Budaya Kerajaan Malaysia); pertemuan Duta Besar Kerajaan Malaysia untuk Indonesia dengan Wapres Indonesia yang membicarakan Standardisasi Bahasa Melayu bulan Maret 2015; Kunjungan dan penandatanganan kerja sama antara Ketua DPD RI dengan Senat Malaysia (23 Februari 2015), yang salah satunya berisi kesepakatan Internasionalisasi Bahasa Melayu/Indonesia; dan Kongres Bahasa Melayu (14-15 Juni 2015) di Kota Batam yang melibatkan Negara: Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Filipina, dan Laos yang merekomendasikan: Internasionalisasi bahasa Melayu dan Standardisasi Bahasa Melayu, serta beberapa kegiatan akademik lainnya.

Isu kemelayuan dengan sub isunya lebih merupakan bentuk infiltrasi ide yang bersarana budaya-bahasa, tetapi bermuatan politis. Ada beberapa alasan mengapa isu itu bermuatan politis. Pertama, penyamaan antara bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia dengan menyatakan bahwa bahasa Indonesia merupakan nama baru dari bahasa Melayu, padahal nama Indonesia yang disematkan pada nama bahasa persatuan RI itu merupakan nama yang muncul karena proses politik (UUD 1945 Pasal 36), yang awalnya dimulai dengan Sumpah Pemuda. Pandangan ini diperkuat oleh Maier (1991) ketika memberi komentar tentang bahasa Melayu Riau yang menjadi bahasa Indonesia sebagai mitos politik. “Ita adalah suatu bahasa buatan yang diciptakan dari bahasa Melayu bukan milik siapa-siapa” (*it was an artificially created form of Malay tha belonged to no one*). Alasan kedua, penyamaan bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia dengan tujuan akhir untuk mendapat dukungan bagi penguatan bahasa Melayu sebagai bahasa internasional akan memberi dampak internal secara politis bagi penguatan bahasa itu di dalam negara yang menjadikannya sebagai bahasa kebangsaan, seperti di Malaysia dan Brunei Darussalam, yang posisinya dalam praktik berbahasa resmi cukup memprihatinkan di dalam negara itu sendiri. Dengan kata lain, dengan dijadikan dan diterimanya bahasa Melayu sebagai bahasa internasional, maka akan melapangkan jalan bagi keberterimaan bahasa itu oleh seluruh suku bangsa dalam negara yang menjadikan bahasa itu sebagai bahasa kebangsaannya. Kenyataan di atas tentu bertentangan dengan kondisi di Indonesia. Dengan nama bahasa Indonesia maka semua suku bangsa yang ada di Indonesia tidak keberatan belajar dan menggunakannya, karena bahasa Indonesia bukan bahasa suku bangsa tertentu melainkan bahasa bersama anak bangsa. Di sinilah nilai strategis dari nama bahasa resmi negara Indonesia yang ditetapkan sebagai bahasa Indonesia. Dalam pada itu, penerimaan nama bahasa Melayu atau paling tidak menyamakan antara bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia, sama dengan memutar jarum jam sejarah perdebatan penamaan bahasa nasional Indonesia yang terjadi tahun 1926.

Antara bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia, jika dihitung secara linguistik dengan menggunakan rumus dialektometri (parameter linguistik untuk penetapan isolek sebagai bahasa atau dialek), pada tanggal 28 Oktober 1928 tidak terdapat perbedaan. Namun, dalam perkembangannya bahasa Indonesia telah tumbuh menjadi bahasa modern dengan jumlah kosakata: 90.000 (dalam KBBI, 2008) dan 350.000 kata dan istilah untuk 41 bidang ilmu (Glosarium Bidang Ilmu 6 Jilid, 2008), sehingga total seluruh kekayaan kata dan istilah mencapai 440.000 dengan tata bahasa dan ejaan yang sudah distandarkan. Apabila dibandingkan dengan jumlah kosakata pada kamus bahasa Indonesia yang berhasil dikumpulkan untuk pertama kalinya (1953) berjumlah 23.000 kosakata, dengan pengandaian bahwa seluruh kosakata dalam kamus itu adalah kosakata bahasa Melayu, maka pertumbuhan bahasa Indonesia jauh meninggalkan bahasa Melayu. Bahwa bahasa Melayu adalah asal atau induk bahasa Indonesia merupakan fakta sejarah yang tidak dapat diungkiri. Namun, dalam perkembangan sejarah antara Induk dengan anak tumbuh menjadi individu-individu yang berbeda, bukan sebuah individu yang sama. Boleh jadi si anak tumbuh melampaui pertumbuhan induknya, dan hal itu merupakan realitas kehidupan organisme, termasuk bahasa sebagai organisme yang tumbuh, berkembang, dan punah sebagaimana manusia pemilik bahasa itu tumbuh, berkembang, dan punah pula.

Selanjutnya, jika dilihat dari ciri fonologis (sistem bunyi) antara bahasa Melayu yang menjadi bahasa kebangsaan di Malaysia berbeda dengan sistem fonologi bahasa Melayu yang menjadi bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila bahasa Melayu yang menjadi bahasa kebangsaan di Malaysia berasal dari dialek a-e (*mate*, *ape* dan lain-lain.), maka bahasa Melayu yang menjadi bahasa Indonesia berasal dari dialek a-a (*mata*, *apa* dan lain-lain.). Oleh karena itu, apabila ada anak-anak bangsa Indonesia yang berpikir untuk menjadikan bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia, sebagai bahasa internasional, maka pikiran itu merupakan

langkah mundur. Upaya pembalikan arah perputaran jarum jam sejarah pembentukan nasionalisme keindonesiaan. Bukankah dialektika pergulatan penamaan identitas nasional Indonesia sudah berlangsung pada Kongres Pemuda I, 1926 dan Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928? Pada Kongres Pemuda I, 1926, Muhammad Yamin mengusulkan butir ketiga Sumpah Pemuda berbunyi: “Kami Poetra dan Poetri Indonesia menjunjung bahasa Persatuan bahasa Melayu”. Pandangan M. Yamin itu dikritisi oleh M. Thabrani dan didukung Sanusi Pane, yang menyatakan bahwa, jika pada butir pertama dan kedua Sumpah Pemuda itu berisi ikrar membentuk “Tanah Air Indonesia” dan “Bangsa Indonesia”, maka mengapa pada butir ketiga tidak berbunyi “bahasa Indonesia”. Jika belum ada, maka harus dilahirkan bahasa itu menjadi bahasa Indonesia. Pandangan Thabrani itu lalu disepakati pada Kongres Pemuda ke-II, sehingga lahirlah Sumpah Pemuda yang kita kenal sekarang ini. Artinya, dari penggalan sejarah itu, maka nama bahasa Indonesia sudah final, tidak perlu standardisasi nama bahasa baru. Pandangan bahwa bahasa Indonesia merupakan nama baru dari bahasa Melayu sebenarnya merupakan titik masuk untuk membangun solidaritas kawasan, terutama solidaritas dari Indonesia, untuk memberi dukungan pada keberadaan bahasa Melayu yang menjadi bahasa kebangsaan pada negara-negara yang menjadikan bahasa itu sebagai bahasa kebangsaannya.

Di dalam Pasal 36 UUD 1945 dan penjelasannya, dinyatakan bahwa, “Bahasa negara adalah bahasa Indonesia”, adapun: “Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura, dan sebagainya), bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara oleh negara...” Pernyataan dalam UUD 1945 tersebut menyiratkan bahwa ketika Indonesia merdeka, maka semua bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa asing merupakan bahasa daerah, termasuk bahasa Melayu. Dalam konteks ini pula, maka kebudayaan Melayu yang salah satu unsurnya berupa bahasa

Melayu, juga dikategorikan sebagai kebudayaan daerah dan secara bersama-sama dengan kebudayaan daerah lainnya menjadi unsur pembentuk dan pemer kaya kebudayaan Indonesia. Itu sebabnya, konsep kebudayaan Melayu Mahawangsa merupakan konsep yang terkait dengan geokultural yang bermuatan politis, yaitu konsep yang memandang kebudayaan negara-negara serumpun: Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Laos, Vietnam, dan Filipina merupakan satu kesatuan budaya, yaitu budaya Melayu Raya.

Dalam konteks negara bangsa, konsep ini merupakan konsep yang mengabaikan keberadaan wilayah-wilayah yang termasuk di dalamnya sebagai negara bangsa yang berdiri sendiri dengan kekhasan budayanya. Dengan kata lain, bagi Indonesia, konsep ini bertentangan dengan konsep kebudayaan nasional Indonesia yang tidak hanya dibangun di atas kebudayaan Melayu semata. Kebudayaan Indonesia merupakan akumulasi atau puncak-puncak dari beragam budaya lokal, seperti kebudayaan Jawa, Sunda, Madura, Batak, Minang, Bugis, Toraja, Papua, termasuk juga kebudayaan Melayu itu sendiri dan seterusnya. Pendeknya, kebudayaan Indonesia merupakan puncak-puncak dari tidak kurang 659 kebudayaan lokal (berdasarkan jumlah bahasa lokal yang diidentifikasi sampai 2014). Konsep ini pula akan mengaburkan batas-batas serta keunikan budaya negara-negara yang diklaim dalam satu mata rantai budaya Melayu Raya tersebut. Konsekuensi lebih lanjut dapat mengaburkan kepemilikan budaya asli antarnegara. Dengan kata lain, konsep ini dapat menjadi bentuk argumentasi pengaburan kepemilikan budaya suatu negara tatkala negara tetangganya mengakui budaya tertentu negara lain sebagai miliknya. Tidak akan ada lagi ruang untuk klaim kebudayaan milik salah satu dari negara-negara yang berada pada rantai konsep Melayu Raya itu, karena sudah “dipagari”, bahwa semuanya merupakan satu kesatuan budaya, dalam hal itu budaya Melayu Raya.

Selain isu-isu kebahasaan dalam konteks keindonesiaan di atas, di wilayah tengah Indonesia muncul pula gerakan yang memanfaatkan keberagaman bahasa untuk implementasi kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah yang salah satunya ditandai oleh pembentukan daerah otonom baru sering kali memanfaatkan kondisi keberagaman bahasa. Pemanfaatan kondisi keberagaman bahasa dimaksud terlihat pada salah satu isu yang dikembangkan dalam menetapkan suatu wilayah menjadi wilayah daerah otonom baru. Rencana pengusulan Banyumas sebagai daerah otonom baru berstatus provinsi dijustifikasi, misalnya dengan mengargumenkan bahwa Banyumas merupakan penutur bahasa tersendiri yang berbeda dengan Sunda dan Jawa. Pengargumentasian Banyumas berbeda dengan Sunda tentu tidak sulit untuk diterima, namun pembedaannya dengan Jawa tentu akan mengundang banyak perdebatan, terutama bagi kalangan ahli bahasa perbandingan. Hal itu disebabkan, apa yang disebut bahasa Banyumas merupakan variasi dialektal dari bahasa Jawa. Jadi, bukan bahasa tersendiri. Begitu pula, kasus rencana pemekaran provinsi NTT atas provinsi NTT dan Flobamora (Flores Raya: mempersatukan Flores, Sumba, Timor, dan Alor), salah satu justifikasi pembenarannya adalah menggunakan argumentasi kebahasaan. Oleh karena kekurangan satu kabupaten untuk mencukupi persyaratan jumlah kabupaten untuk satu daerah otonom berstatus provinsi, kecamatan Adonara yang terletak di Flores Timur didorong untuk ditingkatkan statusnya dari daerah administratif kecamatan menjadi kabupaten. Untuk merasionalkan hal itu, Adonara disebut sebagai wilayah tersendiri dengan bahasa sendiri, yaitu bahasa Adonara. Padahal, isolek yang digunakan di Adonara itu merupakan dialek dari bahasa Lamaholot. Begitu pula kasus yang terjadi di Pinrang Utara di perbatasan Polewali (Sulbar), Mamasa (Sulbar), Toraja (Sulsel), dan Enrekang (Sulsel). Masyarakat di wilayah ini yang dimotori oleh LSM Kesarpati (Kerukunan Keluarga Besar Pattinjo) mendeklarasikan terbentuknya suku bangsa Patinjo dengan bahasa tersendiri, yang selanjutnya akan didorong untuk membentuk

daerah otonom (kabupaten) baru dengan beberapa kecamatan: Batulappa, Duampanua, Lembang, dan Patampanua.

Apa yang menarik dari ketiga kasus di atas ialah memanfaatkan variasi dialektal untuk diklaim sebagai bahasa tersendiri demi identitas yang berbeda dalam rangka membentuk daerah otonom baru. Kasus serupa terjadi pula di Sumbawa. Hadirnya tambang emas PT Newmont Nusa Tenggara, membuat wilayah yang terkena dampak langsung di wilayah pertambangan (Dodo dan Rinti) mengklaim diri sebagai satu komunitas tersendiri yang berbeda dengan komunitas Sumbawa (Sultan Sumbawa, sebagai sebuah masyarakat adat tersendiri) demi aksesnya untuk mendapat pemberdayaan dari perusahaan pertambangan. Logika yang dibangun adalah dengan menyebut diri dan bahkan sudah mendapat pengakuan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebagai komunitas adat tersendiri dengan bahasa tersendiri, yaitu masyarakat adat Cek Bocek, dengan bahasanya Bahasa Berco, mereka akan mendapat pengakuan dari pemerintah Kabupaten Sumbawa. Padahal, bahasa Labangkar yang diklaimnya sebagai bahasa tersendiri tersebut merupakan dialek dari bahasa Samawa.

Lalu di manakah hubungannya bahasa dengan pemekaran wilayah dan konteks keindonesiaan. Untuk menjelaskan hal ini menarik untuk direnungkan kembali hukum sejarah yang menyatakan bahwa apa yang terjadi pada masa lampau akan berulang kembali dalam bentuk yang berbeda. Apabila sebelum Indonesia merdeka menjadi sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah yang menjadi cikal bakal NKRI itu, merupakan wilayah yang terdiri atas beragam negara/kerajaan/kesultanan tersendiri dengan sistem pemerintahan, ekonomi, politik, dan sosial budaya yang otonom. Apa yang disebut sekarang ini sebagai bahasa daerah dahulunya merupakan bahasa-bahasa nasional dari negara-negara kecil tersebut. Bahasa Jawa, Bali, Samawa, Bugis, Melayu, dan seterusnya. dahulunya merupakan bahasa nasional dan bahasa negara dari negara-negara kecil yang berupa: kesultanan

di Jawa, Kerajaan Karang Asem (Bali), Kesultanan Sumbawa (di Sumbawa), Kerajaan Goa (Bugis), dan seterusnya. Negara-negara kecil itu, bergabung ke dalam satu negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Otonomi daerah, sekarang ini berkecenderungan pada pembentukan otonomi suku bangsa yang dulunya ditandai dengan bahasa daerahnya masing-masing. Kasus munculnya Perda tentang Bahasa Daerah yang kadang kala bertentangan dengan UU No. 24 Tahun 2009 dan pemanfaatan batas bahasa sebagai batas wilayah usulan daerah otonom baru merupakan wujud dari pengulangan sejarah dalam bentuk yang berbeda. Artinya, hukum pengulangan sejarah yang terjadi di sini adalah dari negara yang dulunya terberai dalam beberapa negara kecil, menjadi satu negara besar (NKRI), dan kemudian muncul otonomi daerah yang ditandai dengan pemekaran wilayah dengan semangat lokalitas yang cenderung bertensi tinggi. Jika kurang arif disiasati, maka era otonomi daerah yang ditandai dengan pemekaran wilayah tersebut, boleh jadi akan membawa malapetaka bagi stabilitas dan keutuhan NKRI.

Sehubungan dengan uraian di atas, ada dua hal yang menyangkut masalah kebahasaan dan keindonesiaan. Pertama, masalah keindonesiaan dalam hubungannya dengan keberadaan bahasa-bahasa daerah. Hal ini terkait dengan segmentasi kewilayahan atas dasar isu kemelanesiaan dan isu otonomi daerah. Baik isu kemelanesiaan maupun isu otonomi daerah, keduanya, memanfaatkan kondisi keberagaman bahasa daerah yang terdapat di Indonesia. Apabila isu kemelanesiaan memanfaatkan kondisi keberagaman bahasa daerah yang dikaitkan dengan masalah keberbedaan rumpun bahasa—dikotomi Austronesia dan non-Austronesia—maka isu otonomi daerah memanfaatkan keberbedaan bahasa baik pada level beda bahasa maupun beda dialek dengan tanpa mempersoalkan isu keberagaman bahasa pada tataran rumpun bahasa. Namun, kedua-duanya memiliki potensi yang sama, yaitu mengarah pada disintegrasi sosial. Meskipun

demikian, keduanya memiliki perbedaan pada tujuan akhir. Isu kemelanesiaan bertujuan akhir untuk membangun identitas baru bagi keperluan membentuk negara baru (disintegrasi bangsa) dengan memanfaatkan potensi keberagaman bahasa pada tataran perbedaan rumpun bahasa. Adapun isu otonomi daerah bertujuan akhir membangun identitas baru bagi keperluan membentuk daerah otonom baru (provinsi, kabupaten/kota, bahkan sampai kecamatan dan kelurahan) dengan memanfaatkan isu keberagaman bahasa pada level beda dialek atau beda bahasa.

Persoalannya, terletak pada bagaimana merumuskan sebuah politik kebahasaan yang di satu sisi memberi ruang bagi bertumbuhkembangnya bahasa daerah, namun pada sisi lain, tetap menjaga jangan sampai pelestarian bahasa daerah itu mengarah pada pembentukan semangat lokalitas, suatu semangat yang bertentangan dengan spirit Sumpah Pemuda dan pembentukan NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Dalam konteks itu pula, perlu dikembangkan politik kebahasaan yang tetap memberi ruang bagi pelestarian bahasa daerah sebagai wujud kebhinnekaan masyarakat Indonesia dengan memperlihatkan keterhubungan bahasa daerah yang satu dengan bahasa daerah yang lain dalam konteks kesatuasalan secara historis sebagai wujud ketunggalikaan.

Kedua, masalah keindonesiaan dalam hubungannya dengan keberadaan bahasa Indonesia. Masalah kedua ini terkait dengan segmentasi kewilayahan atas dasar isu kemelayuan. Isu kemelayuan menggiring bangsa ini pada perdebatan yang sesungguhnya tidak perlu dilakukan, karena dialektika penetapan bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu, sebagai bahasa persatuan telah berlangsung pada tahun 1926 dan final pada tanggal 28 Oktober 1928. Isu ini jelas-jelas mendegradasi kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, karena disejajarkan dengan bahasa Melayu yang dalam konteks NKRI, bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa daerah yang keberadaannya dilindungi oleh UUD 1945. Keberadaan bahasa Indonesia bagi bangsa Indonesia bukan hanya

sekadar sarana komunikasi yang mempersatukan seluruh tumpah darah Indonesia, tetapi lebih dari itu, bahasa Indonesia adalah identitas dan jati diri bangsa Indonesia.

Apa yang menarik dari uraian di atas ialah keberagaman bahasa jika tidak dikelola dengan baik dapat menjadi potensi disintegrasi sosial yang dapat saja menuju disintegrasi bangsa. Pengelolaan masalah kebahasaan di Indonesia semakin kompleks, karena selain terdapat bahasa-bahasa lokal dan bahasa negara (BI), di Indonesia juga terdapat bahasa-bahasa asing, yang ketiga jenis bahasa tersebut saling berkontestasi dalam taruhan harga diri sosial atas pilihan pemakaiannya. Namun, mengingat pentingnya bahasa bagi bangsa Indonesia, sudah selayaknya bangsa ini memberi prioritas tinggi bagi penyelamatan bahasa-bahasa yang terdapat di Indonesia. Penyelamatan atas bahasa sama artinya penyelamatan bangsa ini dari keutuhannya sebagai negara bangsa. Penyelamatan atas bahasa daerah yang jumlahnya tidak kurang dari 659 buah itu sama artinya dengan menyelamatkan ciri keindonesiaan yang Berbhinneka Tunggal Ika. Beragamnya bahasa daerah di samping menunjukkan keberagaman elemen pembentuk Indonesia, juga melalui bukti-bukti kebahasaan yang masih diwarisi dari bahasa purba yang menurunkan semua bahasa daerah tersebut akan memperlihatkan keberagaman dalam kesatuasalan (periksa peta bukti kebahasaan atas kekerabatan bahasa-bahasa pada Bab V).

Prioritas tinggi terhadap penyelamatan bahasa tersebut telah ditunjukkan oleh para pendiri bangsa dengan dibentuknya cikal bakal lembaga resmi kebahasaan yang menangani masalah bahasa-bahasa di Indonesia dua tahun setelah diproklamasikan NKRI, tepatnya pada tahun 1947. *Istituut voor Taal en Cultuur Onderzoek* merupakan cikal bakal dari lembaga resmi kenegaraan yang menangani masalah kebahasaan di Indonesia dan telah bermertamorfoses menjadi Balai Bahasa di Yogyakarta pada tahun 1948 dan pada tahun 1952 dibentuklah sebuah lembaga dengan nama Lembaga Bahasa Nasional dengan cabangnya di Yogyakarta, Denpasar, dan Makassar.

Pada Tahun 1962, Lembaga Bahasa Nasional berubah nama menjadi Lembaga Bahasa dan Kesusasteraan. Pergantian nama tidak berhenti sampai di situ, tahun 1975, nama Lembaga Bahasa dan Kesustraan berubah menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, dan UU Nomor 24 Tahun 2009 mengamanatkan agar institusi kenegaraan yang menangani masalah kebahasaan berwujud Badan (eselon satu), maka nama Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa pun berubah menjadi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa). Institusi kebahasaan yang sekarang ada, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah memiliki 30 UPT di daerah yang membantu penanganan masalah kebahasaan dan kesastraan.

Demikianlah lembaga itu telah tumbuh menjadi lembaga kebahasaan seperti yang kita saksikan sekarang ini. Apabila para pendiri bangsa ini telah memulainya dengan mencanangkan lembaga resmi kenegaraan, kemudian apa yang sudah kita kerjakan untuk memberi makna bagi keberadaan lembaga itu? Sejak 1953 bangsa ini telah mulai bangkit menangani masalah kebahasaannya dengan bermodalkan 23.000 kata dalam kamus saat itu, kini telah bertambah menjadi 90.000 kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008 dan 350.000 kata dan istilah untuk 41 bidang ilmu. Artinya Indonesia sudah memiliki 440.000 kata dan istilah, ditambah dengan pedomaan tata tulis (Ejaan Bahasa Indonesia), serta Tata Bahasa Baku BI. Bahasa Indonesia telah tumbuh menjadi bahasa modern dengan kemampuan daya ungkap yang cukup tinggi. Persoalannya sekarang, sudahkah keberadaan BI itu ditunjukkan sebagai identitas dan jati diri keindonesiaan? Jawabannya, masih belum maksimal, bahkan pada ranah tertentu masih menunjukkan kondisi yang memilukan hati.

Indikator penegakan identitas keindonesiaan melalui bahasa Indonesia dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pemakaian bahasa itu di dalam negara dan minat pembelajaran bahasa itu di luar negara. Penguatan pemakaian bahasa Indonesia di dalam

negara dapat menjadi sarana untuk memperkokoh komitmen keindonesiaan ke dalam, sedangkan penguatan bahasa Indonesia di luar negara menunjukkan kokohnya pengakuan bangsa lain atas keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara bangsa yang merdeka dan berdaulat. Seiring dengan itu, penguatan bahasa Indonesia di luar negara menjadi sarana diplomasi dalam membangun kepercayaan bangsa lain terhadap Indonesia.

Penyebaran bahasa Indonesia di luar negara di satu sisi memperlihatkan kondisi yang menggembirakan dan di sisi lain menunjukkan ketidakberdayaan bangsa ini dalam membangun diplomasi identitas. Sisi yang menggembirakan dapat ditunjukkan di sini, bahwa sampai pertengahan tahun 2015 telah diidentifikasi sebanyak 174 tempat pembelajaran bahasa Indonesia yang tersebar pada 45 negara. Tempat-tempat penyelenggaraan pembelajaran bahasa Indonesia itu antara lain di KBRI/KJRI, perguruan tinggi, lembaga kursus, sekolah, dan organisasi profesi. Negara-negara tempat penyelenggaraan pembelajaran bahasa Indonesia antara lain dapat disebutkan di sini, misalnya di Jepang terdapat 38 lembaga; Australia: 36; Jerman: 17; Amerika Serikat: 12; Italia: 7; Thailand dan Belanda masing-masing: 6; Korea Selatan: 5; Rusia, Prancis, dan Cina masing-masing: 4; Inggris, Vatikan, Polandia, Arab Saudi, Filipina, dan Singapura masing-masing: 3; Azerbaijan, Uzbekistan, Mesir, dan Myanmar masing-masing: 2; Bulgaria, Hongkong, India, Suriah, Maroko, Sudan, Ceko, Papua Nugini, Serbia, Selandia Baru, Ukraina dan lain-lain., masing-masing: 1 lembaga Indonesia. Namun, patut dicatat bahwa banyaknya negara yang meminati pembelajaran bahasa Indonesia tidak berbanding lurus dengan tekad dan kepercayaan diri bangsa ini untuk memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai identitas dan jati diri bangsa menjadi bahasa pergaulan antarbangsa. Perjuangan bangsa ini melalui kegiatan diplomasi identitas, yang salah satunya berupa bahasa kebangsaan, belum memperlihatkan kekuatan yang berarti. Lalu di manakah masalahnya?

Dalam Pasal 34, Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, yang ditandatangani di Singapura pada tanggal 20 November 2007 oleh sepuluh pemimpin negara yang terhimpun dalam organisasi itu, disebutkan bahwa, “Bahasa kerja ASEAN adalah bahasa Inggris”. Persoalannya, mengapa bahasa Indonesia yang jumlah penuturnya tidak kurang dari 240 juta, dua pertiga dari jumlah keseluruhan penduduk negara yang tergabung dalam perserikatan negara-negara itu, tidak diusulkan menjadi bahasa kerja ASEAN? Bukankah bahasa Indonesia sudah memiliki daya ungkap yang mampu menyaingi daya ungkap bahasa-bahasa dunia lainnya? Ternyata kebesaran bangsa Indonesia dan dukungan substansi kebahasaannya yang sudah mencapai taraf bahasa modern serta dukungan 45 negara yang telah membuka pembelajaran bahasa Indonesia di negaranya belum juga membuat bangsa ini bernyali dalam memperjuangkan negara bangsanya melalui diplomasi kebahasaan. Bukankah sejarah menunjukkan bahwa negara-negara yang memiliki peradaban unggul selalu diawali melalui politik identitas, karena politik identitas dapat memunculkan kepercayaan diri bangsa. Ambil contoh, kemajuan peradaban Islam abad ke-9 sampai abad ke-14 tidak terlepas dari politik identitas melalui penerjemahan semua ilmu pengetahuan Latin-Yunani ke dalam bahasa Arab. Begitu pula, kemajuan negara Eropa Latin sekarang ini yang mulai abad ke-14 tidak lepas pula dari ikhtiar mereka menerjemahkan semua ilmu pengetahuan berbahasa Arab ke dalam bahasa Eropa-Latin, seperti ke dalam bahasa Inggris. Bahkan Jepang telah memberikan pelajaran yang menarik, di tengah porak poranda negara itu dari kehancuran dalam perang dunia kedua, mampu bangkit menjadi negara maju juga diawali dengan politik identitas melalui penerjemahan semua ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Jepang.

Bangsa Indonesia perlu belajar dari pengalaman penyatuan ekonomi negara-negara Eropa dalam satu kesatuan yang dikenal dengan Uni Eropa. Kedua puluh tujuh negara yang tergabung

dalam Uni Eropa itu semua mengajukan bahasa kebangsaannya menjadi bahasa pengantar kerja sama antarmereka. Dengan demikian Uni Eropa memiliki dua puluh tiga bahasa resmi kerja sama antarmereka, yaitu:

Negara:	Bahasa:	Negara:	Bahasa:
Austria	Jerman	Luksemburg	Jerman, Prancis
Belgia	Belanda, Jerman, Prancis	Malta	Malti
Belanda	Belanda	Polandia	Polski
Bulgaria	Bulgar	Portugal	Portugis
Rep. Cek	Cek	Prancis	Prancis
Denmar	Dansk	Romania	Romania
Estonia	Esti	Sipros	Yunani
Finlandia	Suomi, Swensk	Slovenia	Sloven
Irlandia	Inggris, Gaelik	Slovakia	Slovak
Italia	Italia	Spanyol	Spanyol
Jerman	Jerman	Swedia	Swensk
Inggris	Inggris	Ungaria	Magyar
Latvia	Lativi	Yunani	Yunani
Lituania	Lituvi		

Apa yang menarik dari kasus penetapan bahasa resmi Uni Eropa ialah semua negara memiliki posisi tawar yang sama, keberagaman benar-benar dikukuhkan dengan menerima semua bahasa kebangsaan negara anggota menjadi bahasa resmi pergaulan antarmereka. Negara yang baru merdeka seperti Latvia (1988), yang dulu bahasa nasionalnya adalah bahasa Rusia karena negara itu tergabung dalam Uni Soviet, dengan penuh keyakinan mengusulkan bahasa kebangsaannya bahasa Lativi menjadi bahasa kerja sama Uni Eropa. Bahkan yang lebih ekstrim lagi adalah Austria yang dahulunya berada dalam kekuasaan Nazi Jerman (1938--1945), setelah lepas dari kolonisasi Jerman dengan tegas mengusulkan bahasa Jerman Austria sebagai identitas negara

bangsanya yang dipandang berbeda dengan bahasa Jerman itu sendiri. Hanya berbeda pada 23 kosakata bidang makanan, Austria mengajukan syarat keikutsertaannya dalam Uni Eropa (1993-1994) jika keberadaan bahasa Jerman varian Austria dengan dua puluh tiga kosakata khusus yang membedakannya dengan bahasa Jerman (asli) diakui sebagai ciri bahasa Jerman-Austria. Usulan Austria tersebut dimuat dalam Protokol naskah perjanjian keikutsertaan Austria dalam Uni Eropa Nomor 10. Apa yang ingin disampaikan di sini, ialah sekecil apa pun negara itu dan sekecil apa pun perbedaan antarbahasa itu tetap saja diklaim sebagai berbeda. Dalam hal ini, keyakinan akan identitas secara kebahasaan yang berdiri sendiri dipandang sebagai *Conditio qua non* bagi penciptaan jati diri nasional. Mengapa demikian, karena di dalam bahasa kebangsaan suatu negara terdapat negara itu sendiri. Bahasa kebangsaan merupakan penanda keberadaan negara bangsa itu yang paling nyata dan dekat dengan pemiliknya, karena bahasa itu menjadi sarana dan sekaligus pembentuk pikiran pemiliknya. Selayaknya, Indonesia belajar dari pengalaman negara-negara dalam kesatuan Uni Eropa dan untuk melaksanakan hal itu belum terlambat.

Ihwal bahasa Indonesia di dalam negara, jauh lebih memprihatinkan dibandingkan bahasa Indonesia di luar negara. Kondisi pemakaian bahasa baik oleh para tokoh anutan dan media massa masih belum menggembirakan. Bahkan pemakaian yang jauh lebih parah dari kondisi tersebut adalah pemakaian bahasa di luar ruang, seperti spanduk, papan nama, dan lain-lain. Apabila bahasa Indonesia merupakan identitas dan jati diri bangsa, maka kondisi pemakaian bahasa Indonesia hampir di semua pelosok tanah air yang dipenuhi oleh bahasa asing, secara tidak langsung menunjukkan ketidakhadiran negara bangsa ini di ruang publik. Padahal, pemakaian bahasa di ruang publik akan dengan mudah menjadi contoh berbahasa Indonesia bagi generasi muda penerus bangsa.

Hal lain yang cukup memilukan hati terkait dengan kebijakan bangsa ini dalam menegakkan bahasa Indonesia di dalam negara, yaitu gagal terbitnya peraturan tentang kewajiban memiliki kemampuan berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing (TKA). Pada awal terbentuknya Kabinet Kerja, sekitar bulan Februari—Maret 2015, harapan bagi tegaknya eksistensi bahasa Indonesia di dalam negara mendapat hembusan angin segar, berupa tekad yang kuat dan bulat dari Menteri Tenaga Kerja yang ingin menghadirkan negara di tengah-tengah kehidupan bangsa ini melalui rencana penerbitan peraturan tentang hal itu. Namun, niat baik itu kurang mendapat dukungan. Dari kekurangan bangsa ini belajar pada negara lain dalam melindungi hak-hak warga negaranya untuk memperoleh kesempatan bekerja di dalam negara sampai pada kekhawatiran akan berkurangnya investor yang berinvestasi di Indonesia menjadi argumen utama untuk membatalkan niat tersebut. Padahal, cukup banyak contoh negara yang menerapkan persyaratan kemampuan berbahasa bagi tenaga kerja asing yang hendak menjadi tenaga kerja di negara tersebut, misalnya Jepang. Begitu pula rencana pemerintah Prancis menjadikan bahasa Indonesia sebagai pelajaran di sekolah setara SMK, sebagai salah satu bentuk penyiapan tenaga kerja negara itu untuk masuk ke pasar Indonesia merupakan contoh yang dapat menepis kekhawatiran bangsa ini atas berkurangnya investor yang masuk ke Indonesia, karena hal tersebut.

Baik rasa kurang percaya diri maupun rasa khawatir merupakan sikap yang berhubungan dengan mental bangsa. Apabila bahasa berfungsi sebagai sarana berpikir dan pembentuk pikiran manusia, maka sudah selayaknya momentum penguatan bahasa Indonesia menjadi sarana untuk merevolusi mental bangsa. Bukankah, bahasa Indonesia hadir dan diikrarkan para pemuda bangsa ini pada tanggal 28 Oktober 1928 justru menjadi titik awal melakukan revolusi mental. Dari mental yang terberai atas beratus-ratus suku bangsa yang mendiami tanah air (pulau-pulau)

yang terpisah oleh lautan menjadi bangsa yang satu dengan tanah air yang satu pula. Dari bangsa yang ego suku bangsanya tinggi menjadi bangsa yang memiliki solidaritas sosial, empati, tenggang rasa satu sama lain, karena memang mereka berbeda tetapi tetap satu. Dari bangsa yang terjajah, tidak percaya diri bangkit menjadi bangsa yang bebas merdeka, dan penuh keyakinan diri, sehingga mampu mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Oleh karena itu, gagasan revolusi mental yang dicanangkan pemerintah Indonesia saat ini selayaknya diawali dengan merevolusi mental melalui penguatan peran dan kedudukan bahasa Indonesia baik di dalam negara maupun di luar negara.

Buku ini akan membawa pembaca untuk berdarmawisata ke alam pikiran dunia kebahasaan. Mulai dari pembahasan tentang peran bahasa bagi kehidupan manusia (Bab I), dilanjutkan ke Bahasa dan Negara Bangsa (Bab II); Bahasa dan Keindonesiaan (Bab III); Tantangan Integrasi Bangsa dari Aspek Kebahasaan (Bab IV); sampai pada pembahasan ihwal Penguatan Peran Bahasa, Membangun Kemandirian Bangsa (Bab V); dan terakhir sebagai catatan penutup berupa renungan introspektif dengan topik: Menimang Bahasa, membangun Bangsa (Bab VI). Jalinan yang berkelindan antara bab demi bab diharapkan dapat memberikan perspektif bagi pembaca tentang bagaimana pentingnya bahasa, khususnya bahasa Indonesia, tidak hanya bagi kehidupan manusia pada umumnya, tetapi kehidupan manusia sebagai sebuah komunitas negara bangsa Indonesia, semoga bermanfaat.

Jakarta, 27 Ramadhan 1436 H

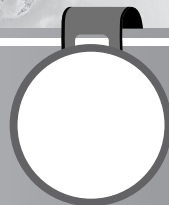
14 Juli 2015

Penulis,

Mahsun



DAFTAR ISI



PRAWACANA DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1 Mengapa Bahasa?
- 1.2 Bahasa dan Komunitas Penuturnya
- 1.3 Realitas Bahasa dan Komunitas Penuturnya

BAB 2 BAHASA DAN NEGARA BANGSA

- 2.1 Elemen Pembentuk Nasionalisme
- 2.2 Bahasa sebagai Elemen Hakiki Negara Bangsa
- 2.3 Negara Bangsa di Atas Fondasi Bahasa
- 2.4 Bahasa dan Kemajuan Ekonomi/Peradaban Negara Bangsa

BAB 3 BAHASA DAN KEINDONESIAN

- 3.1 Bahasa bagi Bangsa Indonesia
- 3.2 Realitas Kebahasaan di Indonesia
- 3.3 Bahasa Indonesia: Dari Pilar Keempat sampai Revolusi Mental
- 3.4 Asal Bahasa Indonesia
- 3.5 Bahasa Indonesia Nama lain dari Bahasa Melayu

BAB 4 TANTANGAN INTEGRASI INDONESIA DARI ASPEK KEBAHASAAN

- 4.1 Segmentasi Wilayah NKRI Berdasarkan Aspek Kebahasaan
 - 4.1.1 Kemelayuan dalam Konteks Keindonesiaan
 - A. Menyoal Internasionalisasi Bahasa Melayu
 - B. Standarisasi Bahasa Indonesia-Melayu menuju Internasionalisasi Bahasa
 - C. Langkah Mundur Menyamakan Bahasa Indonesia dengan Bahasa Melayu
 - D. Melayu Mahawangsa Kurang Realistis bagi Indonesia
 - E. Letak Bahasa dan Budaya Melayu dalam Konteks Keindonesiaan
 - 4.1.2 Kemelanesiaan dalam Konteks Keindonesiaan
 - A. Melanesia yang Non Austronesia dan Kecelakaan Sejarah

- B. Tanah Asal Bahasa Austronesia:
Melanesia, Indocina, atau Indonesia?
- 4.1.3 Otonomi Daerah dan Otonomi Bahasa
- 4.2 Bahasa Asing dan Identitas Keindonesiaan
- 4.3 Isu Kebahasaan dan Perang Generasi Keempat

BAB 5 PENGUATAN PERAN BAHASA, MEMBANGUN KEMANDIRIAN BANGSA

- 5.1 Membangun Kemandirian Bangsa Melalui Penguatan Peran BI
 - 5.1.1 Penguatan Bahasa Indonesia di dalam Negara
 - A. Penguatan BI melalui Jalur Pendidikan Formal
 - B. Penguatan BI melalui Jalur Pendidikan Masyarakat
 - 5.1.2 Penguatan BI di Luar Negara
- 5.2 Membangun Kemandirian Bangsa melalui Penguatan Peran Bahasa Daerah
- 5.3 Membangun Kemandirian Bangsa melalui Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan
- 5.4 Penguatan Peran Lembaga Kebahasaan Negara

BAB 6 PENUTUP: MENIMANG BAHASA MEMBANGUN BANGSA

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

TENTANG PENULIS

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



PENDAHULUAN

1

1.1 Mengapa Bahasa?

Bahasa merupakan salah satu kemampuan alamiah dan perangkat utama yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia dalam rangka mengemban amanah kekhalfahan. Melalui kemampuan berbahasa yang berupa pemahaman akan nama-nama benda di alam semesta ini, malaikat sebagai salah satu makhluk Tuhan yang semulanya meragukan akan kemampuan manusia untuk mengemban amanah tersebut menjadi sujud, dalam arti, mengakui eksistensi manusia sebagai satu-satunya makhluk Tuhan yang memang layak menjadi "wakil Tuhan" di muka bumi. Demikianlah, bahasa menjadi bagian yang integral dari keberadaan manusia. Itu sebabnya pula keberadaan bahasa dapat menjadi penanda keberadaan suatu komunitas dan membedakannya dengan komunitas lainnya. Keberadaan komunitas atau suku bangsa Jawa dapat dirujuk pada adanya bahasa Jawa; suku bangsa Sunda dapat dirujuk pada adanya bahasa Sunda; suku bangsa Minang dapat

dirujuk pada adanya bahasa Minang; suku bangsa Gresi di Papua dapat dirujuk pada adanya bahasa Gresi; suku bangsa Batak dapat dirujuk pada adanya bahasa Batak; suku bangsa Melayu dapat dirujuk pada adanya bahasa Melayu; suku bangsa Bugis dapat dirujuk pada adanya bahasa Bugis; suku bangsa Toraja dapat dirujuk pada adanya bahasa Toraja; suku bangsa Gayo dapat dirujuk pada adanya bahasa Gayo, dan seterusnya. Dalam pada itu, keberadaan bahasa yang berbeda di antara mereka dapat menjadi pembeda satu sama lain.

Mengapa bahasa menjadi bagian yang integral dari keberadaan manusia? Ada tiga alasan yang dapat dikemukakan untuk itu: (a) bahasa mewujudkan kehadiran manusia sebagai makhluk sosial, (b) bahasa merupakan sarana bekerja sama menjadi sesama, dan (c) bahasa menjadi identitas yang dapat menyentuh faktor psikologis dan sosiologis penuturnya.

Bahasa mewujudkan kehadiran manusia sebagai makhluk sosial maksudnya, bahwa karena bahasa manusia dapat menjalani kehidupannya di muka bumi ini. Dijadikannya manusia sebagai khalifah/pemimpin di muka bumi ini jelas mengisyaratkan bahwa manusia adalah makhluk sosial, karena secara konseptual, kepemimpinan hanya akan dapat berjalan jika ada: (a) objek yang menjadi sasaran kepemimpinan, yaitu manusia itu sendiri dan alam semesta, (b) hubungan fungsional antara manusia dengan manusia dan alam, dan (c) pemimpin itu sendiri. Hubungan fungsional antarmanusia dengan alam, dalam hal ini di antaranya hubungan manusia dengan sesama manusia jelas menuntut kehadiran sarana komunikasi yang disebut bahasa. Tanpa sarana komunikasi betapa sulit dibayangkan relasi fungsional dalam menjalankan peran kepemimpinan itu dapat berlangsung dengan baik. Melalui hubungan fungsional manusia dengan alam itulah manusia menciptakan, mengembangkan, dan mentransmisikan kebudayaan/peradaban dari satu generasi ke generasi lainnya. Tanpa bahasa kiranya manusia tidak akan memiliki peradaban yang

di dalamnya terdapat agama, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Itu sebabnya pula, tatkala kita berbicara bahasa, pada saat itulah kita membicarakan sebagian besar dari keseluruhan aspek kehidupan manusia, karena hampir semua aktivitas manusia hanya dimungkinkan berlangsung karena adanya bahasa.

Selanjutnya, bahasa sebagai sarana bekerja sama menjadi sesama maksudnya, manusia sebagai makhluk sosial dituntut agar dapat mempertahankan hidupnya perlu menjalin kerja sama dan menjadi sesama. Relasi fungsional antarsegmen sosial dalam masyarakat majemuk, seperti Indonesia, hanya dimungkinkan berlangsung jika terdapat sarana komunikasi yang sama, yaitu bahasa nasional/bahasa negara, yang dalam hal ini adalah bahasa Indonesia. Melalui bahasa Indonesia, masyarakat Indonesia yang majemuk itu dapat menjalankan relasi fungsional antarsatu sama lain. Tidak hanya itu, melalui bahasa Indonesia, masyarakat majemuk dapat mengidentifikasi diri sebagai satu kesatuan dalam keberagaman. Melalui bahasa nasional/negara masyarakat Indonesia yang majemuk dapat bekerja sama dan menjadi sesama anak Indonesia. Dengan kata lain, bahasa menyatukan berbagai segmen sosial dalam satu identitas yang sama dan bekerja sama dengan menggunakan bahasa tersebut.

Adapun bahasa sebagai identitas yang mengandung aspek psikologis dan sosiologis penuturnya dapat dijelaskan bahwa salah satu yang menjadi simbol atau lambang identitas keberadaan komunitas-komunitas di muka bumi adalah bahasa. Bahasa merupakan salah satu penanda di antara beberapa penanda komunitas (suku bangsa) yang sangat penting, karena bahasa merupakan tempat terwadahi perubahan (evolusi) dan gambaran situasi yang terjadi pada masa lampau maupun masa kini (periksa Glazer dan Daniel P. Moynihan, 1975: 470). Dalam hubungan itu pula, Foley (1997: 384) menyebutkan bahwa secara alamiah kontak antardua atau lebih kebudayaan (suku bangsa) yang berbeda akan selalu termanifestasi dalam wujud perubahan bahasa. Lebih jauh

dinyatakannya bahwa perubahan yang dimaksud dapat berupa proses adopsi ciri-ciri kebahasaan bahasa tertentu oleh bahasa yang lain atau kedua-duanya saling melakukan proses yang sama (bandingkan dengan McMohan, 1994: 200 dan Labov, 1994). Dalam linguistik, proses adopsi ciri-ciri kebahasaan bahasa tertentu yang dilakukan oleh suatu komunitas tutur disebut konvergensi linguistik. Namun selain itu, dapat saja perubahan bahasa itu tidak berwujud konvergensi tetapi malah sebaliknya berwujud divergensi linguistik, yaitu proses perubahan ciri-ciri bahasa dalam suatu masyarakat tutur yang membuat ciri-ciri kebahasaannya menjadi tidak sama dengan ciri-ciri bahasa yang digunakan oleh komunitas tutur lain yang menjadi mitra kontak budayanya. Kedua peristiwa kebahasaan tersebut, konvergensi dan divergensi linguistik, apabila dikaitkan dengan terminologi dalam ilmu sosial (Sukanto, 2001), keduanya masing-masing dapat dipadankan dengan proses asosiasi dan disosiasi.

Selanjutnya, oleh karena asosiasi dan disosiasi itu sendiri dapat dihubungkan dengan tatanan kehidupan harmoni dan disharmoni, maka peristiwa kehidupan yang cenderung ke arah harmoni dan disharmoni (konflik) dalam suatu tatanan kehidupan komunitas majemuk dapat ditelusuri melalui kajian asosiasi/konvergensi dan disosiasi/divergensi linguistik. Dalam pada itu, asosiasi dan disosiasi sosial hanya dapat berlangsung tergantung pada ada/tidaknya perasaan kesederajatan/kesetaraan dan kesamaan di antara dua atau lebih komunitas sosial yang melakukan kontak atau interaksi sosial tersebut. Kesamaan yang dimaksudkan, baik kesamaan asal maupun karena kesamaan sejarah yang dialami pada fase historis tertentu. Apabila kesederajatan dan kesamaan tercipta, maka hubungan yang bersifat konvergensi akan dapat berlangsung; sebaliknya jika suasana kesederajatan dan kesamaan tidak tercipta maka hubungan yang bersifat disosiatif/divergensilah yang akan berlangsung.

Sejalan dengan pandangan di atas, dalam kaitan dengan peristiwa konvergensi dan divergensi linguistik sebagai manifestasi adanya kontak antardua atau lebih penutur bahasa yang berbeda, hanya dapat berlangsung tergantung pada ada/tidaknya suasana psikologis yang mencerminkan kesederajatan dan kesamaan di antara penutur bahasa-bahasa yang berbeda tersebut. Dalam hubungan ini, Mahsun (1994) menunjukkan rendahnya derajat adaptasi linguistik, khususnya yang menyangkut penyerapan unsur-unsur kebahasaan dari bahasa Mbojo (Bima) dalam bahasa Samawa dibandingkan dengan penyerapan dalam bahasa Sasak lebih terkait dengan kedua faktor di atas. Bahasa Samawa, secara geneologis, merupakan bahasa yang memiliki kekerabatan yang lebih dekat dengan bahasa Sasak, daripada hubungan bahasa itu dengan bahasa Mbojo. Kedua bahasa itu (Samawa dan Sasak) dikelompokkan ke dalam kelompok Austronesia Barat, sedangkan bahasa Mbojo termasuk dalam kelompok Austronesia Timur. Relasi kekerabatan yang dekat tersebut membuat penuturnya memiliki relasi kedekatan baik secara psikologis maupun sosiologis satu sama lain. Kondisi psikologis tersebut, menyebabkan penutur bahasa Samawa lebih merasa nyaman menyerap unsur-unsur bahasa Sasak daripada unsur-unsur bahasa Mbojo, meskipun secara geografis penutur bahasa Samawa lebih dekat dengan penutur bahasa Mbojo.

Selain itu, Mahsun (2006) telah membuktikan pula, bahwa kehidupan harmoni yang terjadi antara komunitas Bali dan Sasak yang hidup berdampingan di Babakan, Lombok Barat, dan komunitas Bali dan Sasak yang disharmoni, yang hidup berdampingan di Karang Jasi dan Karang Tapen, Cakranegara, Kota Mataram berhubungan dengan proses adaptasi linguistik yang mencerminkan adaptasi sosial. Di pemukiman yang harmoni ditandai dengan tingginya proses serap-menyerap unsur kebahasaan, sedangkan di wilayah disharmoni menunjukkan serap-menyerap unsur kebahasaan yang rendah. Terdapat kesepadanan

antara adaptasi linguistik dengan adaptasi sosial”. Apabila di antara komunitas tutur yang melakukan kontak memiliki derajat adaptasi linguistik yang tinggi, maka tatanan kehidupan sosial yang harmonislah yang akan terbentuk; sebaliknya apabila derajat adaptasi linguistik di antara komunitas tutur bahasa yang berbeda yang melakukan kontak itu rendah, maka tatanan kehidupan sosial yang mengarah pada disharmonislah yang akan terbentuk. Dalam redaksi lain, dapat dikatakan bahwa derajat adaptasi linguistik memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan derajat munculnya tatanan kehidupan disharmoni. Semakin tinggi derajat adaptasi linguistik, akan semakin rendah derajat potensi konflik di antara komunitas tutur bahasa yang berkontak; sebaliknya semakin rendah derajat adaptasi linguistik, semakin tinggi derajat munculnya potensi konflik.

Abad ke-20 telah ditandai dengan terjadinya banyak konflik suku bangsa yang didasari penentuan hak-hak bahasa asli. Seperti isu suku bangsa lainnya, perbedaan bahasa tidak dapat dibiarkan begitu saja. Kasus konflik suku bangsa yang klimaksnya berujung pada eksodusnya sebagian besar minoritas Turki ketika pemerintah komunis Bulgaria tahun 1970 mencoba membangun kekuatan Bulgarisasi dengan mengambil nama Turki dan Muslim merupakan contoh persoalan bahasa ikut bermain dalam membina tatanan kehidupan yang harmoni. Kasus lain, misalnya Latvia yang sejak kemerdekaannya 1991, menghadapi persoalan yang berupa kebutuhannya untuk memperkenalkan kembali bahasa Lativi sebagai bahasa negara dan bahasa pengantar hubungan kemasyarakatan di samping memberi hak bahasa untuk minoritas yang lebih kecil, serta dengan tanpa mengurangi hak mereka yang berbahasa Rusia; setelah pada tahun 1988 bahasa Rusia merupakan bahasa yang dominan dan bahasa Lativi jarang sekali digunakan dalam urusan resmi negara dan aktivitas publik. Itu sebabnya, untuk memperbaiki kondisi ini, tahun 1989 bahasa Lativi ditetapkan sebagai bahasa resmi kenegaraan dan secara

bertahap mulai diperkenalkan kembali. Negara secara besar-besaran mendukung program belajar bahasa yang dimulai dengan mengajarkan bahasa Lativi pada penduduk Rusia yang pada masa lalu menggunakan bahasa Rusia sebagai bahasa satu-satunya.

Sejalan dengan itu pula, persoalan lain yang muncul, mengapa bahasa dipersoalkan sedemikian rupa? Pertama, ada peran psikologis yang dimainkan bahasa, dalam hal ini, mengikat dalam penghargaan diri dan kebanggaan kelompok serta individu. Kedua, bahasa sering dilihat sebagai milik utama yang mempunyai signifikansi kultural dan juga nilai praktis dalam kehidupan. Itu sebabnya, ketika suatu komunitas harus menggunakan bahasa lain, bukan bahasa aslinya dalam berinteraksi dengan komunitas lain dalam suatu tatanan kehidupan yang lebih luas (multikultural/multibahasa), akan memengaruhi derajat sukanya atau keterasingannya dari kehidupan tersebut. Namun, peran psikologis dan sosiologis bahasa tidak hanya akan menghasilkan kondisi psikologis dan sosiologis seperti digambarkan di atas; dapat saja sebaliknya, pemilihan penggunaan unsur-unsur bahasa lain menjadi bagian dari bahasanya, misalnya melalui proses penyerapan, atau peristiwa kontak bahasa lainnya, seperti alih kode dan campur kode, menjadi bagian dari proses pemenuhan kebutuhan psikologis dan sosiologis. Pemenuhan kebutuhan psikologis di sini menyangkut akan pemenuhan rasa lebih berprestise jika memiliki kemampuan menggunakan unsur-unsur bahasa lain dalam tuturannya; sedangkan pemenuhan kebutuhan sosiologis, menyangkut kebutuhan untuk mengintegrasikan diri dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Dalam hal itu, kedua kebutuhan ini dapat mendorong ke arah kehidupan yang lebih harmonis di antara penutur bahasa yang satu dengan penutur bahasa yang lain. Dengan kata lain, pemenuhan kebutuhan psikologis dan sosiologis melalui penggunaan bahasa lain dalam tuturan yang menggunakan bahasa asli suatu komunitas merupakan salah satu bentuk proses adaptasi sosial yang mengarah pada proses integrasi sosial.

Selanjutnya, jika bahasa begitu penting dan menjadi penanda keberadaan suatu komunitas, mengapa negara-negara yang berbahasa sama tidak menjadi satu komunitas yang lebih besar, seperti menjadi sebuah negara bangsa yang sama, misalnya: mengapa komunitas penutur bahasa Inggris terpilah ke dalam beberapa negara, tidak menjadi satu negara. Alasan tentang realitas ini cukup kompleks, karena seperti dijelaskan di atas bahwa bahasa bukan satu-satunya benang pengikat nasionalisme negara bangsa. Ada benang pengikat berupa ras dan agama. Selain itu, kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan pula dari faktor historis, politis, dan kolonial yang terjadi pada masa lampau. Negara itu, meskipun sama-sama berras sama (ras kulit putih) dan penutur bahasa/varian bahasa yang sama tetapi mereka tidak menjadi sebuah negara bangsa. Faktor sejarah sangat berperan di sini. Migrasi ke wilayah lain, baik karena tekanan ekonomi, demografi, maupun konflik internal membuat segmen sosial tertentu yang bermigrasi, seiring perjalanan sejarah peradaban manusia, komunitas itu lalu membentuk negara bangsa baru.

Selain sebagai jati diri atau lambang identitas seseorang/komunitas/negara bangsa, seperti diuraikan di atas, bahasa juga memiliki fungsi utama sebagai sarana berpikir (Chauchard, 1983), yaitu sarana mengembangkan pikiran/gagasan/IPTEKS dan sarana komunikasi/fungsi interpersonal (Halliday, 1972). Sebagai sarana berpikir maksudnya, melalui bahasa kita dapat memahami apa yang dipikirkan seseorang atau suatu komunitas, baik berpikir tentang diri dan komunitasnya maupun berpikir tentang orang/komunitas lain; sedangkan sebagai sarana komunikasi, maksudnya bahasa memainkan peran penting dalam membangun solidaritas, membangun komunikasi lintas komunitas yang berbeda. Dalam fungsi bahasa sebagai sarana berpikir itulah bahasa dapat berperan sebagai sarana kajian untuk membangun strategi, khususnya strategi dalam memahami sikap, pandangan seseorang/komunitas/negara bangsa baik dalam memandang keberadaan/eksistensi diri/

komunitas/negara bangsanya sendiri maupun dalam memandang keberadaan/eksistensi komunitas/negara bangsa lain dalam hubungan dengan diri atau komunitasnya. Adapun sebagai sarana komunikasi, bahasa dapat berperan sebagai sarana diplomasi dalam membangun solidaritas/kebersamaan sosial. Dalam hal ini, bahasa berperan untuk membangun kerja sama dan menjadi sesama (Sudaryanto, 1990). Dengan demikian, bahasa menjadi sarana diplomasi.

Pemanfaatan bahasa sebagai sarana kajian strategi dalam rangka membangun diplomasi lintas-komunitas, baik komunitas dalam satu negara maupun komunitas lintas negara memainkan peran yang sangat penting pada era kehidupan dunia yang mengglobal dengan peran teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang sangat dominan. Dalam negara bangsa seperti Indonesia yang masyarakatnya majemuk, tersegmentasi dalam berbagai suku bangsa dengan bahasa lokal yang berbeda, pemahaman antarsatu suku bangsa dengan suku bangsa lain dalam rangka membangun komunikasi sosial menuju integrasi sosial dan integrasi bangsa haruslah secara sungguh-sungguh diikhtirakan, jika NKRI yang menjadi cita-cita proklamasi hendak dipertahankan. Pemahaman itu dapat dilakukan melalui kajian strategi yang mengkhhususkan diri pada kajian pemahaman cara berpikir suku bangsa-suku bangsa itu, baik cara berpikir dalam memandang keberadaan suku bangsanya sendiri maupun cara berpikir tentang keberadaan suku bangsanya dalam hubungan dengan suku bangsa lain dalam suatu tatanan kehidupan pluralis.

Dalam konteks kehidupan lintas negara bangsa (transnasional), pemahaman akan bahasa-bahasa bangsa lain menjadi sangat penting tidak hanya bertujuan untuk menjalin komunikasi dengan bangsa yang memiliki bahasa itu, tetapi juga bertujuan untuk memahami pikiran negara tersebut terhadap negara lain. Dengan banyak terjadinya kejahatan yang bersifat transnasional,

seperti kejahatan penyeludupan narkoba, terorisme, perdagangan manusia, sadapan pembicaraan antarpejabat negara, upaya-upaya penguasaan suatu bangsa oleh bangsa lain dan sebagainya, memerlukan pemahaman bahasa negara lain. Dengan demikian, pemahaman bahasa negara lain sangat diperlukan dalam rangka membangun strategi pertahanan dan keamanan suatu negara. Sebagai contoh, dalam rangka pertahanan dan keamanan negara Amerika Serikat, agen rahasia di setiap negara bagian diminta mengidentifikasi bahasa-bahasa yang perlu dipelajari dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan, baik yang menyangkut: pertanian, ketenagakerjaan, komersial, pertahanan, layanan kemanusiaan dan kesehatan, transportasi, perkotaan dan perumahan dan lain-lain. (Wang S.C. dkk., 2010: 5), seperti diperlihatkan berikut ini.

Tabel 1. Bahasa-bahasa Prioritas Tinggi untuk Dipelajari pada Agen Federal Amerika Serikat

No.	Agen Federal	Jumlah Bahasa	Bahasa Prioritas Tinggi
1.	Departemen Pertanian	8	Cina, Arab, Farsi, Hindi, Urdu, Rusia, Jepang, dan Korea
2.	Departemen Perdagangan	5	Arab, Cina Mandarin, Spanyol, Portugis, dan Jepang
3.	Departemen Pertahanan	13	Arab, Cina, Dari, Farsi, Hausa, Hindi, Igbo, Pashta, Rusia, Swahili, Somalia, Urdu, Yoruba
4.	Departemen Layanan Kemanusiaan dan Kesehatan	17	Arab, Cina, Farsi, Francis, Jerman, Hausa, Hindi, Korea, Portugis, Rusia, Spanyol, , Swahili, Tagalog, Thai
5.	Departemen Pengembangan Perkotaan dan Permukiman	6	Cina, Vietnam, Korea, Jepang, Spanyol, dan Rusia
6.	Departemen Tenaga Kerja	6	Arab, Urdu, Farsi, Cina, Spanyol, dan Francis

7.	Departemen Dalam Negeri	20	Arab, Cina, Kanton, Dari, Farsi, Hindi, Urdu, Pasto, Azerbaijan, Bengali, Kazakstan, Korea, Kyrgyz, Nepal, Rusia, Turki..
8.	Departemen Transportasi	0	Saat ini belum direkomendasikan
9.	Dept. of the Treasury	34	Arab, Bulgaria, Kanton, Cina, Czech, Danish, Dari, Dutch, Finnish, Francis, Jerman, Latin, Hindi, Italia, Maltese, Portugis, Rusia, Somalia, Spanyol, Swedia, Vietnam...

Bahkan untuk membongkar pelaku pengeboman di WTC pada tanggal 11 September 2001, pemerintah merekrut warga Amerika yang dapat berbahasa Arab, Parsia, Pashto, dan bahasa Korea untuk menerjemahkan dokumen teroris (Peters, dalam Wang S.C., dkk., 2010). Kajian-kajian yang bersifat strategis dalam rangka memanfaatkan potensi bahasa dan sastra sebagai bentuk diplomasi dalam rangka pertahanan dan keamanan negara perlu digalakkan.

1.2 Bahasa dan Cara Pandang Komunitas Penuturnya

Apa yang menarik dari uraian pada seksi di atas ialah bahasa merupakan identitas yang menjadi penanda keberadaan manusia. Sebagai penanda, melalui bahasa dapat dipahami kelompok yang menjadi komunitas penuturnya. Pemahaman terhadap komunitas penutur suatu bahasa melalui bahasa yang digunakan dapat mengandung pengertian bahwa melalui bahasa dapat ditelusuri cara pandang penuturnya serta perilaku yang menjadi implikasi dari cara pandang tersebut. Dengan kata lain, bahasa membentuk cara pandang manusia terhadap dunia yang mengitarinya. Sebagai contoh, seorang anak Indonesia yang bahasa pertamanya bahasa Jawa, pada saat memperoleh konstruksi/kosakata bahasa Jawa: *nuwun sewu/kula nuwun*, secara simultan si anak akan memperoleh pemahaman tentang cara pandang terhadap relasi antarsesama manusia. Seiring dengan upaya si anak belajar memproduksi

konstruksi bahasa Jawa *nuwun sewu/kula nuwun* itu, pada saat yang bersamaan si anak belajar memahami konteks pemakaian konstruksi bahasa Jawa tersebut. Misalnya, konstruksi itu digunakan ketika melintas di depan orang yang lebih tua, senior, berprestise sosial tinggi atau digunakan ketika memberikan sesuatu kepada orang yang lebih tua, senior, atau memiliki status sosial yang lebih tinggi dari dirinya, sedangkan terhadap orang yang sesama dengannya atau yang lebih muda, rendah status sosial dari dirinya tidak mengucapkan konstruksi tersebut, secara tidak disadari bahwa pada diri si anak telah ditanamkan pemahaman/cara pandang tentang bagaimana bertingkah laku dalam hubungan antarsesama manusia. Dalam konteks itu, si anak diajarkan tentang adanya tata cara yang mengatur relasi antarsesama manusia. Cara pandang ini semakin diperteguh seiring dengan berlanjutnya pemerolehan si anak akan kosakata lain dalam bahasa Jawa, misalnya pemerolehan berbagai bentuk kosakata halus dalam sistem tingkat tutur bahasa tersebut.

Terkait dengan bahasa sebagai pembentuk cara berpikir atau cara pandang di atas menarik untuk disimak hasil survei indeks kebahagiaan masyarakat Indonesia yang dilakukan BPS, 2014 berikut ini dan bandingkan dengan yang dilakukan gallup tahun 2012.

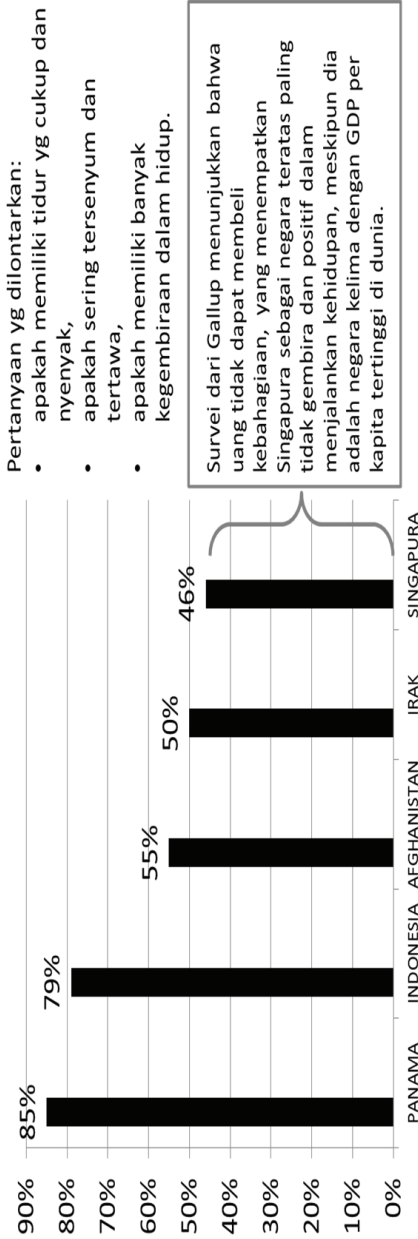
Gambar 1. Survei Indeks Kebahagiaan 2014

Oleh Badan Pusat Statistik



Gambar 2. Survei Negara dengan Masyarakat Paling Bahagia 2012

Survei oleh Gallup dilakukan di 148 negara pada 2011 dan Dipublikasikan 19 Desember 2012



Hasil survei tersebut menggambarkan persentase indeks kebahagiaan masyarakat Indonesia relatif baik, yaitu 65,11 %. Indeks kebahagiaan di atas jika dibandingkan dengan indeks kebahagiaan berdasarkan hasil survei yang dilakukan Gallup tersebut memperlihatkan bahwa orang Indonesia lebih bahagia dibandingkan dengan orang Singapura. Padahal, Singapura merupakan negara kelima dengan GDP per kapita tertinggi di dunia.

Mengapa orang Indonesia lebih bahagia? Persoalan kebahagiaan merupakan persoalan bagaimana cara orang atau komunitas itu memandang hakikat kehidupan. Bagi orang Indonesia, takaran kebahagiaan hidup adalah ketenangan hati. Hal itu terungkap dari banyaknya konstruksi dalam bahasa Indonesia yang menggunakan kata **hati** sebagai salah satu unsur pembentuk konstruksi yang lebih besar, terutama yang berupa ungkapan, seperti terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. Konstruksi Bahasa Indonesia yang Pembentuknya Kata: Hati

Konstruksi Bahasa Indonesia yang Salah Satu Unsur Pembentuknya: hati			
buah hati	jagalah hati	lentera hati	rendah hati
besar hati	jatuh hati	lelah hati	rusak hati
berat hati	kata hati	makan hati	sakit hati
belahan hati	kaya hati	mata hati	sehati
bersedih hati	kecil hati	mengambil hati	tabahkan hati
baik hati	hati yang berbunga	ketika hati bicara	pendingin hati
diberi/dikasi hati	keikhlasan hati	kuatkan hati	penerang hati
dari hati ke hati	kelapangan hati	melunakkan hati	permata hati
dambaan hati	kelembutan hati	menenangkan hati	tambatan hati
di dalam hati	kematian hati	menggapai hati	tinggi hati
dibukakan pintu hati	keras hati	mengunci hati	(tertutup) pintu hati dan lain-lain.
harapan hati	kesejukan hati	patah hati	
hati nurani	ketenteraman hati	pelita hati	

Dalam teori linguistik (ilmu bahasa) dikenal istilah topikalisasi atau pengedepanan. Topikalisasi atau pengedepanan merupakan strategi kebahasaan yang dimanfaatkan oleh penuturnya untuk menonjolkan gagasan tertentu dalam tuturan melalui cara-cara:

- (a) menempatkan unsur bahasa yang mengandung konsep/gagasan/pikiran yang hendak ditonjolkan pada posisi awal, misalnya kalimat aktif lebih menekankan peran subjek sebagai pelaku tindakan, seperti: **Ali membeli baju**. Ali sebagai pelaku tindakan ditonjolkan/dikedepankan melalui peletakan unsur **Ali** sebagai subjek kalimat yang diletakkan pada posisi awal kalimat, bandingkan misalnya dengan bentuk pasif dari kalimat itu: **Baju dibeli Ali**;
- (b) memberi penanda pemokus, seperti “**oleh**”, misalnya: **Baju dibeli oleh Ali**;
- (c) penggunaan suatu konstruksi secara dominan sebagai salah satu unsur pembentuk konstruksi yang lebih kompleks.

Berdasarkan teori linguistik tersebut, banyaknya konstruksi yang dapat diturunkan dengan menggunakan kata **hati** seperti contoh di atas menggambarkan bahwa bagi orang Indonesia konsep **hati** merupakan sesuatu yang lebih ditonjolkan dalam cara memandang kehidupan. **Hati** menjadi ukuran bagi kebahagiaan hidup. Bagi orang Indonesia, kekayaan material tidak dipandang sebagai sesuatu yang menyenangkan jika tidak dapat membawa ketenangan hati. Artinya, orang Indonesia kebahagiaan merupakan sesuatu yang bersifat psikologis bukan material. Walaupun memiliki banyak harta benda, tetapi jika harta benda itu tidak membawa ketenangan/ketentraman hati maka tidak akan ada gunanya. **Hati** merupakan tolok ukur kehidupan manusia Indonesia.

Dalam bahasa-bahasa daerah di Indonesia, konstruksi mengandung konsep **hati** juga banyak dijumpai, misalnya dalam bahasa Samawa, salah satu bahasa yang terdapat di wilayah Pulau Sumbawa bagian barat berikut ini.

Tabel 3. Konstruksi Bahasa Samawa yang Pembentuknya Kata: Hati

<i>basai ate</i> 'sehati, bersatu hati'	<i>lo ate</i> 'perhatian'	<i>rasate</i> < <i>rasa + ate</i> 'keinginan'
<i>be ate</i> 'memberi hati'	<i>na roa ate</i> ' <i>tega, sampai hati</i> '	<i>rarate</i> < <i>rara 'miskin' + ate</i> 'khawatir'
<i>bo ate</i> 'mudah putus asa'	<i>nonda ate</i> 'kurang perhatian'	<i>rusak ate</i> 'menderita'
<i>bua ate</i> 'buah hati'	<i>ngas ate</i> 'was was'	<i>sakit ate</i> 'sakit hati'
<i>ente ate</i> 'mengambil hati'	<i>nyaman ate</i> 'bahagia'	<i>satek</i> < <i>saik 'satu' + ate</i> 'ingin, mencintai'
<i>entek ate</i> 'naik pitam, marah'	<i>ode ate</i> 'kecil hati, putus asa, pesimis'	<i>talo ate</i> 'kecewa dan berkeinginan untuk membalas'
<i>kanentek ate</i> 'ketakutan'	<i>pedi ate</i> 'belas kasih, empati'	<i>terik ate</i> 'jatuh hati'
<i>keras ate</i> 'teguh, kukuh, berkemauan keras, mudah mara'	<i>polak ate</i> 'patah hati, kecewa'	<i>tingi ate</i> 'sombong'
<i>lenge ate</i> 'iri, berprasangka buruk'	<i>rango ate</i> 'besar hati'	
<i>ling ate</i> 'kata hati'	<i>rangate</i> 'suka mengingat (kebaikan orang)'	

Bahkan dalam bahasa Samawa ditemukan sejenis ekspresi sastra berupa pantun, yang disebut Lawas, menggambarkan cara pandang manusia Samawa yang menempatkan **hati** sebagai tolok ukur hubungan genetis, seperti terungkap dalam Lawas berikut:

Mana tau barang kayak 'Siapa pun orangnya'

Lamen to sanyaman ate 'Jika dapat membawa ketenangan hati'

Yanan si sanak parana 'Itulah sanak saudara'

Hal yang sama dapat pula dijumpai dalam berbagai bahasa daerah yang ada di Indonesia. Artinya, dapat dikatakan bahwa manusia Indonesia menempatkan **hati** sebagai tolok ukur dalam memandang makna kehidupan.

Alasan di atas dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa orang Irak dan Afganistan dari hasil survei tersebut menunjukkan indeks kebahagiaan lebih tinggi dibandingkan dengan orang Singapura. Padahal, kedua negara itu sedang dilanda peperangan. Mungkin secara psikologis, perang bagi sebagian orang di kedua negara itu merupakan wahana untuk menunjukkan kecintaan pada Sang Pencipta (konsep perang *fisabilillah*). Terlepas dari hal di atas, yang ingin ditekankan di sini adalah melalui bahasa dapat ditelusuri cara pemilik bahasa itu memandang kehidupan, atau dengan kata lain, cara pandang suatu komunitas dapat ditelusuri melalui bahasa yang mereka gunakan. Dengan demikian, bahasa membentuk cara pandang penutur bahasa itu sendiri.

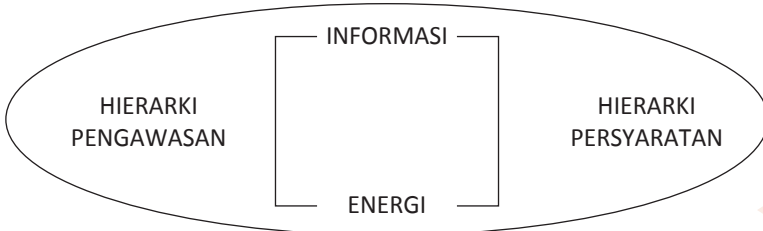
Pemanfaatan data kebahasaan untuk tujuan semacam ini sudah lama dan banyak dilakukan, misalnya identifikasi perilaku komunitas Hopi, yang dilakukan Whorf (1956) atau oleh Carrol dan Casagrande (1958) terhadap penutur bahasa Navaho Amerindian atau oleh Bloom (1981) terhadap penutur bahasa Inggris dan Cina. Cara pandang yang dianut manusia merupakan sesuatu yang tidak tampak, abstrak karena dia merupakan bagian dari sistem budaya yang mendasari semua tingkah laku manusia, baik itu perilaku verbal maupun nonverbal. Dalam bukunya *Social System and the Evolution of Action Theory*, Parsons (1977) menyatakan bahwa sistem budaya mengontrol sistem tingkah laku melalui sistem sosial dan sistem kepribadian, yang secara skematis diperlihatkan dalam gambar berikut.



Patut ditegaskan bahwa dari keempat elemen di atas, Sistem tingkah laku inilah yang konkret dan teramati. Sementara itu, secara umum perilaku manusia dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu perilaku verbal dan nonverbal. Dengan demikian, sistem budaya yang dianut oleh seseorang atau kelompok masyarakat hanya dapat teramati melalui perilaku verbal atau nonverbal. Kajian terhadap perilaku verbal dan nonverbal memungkinkan kita dapat memahami sistem kepribadian, sistem sosial, dan sistem budaya yang dianut suatu komunitas atau individu.

Mengapa sistem yang di atasnya dapat mengontrol sistem yang berada di bawahnya? Menurut Wiener, sistem di atas memiliki informasi, sedangkan sistem yang di bawahnya memiliki energi untuk melaksanakan informasi yang terdapat pada sistem di atasnya. Sistem di atasnya melakukan pengawasan terhadap sistem di bawahnya, sementara sistem di bawahnya menjadikan sistem di atasnya sebagai persyaratan untuk mewujudkan diri. Oleh karena itu, antara sistem yang di atas dengan sistem yang di bawahnya memiliki hierarki pengawasan, sedangkan antara sistem di bawah dengan sistem yang di atasnya memiliki hierarki persyaratan. Hubungan pengawasan dan persyaratan antara informasi yang dimiliki sistem di atasnya dengan energi yang dimiliki sistem di bawah oleh Wiener dikatakan memiliki relasi yang bersifat

sibernetis. Oleh karena itu, teori yang diusulkan Wiener ini dikenal dengan teori siberetik. Secara diagramatis, gagasan yang dikemukakan Wiener itu diperlihatkan berikut ini.



Bahasa sebagai sistem tingkah laku, dalam hal ini tingkah laku verbal, memiliki energi untuk melaksanakan apa yang diperintahkan sistem di atasnya. Karena bahasa tidak hanya menjadi salah satu unsur kebudayaan manusia tetapi juga merupakan wadah kebudayaan itu sendiri. Ia memiliki energi untuk mewujudkan apa yang tergambar baik pada sistem kepribadian, sistem sosial, maupun sistem budaya. Bagaimana wujud sistem kepribadian, yang menjadi refleksi sistem sosial dan sistem budaya (cara pandang) sebagai sistem di atasnya, bahasa tidak hanya dapat merefleksikannya tetapi juga menjadi perekam tentang informasi yang terdapat pada sistem-sistem di atas tersebut. Energi yang dimiliki bahasa, pada tataran terkecil, terefleksi dalam satuan berupa leksikal/kosakata. Banyaknya kosakata dalam suatu bahasa mencerminkan kandungan energi informasi yang dimiliki bahasa tersebut. Katakan, sebagai contoh bahasa Indonesia memiliki 90.000 kata dalam KBBI 2008, ditambah 350.000 kata dan istilah untuk 41 bidang ilmu, itu artinya, bahasa Indonesia memiliki konsep untuk menyampaikan 440.000 informasi, belum lagi ditambah dengan kemampuan unsur leksikal itu dihubungkan dengan unsur leksikal lainnya dalam satu struktur gramatika. Jadi intinya, bahasa sebagai salah satu wujud sistem tingkah laku, memang memiliki energi untuk menyampaikan informasi yang diamanahkan oleh sistem budaya melalui sistem sosial dan sistem kepribadian.

Apabila dicermati secara saksama, maka sistem dasar yang menentukan tingkah laku manusia baik sebagai individu maupun sosial adalah sistem budaya (nilai budaya/cara pandang) yang dianut serta membentuk manusia atau komunitas tersebut. Dalam suatu komunitas yang menempatkan penghargaan yang lebih tinggi pada orang yang lebih senior/tua sebagai sistem nilai budaya yang dianut dalam memandang relasi antarsesama manusia, dalam tingkah lakunya akan memperlihatkan berbagai bentuk perilaku yang mencerminkan nilai budaya tersebut. Munculnya oposisi kosakata halus dan tidak halus/kasar dalam komunitas berpenutur bahasa Jawa, Bali, atau Sasak, misalnya merupakan refleksi dari adanya sistem budaya komunitas-komunitas tersebut yang menempatkan penghormatan yang lebih tinggi pada orang yang lebih tua dari dirinya. Begitu pula munculnya perilaku yang sedikit merendahkan atau membungkukkan badan ketika melintas di depan orang yang lebih tua dari dirinya merupakan salah satu bentuk perilaku nonverbal pada komunitas tersebut yang menempatkan sistem budaya pemberian penghargaan pada orang yang lebih tua dari dirinya. Dengan demikian, baik perilaku verbal maupun nonverbal merupakan refleksi dari suatu sistem budaya yang dianut suatu komunitas dan kedua wujud perilaku ini sering sinkron dalam penampakkannya.

Seperti telah disebutkan bahwa sistem budaya merupakan sesuatu yang tidak tampak, karena ia merupakan sekumpulan nilai-nilai yang dianut suatu komunitas, sedangkan perilaku merupakan penampakan dari sistem nilai budaya tersebut. Oleh karena itu, analisis sistem budaya hanya dimungkinkan melalui analisis sistem tingkah laku, baik itu tingkah laku verbal maupun nonverbal. Analisis verbal dimaksudkan di sini adalah analisis terhadap sistem bahasa yang pertama kali digunakan (bahasa ibu) dan telah membentuk pandangan dunia (orientasi nilai budaya) komunitas penutur bahasa itu. Analisis terhadap sistem bahasa dimungkinkan karena struktur bahasa, seperti dinyatakan Sapir-Whorff dan dirumuskan kembali

oleh Clark dan Clark (bandingkan Whorf, 1966 dengan Clark dan Clark, 1977) di atas mempunyai pengaruh terhadap cara berpikir seseorang. Dengan kata lain, cara manusia memandang makna kehidupan terekam dalam struktur bahasanya, di samping dalam tradisi lisan, mitos, syair-syair kepahlawanan, dan sistem hukum tradisional (Soedjatmoko, 1994 dan Huntington, 2001).

Mengingat bahwa tidak semua unsur bahasa merekam informasi yang berhubungan dengan sistem budaya manusia, maka secara metodologis penghimpunan data dipandu oleh konsep yang berhubungan dengan unsur-unsur universal yang menentukan orientasi budaya manusia, yaitu (1) hakikat hidup, (2) hakikat karya, (3) hakikat pandangan manusia terhadap keberadaannya dalam dimensi waktu, (4) hakikat hubungan manusia dengan sesama, (5) hakikat hubungan manusia dengan alam, (6) hakikat hubungan manusia dengan sang pencipta, dan (7) hakikat pandangan manusia terhadap keberadaannya dalam dimensi ruang (bandingkan Kluckhohn, 1961 dengan Mahsun, 2009).

Analisis serupa dapat pula dilakukan untuk menjawab pertanyaan mengapa hasil survei kebahagiaan yang dilakukan oleh Gallup di atas menggambarkan bahwa orang Indonesia lebih bahagia dibandingkan dengan orang Singapura. Padahal, dari segi penghasilan Singapura merupakan negara dengan urutan kelima dunia GDP nasionalnya, seperti ditampakkan pada tabel di atas.

tabel yang mana ya pak

1.3 Realitas Bahasa dan Komunitas Penuturnya

Paling tidak terdapat dua realitas pandangan yang berkembang dalam kehidupan tentang diri makhluk yang disebut manusia. Pandangan *pertama* menyatakan bahwa diri manusia berkembang dari sepasang manusia pertama (yaitu diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan atau pandangan yang menerima konsep manusia pertama Adam-Hawa). Pandangan *kedua* adalah bahwa keberadaan manusia itu tersegmentasi atas bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa yang berbeda satu dengan yang lain. Secara

sepintas dua pandangan tentang realitas keberadaan manusia di atas seakan-akan bertentangan satu sama lain, namun sesungguhnya kedua pandangan itu memiliki relasi pendasaran secara diakronis atau historis. Maksudnya ialah penerimaan kedua pandangan itu memberikan gambaran pada kita bahwa secara diakronis/historis manusia itu berkembang dari sepasang manusia pertama lalu dalam perjalanan historis tumbuh menjadi bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa yang berbeda (QS Al Hujurat: 13). Persoalannya adalah bagaimana menjelaskan bahwa diri manusia yang berasal dari sepasang manusia pertama itu dapat tumbuh menjadi bangsa dan suku bangsa yang berbeda? Lalu apakah yang menjadi pembeda utamanya? Apabila pada seksi 1.1 di atas dijelaskan bahwa pembeda manusia dengan makhluk lain adalah kemampuannya untuk melambangkan benda-benda secara verbal, maka bahasa itulah menjadi penanda utama keberadaan manusia. Persoalan lain yang timbul ialah bagaimana menjelaskan bahasa yang pertama dikembangkan oleh kelompok manusia pertama tumbuh menjadi bahasa yang berbeda-beda yang menandai keberbedaan suatu bangsa dengan bangsa lain, misalnya berbeda bahasa bangsa Indonesia dengan bangsa Inggris (Kerajaan Inggris), yang masing-masing menuturkan bahasa negaranya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris; berbeda bahasa suku bangsa Jawa dengan suku bangsa Samawa, yang masing-masing menuturkan bahasa lokal bahasa Jawa dan bahasa Samawa. Untuk menjawab persoalan itu akan diilustrasikan berikut ini.

Kita andaikan bahwa sepasang manusia pertama itu diturunkan di suatu belahan bumi, katakan belahan bumi bagian I. Untuk dapat mempertahankan hidupnya, sepasang manusia itu memerlukan kerja sama satu sama lain. Kerja sama itu tentu memerlukan sarana, yang dalam hal ini disebut bahasa. Pada tahap awal, kebutuhan akan sarana komunikasi itu mungkin mulai dari perangkat leksikal dan gramatikal yang sangat terbatas dan sederhana yang memang diperlukan saat itu. Dalam bentuk pengandaian, katakan bahwa pada fase awal, pasangan manusia itu mungkin memiliki kata penunjuk

yang berupa kata ganti: *saya, kamu*; kata-kata yang berhubungan dengan aktivitas sehari-hari seperti: *tidur, bangun, masak, makan, bekerja, berak, kencing, mandi*; kata-kata yang berhubungan dengan bagian tubuh seperti: *mata, hidung, tangan, kaki, perut, kepala, telinga, mulut, lidah, gigi*; kata-kata yang berhubungan dengan nama-nama benda di sekitar: *mangga, pisang, jeruk, salak, nangka, rambutan*; kata-kata kekerabatan lain, mungkin karena sepasang manusia itu sudah mulai berkembang keturunannya lalu muncul kata-kata: *anak, dia, mereka, adik, kakak, ipar, besan, cucu, nenek, kakek* dan seterusnya; kata-kata yang berhubungan dengan keadaan/cuaca, misalnya kata-kata *dingin, sejuk, panas, hujan, kemarau* dan seterusnya sampai berkembang menjadi perbendaharaan bahasa yang memang menjadi kebutuhan masyarakatnya.

Dalam perjalanan waktu, karena manusia yang berada di belahan bumi bagian I itu menjadi padat atau karena ada konflik kepentingan dalam perebutan kekuasaan atau perebutan akses terhadap sumber daya ekonomi, lalu sebagiannya bermigrasi ke wilayah belahan dunia bagian lain secara berkelompok. Katakan migrasi karena kepadatan di wilayah awalnya pindah ke belahan E, sedangkan kelompok yang migrasi karena konflik menyebar ke wilayah A. Di wilayah baru, masing-masing kedua kelompok migran pertama itu, memiliki kondisi alam yang berbeda yang membuat jenis tumbuhan tertentu dapat tumbuh sedangkan yang lainnya tidak dapat tumbuh. Kita andaikan di tempat yang baru itu, di wilayah E tumbuh-tumbuhan seperti: *mangga, nangka, rambutan* tidak ditemukan, tetapi ditemukan tumbuh-tumbuhan lain (berupa makanan), misalnya: *kedondong, kelapa* dan seterusnya; sedangkan di wilayah A tumbuh-tumbuhan seperti: *jeruk, salak, pisang* tidak ditemukan namun, ditemukan tumbuhan berupa: *apel, labu, semangka* dan seterusnya.

Selain itu, mengingat migrasi kelompok di wilayah A dimotivasi karena dendam sebagai akibat perebutan kekuasaan dan atau perebutan akses atas sumber daya ekonomi, lalu mereka ingin

benar-benar memutuskan relasi kekerabatannya dengan kelompok di wilayah asal dan mencoba membangun identitas kelompok yang berbeda dengan identitas kelompok asalnya. Salah satu identitas yang paling nyata adalah berupa bahasa. Terkait dengan ini, kelompok di belahan A dengan sengaja mengubah bahasanya agar berbeda dengan bahasa kelompok I, katakana pembedaan itu dilakukan dengan mengubah semua vokal /a/ pada posisi akhir, yang terdapat pada semua kosa kata yang dimiliki diganti dengan vokal /e/. Dengan demikian, kata-kata yang dibawa dari wilayah asalnya seperti kata: *saya, mata, kepala, telinga, mangga, nangka, dan mereka* diubah menjadi masing-masing: *saye, mate, kepale, telinge, mangge, nangke, dan mereke*. Berdasarkan ilustrasi perubahan sederhana di atas -- tentu tidak sesederhana itu karena perubahan bahasa melibatkan unsur yang sangat kompleks -- dapat dikatakan bahwa antara bahasa di wilayah I dengan bahasa di kedua wilayah migrasi gelombang pertama itu memiliki perbedaan. Perbedaan antara wilayah I dengan E, dari ilustrasi sederhana di atas, terjadi karena faktor geografis, sedangkan perbedaan antara wilayah I dengan wilayah A disebabkan selain faktor geografi juga karena faktor politis (konflik).

Kata-kata: *mangga, nangka, dan rambutan* yang ditemukan di wilayah asal mula ditinggalkan oleh penutur di wilayah migrasi E karena tumbuhan itu tidak ditemukan di wilayah itu diiringi dengan munculnya kata baru berupa: *kedondong* dan *kelapa*. Berdasarkan ilustrasi sederhana ini paling tidak terdapat 5 kosakata yang memiliki perbedaan antara kosakata yang terdapat pada bahasa di wilayah asal (wilayah I) dengan kosakata yang terdapat di wilayah migrasi E. Adapun perbedaan antara bahasa di wilayah asal dengan bahasa di wilayah migrasi E terjadi pada penghilangan kosakata: *jeruk, salak, dan pisang* dalam bahasa asal dengan ditambah kosakata baru: *apel, labu, dan semangka* pada bahasa di wilayah migrasi A. Di samping terjadi perbedaan jumlah kosakata sebanyak 5 buah kosakata, perbedaan lain antara kosakata wilayah I dengan A terjadi pada perbedaan struktur fonologi,

yaitu vokal /a/ pada posisi akhir kata dalam bahasa di wilayah I menjadi vokal /e/ di wilayah A. Perbedaan itu tidak hanya terjadi antara bahasa di wilayah asal (wilayah I) dengan kedua bahasa di wilayah migrasi tetapi juga terjadi perbedaan antara bahasa di kedua wilayah migrasi tersebut. Perbedaan antara ketiga bahasa dalam ilustrasi imajinatif di atas dapat diperlihatkan berikut ini.

Tabel 4. Simulasi Perubahan Bahasa Manusia

Bahasa Wilayah I:	Bahasa Wilayah E:	Bahasa Wilayah A:	Bahasa Wilayah I:	Bahasa Wilayah E:	Bahasa Wilayah A:
saya	saya	saye	jeruk	jeruk	-
kamu	kamu	kamu	salak	salak	-
tidur	tidur	tidur	nangka	-	nangke
bangun	bangun	bangun	rambutan	-	rambutan
masak	masak	masak	anak	anak	anak
makan	makan	makan	dia	dia	die
bekerja	bekerja	bekerje	mereka	mereka	mereke
berak	berak	berak	adik	adik	adik
kencing	kencing	kencing	kakak	kakak	kakak
mandi	mandi	mandi	ipar	ipar	ipar
mata	mata	mate	besan	besan	besan
hidung	hidung	hidung	cucu	cucu	cucu
tangan	tangan	tangan	nenek	nenek	nenek
kaki	kaki	kaki	kakek	kakek	kakek
perut	perut	perut	dingin	dingin	dingin
kepala	kepala	kepale	sejuk	sejuk	sejuk
telinga	teling	telinge	panas	panas	panas
mulut	mulut	mulut	hujan	hujan	hujan
lidah	lidah	lidah	kemarau	kemarau	kemarau
gigi	gigi	gigi	-	kedondong	apel
mangga	-	mangge	-	kelapa	labu
pisang	pisang	-	-	-	semangka

Perubahan yang mengakibatkan perbedaan bahasa sesungguhnya jauh lebih kompleks. Jika ilustrasi di atas hanya menggambarkan perubahan karena faktor geografis dan sosiopolitis, maka kompleksitas perubahan bahasa akan jauh lebih tampak jika

ditambah dengan perubahan karena perkembangan peradaban yang dialami oleh masing-masing kelompok penutur bahasa di wilayah yang baik secara sosial maupun geografis berbeda. Seiring dengan perjalanan waktu, bahasa manusia yang semula berasal dari satu asal yang sama, tumbuh menjadi bahasa baru, yang diawali perubahan yang mengakibatkan perbedaan dialek, lalu berkembang menjadi perubahan yang membentuk bahasa, keluarga bahasa, sampai pada perubahan yang membentuk rumpun bahasa yang berbeda. Demikianlah, sejarah bahasa manusia telah berkembang dari sebuah bahasa menjadi beribu bahasa manusia di muka bumi ini. Sampai tahun 2009 tercatat 6.909 buah bahasa yang tumbuh dan berkembang di muka bumi (Lewis, 2009: 7). Jumlah itu belum termasuk variasi dialektal yang dimiliki oleh masing-masing bahasa, yang satu saat varian dialektal itu dapat tumbuh menjadi bahasa baru atau dia punah sebelum menjadi bahasa. Di Indonesia sendiri, sampai tahun 2014 telah diidentifikasi sejumlah 659 buah bahasa lokal, belum termasuk bahasa negara, bahasa Indonesia. Jumlah itu dimungkinkan akan bertambah, karena sampai saat ini masih dilakukan penyelesaian pengumpulan data untuk pemetaan bahasa di Papua. Dari 659 bahasa lokal itu, sebagian besar terdapat di kawasan Timur Indonesia, yaitu 307 di Papua. Bahasa-bahasa di Kawasan Timur itu sebagian besar terancam punah karena jumlah penuturnya kecil dan semakin berkurang dari waktu ke waktu.

Suatu hal yang perlu dicatat bahwa perubahan bahasa yang terjadi tidak hanya karena tuntutan kebutuhan ekspresi manusia pemilik bahasa itu sendiri, tetapi yang jauh lebih penting dari itu adalah perubahan karena kebutuhan akan identitas baru kelompok penutur bahasa itu sendiri. Dalam konteks inilah bahasa lalu mengikat semua penuturnya secara emosional. Itu sebabnya persoalan bahasa, bukan semata-mata menjadi persoalan sarana komunikasi tetapi lebih jauh menyangkut jati diri komunitas penuturnya. Dengan demikian, keberagaman bahasa adalah cerminan keberagaman umat manusia sebagai penutur bahasa itu sendiri.



BAHASA DAN NEGARA BANGSA

2

2.1 Elemen Pembentuk Nasionalisme

Ketika berbicara ihwal negara bangsa, yang terbersit dalam pikiran kita penyatuan berbagai komunitas/suku bangsa yang berbeda dalam satu sistem pemerintahan. Penyatuan tersebut hanya mungkin terwujud jika antarsegmen sosial itu memiliki kesamaan-kesamaan yang dapat mempersatukan mereka. Terdapat tiga elemen yang dapat dipilih untuk menjadi landasan pembentukan nasionalisme negara bangsa, yaitu ras/suku bangsa, agama, dan bahasa (Anwar, 2008). Terdapat banyak contoh negara bangsa yang nasionalismenya dibangun di atas fondasi ras, misalnya negara-negara di Afrika, seperti Afrika Selatan. Jika elemen ras yang dipilih, betapa sulit bangunan nasionalisme Indonesia akan ditegakkan. Bayangkan, jika berpatokan pada bahasa sebagai penanda identitas ras (suku bangsa) maka berdasarkan identifikasi bahasa lokal di Indonesia yang berjumlah 659 buah bahasa (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2014), dapat dikatakan bahwa ada 659 suku

bangsa yang terdapat di Indonesia. Dari 659 suku bangsa itu, suku bangsa manakah yang dipilih sebagai representasi keindonesiaan negara bangsa Indonesia? Suatu pilihan yang sangat sulit, boleh jadi pilihan itu justru menempatkan cita-cita membangun NKRI hanya sebatas angan-angan belaka.

Pengalaman Indonesia ketika gerakan memperkaya daya ungkap bahasa Indonesia sehingga mampu menjadi bahasa modern yang sejajar dengan bahasa dunia lainnya, para perekraya bahasa melalui institusi kebahasaan pada kisaran tahun 1970-an sampai dengan tahun 1988 banyak menyerap kosakata bahasa Jawa muncul kritikan yang cukup pedas. Dengan redaksi yang berbeda, tetapi esensinya sama, kritikan itu menyuarakan dengan lantang tolakan dominasi bahasa Jawa dengan menyatakan, “Terjadi proses penjawaan dalam bahasa Indonesia”. Kritikan tersebut menggambarkan tolakan dominasi suku bangsa tertentu dalam membangun keindonesiaan. Artinya, elemen suku bangsa atau ras tidak mungkin menjadi fondasi dalam membangun nasionalisme Indonesia dan dari sinilah disadari betapa cerdasnya para pendiri bangsa untuk tidak memilih elemen tersebut sebagai fondasi dalam membangun nasionalisme Indonesia.

Begitu pula dengan elemen agama, ada banyak negara bangsa yang menjadikan agama sebagai elemen pengikat nasionalismenya. Bahkan nama agama itu dijadikan nama negaranya, misalnya Republik Islam Iran, yang menjadikan agama Islam sebagai fondasi dalam membangun nasionalisme negara bangsanya. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia terdapat enam agama yang diakui secara resmi oleh negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghuchu. Persoalannya, agama manakah yang akan menjadi fondasi atau benang pengikat dalam membangun nasionalisme keindonesiaan. Katakan, dipilih Islam karena agama ini adalah agama mayoritas. Pengalaman sejarah ketika rumusan sila pertama Pancasila di dalam Piagam Jakarta yang berbunyi: “Ketuhanan Dengan Kewajiban

Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluk-pemeluknya”, tujuh kata terakhir pada redaksi sila pertama itu dihapuskan sehingga muncullah bunyi Pancasila seperti dikenal sekarang: “Ketuhanan Yang Maha Esa” telah memberikan pelajaran pada bangsa ini bahwa betapa arifnya para pendiri bangsa untuk tidak memilih agama sebagai fondasi dalam membangun negara bangsa Indonesia. Itu sebabnya pula, sehebat apa pun gerakan yang ingin mengubah fondasi nasionalisme Indonesia atas dasar agama pasti akan mendapat tolakan yang kuat, sebagaimana gagalnya beberapa gerakan yang ingin membentuk negara agama, seperti yang dilakukan para separatis DII/TII.

Suatu hal yang menarik adalah dipilihnya bahasa sebagai fondasi dalam membangun negara bangsa Indonesia. Hal itu terlihat dari kesadaran akan pengakuan atas kesatuan tanah air yaitu tanah air Indonesia, meskipun terdiri atas tidak kurang tujuh belas ribu tanah air (pulau) dan kesatuan bangsa yaitu bangsa Indonesia, meskipun terdiri atas tidak kurang dari 659 suku bangsa. Suku bangsa yang berpencar-pencar yang mendiami pulau yang tujuh belasan ribu tersebut diyakini mampu direkatkan dengan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Artinya, bahasa menjadi benang pengikat dalam membangun nasionalisme Indonesia. Dalam konteks ini, menjadi amat penting dan benar pengakuan mantan perdana menteri Singapura, Lee Kuan Yew dalam bukunya: *One Man's View of the World*, yang menyatakan bahwa pada tahun 1998, ketika runtuhnya kekuasaan Orde Baru, tidak ada satu orang pun pejabat di negara itu yang tidak meramalkan di Indonesia pada saat itu akan terjadi balkanisasi. Indonesia akan hancur berkeping-keping menjadi negara-negara kecil, boleh jadi akan mengikuti asalnya dari beberapa ratus kerajaan/kesultanan. Namun, ramalan itu jauh dari kebenaran. Lalu apa yang membuat Indonesia masih bertahan seperti sekarang ini? Lee Kuan Yew menjawabnya dengan menyatakan bahwa Indonesia telah diwarisi satu hal yang tiada ternilai oleh para pendiri bangsanya, yaitu

bahasa persatuan bahasa Indonesia. Di sinilah pentingnya peran bahasa nasional/persatuan suatu negara bangsa.

2.2 Bahasa sebagai Elemen Hakiki Negara Bangsa

Terdapat banyak contoh negara bangsa yang membangun nasionalismenya di atas fondasi bahasa, misalnya India dan Pakistan, Cina, dan Israel. India dan Pakistan berusaha membedakan diri satu sama lain dengan menyatakan bahwa penutur bahasa India dan Pakistan merupakan penutur bahasa yang berbeda, meskipun secara sosiolinguistik masih terdapat pemahaman timbal balik antarmereka. Sebaliknya, Cina menyamakan semua bahasa yang berbeda dalam satu sistem tata tulis demi sebuah identitas yang sama untuk sebuah negara yang besar dan berdaulat. Adapun Israel menghidupkan kembali bahasa yang sudah tidak digunakan demi sebuah identitas. Sebegitu pentingkah fungsi yang dimainkan bahasa nasional dalam sebuah negara bangsa?

Bahasa menjadi elemen hakiki negara bangsa yang menetapkannya sebagai elemen pengikat nasionalismenya, karena bahasa lebih dekat dengan manusia. Kemana pun manusia berada bahasa akan selalu hadir bahkan walaupun pada saat manusia beristirahat/tidur sekali pun. Bahasa, selain menjadi sarana berpikir, juga sekaligus membentuk struktur berpikir penuturnya. Itu sebabnya, para pemuda pejuang kemerdekaan Indonesia, memaksa bahasa yang belum pernah “mengandung” untuk melahirkan sebuah bahasa baru, yang diberi nama bahasa Indonesia. Memang bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, tetapi sebuah asal tentu tidaklah sama dengan turunannya. Kita yakin bahwa manusia yang jumlahnya bermiliar sekarang ini berasal dari sepasang suami-istri, yang dalam agama samawi (khususnya Islam) diyakini berasal dari Adam dan Hawa. Agaknya keliru jika menyamakan Adam-Hawa adalah individu yang sama dengan miliaran anak manusia yang ada sekarang ini. Kiranya tidak berlebihan jika analogi itu ditautkan demikian, karena bukankah

bahasa itu adalah organisme yang lahir, tumbuh, berkembang, dan punah sebagaimana manusia pemilik bahasa itu lahir, tumbuh, berkembang, dan punah pula.

Adapun kasus yang terjadi di Israel, ketika negara itu merdeka, hal yang pertama-tama dilakukan adalah menetapkan identitasnya agar berbeda dengan identitas negara-negara yang berbahasa Arab, seperti Arab Saudi, Palestina dan lain-lain.; berbeda dengan negara yang menggunakan bahasa Parsi, seperti Republik Islam Iran. Apa yang dilakukan adalah menghidupkan bahasa Ibrani yang telah punah ratusan tahun demi identitas negara bangsanya. Hal yang relatif sama dengan Israel adalah Indonesia. Apabila Israel menghidupkan bahasa yang sudah punah ratusan tahun untuk menjadi identitasnya, maka Indonesia memaksa bahasa yang tidak pernah “mengandung” untuk melahirkan bahasa baru yang diberi nama bahasa Indonesia. Bahasa menjadi elemen hakiki negara bangsa yang menetapkannya sebagai elemen pengikat negara bangsa karena bahasa lebih dekat dengan manusia, bahasa membentuk struktur berpikir. Kemana pun manusia berada bahasa akan selalu hadir walaupun pada saat manusia beristirahat/tidur.

2.3 Negara Bangsa di atas Fondasi Bahasa

Pada tanggal 18 Agustus 1945, para pendiri bangsa ini memperteguhkan kembali sikap menempatkan bahasa sebagai fondasi dalam membangun semangat keindonesiaan kita, yaitu dengan disahkannya UUD 1945 yang di dalamnya memuat kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Perjuangan dalam menempatkan bahasa sebagai fondasi untuk membangun keindonesiaan bukanlah perjuangan yang mudah. Ada beberapa kondisi yang membuat para pendiri bangsa Indonesia berada pada posisi sulit dalam menempatkan bahasa sebagai fondasi dalam membangun keindonesiaan.

Pertama, semua bahasa yang tumbuh di wilayah yang kemudian menjadi wilayah NKRI memiliki kedudukan yang sama, yaitu

sebagai bahasa lokal/bahasa suku bangsa, yang pada saat sebelum proklamasi merupakan bahasa-bahasa nasional dari negara-negara kecil yang menjadi cikal NKRI. Pilihan salah satu di antaranya, jika tidak didasari semangat kebersamaan untuk membangun sebuah negara bangsa yang besar, akan menjadi potensi konflik yang justru dapat menggagalkan cita-cita bersama tersebut. *Kedua*, jumlah penutur dan kemampuan daya ungkap antara satu bahasa dengan bahasa lokal lainnya berbeda. Ada bahasa lokal yang baik jumlah penutur maupun kemampuan daya ungunya kecil dan rendah, misalnya bahasa Melayu dan ada pula bahasa lokal yang baik jumlah penutur maupun kemampuan daya ungunya besar dan tinggi, misalnya bahasa Jawa. Pilihan terhadap bahasa Melayu sebagai induk bahasa resmi negara dengan nama bahasa Indonesia, merupakan pilihan yang sulit, jika tanpa didasari semangat kebersamaan dalam membangun negara bangsa.

Sungguh kearifan yang dipertontonkan para pendiri bangsa dalam memilih bahasa lokal yang kemudian menjadi induk bahasa resmi negara tersebut merupakan kearifan yang sangat dibutuhkan bangsa ini di tengah-tengah masyarakat negara bangsa yang mengglobal. Bangsa Indonesia patut bersyukur, karena dengan menerima elemen bahasa Indonesia sebagai benang pengikat semangat kebangsaan, bangsa ini mampu mengikat berbagai segmen sosial yang berbeda latar belakang agama dan suku bangsa.

Rasa syukur yang sedalam-dalamnya itu akan semakin bertambah jika anak bangsa ini membandingkan kondisi negara bangsanya dengan negara bangsa Pakistan, India, dan Cina, serta Israel. Pakistan dan India adalah dua negara yang memiliki bahasa yang sesungguhnya sama, karena jika penutur Pakistan berbicara dengan penutur-penutur India akan terdapat saling pengertian satu sama lain dengan tanpa kesulitan yang berarti. Hal itu disebabkan kedua bahasa itu merupakan bahasa yang diturunkan dari satu bahasa yang sama yaitu bahasa Hindustani, salah satu turunan dari bahasa Sanskerta yang masuk dalam rumpun Indo-

Eropa. Namun, demi sebuah identitas sebagai negara bangsa yang berbeda mereka harus menyatakan kedua bahasa itu adalah bahasa yang berbeda. Pakistan memberi nama bahasa resmi negaranya dengan nama bahasa Urdu, sedangkan India dengan nama bahasa Hindi. Bahkan secara ekstrim mereka menandai keberbedaan bahasanya melalui penggunaan aksara yang berbeda, bahasa Urdu menggunakan aksara Arab sedangkan bahasa Hindi menggunakan aksara Dewanegari. Kalau kasus di atas memperlihatkan sesuatu yang sama dibuat menjadi tidak sama melalui ekspresi tulis yang berbeda, maka kasus berikut ini justru sebaliknya, yaitu penggunaan ekspresi tulis yang sama untuk mempersatukan bahasa yang berbeda.

Penggunaan aksara yang sama sebagai wujud pemersatu demi sebuah identitas yang satu terjadi pada Republik Rakyat Cina. Di negeri ini terdapat 56 bahasa. Tidak ada saling pengertian di antara penuturnya. Apabila penduduk di Provinsi Guangdong bertemu dengan penduduk Yunan, Nanjing atau penduduk Hongkong dan masing-masing menggunakan bahasanya sendiri-sendiri, tidak akan terjadi pemahaman timbal balik. Sebagai bahasa persatuan sejak berabad-abad yang lalu digunakan bahasa Mandarin dengan sebutan resmi Kuan Hua, yaitu bahasa yang penutur aslinya tinggal di sebelah utara, di ibukota negara, Beijing. Untuk mempersatukan negeri yang sangat luas dengan penduduk yang begitu besar digunakan satu jenis aksara, yaitu aksara Han untuk berkomunikasi tulis di antara sesama penutur bahasa yang berbeda. Dengan demikian, walaupun antara bahasa Hokkien, bahasa Hakka, bahasa Wu dan yang lainnya itu tidak ada saling pengertian, tetapi bangsa Cina tidak menganggap masing-masing itu sebagai bahasa yang berbeda melainkan hanya merupakan dialek dari bahasa Cina, yaitu suatu entitas kultural (dengan tanpa ujarannya) yang diungkapkan dengan satu aksara, yaitu aksara Han (Kridalaksana, 2010). Dengan kata lain, meskipun tidak ada saling pengertian di antara penutur pelbagai bahasa daerah, tetapi karena mereka

menggunakan aksara yang sama, orang Cina mengatakan bahwa bahasa-bahasa itu adalah dialek dari bahasa Cina, yang wujudnya adalah sistem aksara.

Apabila perjuangan bangsa Pakistan, India, dan Cina memanfaatkan ekspresi tulis melalui masing-masing perbedaan dan penyamaan sistem keaksaraan untuk membangun identitas bahasa negaranya, maka tidak demikian halnya dengan Israel. Demi sebuah identitas bahasa negara yang berbeda dengan bahasa negara di negara-negara sekitarnya, Israel telah menghidupkan bahasa yang telah punah beberapa ratus tahun yang lalu. Bahasa Ibrani yang telah tiada dihidupkan kembali demi sebuah identitas kenegaraan yang berbeda dengan Iran, Palestina, Arab Saudi dan negara lain di sekitarnya. Kasus Israel ini relatif sama dengan Indonesia dalam menemukan identitas kebangsaannya melalui pilihan bahasa negara. Apabila Israel menemukan identitas bahasa negaranya melalui proses melahirkan kembali bahasa yang telah mati, maka Indonesia melakukan proses memaksa lahir bahasa baru dari sebuah bahasa yang tidak pernah “mengandung”. Artinya, keduanya berasal dari bahasa yang sudah/belum ada dipaksakan menjadi ada. Suatu kegiatan yang sulit, tetapi amat menentukan bagi terbentuknya NKRI.

Bahasa Indonesia, selain sebagai bahasa negara, yang menjadi identitas keindonesiaan, menjadi sarana komunikasi, juga yang jauh lebih penting adalah menjadi sarana untuk bekerja sama dan menjadi sesama. Melalui BI, anak bangsa ini dapat bekerja sama dan menjadi sarana untuk menjadi sesama, yaitu menjadi sesama anak-anak bangsa Indonesia. Dalam konteks ini bahasa memainkan peran sebagai sarana untuk mengembangkan diplomasi dalam rangka memperkuat kesatuan bangsa secara internal dan memperkuat peran Indonesia di dunia internasional.

2.4 Bahasa dan Kemajuan Ekonomi/Peradaban Negara Bangsa

Ternyata kebesaran bangsa Indonesia dan dukungan substansi kebahasaannya yang sudah mencapai taraf bahasa modern serta dukungan 45 negara yang telah membuka tempat pembelajaran bahasa Indonesia sebanyak 174 sampai pertengahan 2015 belum juga membuat bangsa ini bernyali dalam memperjuangkan negara bangsanya melalui diplomasi kebahasaan. Bukankah sejarah menunjukkan bahwa negara-negara yang memiliki peradaban unggul selalu diawali melalui politik identitas, karena politik identitas dapat memunculkan kepercayaan diri bangsa. Ambil contoh, kemajuan peradaban Islam abad ke-9 sampai abad ke-14 tidak terlepas dari politik identitas melalui penerjemahan semua ilmu pengetahuan Latin-Yunani ke dalam bahasa Arab. Begitu pula kemajuan negara Eropa Latin sekarang ini, yang dimulai abad ke-14, tidak lepas pula dari ikhtiar mereka menerjemahkan semua ilmu pengetahuan berbahasa Arab ke dalam bahasa Eropa-Latin, seperti ke dalam bahasa Inggris. Bahkan Jepang telah memberikan pelajaran yang menarik, di tengah porak poranda negara itu dari kehancuran dalam perang dunia kedua, mampu bangkit menjadi negara maju dengan diawali politik identitas melalui penerjemahan semua ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Jepang.

Uraian di atas menyiratkan bahwa peradaban unggul suatu bangsa, yang tentunya akan disertai oleh keunggulan perekonomian negara tersebut, pertama-tama dibangun di atas kepercayaan terhadap apa yang dimiliki dan atas kemampuan diri sendiri, termasuk kepercayaan atas kepemilikan sarana berpikir dan pembentukan pikiran bangsa, yang dalam hal ini bahasa nasionalnya.

Bahasa sebagai sarana berpikir dan sekaligus pembentuk pikiran penuturnya merupakan identitas yang sangat dekat dengan pemiliknya dibandingkan dengan identitas lainnya. Bahasa

merupakan salah satu simbol atau lambang identitas keberadaan komunitas-komunitas tersebut. Ia merupakan salah satu penanda di antara beberapa penanda komunitas (suku bangsa) yang sangat penting, karena bahasa merupakan tempat terwadahi perubahan (evolusi) dan gambaran situasi yang terjadi baik pada masa lampau maupun masa kini (Glazer dan Daniel P. Moynihan, 1975: 470). Sebegitu dekatnya bahasa dengan pemilikinya, maka bahasa mempunyai nilai psikologis pada penuturnya, yang bersifat mengikat dalam penghargaan diri dan kebanggaan kelompok serta individu. Selain itu, bahasa sering dilihat sebagai milik utama yang mempunyai signifikansi kultural dan juga nilai praktis dalam kehidupan. Itu sebabnya, ketika suatu komunitas harus menggunakan bahasa lain, bukan bahasa aslinya dalam berinteraksi dengan komunitas lain, maka akan memengaruhi derajat sukanya atau keterasingannya dari kehidupan tersebut.

Namun, peran psikologis bahasa tidak hanya akan menghasilkan kondisi seperti digambarkan di atas, tetapi juga dapat saja sebaliknya. Pemilihan penggunaan unsur-unsur bahasa lain menjadi bagian dari bahasanya, misalnya melalui proses penyerapan atau peristiwa kontak bahasa lainnya, seperti alih kode dan campur kode, menjadi bagian dari proses pemenuhan kebutuhan psikologis, yang berupa pemenuhan akan rasa lebih berprestise. Pada saat peran psikologis lebih berprestise itu muncul, seiring dengan itu, perasaan menganggap rendah terhadap apa yang dimiliki (termasuk kepemilikan terhadap bahasanya sendiri) mulai timbul. Perasaan rendah diri, kurang yakin dengan diri dan identitasnya mulai merasuk dalam pikirannya. Mengapa hal itu mudah terjadi melalui bahasa? Tentu tidak terlepas dari peran bahasa itu sendiri sebagai sarana berpikir dan sekaligus pembentuk pikiran manusia.

Patut dicatat bahwa kekhawatiran munculnya rasa rendah diri jangan lalu menghalang-halangi seseorang untuk belajar bahasa lain. Belajar bahasa lain, tentu sangat penting karena semakin

banyak bahasa yang dikuasai akan semakin luas pergaulannya dengan komunitas lain. Seiring dengan semakin luasnya jangkauan masyarakat yang digauli, semakin luas pula ruang kompetisi yang dapat dimasuki. Sementara itu, individu atau komunitas yang mampu memenangkan persaingan adalah individu atau komunitas yang identitasnya kuat. Itu, sebabnya penguatan identitas keindonesiaan jauh lebih penting diletakkan lebih dahulu di dalam membangun kepribadian anak bangsa. Oleh karena itu pula, kiranya kurang strategis jika sejak kecil anak-anak bangsa ini sudah dijauhkan dari identitasnya sendiri dan mulai dikenalkan identitas bangsa lain, seperti anak sekolah dasar (alih-alih sejak pendidikan PAUD), yang sudah diharuskan belajar bahasa asing dengan mengabaikan pembentukan karakter melalui penguatan pemahaman terhadap bahasa nasionalnya sendiri.

Pengalaman yang menarik dilakukan oleh Jepang. Ketika tahap awal membangun bangsanya dari kehancuran Perang Dunia II, Jepang membangun identitas kejepangannya melalui proses penjejangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua ilmu pengetahuan berbahasa asing diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Tidak boleh ada buku ilmu pengetahuan berbahasa asing beredar sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Setelah mereka memiliki kemampuan ilmu pengetahuan yang tinggi dan karena itu dapat membawa bangsanya menjadi bangsa modern dengan kemajuan perekonomiannya, Jepang mulai membuka diri dengan membelajarkan bahasa asing. Untuk pembelajaran bahasa Indoensia saja, belum bahasa lainnya, terdapat 38 tempat pembelajaran dengan satu lembaga profesi yang khusus melakukan pengujian kemampuan berbahasa Indonesia (Himpunan Penguji Bahasa Indonesia/HIPUBI). Mereka keluar ketika mereka sudah memiliki fondasi identitas yang kuat dan matang. Hal sebaliknya terjadi pada bangsa Indonesia. Di tengah kerapuhan identitas, bangsa ini merangsek masuk ke dalam suasana kompetisi yang luar biasa luas. Akhirnya, apa yang terjadi, bangsa ini lamban dan

terseok-seok dalam upaya menjadikan dirinya sebagai bangsa/negara maju, meskipun telah diberkahi kelimpahan sumber daya alam yang tiada ternilai.

Terdapat hubungan yang bersifat mengikat antara kemajuan ekonomi (peradaban) suatu bangsa dengan politik identitas yang berupa penguatan identitas/jati diri melalui penguatan bahasa nasional. Kemajuan ekonomi/peradaban Islam pada abad ke-9 sampai abad ke-14 dan kemajuan ekonomi/peradaban negara-negara Eropa Latin sejak abad ke-14 sampai sekarang ini, serta kemajuan ekonomi/peradaban Jepang sejak bangkit setelah Perang Dunia Kedua sampai sekarang, seperti digambarkan di atas, semuanya didasarkan pada politik identitas melalui penguatan bahasa nasional mereka. Ketika kekuatan ekonomi dicapai, ekspansi penguatan identitas ke luar negara mulai digerakkan. Sebagai contoh yang menarik, semua negara maju yang membuka ruang untuk beasiswa ke negaranya atau membuka lapangan kerja untuk bekerja di negaranya bagi warga negara asing selalu diprasyarkan kemampuan berbahasa bahasa negara itu pada tingkat tertentu, misal harus lulus TOEFL dengan skor tertentu untuk menerima beasiswa atau bekerja di negara menggunakan bahasa Inggris. Di Jepang, tenaga kerja medis warga negara Indonesia kesulitan untuk masuk ke pasar kerjanya karena standar kemampuan berbahasa Jepang yang tinggi harus dicapai.

Contoh lain, dalam beberapa pertemuan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Cina, melalui institusi terkait, terjadi kesepahaman tentang kemungkinan membuka pusat kajian Indonesia (baik pusat pembelajaran atau studi bahasa Indonesia pada perguruan tinggi) di negara itu asalkan pemerintah Indonesia mau memfasilitasi terbentuk hal yang serupa untuk bahasa Mandarin. Bahkan yang lebih menarik adalah ekspansi identitas negara yang berbahasa Inggris. Siapa yang membayangkan, bahasa Inggris yang sudah tidak satu pun manusia di jagad raya ini menyangsikan keunggulan bahasa tersebut sebagai bahasa

modern yang memiliki prestise sosial tinggi, masih saja melakukan penguatan penggunaan bahasa itu di luar negara dengan berbagai cara, termasuk cara-cara yang berbau akademik.

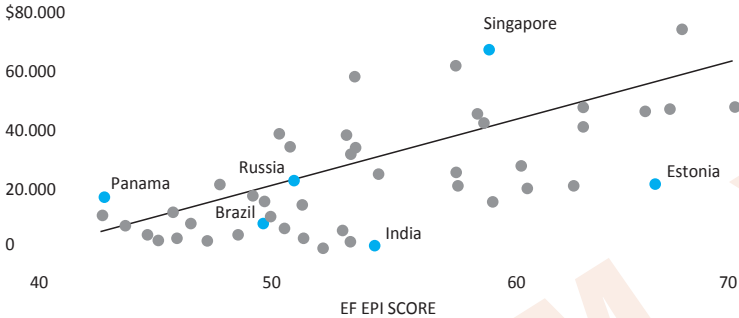
Pernah di suatu peristiwa, berupa forum Diskusi Panel, yang diselenggarakan **English First**, dengan Topik: Apakah Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia lebih Penting untuk Tingkat Kompetensi dan Daya Kompetitif secara Ekonomi bagi Masyarakat di Indonesia. Diskusi dilangsungkan tanggal 29 Januari 2014 di Grand Hyatt Hotel, Jakarta, pukul 18.00-20.00 WIB. Dalam garis besar materi Chris Mc Cormick, Ph.D., Senior Vice President, **English First**, yang dikirim ke peserta khusus tema tersebut, terdapat ungkapan/gagasan yang memiliki muatan “paham tertentu”, yaitu *Better English = Better Income; Better English = Better Quality of Life; dan English = Better Future*. Apa yang menarik dari ungkapan tersebut ialah antara ungkapan pertama, dalam bahasa Indonesianya: **Baik Bahasa Inggris, Baik Penghasilan** memiliki hubungan pendasaran dengan ungkapan kedua: **Baik Bahasa Inggris, Menjadi baik Kualitas Hidup**, dan ungkapan pertama dan kedua memiliki hubungan pendasaran dengan ungkapan ketiga: **Bahasa Inggris menjamin masa Depan yang lebih Baik**. Tiga ungkapan itu, bangunan logika berpikirnya, dirajut dengan menggunakan hukum silogisme yang konklusinya dibangun atas premis-premis yang tidak terbantahkan. Ungkapan pertama dan kedua masing-masing menjadi premis mayor dan premis minor, sedangkan ungkapan ketiga adalah konklusinya. Apabila keyakinan tentang baiknya kemampuan bahasa Inggris dapat berakibat pada baiknya penghasilan, maka penghasilan yang baik tentu akan memberi jaminan kualitas hidup yang baik, dan kualitas hidup yang baik tentu berdampak pada masa depan yang baik. Untuk membuat agar ketiga ungkapan yang bermuatan paham/ideologis itu menjadi premis-premis yang seakan-akan tidak terbantahkan, maka disajikannya fakta dalam bentuk statistik yang cukup meyakinkan, seperti digambarkan berikut ini.

Better English = Better Income

BETTER ENGLISH AND INCOME GO HAND IN HAND

English proficiency shows a strong correlation with a country's gross national income

GROSS NATIONAL INCOME PER CAPITA



SOURCE UNITED NATIONS, GNI PER CAPITA PPP(s). 2012 AND EF EPI 2013 REPORT

HBR.ORG



English Proficiency Index (EF EPI)

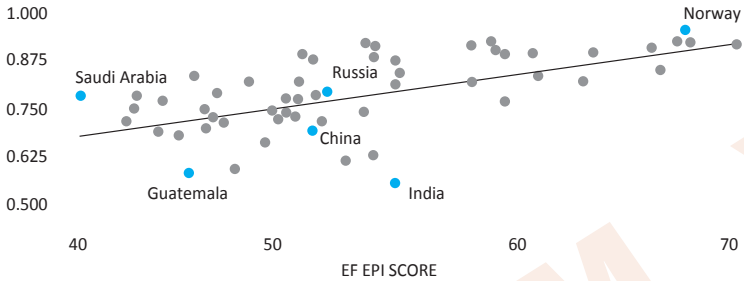
Data statistik di atas jelas sekali memperlihatkan kebenaran premis pertama: Baik bahasa Inggris, Baik Penghasilan, karena Singapura yang Indeks Kemampuan Bahasa Inggrisnya lebih tinggi dibandingkan Panama, Rusia, Brazil, India memiliki penghasilan per kapita yang lebih tinggi. Artinya premis pertama tidak terbantahkan. Selanjutnya, premis kedua berusaha dibuktikan dengan data berikut ini.

Better English = Better Quality Of Life

BETTER ENGLISH, BETTER QUALITY OF LIFE

There is a correlation between how well a country's population speaks English and education, life expectancy, literacy, and standards of living

HUMAN DEVELOPMENT INDEX (HDI)



SOURCE UNITED NATIONS HUMAN DEVELOPMENT REPORT. 2012 AND EF EPI 2013 REPORT HBR.ORG



English Proficiency Index (EF EPI)

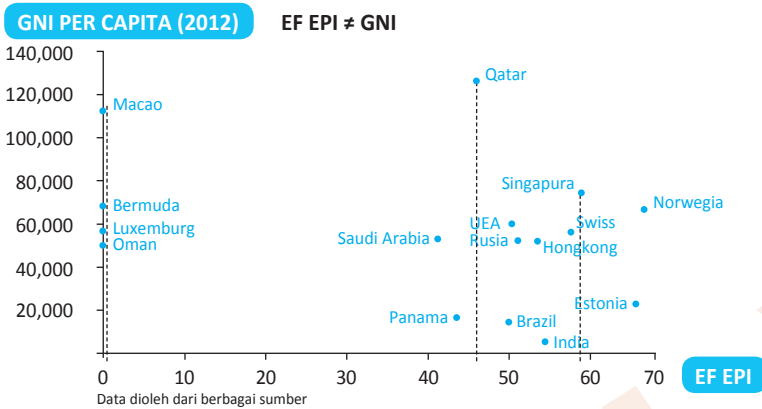
Data di atas, memperlihatkan kebenaran premis kedua: Baik Bahasa Inggris, Kualitas Hidup Menjadi baik, karena Norwegia memiliki indeks kualitas hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan indeks kualitas hidup Arab Saudi, Rusia, Guatemala, Cina, dan India yang indeks kemampuan berbahasa Inggris lebih rendah dibandingkan Indeks kemampuan Bahasa Inggris Norwegia. Dengan dimilikinya kebenaran kedua premis itu, maka konklusinya: Menguasai Bahasa Inggris berarti memiliki Masa Depan yang Baik tidak diragukan kebenarannya.

Apabila paham itu, merasuki anak-anak muda bangsa ini, terutama para remaja yang disasar dari program tersebut, dapat dibayangkan ketika para remaja Indonesia berumah tangga dan memiliki anak, mereka akan mengintroduksi paham tersebut sejak anak-anak mereka mulai mengenal bahasa. Artinya, bahasa ibu untuk mereka adalah bahasa Inggris, bukan bahasa

daerah atau bahasa Indonesia. Jika hal ini terjadi, kekhawatiran pakar budaya dan seni Indonesia, Pamela Allen, Guru Besar Universitas Tasmania, Australia seusai memberikan pidato Akademik dalam upacara Wisuda Sarjana di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 23 Maret 2014 (*Republika*, 24 Maret 2014), yang menyatakan bahwa perkembangan bahasa Indonesia di Indonesia, khususnya di kota-kota besar mengkhawatirkan, karena banyak rumah tangga di kota-kota besar sudah mulai menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari (bahasa pertama) lihat pula Dodi Ambardi (*Tempo*, 25 Januari 2015). Apabila hal ini terus berlangsung, dalam satu atau dua dasawarsa ke depan, bahasa Indonesia hanya akan tersisa penggunaannya dalam dokumen-dokumen resmi kenegaraan yang ditulis pada masa lalu, sebagaimana halnya bahasa Melayu di Singapura, yang tinggal dalam lagu kebangsaannya: “Majulah Singapura” dan penggunaan untuk aba-aba dalam dunia militer, serta beberapa stasiun televisi.

Namun, sejauh mana premis yang dibangun itu memiliki kebenaran yang tidak terbantahkan? Menarik untuk dicermati data statistik tentang premis pertama: Baik Bahasa Inggris, Baik Penghasilannya, yang menjadi premis mayor untuk membuat konklusi. Secara sepintas, jika tidak disertai naluri riset yang tinggi, maka data itu akan diterima begitu saja. Padahal, ada informasi lain yang tidak dihadirkan sehingga tidak menolak kebenaran premis pertama tersebut. Dari penelusuran data, diperoleh data berikut ini.

Better English = Better Income



Data di atas memperlihatkan bahwa informasi tentang Qatar yang menunjukkan indeks kemampuan bahasa Inggrisnya lebih rendah dibandingkan dengan Singapura, tetapi penghasilan per kapitanya lebih tinggi dari Singapura tidak ditampilkan. Begitu pula data tentang Norwegia memiliki indeks kemampuan bahasa Inggrisnya lebih tinggi dibandingkan dengan Singapura, tetapi pendapatan per kapitanya lebih rendah dibandingkan dengan Singapura. Artinya, konklusi yang memperlihatkan hubungan pendasaran antara kemampuan berbahasa Inggris dengan pendapatan, kualitas hidup, dan masa depan yang lebih baik tidak terbukti. Memang penguasaan bahasa sebagai sarana komunikasi akan dapat menempatkan seseorang pada posisi pergaulan yang lebih luas dan dengan sendirinya terbuka peluang untuk melakukan ekspansi usaha ke wilayah-wilayah lainnya. Namun, kemampuan berkomunikasi, yang dalam hal ini mempersyaratkan penguasaan bahasa, bukan penentu utama. Penentu utama adalah kepercayaan diri individu itu untuk memasuki area kontestasi ekonomi yang lebih luas. Sementara itu, kepercayaan diri akan muncul jika dalam diri individu itu telah terbentuk identitas dan jati diri yang kuat. Perhatikan misalnya, hampir semua warga negara Indonesia mampu berbahasa Indonesia, tetapi amat jarang

di antara warga negara Indonesia itu siap berkontestasi dengan warga negara Indonesia lainnya yang terdapat pada wilayah/daerah suku bangsa yang berbeda dengan dirinya. Mungkin suku bangsa yang cukup dikenal gigih untuk hal itu adalah suku bangsa Padang atau Minang. Oleh karena mereka memiliki kepercayaan diri yang tinggi, hampir di seluruh wilayah Indonesia ditemukan rumah makan Padang atau Minang. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Bukankah mereka sudah memiliki kemampuan berkomunikasi dengan suku bangsa lainnya yang ada di Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia?

Terlepas dari persoalan di atas, yang penting ingin ditekankan di sini, ialah negara yang jelas-jelas telah memenangkan kontestasi politik identitas, seperti negara-negara berbahasa Inggris, masih saja berusaha menguatkan identitasnya melalui berbagai macam cara seperti digambarkan di atas. Mengapa negara bangsa ini yang sering mengklaim diri sebagai negara besar, tetapi belum berkategori negara maju, tidak seprogresif negara-negara tersebut? Dalam konteks ini, peran ketokohan dan keteladanan para pemimpin bangsa dalam pengutamaan bahasa negara pada situasi resmi kenegaraan sangat dibutuhkan.



BAHASA DAN KEINDONESIAAN

3

3.1 Bahasa bagi Bangsa Indonesia

Enam puluh tujuh tahun yang lalu, tepatnya tanggal 25-27 Juni 1938, di Kota Solo telah berlangsung suatu peristiwa sejarah yang tidak mungkin dapat dihilangkan dari ingatan kolektif bangsa Indonesia sebagai sebuah negara bangsa, yaitu peristiwa Kongres Bahasa Indonesia yang pertama. Kongres itu berlangsung 10 tahun setelah diikrarkannya Sumpah Pemuda, pada tanggal 28 Oktober 1928, yang salah satu ikrarnya, “Kami Poetra dan Poetri Indonesia Menjunjung Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia”. Ada yang menarik dari putusan yang dihasilkan dalam kongres bahasa pertama tersebut, yaitu memperkuat dan mempertegas kembali ikrar politis para pendiri bangsa terhadap pilihan unsur/ elemen bahasa sebagai benang pengikat kebangsaan Indonesia.

Indonesia adalah tempat kosong (*slot*) atau wadah yang pengisinya adalah suku bangsa-suku bangsa yang mendiami kepulauan yang terdapat dalam wilayah NKRI. Sementara itu, ketika berbicara suku bangsa, yang terbersit dalam pikiran adalah bahasa-bahasa lokal/bahasa daerah. Hal itu disebabkan, keberadaan suku bangsa tersebut secara nyata dan jelas ditandai oleh bahasa-bahasa lokal/bahasa daerah. Itu sebabnya, ketika diidentifikasi adanya suku bangsa Jawa, Sunda, Bali, Batak, Bugis, Minang, Asmat, Toraja, Gayo, yang terlintas dalam pikiran adalah masing-masing adanya bahasa Jawa, Sunda, Bali, Batak, Bugis, Minang, Asmat, Toraja, Gayo, dan seterusnya.

Selanjutnya, jika hanya elemen bahasa lokal/daerah yang menjadi pengisi keindonesiaan itu tentu Indonesia hanya merupakan segmentasi sosiokultural yang tidak terhubung satu sama lain. Oleh karena itu, diperlukan satu bahasa yang dapat menjadi penyatu segmen sosiokultural tersebut sehingga terhubung satu sama lain. Bahasa penghubung itulah yang disebut sebagai bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dengan demikian, dalam konteks linguistik, Indonesia adalah bahasa-bahasa lokal/bahasa daerah dan bahasa negara: bahasa Indonesia.

Keberadaan bahasa daerah yang berjumlah tidak kurang 659 bahasa itu memiliki peran yang sangat penting dalam memperlihatkan keterkaitan antara satu bahasa dengan bahasa lain, yang dengan sendirinya pula memperlihatkan keterkaitan antarpemertutur bahasa-bahasa tersebut. Semua bahasa daerah itu memiliki peran yang sama penting dalam memperlihatkan keberagaman bangsa Indonesia pada satu sisi dan pada sisi yang lain mempertautkan satu suku bangsa dengan suku bangsa lain. Sebagai contoh, akan dikemukakan bagaimana peran satu bahasa untuk memperantarai hubungannya dengan bahasa lain berikut ini.

Dalam peta bahasa yang diterbitkan Summer Institute of Linguistics, cabang Indonesia (2004) mengelompokkan bahasa Tarfia, Tobati ke dalam kelompok yang berbeda dengan bahasa Gresi dan bahasa Namblong, yang keempatnya berada di Papua. Bahasa Tarfia dan bahasa Tobati dikelompokkan ke dalam bahasa-bahasa yang masuk rumpun Austronesia, sedangkan bahasa Namblong dan bahasa Gresi dikelompokkan ke dalam bahasa-bahasa kelompok Non Austronesia (Filum Transnugini). Apabila ditinjau dari satuan leksikal (kosakata), yang dimiliki oleh bahasa-bahasa itu memang berbeda jauh, di atas 80%. Perbedaan di atas 80%, dari sudut pandang dialektometri (parameter statistik untuk penetapan suatu isolek sebagai bahasa atau dialek), menunjukkan perbedaan bahasa. Namun, di antara bahasa-bahasa itu masih ditemukan satuan gramatis Austronesia purba **nia* yang berfungsi sebagai penghubung antara unsur yang diterangkan dengan unsur yang menerangkan atau sebaliknya, yang dalam konstruksi genitif disebut penanda milik (dapat dimaknai sebagai ‘mempunyai atau kepunyaan’).

Para ahli perbandingan bahasa di dunia sepakat bahwa satuan gramatis merupakan satuan bahasa yang sukar berubah dibandingkan dengan satuan leksikal dan satuan fonologis. Penanda milik tersebut ditemukan dalam bahasa Jawa menjadi: *ne* atau *e*, pada konstruksi: *klambine Joko* ‘Baju (kepuhyaan) Joko’ dan *bapake Joko* ‘Bapak (kepuhyaan) Joko’. Satuan {-e} dalam bahasa Jawa tersebut berasal dari konstruksi {-ne} dengan penghilangan konsonan jika dibubuhkan pada kata yang berakhir konsonan. Adapun satuan {-ne} itu sendiri diturunkan dari bentuk purba Austronesia **nia* ‘mempunyai, kepunyaan’ melalui kontraksi vokal /i/ dengan vokal /a/ menjadi /e/. Peristiwa linguistik ini merupakan suatu keteraturan dalam hukum perubahan bunyi Bahasa Jawa, seperti pada:

{ka-an} + *bupati* > kabupatian > kabupaten;

{ka-an} + *suwi* > kasuwian > kasuwen 'kelamaan'

{-an} + *legi* > legian > legen 'manisan' dan lain-lain.

Dalam bahasa Gresi dan bahasa Namblong, satuan gramatis itu muncul masing-masing menjadi {-ge} dan {-de}, seperti pada masing-masing: *aya ge yap* 'ayah mempunyai rumah' dan *ngayo de yamo* 'ayah mempunya rumah'. Sulit rasanya memperlihatkan keterhubungan antara bahasa Tarfia dan Tobati dengan bahasa Gresi, karena perubahan dari {-ni} pada bahasa Tarfia dan Tobati menjadi {-ge} dalam bahasa Gresi merupakan perubahan yang tidak lazim, melanggar kaidah perubahan bunyi bahasa secara universal. Perubahan vokal /i/ pada {-ni} menjadi vokal /e/ pada {-ge} masih dapat dijelaskan, karena vokal /i/ dan /e/ memiliki ciri yang sama, yaitu sama-sama bunyi vokal depan. Selain itu, para ahli perbandingan bahasa di dunia bersepakat bahwa vokal tengah: /e, E, o dan O/ merupakan vokal yang berasal dari vokal tinggi /i, u, atau a/ melalui proses asimilasi parsial, misalnya dalam bahasa Austronesia Purba: **lima* > BJ: limo 'lima', vokal /o/ berasal dari vokal /a/ pada kata **lima*, dalam bahasa Austronesia Purba.

Namun, dengan ditemukannya wujud satuan gramatis Austronesia **nia* itu dalam bahasa Namblong berupa {-de} atau dalam bahasa Kafoa, salah satu bahasa di Papua Barat, berwujud: {-gi} pada bentuk: *nimang gi awi* 'ayah mempunyai rumah', maka dapat dikatakan bahwa perubahan yang menghubungkan antara bentuk-bentuk dalam bahasa Tarfia dan Tobati di satu sisi dengan perubahan pada bahasa Namblong adalah perubahan pada bahasa Kafoa dan bahasa Gresi. Dalam bahasa Dubu, juga Papua, ditemukan satuan gramatis Austronesia Purba tersebut dalam bentuk {-ne}, seperti pada: *afa ne neme* 'ayah mempunyai rumah', maka urutan-urutan perubahan satuan gramatis tersebut adalah dari bentuk Austronesia Purba **nia* > Tarfia, Tobati: *ni* > Dubu: *ne* >

Namblong: {-de}. Berdasarkan bentuk dalam bahasa Tarfia dan Tobati: {-ni} menjadi bahasa Kafoa {-gi} dan berdasarkan bentuk dalam bahasa Dubu: {-ne}, juga dalam bahasa Jawa: {-ne} menjadi bahasa Namblong: {-de}, dan dari bentuk dalam bahasa Namblong inilah muncul menjadi: {-ge} dalam bahasa Gresi.

Jika bahasa Namblong telah punah atau bahasa daerah lain yang memelihara satuan gramatis Austronesia tersebut dalam bentuk {-de} telah punah, akan sulit dijelaskan perubahan konsonan /n/ menjadi /g/, suatu perubahan yang tidak lazim terjadi dalam perubahan bahasa-bahasa di dunia. Penjelasan yang masuk akal adalah perubahan dari konsonan /d/ menjadi konsonan /g/, karena kedua konsonan ini memiliki ciri fonetis yang sama, yaitu sama-sama konsonan bersuara. Adapun perubahan dari konsonan /n/ menjadi konsonan /d/ merupakan perubahan yang lazim, karena kedua konsonan itu memiliki ciri fonetis yang sama, yaitu sama-sama berupa konsonan afikodental.

Uraian di atas menggambarkan betapa besar peran bahasa-bahasa lokal di Indonesia yang dapat menjadi bukti empirik bagi keberbedaan tetapi satu asal seluruh bangsa Indonesia. Dalam pada itu pula, pemanfaatan isu keberbedaan rumpun bahasa dari semua bahasa yang terdapat di Indonesia dapat terbantahkan. Dengan kata lain, pengelompokan bahasa Tarfia dan Tobati sebagai kelompok yang berbeda dengan bahasa Namblong, Gresi, Kafoa, dan Dubu oleh pakar yang tergabung dalam kelompok SIL di atas tidak berdasar. Semua masuk rumpun Austronesia, karena masih memelihara unsur-unsur Austronesia Purba. Patut ditambahkan, bahwa satuan gramatis Austronesia Purba tersebut ditemukan pula pada bahasa-bahasa di Formosa dan Filipina, seperti:

1. Bahasa Paiwan: *umaq ni maju* ‘rumah kepunyaan dia’
2. Makazayazaya Paiwan: *kina ni Kamak* ‘ibu kepunyaan Camak’
3. Bahasa Tagalog: *lapis na sa bata* atau *sa bata ng lapis* ‘pensil kepunyaan anak’

Kiranya tidak keliru apabila para pendiri bangsa mengedepankan bahasa sebagai fondasi dalam membangun nasionalisme negara bangsa Indonesia.

Pilihan bahasa yang dijunjung tinggi jatuh pada bahasa yang waktu itu adalah bahasa lokal, yaitu bahasa Melayu bukan bahasa Jawa. Padahal, dari segi jumlah penutur dan kekayaan kosakatanya jauh lebih besar penutur dan jumlah kosakata bahasa Jawa dibandingkan bahasa Melayu saat itu. Berdasarkan hasil survei tahun 1930 penutur bahasa Jawa mencapai 42 juta, sedangkan penutur bahasa Melayu tidak lebih dari satu juta orang (Ibrahim, 2013). Alasan yang dikemukakan yaitu bahasa Melayu memiliki sebaran geografis yang sangat luas, mencakupi seluruh kawasan yang menjadi cikal bakal wilayah NKRI serta kemampuan daya ungkapannya meskipun rendah namun lebih mencerminkan semangat kemerdekaan yang menjadi tuntutan para pejuang kemerdekaan. Dikatakan demikian karena dalam kosakata bahasa Melayu tidak dikenal sistem gradasi sosial seperti bahasa Jawa yang sangat kaya dengan sistem undak usuk/tingkat tutur, yang sangat kental dengan semangat feodalisme. Suatu semangat yang justru ingin dihilangkan melalui cita-cita pendirian negara bangsa Indonesia. Dengan demikian, kesadaran akan pentingnya elemen bahasa dalam membangun nasionalisme keindonesiaan merupakan pilihan yang sangat strategis.

Kesadaran itu tidak hanya terefleksi sebagai salah satu butir dari tiga butir kandungan Sumpah Pemuda yang diikrarkan para pemuda 87 tahun silam (28 Oktober 1928), tetapi juga dieksplisitkan di dalam UUD 1945, yaitu penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Bahkan dipilihnya nama bahasa nasional NKRI dengan nama bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu—karena bahasa Indonesia adalah bahasa yang “dilahirkan” dari bahasa Melayu—menggambarkan bahwa para pendiri bangsa memang telah bertekad untuk membangun nasionalisme keindonesiaan bukan di atas fondasi suku bangsa

(suku bangsa Melayu), tetapi di atas fondasi kebahasaan yang disebut bahasa Indonesia.

Perhatian terhadap bahasa sebagai elemen utama dalam membangun nasionalisme keindonesiaan tidak hanya berhenti pada penetapan sebuah bahasa yang berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara, tetapi diikuti pula pada pengakuan keberadaan bahasa-bahasa lokal. Dalam UUD 1945 diterangkan secara eksplisit ihwal keberadaan bahasa-bahasa lokal tersebut sebagai bahasa yang dilindungi dan dipelihara oleh negara. Relasi antara bahasa Indonesia dan bahasa lokal semakin mempertegas keberadaan dua pilar utama dalam membangun nasionalisme keindonesiaan, yaitu pilar NKRI, yang direfleksikan pada pilihan sebuah bahasa nasional dan bahasa resmi negara, yaitu bahasa Indonesia dan pilar Bhinneka Tunggal Ika yang direfleksikan dalam pengakuan keberagaman bahasa lokal. Kiranya menjadi sangat jelas, keberadaan bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa lokal menjadi penanda atau jati diri keberadaan negara bangsa Indonesia.

Sebegitu cermatnya para pendiri bangsa dalam menetapkan pilihan pada bahasa sebagai benang pengikat tergambar pada pilihan kata kunci dalam butir-butir Sumpah Pemuda. Pada butir pertama dan kedua, kata kunci yang dipilih adalah "... mengaku... satu...", sedangkan pada butir ketiga konstruksi itu diganti dengan konstruksi, "... menjunjung bahasa persatuan...". Pilihan konstruksi "... menjunjung bahasa persatuan ..." mengandung makna adanya pengakuan terhadap keberadaan bahasa lain selain bahasa yang dijunjung tinggi tersebut, dalam hal ini bahasa lokal/bahasa daerah. Kesadaran akan adanya bahasa lokal selain bahasa Indonesia yang harus diakui keberadaannya, juga tergambar dalam rumusan pasal UUD 1945. Dalam Pasal 36 selain dijelaskan tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, juga bagian penjelasannya dijelaskan, "Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya

dengan baik-baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura, dan sebagainya) bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara...”. Dengan demikian, bahasa Indonesia adalah cerminan dari ketunggalikaan bangsa Indonesia, sedangkan bahasa lokal adalah cerminan dari kebhinnekaan bangsa Indonesia. Dengan kata lain, Indonesia adalah wadah, tempat kosong yang pengisinya adalah suku bangsa yang beraneka ragam. Sementara itu, suku bangsa-suku bangsa itu secara linguistik adalah bahasa-bahasa lokal. Dikatakan demikian, karena kita dapat mengidentifikasi adanya suku bangsa tertentu dengan merujuk pada keberadaan bahasa lokal, seperti digambarkan di atas. Dalam konteks pilar kebangsaan, keberadaan bahasa Indonesia merepresentasikan pilar NKRI sedangkan bahasa lokal/ bahasa daerah merepresentasikan pilar Bhinneka Tunggal Ika, yang keduanya diderivasi dari dasar negara: Pancasila dan pilar kebangsaan: UUD 1945.

gambar
yang
mana
pak

Kehadiran bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa dapat disepadankan dengan kehadiran bahasa nasional negara Israel. Seperti disebutkan di atas, ketika Israel menemukan tanah pijakannya di wilayah yang mereka diami sekarang dan memproklamasikan berdirinya negara zionis Israel, upaya yang pertama-tama mereka lakukan untuk membangun identitas/ jati diri agar berbeda dengan identitas negara tetangganya yang berbahasa Arab dan Parsia adalah menghidupkan kembali bahasa Ibrani yang telah mati ribuan tahun yang lalu. Apabila Israel yang demi sebuah identitas menghidupkan kembali bahasa yang telah mati, Indonesia “memaksakan secara politis” bahasa yang tidak pernah “mengandung” untuk melahirkan sebuah bahasa baru yang diberi nama bahasa Indonesia.

Suatu hal yang perlu ditekankan di sini adalah Indonesia tidak seperti bangsa Israel. Bangsa Indonesia lebih banyak mengingkari sejarah pergerakan kebangsaannya sendiri dibandingkan dengan Israel. Kita lalai dalam merawat bahasa

Indonesia sebagai identitas, salah satu buktinya adalah maraknya pemakaian bahasa asing diruang publik. Selain itu, kita abai dalam menjadikan bahasa kita sebagai bahasa ilmu pengetahuan, padahal dari kongres bahasa Indonesia yang pertama sampai kongres bahasa Indonesia kesepuluh tahun 2013, meskipun dalam redaksi yang berbeda, spirit menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan tidak pernah lepas dari ikhtiar memajukan bahasa yang di dalamnya terdapat ikhtiar memajukan bangsa. Apabila saat ini sering didengung-dengungkan adanya degradasi semangat kebangsaan, yang sering dirujuk dengan perilaku anak didik yang tidak lagi menghafal lagu kebangsaan, menghafal dasar negara Pancasila, memberi penghormatan pada bendera pada saat upacara, mengapa dengan maraknya pemakaian bahasa asing dalam tuturan formal serta pemakaian bahasa di luar ruang tidak dianggap sebagai salah satu wujud terjadinya penggerusan identitas yang juga mencerminkan tergerusnya semangat kebangsaan Indonesia?

Terdapat empat identitas keindonesiaan yang paling jelas dan tampak, yaitu Bahasa, Bendera, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Itu sebabnya, keempat identitas tersebut dirangkum pengaturannya dalam satu peraturan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Namun, di antara keempat identitas kebangsaan itu hanya bahasalah yang paling dekat dan menyatu dalam kehidupan manusia. Saking dekatnya manusia dengan bahasa, mau tidur pun orang memakai bahasa, misalnya munculnya pernyataan, "... saya mengantuk, saya mau tidur dulu dan seterusnya...". Bahkan bermimpi pun menggunakan bahasa, misalnya ketika bermimpi berdebat dengan teman yang terbawa dalam mimpi. Sebaliknya tidak akan terjadi ketika mau tidur lalu mengatakan, "Saya mau memakai atau menaikkan bendera dulu" atau "Saya mau menyanyikan lagu Indonesia Raya" atau "Saya mau memakai lambang negara di baju tidur saya" dan seterusnya.

Demikianlah, bahasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari manusia pemilik bahasa itu sendiri, bahkan bahasa menjadi pembentuk cara pandang manusia pemiliknya.

Sebagai contoh, seorang anak Indonesia yang belajar bahasa pertama, katakan bahasa Indonesia, mendengar ibunya melafalkan kata “permisi” lalu si anak mencoba meniru untuk memproduksi kata itu. Seiring dengan itu, si anak mencoba memahami konteks situasi pemakaian kata itu sebagai kandungan makna yang diembannya, misalnya kata itu digunakan ketika si ibu melintasi ayah si anak (suami). Peristiwa serupa terulang beberapa kali, hanya konteks situasinya yang berbeda. Pada peristiwa berikutnya si ibu mengucapkan kata “permisi” pada saat dia melewati orang lain yang lebih dihormati, misalnya orang tua si ibu atau dapat saja ketika anak itu bertambah besar menyaksikan peristiwa penggunaan kata itu pada konteks lain, misalnya melihat temannya mengucapkan kata itu pada saat dia melintas di depan orang tuanya atau orang yang lebih tua dirinya.

Melalui proses belajar kata tersebut si anak yang belajar berbahasa tidak hanya belajar bagaimana memproduksi kata secara linguistik, tetapi si anak belajar tentang nilai-nilai yang mencerminkan cara pandang penutur bahasa itu atas relasi antarsesama manusia. Melalui belajar kata itu, si anak dibentuk cara pandang bahwa ketika berhubungan dengan sesama yang memiliki usia atau status sosial yang lebih tinggi dari si pembicara maka harus dihormati melalui pilihan kata, salah satunya mengucapkan permisi, bahkan disertai sedikit membungkukkan badan ketika melintasi orang yang lebih tua atau dihargai tersebut. Dengan demikian, bahasa membentuk cara pandang manusia, karena bahasa diciptakan sebagai sarana merefleksikan pandangan manusia terhadap dunia. Bukankah Adam pertama-tama diajarkan tentang nama-nama benda? Untuk itu, Safir-Worff mengajukan sebuah teori yang disebutnya dengan teori relativitas bahasa. Menurut teori ini, bahwa cara manusia memandang

dunianya tercermin dalam struktur bahasa yang digunakannya dan sebaliknya, struktur bahasa yang dimilikinya membentuk cara pandang manusia.

3.2 Realitas Kebahasaan di Indonesia

Dari sudut pandang kebahasaan, di Indonesia terdapat tiga jenis bahasa, yaitu bahasa nasional dan resmi negara (bahasa Indonesia), bahasa-bahasa lokal (bahasa daerah yang menjadi bahasa ibu sebagian besar warga negara Indonesia), dan bahasa asing. Ketiga jenis bahasa itu berinteraksi dalam penutur bahasa yang sama, yaitu warga negara Indonesia, sehingga menciptakan kondisi masyarakat yang bilingual/multilingual. Di dalam masyarakat yang bilingual/multilingual, peran psikososial penutur bahasa akan memengaruhi pilihan pemakaian bahasa, yang kadang kala faktor tersebut memberi pengaruh yang begitu dominan. Kenyataan itu, membuat pemakaian suatu bahasa tertentu kadang-kadang disisipi unsur bahasa lain yang dikuasai penuturnya, sehingga membuat suasana berbahasa yang kurang konsisten/taat asas. Itu sebabnya, tidak mengherankan jika dalam pemakaian bahasa nasional/bahasa resmi negara (bahasa Indonesia) banyak tersisipi unsur bahasa lain terutama bahasa asing. Kondisi ini dapat dilihat, misalnya pemakaian bahasa Indonesia di luar ruang yang kurang terkendali dapat ditemukan di hampir seluruh wilayah Indonesia, terutama di ibukota negara, provinsi, dan kabupaten/kota. Di setiap sudut atau jalan dipenuhi spanduk, plang, dan papan nama yang tidak lagi mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia. Oleh karena kondisi kurang taat asas itu menimpa bahasa resmi negara, maka seiring dengan itu, secara tidak disadari, terjadi proses pendangkalan semangat nasionalisme/kebangsaan.

Dalam era global yang dampaknya mulai dirasakan sejak awal abad ke-21, fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional dan identitas nasional perlu disikapi dengan lebih cermat. Masalahnya adalah sejak tiga dekade terakhir penggunaan bahasa

Inggris di Indonesia makin kuat “merasuk” hampir ke semua bidang kehidupan. Kecenderungan itu jelas merupakan ancaman yang serius bagi kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, terutama terkait dengan fungsinya sebagai lambang kebanggaan dan identitas nasional, dan sebagai bahasa negara, terutama dalam administrasi pemerintahan.

Selain itu, meskipun Indonesia telah merdeka selama 70 tahun, keberadaan bahasa Indonesia belum sepenuhnya menjadi identitas/jati diri bangsa. Kondisi itu ditunjukkan oleh masih banyaknya pemakaian bahasa Indonesia oleh warga negara Indonesia yang kurang proporsional. Tidak hanya itu, di desa-desa masih banyak dijumpai warga negara Indonesia yang buta bahasa Indonesia. Kondisi semacam itu, tentu tidak dapat dilepaskan dari kondisi awal bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu, yang penuturnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penutur bahasa Jawa pada waktu itu. Oleh karena itu, ikhtiar membuat semua warga negara Indonesia menjadi pengguna bahasa Indonesia (sesuai kedudukan dan fungsinya) secara baik dan benar merupakan langkah yang harus terus dilakukan. Lebih-lebih, jika dihubungkan dengan masih banyaknya kalangan terdidik Indonesia yang belum memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Belum lagi ditambah dengan banyaknya ragam bahasa Indonesia, khususnya ragam lisan, telah turut memengaruhi pilihan bahasa dalam situasi resmi.

Dalam dunia pendidikan, pembelajaran bahasa Indonesia belum mampu menjadikan bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan yang dapat membangun struktur berpikir pada diri siswa. Hasil studi organisasi dunia: *The Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD), melalui PISA (*Programme for International Student Assessment*) memberikan gambaran bahwa untuk mata pelajaran bahasa (*reading*), hanya 1,5% siswa Indonesia yang mencapai level 4, sisanya: 98,5% berada pada level 3 ke bawah. Artinya, mayoritas siswa Indonesia (98,5%) hanya

mampu memecahkan masalah yang bersifat hapalan, sedangkan yang mampu memecahkan masalah yang memerlukan pemikiran hanya 1,5%. Kondisi ini tentu memunculkan pertanyaan besar bagi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah. Pertanyaan demikian menjadi signifikan karena salah satu fungsi utama bahasa adalah menjadi sarana berpikir sekaligus membentuk pikiran manusia. Artinya, pembelajaran bahasa Indonesia belum dibangun atas dasar bahasa sebagai sarana pembentuk pikiran. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam penataan materi dan metode pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah.

Bahasa Indonesia, sebagai bahasa nasional ataupun sebagai bahasa negara, memiliki wilayah pemakaian di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke dengan jumlah penduduk sekitar 240 juta orang. Luas wilayah penggunaan bahasa Indonesia dan ketersebaran penutur di seluruh pelosok tanah air memungkinkan terjadinya perbedaan perkembangan yang pada akhirnya akan memicu terbentuknya dialek di daerah yang berbeda latar belakang sosial budayanya. Diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk menyebarluaskan bahasa Indonesia standar ke seluruh warga negara Indonesia dan menggunakannya sesuai fungsi dan kedudukannya.

Potensi bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi dalam masyarakat multikultural dan mulai menguatnya peran bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang penting untuk dipelajari di banyak negara. Bahasa Indonesia telah diajarkan di 174 pusat pembelajaran yang tersebar pada 45 negara, di antaranya di: Australia, Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Fenomena itu dapat dimanfaatkan untuk misi diplomatik bagi bangsa Indonesia melalui pengajaran bahasa Indonesia bagi orang asing (BIPA). Penyebaran pembelajaran bahasa Indonesia ke kawasan tersebut menunjukkan bahwa bahasa Indonesia berpotensi menjadi bahasa

pergaulan antarbangsa. Namun, potensi itu tidak akan terwujud menjadi kenyataan jika tidak diikuti ikhtiar yang teratur, terencana, dan terukur yang dilakukan oleh institusi resmi yang menangani masalah kebahasaan.

Apabila kondisi bahasa Indonesia itu terjadi akibat besarnya pengaruh bahasa asing yang diperkuat oleh derasnya arus globalisasi yang cenderung menganggap sesuatu yang datang dari luar sebagai sesuatu yang bernilai tinggi, kondisi kebahasaan bahasa-bahasa lokal tidaklah demikian halnya. Proses nasionalisasi bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional yang mempersatukan semua rakyat yang berbeda latar belakang bahasa lokalnya, begitu gencar dilakukan sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, mengakibatkan keberadaan bahasa-bahasa lokal tersebut terpinggirkan. Tidak jarang di antaranya mengalami kepunahan dan sampai sekarang masih banyak di antaranya menunggu waktu kepunahan. Padahal, kesepadanan yang terdapat dalam bahasa-bahasa lokal itu dapat menjadi bukti kekerabatan suku-suku bangsa penuturnya. Tentu hal itu, haruslah didahului dengan pengkajian yang sistematis tentang keberadaan dan relasi kekerabatan di antara bahasa-bahasa lokal tersebut. Apabila kondisi ini terus dibiarkan, tanpa perencanaan yang matang, Indonesia akan kehilangan mata rantai yang dapat menjustifikasi secara empirik kebenaran semboyan negaranya: *Bhinneka Tunggal Ika*. Bahkan, suatu hal yang sangat merisaukan adalah indikasi pemanfaatan keberagaman bahasa lokal untuk memecah belah (*disintegrasi sosial*), seperti isu Melanesia, Kemelayuan, dan lain-lain., seperti diuraikan pada seksi-seksi berikut.

Sementara itu, keberadaan bahasa-bahasa asing di Indonesia memang diperlukan dan diajarkan di sekolah-sekolah terutama bahasa-bahasa yang dikategorikan bahasa dunia, seperti bahasa Inggris dan Arab. Namun, keberadaan bahasa itu hanya sebatas penguasaan untuk sarana komunikasi, belum dijadikan sebagai

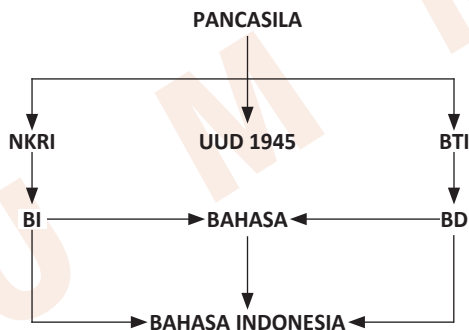
media untuk pengembangan strategi dalam rangka diplomasi bahasa untuk tujuan pertahanan dan keamanan. Kasus berulang-ulangnya pegeboman yang dilakukan oleh kelompok teroris di Indonesia seharusnya tidak terjadi, jika ikhtiar preventif dilakukan melalui upaya penelusuran dokumen teroris yang menggunakan bahasa asing, seperti upaya mencari tahu otak pegeboman di WTC Amerika Serikat beberapa tahun lalu. Dengan kata lain, keberagaman bahasa dari segi jenisnya seperti diuraikan di atas belum dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan strategis dan diplomasi, tetapi lebih pada penguasaan bahasa untuk tujuan komunikasi yang bersifat alamiah.

3.3 Bahasa Indonesia: dari Pilar Keempat Sampai Revolusi Mental

Uraian pada seksi 3.1 dan 3.2 di atas memberikan gambaran bahwa begitu pentingnya keberadaan bahasa bagi bangsa Indonesia, terutama keberadaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Baik bahasa Indonesia maupun bahasa daerah memiliki tugas yang penting dalam membangun negara bangsa Indonesia. Redaksi konseptual tentang negara bangsa Indonesia yang dilukiskan dalam Sumpah Pemuda memperlihatkan realitas sesungguhnya tentang Indonesia. Konstruksi sintaktis dari pernyataan dalam Sumpah Pemuda yang memilih unsur leksikal: “... *mengaku ...satu...*”, merefleksi kesadaran sesungguhnya bahwa bangsa Indonesia terdiri lebih dari satu tanah air (butir pertama) dan lebih dari satu (suku) bangsa (butir kedua), tetapi semuanya menjadi satu karena dapat diikat oleh sebuah bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dalam konteks ini, bahasa Indonesia dapat disejajarkan dengan pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sedangkan suku bangsa yang beragam yang mendiami tanah air (pulau-pulau yang berjumlah kurang lebih 17.000) direfleksikan melalui penggunaan bahasa daerah yang berbeda-beda, dapat disejajarkan dengan pilar Bhinneka Tunggal Ika (BTI).

Oleh karena keberadaan bangsa Indonesia yang beragam dan ditandai oleh keberagaman bahasa daerah, tersatukan oleh bahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia dapat menjadi salah satu pilar yang menopang keutuhan NKRI. Dengan kata lain, keberadaan bahasa, terutama bahasa Indonesia, menjadi salah satu pilar penopang keindonesiaan bersama pilar-pilar kebangsaan lainnya, yaitu UUD 1945, NKRI, dan BTI. Keempat pilar itu tentu tidaklah berdiri di atas ruang hampa, ia ditegakkan di atas dasar/fondasi yang kokoh, yaitu dasar negara Pancasila. Apabila negara bangsa Indonesia itu dianalogikan sama dengan bangunan, fondasinya adalah Pancasila, sedangkan pilar-pilar yang membentuk dan membuat tegaknya bangunan adalah UUD 1945, NKRI, BTI, dan BI, dapat diperlihatkan dalam diagram berikut ini.

Diagram 1. Dasar Negara Beserta Empat Pilar Kebangsaan Indonesia



Bangsa Indonesia adalah bangsa besar yang terdiri atas banyak suku bangsa, budaya, bahasa, dan agama. Dengan kata lain, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, baik dari segi geografi maupun dari segi populasi. Kemajemukan merupakan peluang sekaligus tantangan dan merupakan kekuatan sekaligus kelemahan. Tantangan itu semakin terasa terutama ketika bangsa ini membutuhkan kebersamaan dan persatuan dalam menghadapi dinamika kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Konflik sosial antaranak bangsa dan posisi Indonesia yang berada

di wilayah bencana (cincin api: 122 gunung berapi) jelas-jelas membutuhkan kesadaran kolektif dalam bentuk kebersamaan yang kuat. Kebersamaan dalam menangani bencana dan kebersamaan untuk menghindari konflik sosial, kebersamaan dalam mewujudkan NKRI dalam kebhinnekatunggalikaan.

Tanggal 28 Oktober 1928 para pemuda dari berbagai daerah sadar betul akan kekuatan yang dapat dibangun dari kebersamaan tersebut, terutama dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Mereka bersepakat untuk bersatu melalui Sumpah Pemuda yang menegaskan: satu tanah air, satu bangsa, dan menjunjung satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Semangat dan gerakan untuk bersatu itu telah menjadi sumber inspirasi bagi munculnya gerakan yang terkonsolidasi untuk membebaskan diri dari keterjajahan kemudian memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Proklamasi kemerdekaan merupakan pernyataan dan tindakan mewujudkan ikrar bersatu, untuk mendirikan NKRI dari Sabang sampai Merauke yang merdeka dan berdaulat, seperti yang diimpikan tatkala Sumpah Pemuda diikrarkan. Sejak awal berdirinya NKRI para pendiri bangsa ini sadar akan keberadaan masyarakat yang majemuk sebagai kekayaan bangsa yang harus diakui, diterima, dan dihormati yang kemudian diwujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, pada saat diikrarkannya Sumpah Pemuda, maka pada saat itulah para pendiri bangsa memulai gerakan revolusi mental. Merevolusi mental dari keterberaian atas tanah air dan keterberaian atas suku bangsa yang mendiami tanah air yang berpencar-pencar itu menjadi satu kesatuan. Merevolusi mental dari keterjajahan menjadi mental yang bebas menentukan nasib sendiri, merevolusi mental dari ketergantungan pada pihak luar menuju mental mandiri baik secara politis, ekonomi, maupun sosiokultural.

Revolusi mental itu diekspresikan kembali dengan seberkas torehan pernyataan proklamasi yang dinyatakan dalam bahasa

Indonesia. Dapat dibayangkan, jika teks proklamasi itu dirumuskan dalam bahasa daerah, katakan bahasa Jawa yang saat itu penuturnya lebih banyak dibandingkan bahasa-bahasa daerah lainnya, apakah mungkin semua suku bangsa yang menjadi warga Indonesia yang diproklamasikan itu mau menerima pernyataan tersebut? Begitu pula, jika teks proklamasi itu dinyatakan dalam bahasa daerah, apakah mungkin bangsa penjajah atau bangsa lain mau menerima pengakuan dan pernyataan wakil bangsa Indonesia dalam teks proklamasi tersebut? Setidak-tidaknya, bangsa penjajah telah dibuat berpikir sungguh-sungguh tentang isi pernyataan yang tertuang dalam teks proklamasi tersebut. Dengan demikian, bahasa Indonesia telah membuktikan diri mampu merevolusi mental anak bangsa untuk sadar akan perlunya kebersamaan dalam membangun bangsa dan merevolusi mental bangsa lain untuk mau menerima eksistensi negara bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bahasa di samping sebagai sarana komunikasi juga berfungsi sebagai sarana berpikir dan sekaligus pembentuk pikiran penuturnya. Seiring dengan itu, mengingat masalah mental menyangkut alam pikiran manusia, maka merevolusi mental melalui penguatan bahasa Indonesia di dalam negara dan di luar negara merupakan salah satu cara yang paling efektif. Bukankah sudah ditunjukkan dalam uraian terdahulu, bahwa negara-negara yang mencapai keunggulan peradabannya selalu diawali dengan revolusi mental melalui politik identitas, yaitu penguatan bahasa nasionalnya sebagai sarana berpikir dan pembentuk pikiran komunitasnya.

Kehidupan berbhinneka tunggal ika dalam membentuk NKRI membutuhkan kesadaran kolektif yang merefleksikan mental: (a) Jujur untuk mengakui keberbedaan dalam melaksanakan komitmen untuk bersatu; (b) Keterbukaan untuk mau menerima pihak lain dalam satu wadah persatuan (NKRI); (c) Toleran/empati dalam memahami keberadaan (eksistensi) komunitas lain yang membentuk keluarga besar NKRI; (d) Familier dalam

melihat komunitas lain sebagai bagian dari keluarga besar NKRI; (e) Kebersamaan/senasib dalam melihat komunitas lain yang membentuk warga NKRI; (f) Kepahlawanan dalam memperjuangkan tegaknya NKRI dan (g) Kerja keras dalam mengisi kemerdekaan NKRI. Sikap-sikap yang mencerminkan mental bangsa yang berbeda-beda tetapi satu itu haruslah dibangun, dibentuk, dan dikomunikasikan secara baik dengan bahasa yang dipahami semua anak bangsa, yaitu melalui bahasa Indonesia baku.

3.4 Asal Bahasa Indonesia

Ihwal tanah asal bahasa Melayu yang menjadi asal bahasa Indonesia memang masih menimbulkan perdebatan. Dalam Kongres Bahasa Indonesia I, di Solo 25-28 Juni 1938, sepuluh tahun setelah Sumpah Pemuda, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa, “Yang dimaksud bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu dan dasarnya berasal dari bahasa Melayu Riau” (Dahlan, 2014 dan Ibrahim, 2013).

Pada saat sebelum terjadi pemekaran wilayah provinsi Riau atas dua provinsi, yaitu Provinsi Riau (Induknya: Riau Daratan) dengan Provinsi Kepulauan Riau (hasil pemekaran: Riau Kepulauan) tidak terjadi masalah dalam klaim asal bahasa Indonesia. Namun, setelah pemekaran wilayah, muncul pandangan berbeda yang menyatakan bahwa bahasa Melayu yang menjadi bahasa Indonesia adalah Melayu Daratan (Provinsi Riau) dan pandangan yang cukup kuat disuarakan akhir-akhir ini adalah pandangan yang menyatakan bahwa bahasa Melayu yang menjadi bahasa Indonesia itu adalah Melayu Riau Kepulauan (Riau Lingga). Begitu kuatnya pandangan ini, berbagai kegiatan baik akademik maupun kegiatan sosial budaya, seperti Perhelatan Tamadun Melayu marak diselenggarakan di wilayah ini. Keberadaan Raja Ali Haji juga turut memperkuat klaim Melayu Kepulauan yang menjadi asal bahasa Indonesia. Termasuk dikirimkannya Charles

van Ophuijsen, Inspektur Jenderal Sekolah Melayu, 1901 ke Pulau Penyengat untuk menyusun kamus dan tata bahasa Melayu baku (1901 dan 1910) berdasarkan varian Melayu daerah itu. Untuk memperkuat pandangannya itu, pemerintah daerah Kepulauan Riau meminta Badan Bahasa untuk mengeluarkan sertifikat pengakuan asal bahasa Indonesia itu dari Pulau Penyengat dan di sana akan dibangun Monumen Bahasa Melayu.

Selain terdapat klaim bahasa Melayu yang menjadi bahasa Indonesia itu berasal dari Melayu Riau, juga Palembang dan Kalimantan disebut-sebut sebagai asal bahasa Melayu yang menjadi Indonesia. Mana di antara wilayah tersebut menjadi asal bahasa Indonesia menarik untuk dianalisis dari aspek linguistik berikut ini.

Apabila dicermati karya van Ophuijsen tentang Bahasa Melayu Baku yang ditulisnya tidak terdiri atas ciri dialek Melayu Riau-Lingga. Van Ophuijsen menggunakan lafal [a] untuk yang ditulis < a > pada akhir kata. Padahal, penutur Melayu Riau-Lingga melafalkannya sebagai [ə] dan Melayu Daratan (Riau-Pekan Baru) menggunakan [o]. Persoalannya, mengapa van Ophuijsen memilih [a] bukan [ə] atau [o] yang kedua varian disebutkan terakhir merupakan dua varian yang terdapat di wilayah Riau Daratan dan Riau Kepulauan? Salah satu jawaban yang diajukan ialah dalam naskah Melayu di Riau (Daratan atau Kepulauan/Lingga) ditulis menggunakan vokal Austronesia Purba [a] untuk pelafalan vokal [ə]. Namun, jawaban tersebut belum memuaskan karena di Minangkabau cerita/sastra Melayu, yang ditulis dengan aksara Jawi/Arab-Melayu, selalu ditulis dengan menggunakan [o] yang merupakan realisasi vokal Austronesia Purba *a. Artinya, alasan penulisan menggunakan [a] yang sebenarnya dibaca [ə] tidak berlaku karena di Minangkabau yang dilafalkan [o] tetap ditulis dengan huruf <o> bukan dengan huruf <a>.

Selain itu, perbedaan antara bahasa Melayu dialek Riau-Lingga dan bahasa Melayu Baku yang dihasilkan van Ophuijsen

juga terjadi pada huruf <r>, yang oleh van Ophuijsen, dibedakan atas empat variasi fonetis: 1) konsonan gutural [ʁ] yang dikatakan merupakan ucapan yang digunakan dalam banyak dialek Melayu; 2) konsonan uvular [χ]; 3) atau konsonan yang diucapkan lebih di depan (rupanya velar) [ʀ]; 4) konsonan dental atau palatal [r]. Pada bahasa Melayu Riau dan banyak varian Melayu yang lain digunakan dua ucapan untuk huruf <r>, yaitu diucapkan sebagai bunyi frikatif velar: [ʀ] pada awal dan di tengah kata, dan diucapkan sebagai luncuran schwa pada akhir kata [ʁ]. Artinya, pelafalan huruf <r> sebagai bunyi dental atau palatal [r] pada akhir kata tidak dimiliki varian Melayu Riau. Namun, van Ophuijsen mengambil keputusan memilih [r] sebagai ucapan untuk huruf <r>. Mengapa hal itu terjadi? Mungkin karena konsonan ini tidak beralofon dan digunakan dalam semua posisi dan sesuai dengan keputusan yang diterapkan untuk [a].

Perbedaan lainnya, juga terjadi pada realisasi huruf <k>, ejaan van Ophuijsen mengizinkan dua ucapan menurut posisinya, yaitu [k] pada awal dan tengah kata dan [ʔ] pada akhir kata, misalnya *anak* yang diucapkan [anaʔ]. Hanya dalam kata tertentu dipakai lambang <'>, misalnya untuk makna 'tidak' diizinkan ejaan <ta'> dan <tak>. Dalam kata Arab yang mengandung hamzah, penggunaan huruf *k* dianggap salah, misalnya *moe'im* 'yang percaya'. Artinya, dalam kasus ini pada umumnya diizinkan satu huruf untuk dua bunyi, yaitu [k] dan [ʔ]. Dapat dibayangkan bahwa orang Belanda tidak ingin memakai lambang <'> yang biasanya tidak digunakan sebagai huruf abjad Latin.

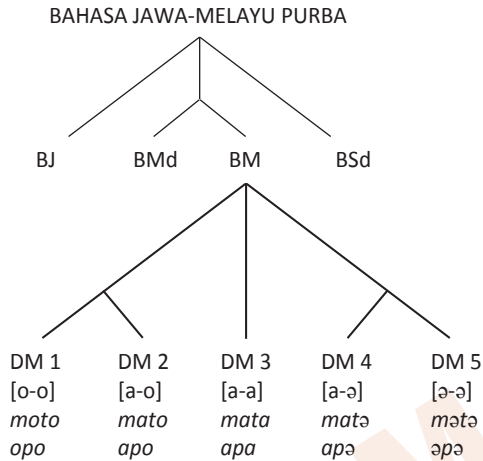
Tata bahasa van Ophuijsen (1910), seperti dipaparkan di atas tidak mencerminkan dialek Riau dalam semua ciri fonologinya, dan tata bahasa itu disebarluaskan di seluruh Indonesia oleh murid sekolah guru dari *Fort de Kocq* (*Sekolah Raja*) di Bukittinggi. Bahasa ini, yang dianggap 'baik', digunakan dalam kebanyakan buku dan karangan, baik karya sastra maupun pendidikan, yang diterbitkan *Balai Pustaka* yang dibentuk sebagai pusat persebaran

bahasa Melayu yang baku. Varian bahasa Melayu ini yang akhirnya dipilih sebagai 'Bahasa Indonesia' dalam Kongres Pemuda Kedua pada tahun 1928 (Sumpah Pemuda).

Persoalannya, bahasa Melayu yang manakah yang dipilih menjadi dasar untuk melahirkan bahasa Indonesia? Maier (1991) menyebutkan bahasa Melayu Riau (*Riouw Maleisch*), yang menjadi asal bahasa Indonesia seperti disebutkan di atas, merupakan sebuah mitos politik (*political Myth*) belaka. "Ia adalah sebuah bahasa buatan, tidak alami, yang diciptakan dari bahasa Melayu bukan milik siapa-siapa" (*it was an artificially created form of Malay that belonged to no one*).

Berdasarkan konsep bahasa baku atau bahasa standar sebagai bahasa yang menjadi kerangka acuan penutur suatu bahasa dalam berbahasa secara baik dan benar, maka bahasa baku merupakan pilihan dari sekian varian yang terdapat dalam satu bahasa. Sebagai contoh, apa yang disebut bahasa Jawa Baku, yaitu bahasa Jawa dialek Solo-Yogya, tidak lain adalah salah satu varian yang terdapat dalam bahasa tersebut yang disepakati sebagai bahasa acuan dalam penggunaan secara baik dan benar. Dengan kata lain, bahasa baku adalah dialek tertentu dalam bahasa itu yang disepakati untuk ditetapkan sebagai acuan penuturnya dalam berbahasa secara baik dan benar. Mengapa harus dipilih, karena secara alamiah tidak ada satu bahasa pun di dunia ini yang tidak memiliki variasi (dialektal). Patut ditegaskan bahwa pilihan terhadap salah satu dialek untuk diangkat sebagai bahasa baku, bukan berarti mengabaikan dialek lainnya. Boleh jadi beberapa kosakata atau sistem gramatis dan fonologis varian lain diambil untuk menyempurnakan sistem bahasa tersebut. Dalam konteks ini, pandangan Meier (1991) di atas menjadi berterima. Namun demikian, bukan berarti asal varian yang menjadi bahasa standar itu tidak dapat ditelusuri. Untuk menjelaskan hal itu akan dikemukakan berikut ini. Dari segi fonologi, bahasa Melayu memiliki lima varian, seperti terlihat dalam diagram berikut.

Diagram 2. Pohon Kekerabatan Bahasa Purba Jawa-Melayu



Catatan: BJ= bahasa Jawa, BMd= bahasa Madura, BM= bahasa Melayu, BSd= bahasa Sunda
 DM 1= dialek Melayu 1, DM 2= dialek Melayu 2, DM 3= dialek Melayu 3
 DM 4= dialek Melayu 4, DM 5= dialek Melayu 5
 Rekonstruksi bahasa Melayu-Jawa Purba dikutip dari Nothofer (1975)

Dalam kenyataan secara alamiah, tidak ada satu bahasa pun di dunia ini yang homogen. Ia selalu tampil dalam keberagaman. Keberagaman itu dapat disebabkan faktor geografis, seperti bahasa Jawa di Jawa Timur berbeda dengan bahasa Jawa di Yogyakarta atau di Banyumas; atau bahasa Inggris di Kerajaan Inggris berbeda dengan bahasa Inggris di Amerika, Australia dan lain-lain. negara yang berbahasa Inggris. Selain faktor geografis bahasa-bahasa itu dapat muncul beragam variannya karena faktor sosiologis, misalnya bahasa Jawa di Keraton berbeda dengan bahasa Jawa kelas sosial kelompok abdi dalem, bahkan bahasa Jepang mengenal perbedaan karena faktor jenis kelamin. Hal yang serupa terjadi pula dalam bahasa Melayu, yang dapat memiliki varian baik karena faktor geografis maupun sosiologis. Varian karena faktor geografis, misalnya bahasa Melayu Riau berbeda dengan bahasa Melayu Papua, Melayu Minang, Melayu Loloan (di

Bali), Melayu Ampenan (di Lombok), Melayu Larantuka (NTT), Melayu Menado, Melayu Ambon, termasuk berbeda dengan Melayu varian Malaysia, Brunei, Pattani (Thailand), Singapura dan lain-lain. Perbedaan karena faktor sosial, juga terlihat pada sistem sapaan (bentuk hormat/honorifik): kamu, anda, tuan, paduka, saya, aku, hamba dan lain-lain.

Secara fonologis, paling tidak terdapat lima variasi dialektal bahasa Melayu, seperti terlihat pada diagram pohon di atas. Berdasarkan realitas berbahasa, dapat dikatakan bahwa asal varian dialektal yang menjadi bahasa negara dan bahasa nasional Indonesia dengan varian bahasa Melayu yang menjadi bahasa nasional Malaysia berbeda. Bahasa Melayu yang menjadi bahasa Indonesia berasal dari varian [a-a], sedangkan bahasa Melayu yang menjadi bahasa nasional Malaysia berasal dari varian [a-e]. Dengan demikian, perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu yang menjadi bahasa kebangsaan Malaysia cukup kompleks meskipun berasal dari asal yang sama. Kasus kesatuasalan bahasa yang muncul menjadi bahasa yang berbeda memang sudah menjadi sunatullah, karena sesungguhnya semua bahasa di dunia ini memiliki asal bahasa yang satu yaitu bahasa Sang Pencipta yang diajarkan pertama kalinya kepada manusia pertama yang diciptakan-Nya. Tumbuh dan berkembang menjadi beribu-ribu bahasa di dunia karena proses alamiah yang kompleks yang melibatkan faktor sosial, politik, kebudayaan, ekonomi, bahkan sampai persoalan psikologis dan religius.

Antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, jika dihitung secara linguistik dengan menggunakan rumus dialektometri (parameter linguistik untuk penetapan isolek sebagai bahasa atau dialek), pada tanggal 28 Oktober 1928 tidak terdapat perbedaan. Namun, dalam perkembangannya bahasa Indonesia telah tumbuh menjadi bahasa modern dengan jumlah kosakata: 90.000 (dalam KBBI, 2008) dan 350.000 kata dan istilah untuk 41 bidang ilmu (Glosarium Bidang Ilmu 6 Jilid, 2008), sehingga total seluruh

kekayaan kata dan istilah mencapai 440.000 dengan tata bahasa dan ejaan yang sudah distandarkan. Apabila dibandingkan dengan jumlah kosakata pada kamus bahasa Indonesia yang berhasil dikumpulkan untuk pertama kalinya (1953) berjumlah 23.000 kosakata. Dengan pengandaian bahwa seluruh kosakata dalam kamus itu adalah kosakata bahasa Melayu, pertumbuhan bahasa Indonesia jauh meninggalkan bahasa Melayu. Bahwa bahasa Melayu adalah asal atau induk bahasa Indonesia merupakan fakta sejarah yang tidak dapat diungkiri. Namun, dalam perkembangan sejarah antara induk dengan anak merupakan individu-individu yang berbeda, bukan sebuah individu yang sama. Boleh jadi si anak tumbuh melampaui pertumbuhan induknya, dan hal itu merupakan realitas kehidupan organisme, termasuk bahasa sebagai organisme yang tumbuh, berkembang, dan punah sebagaimana manusia pemilik bahasa itu tumbuh, berkembang, dan punah pula.

Mengingat bahwa dialek bahasa Melayu yang menjadi bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu dialek [a-a], bukan dialek [a-e], [e-e], [a-o], atau [o-o], di manakah ditemukan varian tersebut? Dalam disertasi yang ditulis Adelaar (1992) dijelaskan bahwa varian bahasa Melayu [a-a] ditemukan di Banjar Hulu, Pulau Kalimantan, Kedah di Pulau Pinang, Langkawi di Semenanjung, dan dialek Melayu Brunei. Dilihat dari ciri fonologis di atas, asal bahasa Melayu yang menjadi bahasa Indonesia adalah di Pulau Kalimantan, Banjar Hulu. Dengan berpatokan pada hipotesis persebaran bahasa Austronesia yang diusulkan Blust dari Indocina—meskipun penulis sendiri menolak pandangan Austronesia dari Indocina tetapi dari Papua/Indonesia—bahasa Austronesia di Indonesia menyebar ke Sumatra dari Kalimantan, bukan sebaliknya dari Sumatra ke Kalimantan, maka asal varian bahasa Melayu yang menjadi bahasa Indonesia adalah dari varian Banjar Hulu, bukan dari Kedah, Langkawi atau Brunei.

3.5 Bahasa Indonesia Nama lain dari Bahasa Melayu

Dalam Bukunya yang berjudul “Tanah Air Bahasa Indonesia”, Ibrahim (2013: 23) berpendapat bahwa,

“...Yang sebenarnya, bahasa Melayu Kepulauan Riau (Riau pada masa lalu) secara utuh dan menyeluruh menjadi bahasa Indonesia atau nama lain daripada bahasa Melayu. Sederhana saja, disebut bahasa Indonesia karena menyesuaikan atau mengikuti nama bangsa yang diberikan kemudian, yakni Indonesia. Bila demikian halnya, tidaklah tepat mengatakan bahasa ini sebagai bahasa daerah...”

Dalam konteks keindonesiaan, munculnya gagasan atau pola pikir yang tidak mau menerima bahasa Melayu yang disetarakan dengan bahasa daerah lainnya patut menjadi perhatian. Padahal, ketika UUD 1945 diterima sebagai UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dalam salah satu pasalnya (Pasal 36) menyatakan secara konstitusional bahwa bahasa Indonesia yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa resmi negara. Seiring itu, maka semua bahasa yang ada di Indonesia, selain bahasa Indonesia dan bahasa asing disebut sebagai bahasa daerah, termasuk di dalamnya bahasa Melayu. Bahasa-bahasa itu, bahasa Indonesia dan bahasa daerah, dihormati dan dipelihara oleh negara, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UUD 1945 Pasal 36 tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan di sini bahwa antara bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu adalah dua bahasa yang berbeda dari segi kedudukan, yang satu berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, sedangkan yang lainnya (bahasa Melayu) adalah bahasa daerah yang sama kedudukannya dengan bahasa Jawa, Sunda, Batak, Gresi dan lain-lain yang terdapat di Indonesia. Namun, perbedaan itu tidak hanya berbeda dari sudut kedudukan dalam konteks keindonesiaan, tetapi secara substansi kebahasaan juga berbeda. Selain perbedaan substansi

seperti disebutkan dalam karya van Ophuijsen, juga dalam perkembangan mutakhir antara bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu (di Malaysia, Brunei Darussalam) memiliki perbedaan dalam sistem penyerapan unsur bahasa asing dalam memperkaya daya ungkap masing-masing bahasa. Adaptasi fonologis dalam penyerapan bahasa Indonesia didasarkan pada wujud leksikal itu dalam sistem tata tulis dalam bahasa asalnya, kemudian dilafalkan sesuai dengan lafal Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar warna bahasanya dari ekspresi lisan benar-benar mencerminkan lafal khas Indonesia. Sebagai contoh, semua kosakata asing (bahasa Inggris) yang berakhir dengan suku kata: /-t(s)ion/ atau /-ty/, masing-masing menjadi bahasa Indonesia /-si/ dan /-tas/, misalnya:

- generation* > BI: generasi
- television* > BI: televisi
- activity* > BI: aktivitas dan lain-lain.

Adapun adaptasi fonologis dalam bahasa Melayu (terutama Malaysia) didasarkan pada wujud leksikal itu pada sistem bahasa lisan, sehingga ketiga kosakata di atas menjadi bahasa Melayu (Malaysia), masing-masing:

- generation* > BM (Malaysia): *jenerasyen*
- television* > BM (Malaysia): *televisyen*
- activity* > BM (Malaysia): *ekstiviti* dan lain-lain.

Warna asli dalam bahasa asingnya masih kental sehingga warna sistem pelafalan Melayunya menjadi luntur. Berbeda dengan bahasa Indonesia yang warna lafal keindonesiaannya (Melayu Polinesia) sangat dipertahankan. Dengan kata lain, sistem fonologi, khususnya sistem fonetis khas bahasa Indonesia masih dipertahankan, sedangkan dalam bahasa Melayu, khususnya Malaysia sudah meninggalkan warna Melayu Polinesia.

Selanjutnya, dari segi leksikal antara bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu (Malaysia) memiliki banyak perbedaan. Jumlah kosakata yang menjadi perbendaharaan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu berbeda. Sampai tahun 2008, perbendaharaan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berjumlah 90.000 lema, ditambah 350.000 kata untuk 41 bidang ilmu, sedangkan bahasa Melayu memiliki 18.000 kata (bandingkan KBBI 2012 dengan Kamus Dewan, 1991). Sumber penyerapan kosakata untuk bahasa Indonesia sangat beragam, di samping dari bahasa asing, juga berasal dari beragam bahasa lokal yang tidak kurang dari 659 bahasa, seperti serapan dari bahasa Jawa, Sunda, Minang, Bali, Sasak, Bugis dan lain-lain. Selain itu, perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu (Malaysia) terletak pada komponen pemaknaan (semantik) leksikal. Terdapat banyak kata yang dalam bahasa Indonesia dan bahasa Melayu (Malaysia) yang memiliki representasi formatifnya sama tetapi rujukan pemaknaannya berbeda, misalnya kata *jemput* dan *tandas* dalam bahasa Indonesia masing-masing bermakna 'menjemput' dan 'memberi penegasan' sedangkan dalam bahasa Melayu (Malaysia) bermakna 'mengundang' dan 'jamban, toilet'.

Perbedaan lain, yang paling prinsip adalah persoalan penamaan. Nama bahasa Indonesia, menyangkut identitas negara bangsa Indonesia, sedangkan nama Melayu merujuk pada nama salah satu suku bangsa, baik di Malaysia maupun di Indonesia.



TANTANGAN INTEGRASI INDONESIA DARI ASPEK KEBAHASAAN

4

Sebagai negara bangsa yang semangat kebangsaannya dibangun di atas fondasi bahasa, keberagaman bahasa di Indonesia menjadi salah satu titik masuk untuk mengganggu stabilitas dan keutuhan negara bangsa Indonesia. Beberapa permasalahan dasar yang dihadapi bangsa ini terkait dengan masalah keindonesiaan dalam hubungannya dengan masalah kebahasaan menyangkut:

- a. kondisi keberagaman bahasa dalam konteks keindonesiaan (kebangsaan),
- b. bahasa sebagai identitas kebangsaan, dan
- c. globalisasi dalam hubungannya dengan masalah pertahanan dan keamanan.

Terkait butir (a), kondisi keberagaman bahasa lokal dalam hubungannya dengan masalah kebangsaan dimaksudkan bahwa keberagaman bahasa yang dituturkan oleh suku-suku bangsa pengisi keindonesiaan tidak jarang digunakan sebagai alat untuk membedakan diri satu sama lain yang pada akhirnya berdampak pada

disintegrasikan sosial yang menuju disintegrasikan bangsa. Konflik sosial yang terjadi secara intens di era reformasi, pembentukan daerah otonom baru yang memanfaatkan bahasa sebagai salah satu identitas pembeda, munculnya gerakan separatisme yang bertujuan pada pembentukan negara baru dengan memanfaatkan perbedaan kelompok penutur bahasa-bahasa lokal untuk menjustifikasi dan memperkuat keberadaannya, memberikan gambaran bahwa persoalan keberagaman bahasa menjadi salah satu faktor yang turut berperan. Ada dua hal yang menurut pengamatan saat ini terkait masalah kondisi kebahasaan dalam hubungannya dengan semangat kebangsaan, yaitu (a) penguatan identitas keindonesiaan ke dalam negara dan (b) pemantapan identitas keindonesiaan di luar negara melalui diplomasi kebahasaan.

Terkait butir (a) adalah gangguan bagi percepatan terlaksananya konsolidasi internal dalam memperkuat semangat kebangsaan setiap warga negara. Gangguan ini muncul sebagai akibat berkembangnya paham kemelanesiaan di wilayah timur Indonesia. Paham ini meyakinkan warga negara Indonesia di kawasan itu tentang ketidaksamaan kelompok (bahasa dan ras) dengan warga negara Indonesia di kawasan Indonesia lainnya. Dari segi kebahasaan, paham ini memanfaatkan keberbedaan bahasa untuk mengidentifikasi diri sebagai penutur bahasa Non Austronesia yang berbeda kelompok bahasanya dengan kelompok warga negara di belahan Indonesia lainnya, yang bertutur menggunakan bahasa kelompok Austronesia. Dari segi ras mereka mengidentifikasi diri sebagai ras kulit hitam yang sesuai dengan nama Melanesia yang berasal dari bahasa Yunani Kuno: *melan* 'hitam' dan *nesos* 'pulau' (pulau yang didiami orang berkulit hitam). Termasuk dalam kategori butir (a) di atas adalah era otonomi daerah yang ditandai oleh maraknya pembentukan daerah otonom baru dengan memanfaatkan kondisi kebahasaan.

Adapun yang terkait butir (b) adalah gangguan bagi upaya penguatan identitas keindonesiaan sebagai akibat dari suasana

kontestasi antara penguatan identitas keindonesiaan melalui diplomasi penguatan bahasa Indonesia di luar negara dengan diplomasi penguatan bahasa Melayu. Paham internasionalisasi bahasa Melayu sebagai paham sandingan dari internasionalisasi bahasa Indonesia diperkuat dengan paham budaya Melayu Mahawangsa, yaitu suatu paham yang menganggap bahwa negara bangsa: Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Filipina, dan Kamboja merupakan negara bangsa yang terhimpun dalam satu kesatuan budaya, yaitu budaya Melayu Raya (Melayu Mahawangsa). Paham Kemelayuan tidak hanya menciptakan kontestasi penguatan identitas keindonesiaan melalui diplomasi kebahasaan di luar negara, tetapi paham itu juga mengganggu percepatan konsolidasi kebangsaan secara internal, karena paham ini telah terinfiltrasi ke dalam pikiran warga negara di kawasan barat Indonesia, antara lain munculnya karya Ibrahim (2013) dan (Dahlan, 2014). Dengan kata lain, tuntutan internasionalisasi bahasa Melayu dengan paham Kebudayaan Melayu Mahawangsa tidak hanya diartikulasikan oleh pihak luar tetapi juga diartikulasikan oleh warga negara Indonesia sendiri. Ihwal paham Melanesia yang Non-Austronesia, internasionalisasi bahasa Melayu dengan konsep/paham kebudayaan Melayu Mahawangsa, dan keberagaman bahasa daerah dalam konteks otonomi daerah akan menjadi pembahasan tersendiri secara mendasar pada seksi-seksi berikut.

Persoalan lain terkait masalah kebahasaan dalam konteks keindonesiaan adalah persoalan globalisasi (butir c). Kemajuan Ipteks, khususnya kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi membawa dampak pada derasnya arus globalisasi yang melanda kehidupan negara bangsa. Kompleksitas masalah informasi, baik menyangkut jumlah dan kandungannya, yang didukung kecepatan pergerakan yang semakin meningkat pesat sebagai akibat dari kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi tersebut telah menempatkan masalah informasi menjadi masalah

sentral dalam menjaga kelangsungan hidup negara bangsa. Dalam konteks itu, informasi menjadi pendukung, penggerak, dan pemungkin berbagai aspek hubungan antarbangsa dan antarnegara melakukan upaya-upaya: mengetahui, memahami, menganalisis kondisi dan situasi suatu bangsa dan negara untuk saling mengenal dan menjadi bersahabat sampai pada pembangunan dan penciptaan persepsi terhadap suatu bangsa dan negara. Bahkan lebih dari itu, sampai pada penghancuran kredibilitas suatu negara dan bangsa melalui perang informasi (perang generasi keempat). Kasus sadapan yang dilakukan Australia terhadap percakapan pejabat negara baru-baru ini yang merusak hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia, Jerman, dengan Amerika, merupakan contoh bagaimana peran informasi dalam menjamin pertahanan dan keamanan suatu negara. Dalam hubungan dengan itu pula, oleh karena informasi disampaikan melalui medium utama bahasa, bahasa di sini memainkan peran yang sangat penting.

Kompleksitas masalah kebahasaan dalam hubungannya dengan pertahanan dan keamanan negara menuntut keberadaan institusi yang menangani masalah kebahasaan yang sigap dan lengkap. Sejauh ini, institusi kebahasaan yang ada, dalam hal ini Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan tiga unit teknisnya, yaitu Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa; Pusat Pembinaan; dan Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan memiliki beban tugas dan fungsi yang sangat besar dalam mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan resmi negara. Besarnya tanggung jawab itu tidak hanya menyangkut perlunya percepatan dalam pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa nasional dan resmi negara menjadi bahasa modern yang dijadikan jati diri bangsa, tetapi juga menyangkut luasnya wilayah NKRI dengan rentang kendali antarwilayah yang relatif jauh serta diversitas kompetensi berbahasa warga negara yang sangat beragam. Oleh karena itu, persoalan internasionalisasi bahasa

Indonesia dalam rangka memperkuat keberadaan Indonesia di percaturan dunia (sebagai wujud diplomasi halus/*soft diplomacy*) dan hubungan bahasa dengan masalah pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan dalam rangka pertahanan dan keamanan negara haruslah ditangani secara serius. Untuk itu, diperlukan kemandirian lembaga ini sebagai suatu lembaga yang langsung di bawah presiden sebagaimana lembaga yang berupa badan, seperti BNPT, BNPB dan lain-lain. Keberadaannya langsung di bawah presiden, tidak di bawah kementerian tertentu seperti sekarang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menjadi sangat rasional mengingat masalah bahasa tidak hanya menyangkut satu kementerian tetapi juga seluruh bangsa Indonesia.

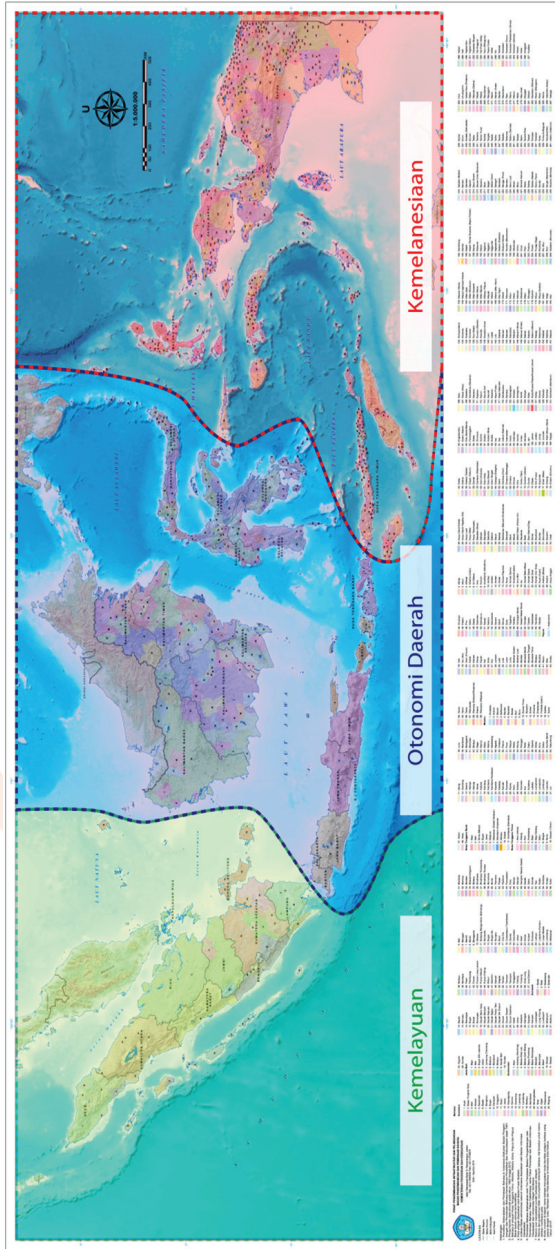
4.1 Segmentasi Wilayah NKRI Berdasarkan Aspek Kebahasaan

Konsep segmentasi kewilayahan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu dari sudut murni kebahasaan dan dari sudut politik kebahasaan. Dari sudut murni kebahasaan, segmentasi kewilayahan maksudnya sebagai segmentasi wilayah tutur termasuk penuturnya ke dalam wilayah pakai bahasa, kelompok bahasa baik berupa keluarga bahasa (*family*), rumpun bahasa (*stock*), maupun filum bahasa (*microfillum*, *messofillum*, *macrofillum*) berdasarkan parameter kebahasaan. Parameter kebahasaan dapat secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif dilakukan penghitungan terhadap tingkat keberbedaan antarbahasa, seperti menggunakan dilektometri atau menghitung tingkat kesamaan unsur kebahasaan, seperti menggunakan leksikostatistik. Adapun parameter kualitatif yaitu penggunaan ciri-ciri kesamaan linguistik, baik berupa retensi maupun inovasi bersama (Mahsun, 2010). Sebagai contoh segmentasi kewilayahan dari sudut pandang murni kebahasaan dapat ditunjukkan, misalnya pilahan bahasa-bahasa di Indonesia atas subrumpun Austronesia Barat dan Austronesia Timur yang dilakukan Brandess (1884).

Adapun konsep segmentasi dari sudut pandang politik kebahasaan adalah segmentasi wilayah tutur termasuk penutur bahasa berdasarkan aspek politis dengan memanfaatkan potensi bahasa dominan yang bertujuan untuk mengikat keseluruhan komunitas dalam wilayah politik kebahasaan itu sebagai satu kesatuan identitas. Istilah bahasa dominan di sini dimaknai sebagai bahasa yang jumlah penuturnya besar, berstatus sosial tinggi dan sebaran geografisnya luas. Dalam konteks ini, segmentasi ditujukan untuk membangun identitas baru antarberbagai penutur bahasa yang berbeda, baik penutur bahasa dominan maupun penutur bahasa-bahasa kecil. Boleh jadi, ikatan itu memanfaatkan ciri-ciri dominan kebahasaan yang terdapat dalam satu wilayah yang dicoba untuk menumbuhkan/membangkitkan solidaritas bersama. Dalam segmentasi kewilayahan berdasarkan politik kebahasaan, pilahan wilayah dilandaskan pada isu-isu politik dengan memanfaatkan bahasa sebagai identitas pengikatnya. Segmentasi kewilayahan berdasarkan sudut pandang politik bahasa dapat ditunjukkan dalam peta di samping.

Peta 1 menggambarkan wilayah NKRI tersegmentasi ke dalam tiga isu kebahasaan yang berdimensi politis, yaitu segmentasi atas dasar isu kemelayuan, isu keberagaman bahasa dalam konteks otonomi daerah, dan isu kemelanesiaan. Segmentasi atas isu kemelayuan terjadi di wilayah barat seluruh Kepulauan Sumatra, isu otonomi daerah mencakupi wilayah Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan NTB; sedangkan isu kemelanesiaan mencakupi wilayah Papua, Papua Barat, Halmahera, Maluku, dan NTT. Patut ditambahkan bahwa konsep segmentasi isu otonomi daerah sebenarnya cukup longgar, karena dapat saja isu itu muncul di wilayah pilahan atas kedua isu lainnya, tergantung target politis antara yang ingin dicapai dengan memanfaatkan kondisi keberagaman bahasa. Itu sebabnya penanganan masalah kebahasaan dengan tiga isu kewilayahan tersebut tidak cukup didekati secara linguistis semata, tetapi lebih dari itu haruslah

Peta 1. Segmentasi Wilayah NKRI Berdasarkan Isu Kebahasaan



didekati secara strategis sosiopolitis. Artinya, persoalan kebahasaan dan juga kesastraan di Indonesia, selain didekati secara linguistis, perlu juga didekati secara nonlinguistis. Kajian-kajian yang bersifat strategis dalam rangka memanfaatkan potensi bahasa dan sastra sebagai bentuk diplomasi dalam rangka pertahanan dan keamanan negara perlu digalakkan. Sebagai contoh, dalam rangka pertahanan dan keamanan negara Amerika Serikat, agen rahasia di setiap negara bagian diminta untuk mengidentifikasi bahasa-bahasa yang perlu dipelajari dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan, baik yang menyangkut: pertanian, ketenagakerjaan, komersial, pertahanan, layanan kemanusiaan dan kesehatan, transportasi, perkotaan dan perumahan, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat kembali seksi 2.1.

Segmentasi kewilayahan yang akan menjadi pokok bahasan utama dalam buku ini lebih difokuskan pada segmentasi kewilayahan berdasarkan politik kebahasaan dengan tetap memadankannya dengan segmentasi kewilayahan berdasarkan pendekatan murni kebahasaan (linguistik). Hal ini didasarkan paling tidak atas dua hal, yaitu (a) persoalan ini menyangkut eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan (b) persoalan ini belum pernah disentuh untuk dibicarakan dalam konteks kehidupan negara bangsa. Kebanyakan pembicaraan tentang bahasa lebih ditujukan pada pembicaraan dalam konteks pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa itu sendiri, bukan dalam konteks bahasa sebagai identitas dan fondasi dalam membangun nasionalisme negara bangsa. Secara terinci ketiga segmentasi kewilayahan yang dipaparkan pada peta di atas masing-masing diuraikan secara mendalam pada seksi pembahasan tersendiri. Selain itu, pembicaraan yang akan menyertai analisis bahasa dan identitas keindonesian tersebut adalah ihwal bahasa asing dan degradasi peran bahasa negara. Hal ini akan dibicarakan dalam seksi tersendiri setelah tiga isu di atas dipaparkan. Mengapa hal ini penting, karena intensitas penguatan bahasa asing utama turut

memberi kontribusi bagi perlambatan konsolidasi penguatan identitas keindonesiaan melalui bahasa.

4.1.1 Kemelayuan dalam Konteks Keindonesiaan

Ada dua isu utama yang menarik disimak dalam hubungan dengan konsep kemelayuan, yaitu isu internasionalisasi bahasa Melayu dan isu kebudayaan Melayu Mahawangsa (Melayu Raya). Kedua konsep ini memiliki hubungan yang saling mengikat dan memperkuat satu sama lain. Untuk lebih sistematis dan lebih fokus pembahasannya akan disajikan berikut ini.

A. Menyoal Internasionalisasi Bahasa Melayu

Mengapa harus mempersoalkan gagasan atau paham tentang internasionalisasi bahasa Melayu? Gagasan ini menjadi dipersoalkan karena berkembang dalam pikiran anak bangsa Indonesia. Sementara di Indonesia sendiri, gagasan penginternasionalan itu justru diletakkan pada internasionalisasi bahasa Indonesia, sesuai dengan amanat UU Nomor 24 Tahun 2009. Bukanlah bahasa Melayu, karena bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa daerah yang keberadaannya dilindungi UUD 1945, sebagaimana bahasa daerah lainnya yang terdapat di Indonesia.

Dalam konteks keindonesiaan, ikhtiar peningkatan fungsi bahasa yang diamanatkan UU Nomor 24 Tahun 2009 adalah internasionalisasi bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Munculnya semangat menginternasionalkan bahasa Melayu, yang disuarakan antara lain pada seminar dalam rangka Perhelatan Tamadun Melayu (28 September 2013) yang dibuka Wapres 27 September 2013, menggambarkan bahwa pola berpikir yang menyamakan antara bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia, seperti yang disosialisasikan dalam buku *Tanah Air Bahasa Indonesia*, karangan seorang pakar Budaya Melayu: Abdul Kadir Ibrahim (2013: 23) cukup efektif untuk mencuci otak sebagian anak bangsa Indonesia.

Gagasan tentang internasionalisasi bahasa Melayu sudah cukup lama berkembang di negara jiran Malaysia dengan organisasi yang dibentuknya tanggal 20 Agustus 2000, di Kuala Lumpur, yang diberi nama Majelis Antarbangsa Bahasa Melayu (MABM), yang waktu itu diikhtiarkan sebagai bentuk perjuangan lanjutan dari perjuangan yang dilakukan melalui Majelis Bahasa Brunei Darussalam, Indonesia, dan Malaysia (MABBIM). Beberapa tahun sejak diresmikan, MABM sempat tidak aktif dan dicoba aktifkan kembali melalui Konferensi ke-6 tanggal 15-16 Oktober 2014 di Kuala Lumpur. Melalui MABM mereka menggerakkan upaya internasionalisasi bahasa Melayu, yang salah satunya, melalui pembentuk *Chair of Malay Studies*, seperti di Ohio State, Leiden, Selandia Baru, Australia, Cina/Beijing dengan mengirimkan guru besar bahasa dan sastra Melayu untuk mengisi posisi tersebut.

Memang ikhtiar menyatukan langkah antara Indonesia di satu pihak dengan Malaysia dan Brunei Darussalam di pihak lain, dalam meningkatkan fungsi bahasa nasional masing-masing pihak tidak mungkin akan terwujud, karena di samping dari segi nama bahasa nasional kedua pihak berbeda, juga dari segi substansi kebahasaannya berbeda. Nama bahasa Indonesia, menyangkut identitas negara bangsa Indonesia. Adapun dari segi substansi tidak hanya menyangkut asal dialek bahasa Melayu yang menjadi bahasa Indonesia dan bahasa kebangsaan Malaysia, tetapi juga menyangkut kekayaan kosakata, perbedaan dalam pemaknaan kata yang sama, juga berbeda pada sistem penyerapan dalam rangka pemer kaya daya ungkap. Dengan demikian, perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu yang menjadi bahasa kebangsaan Malaysia cukup kompleks meskipun berasal dari asal yang sama. Kasus kesatuasalan bahasa yang muncul menjadi bahasa yang berbeda memang sudah menjadi sunatullah, karena sesungguhnya semua bahasa di dunia ini memiliki asal bahasa yang satu yaitu bahasa Sang Pencipta yang diajarkan pertama

kalinya kepada manusia pertama yang diciptakan-Nya. Tumbuh dan berkembang menjadi beribu-ribu bahasa di dunia karena proses alamiah yang kompleks yang melibatkan faktor sosial, politik, kebudayaan, ekonomi, bahkan sampai persoalan psikologis dan religius.

B. Standardisasi Bahasa Indonesia-Melayu Menuju Internasionalisasi Bahasa

Gagasan standardisasi bahasa Indonesia-Melayu semakin gencar disuarakan, terutama menjelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean pada penghujung tahun 2015. Gagasan itu disampaikan secara eksplisit oleh Duta Besar Malaysia untuk Indonesia selepas bertemu dengan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla dan kemudian dijadikan salah satu rumusan dari keputusan Kongres Bahasa Melayu yang berlangsung di Kota Batam, tanggal 14-15 Juni 2015. Munculnya gagasan tersebut bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan telah melalui perjalanan panjang dengan diawali berbagai pertemuan baik bersifat akademik maupun formal antarpemimpin negara untuk mendorong bahasa Indonesia-Melayu menjadi bahasa internasional. Sebut saja beberapa pertemuan penting, di antaranya Perhelatan Tamadun Melayu pada bulan September 2013 yang dibuka Wapres Boediono di Kepulauan Riau, Pertemuan antara pimpinan DPD RI dengan Senat Malaysia pada tanggal 23 Februari 2015, pertemuan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia dengan Wapres Jusuf Kalla pada bulan Maret 2015, sampai pertemuan akademik di bawah payung Kongres Bahasa Melayu yang berlangsung di Kota Batam, tanggal 14-15 Juni 2015 tersebut.

Seberapa penting bahasa standar bagi keperluan internasionalisasi bahasa itu? Jawabannya tentu sangat penting, karena proses internasionalisasi bahasa dilakukan melalui pembelajaran bahasa, yang di dalamnya menuntut keberadaan bahasa standar untuk mengukur capaian hasil belajar. Lalu persoalannya, apa

urgensinya bagi Indonesia, bukankah sudah memiliki bahasa standar/baku bahasa Indonesia (BI)? Dengan kata lain, perlukah bagi bangsa Indonesia merumuskan bahasa standar baru dengan mempertimbangkan bahasa Melayu (BM) yang digunakan sebagai bahasa kebangsaan di Malaysia? Sebelum menjawab persoalan ini, ada baiknya dijelaskan cakupan kebahasaan yang perlu distandarkan.

Standardisasi bahasa mencakup dua hal, yaitu standardisasi bahasa itu sendiri, dalam hal ini nama bahasanya, dan standardisasi aspek kebahasaannya yang mencakup: pelafalan/ejaan, tata bahasa, dan kosakata/istilah. Untuk BI, standardisasi nama bahasa telah berlangsung seiring dengan dialektika pergulatan penetapan identitas nasional Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada Kongres Pemuda I pada tahun 1926, Muhammad Yamin mengusulkan butir ketiga Sumpah Pemuda berbunyi: “Kami Poetra dan Poetri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Melayu”. Pandangan M. Yamin itu dikritisi oleh M. Thabrani dan didukung Sanusi Pane, yang menyatakan bahwa, jika pada butir pertama dan kedua Sumpah Pemuda itu berisi ikrar membentuk “Tanah Air Indonesia” dan “Bangsa Indonesia”, maka mengapa pada butir ketiga tidak berbunyi “menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia”. Jika bahasa itu belum ada, harus dilahirkan dan diberi nama bahasa Indonesia. Pandangan Thabrani ini lalu disepakati pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928, sehingga lahirlah butir-butir Sumpah Pemuda yang kita kenal sekarang ini. Artinya, dari penggalan sejarah itu, pemberian nama bahasa persatuan Indonesia dengan nama bahasa Indonesia sudah selesai, final, dan mengikat, serta tidak perlu standardisasi nama bahasa baru.

Standardisasi pada aspek kedua jauh lebih rumit karena mencakup banyak aspek substantif yang kompleks dan sulit direalisasikan karena masyarakat penuturnya sudah menerima secara intuitif dan menjadi bagian dari kegiatan berbahasa

sehari-hari. Dalam standardisasi pelafalan misalnya, tidak serumit standardisasi kosakata, karena hanya terkait penyamaan pelafalan kata-kata yang berstruktur a-a (seperti *apa*, *mata*) dan a-e (seperti *ape*, *mate*). Maukah negara serumpun yang memperjuangkan BM itu menerima lafal standar berstruktur a-a bukan berstruktur a-e? Sebagaimana lafal standarnya dalam BI baku. Adapun standardisasi pada aspek kosakata melibatkan banyak hal, yaitu penyamaan terhadap kelompok kata-kata yang sama bentuknya tetapi berbeda maknanya yang jumlahnya relatif besar. Misalnya, kata *jemput* (yang dalam BM sepadan dengan kata *mengundang* dalam BI), *tandas* (dalam BM bermakna toilet dan dalam BI bermakna memberi penekanan, seperti pada bentuk *menandaskan*). Masalah lain terkait tata cara penyerapan yang berasal dari satu sumber tetapi berbeda kaidah penyerapannya, misalnya: /-t(s)ion/ atau /-ty/, masing-masing menjadi BI /-si/ dan /-tas/, misalnya: *generation* > generasi, *television* > televisi, *activity* > aktivitas dan lain-lain. Sementara itu, dalam BM menjadi *jenerasyon*, *televisyen*, *ekstiviti* dan lain-lain. Belum lagi masalah yang menyangkut kaidah tata bahasa, terutama terkait kolokasi imbuhan yang sama tetapi berbeda kata dasar yang dapat dilekatinya.

Sebenarnya, kerja sama dalam standardisasi kebahasaan antara Indonesia-Malaysia sudah lama dimulai, yaitu tahun 1959, khususnya untuk penyamaan ejaan (Ejaan Malindo: Malaysia-Indonesia). Oleh karena persoalan politik antarkedua negara, kerja sama itu sempat terhenti dan baru dilanjutkan kembali tahun 1967. Ketika Brunei Darussalam merdeka, negara ini pun ikut bergabung dalam kerja sama kebahasaan, yang sekarang dikenal dengan nama Majelis Bahasa Brunei Darussalam, Indonesia, dan Malaysia (MABBIM). Namun, perjalanan yang cukup panjang dalam kerja sama tersebut (sekarang sudah berjalan 54 tahun) menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan. Hal itu ditunjukkan, misalnya hasil sidang pakar MABBIM

yang seharusnya diperoleh kata/istilah yang sama untuk ketiga negara, tetapi hal itu tidak terjadi, karena memang sulit untuk mempersatukan dua bahasa yang memiliki sistem yang berbeda, seperti perbedaan dalam kaidah penyerapan di atas. Artinya, upaya bersama untuk standarisasi bahasa merupakan pekerjaan yang sia-sia karena harus menata ulang kaidah-kaidah kebahasaan dan penerapannya terhadap kata/istilah yang sudah berterima dalam masyarakat negara masing-masing.

Dalam rangka internasionalisasi BI, standarisasi dalam bentuk kerja sama itu tidak diperlukan lagi, karena standarisasi BI sudah dimulai sejak 1972 dengan standarisasi ejaan, yang diikuti standarisasi aspek ketatabahasaan, kata, dan istilah. Apa lagi secara nyata, saat ini pusat-pusat pembelajaran BI di luar negeri tumbuh sangat menggembirakan. Sampai tahun 2015 terdaftar 174 pusat pembelajaran BI yang tersebar di 45 negara, baik di perguruan tinggi, lembaga kursus, sekolah-sekolah, maupun di KBRI/KJRI. Sebut saja misalnya, di Jepang terdapat 38 tempat pembelajaran BI; di Australia 36 lembaga; di Jerman 17 lembaga; di Amerika 12 lembaga; di Italia 7 lembaga; Belanda 6 lembaga. Masalahnya sekarang bagaimana merawat lembaga-lembaga penyelenggara pembelajaran BI itu dengan memfasilitasi melalui penyediaan bahan pembelajaran, penyediaan tenaga pengajar dan fasilitasi lainnya. Tentu, yang patut diingat bahwa penguatan bahasa BI di luar negeri jangan sampai melupakan penguatan BI di dalam negeri.

Bagaimanapun juga bahasa Indonesia adalah wajah Indonesia yang harus ditampakkan baik di dalam maupun di luar negeri, karena BI bukan hanya sekadar sarana komunikasi yang mempersatukan berbagai suku bangsa yang berbeda latar belakang bahasa dan budaya di Indonesia, tetapi jauh dari itu BI adalah identitas dan jati diri keindonesiaan bangsa Indonesia. Kita harus belajar dari 27 negara yang tergabung dalam Masyarakat Uni-Eropa yang masing-masing negara memperjuangkan

identitas diri yang berupa bahasa nasionalnya menjadi bahasa pengantar kerja sama Uni-Eropa. Oleh karena itu, jika ada ikhtiar untuk melakukan standarisasi bahasa Indonesia dan bahasa Melayu untuk dijadikan sebuah bahasa pergaulan dunia, seperti yang dikemukakan Duta Besar Kerajaan Malaysia (Tempo.com, 23 Maret 2015) dimulai dari kawasan ASEAN, maka tantangan terberat terjadi pada upaya menstandarkan kosakata yang sama tetapi berbeda makna, seperti kata *jemput* dan *tandas* di atas. Kata-kata yang sudah disepakati maknanya dalam pemakaian sehari-hari masyarakat akan sulit dan tidak dapat dipaksakan untuk diubah. Kalau terjadi hanya pada dua kata tersebut, tentu tidak akan mendapat hambatan yang sangat berarti. Namun, bagaimana jika perbedaan itu terjadi pada beratus-ratus bahkan beribu-ribu kata? Suatu hal yang paling prinsip adalah standar penamaan bahasa. Bagi bangsa Indonesia, nama bahasanya sudah final, karena itu menyangkut identitas dan jati diri kebangsaan Indonesia. Persoalannya, maukah negara-negara yang menjadikan dan menamakan bahasa nasionalnya dengan nama bahasa Melayu, distandarkan menjadi bernama bahasa Indonesia? Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terdapat bahasa Indonesia di Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura dan seterusnya, sebagaimana kita dapat mengatakan bahwa terdapat bahasa Inggris selain di Kerajaan Inggris yang digunakan sebagai bahasa negara Amerika, Australia dan negara lain yang berbahasa Inggris. Apabila tidak terdapat kesepakatan dalam standarisasi sebuah nama yang diterima bersama oleh negara-negara itu, ungkapan “Jangan ada dusta di antara kita” sulit untuk dihindari.

Untuk memperjuangkan bahasa negara menjadi bahasa pergaulan nasional tidak mengharuskan dua bahasa yang meskipun seasal tetapi telah mengalami metamorfosis secara politis dan linguistis berbeda lalu dipaksakan untuk disatukan. Sebagai contoh, bahasa Mandarin diperjuangkan oleh negaranya menjadi bahasa pergaulan internasional tidak harus menggandeng bahasa

Jepang, meskipun kedua bahasa ini memiliki kesamaan sejarah dan sistem tata tulis yang dianutnya. Kemajuan Ipteks negara itu, yang berdampak pada kemajuan sosial budaya, ekonomi, dan politik, akan dapat memperlancar bahasa itu diterima oleh negara lain. Munculnya 176 Pusat Pembelajaran Bahasa Indonesia yang tersebar di 45 negara membuktikan bahasa Indonesia lambat laun akan menjadi bahasa yang diterima oleh negara lain di dunia sebagai bahasa pergaulan internasional. Namun, yang patut dicatat ialah akselerasi dari upaya menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa pergaulan dunia sangat ditentukan oleh ikhtiar bersama yang diawali oleh sikap positif anak bangsa ini terhadap bahasa negaranya.

C. Langkah Mundur Menyamakan BI dengan BM

Indonesia, seperti halnya India, Pakistan, Cina, dan Israel dan beberapa negara lainnya, merupakan negara bangsa yang membangun nasionalismenya di atas fondasi bahasa, bukan di atas fondasi agama, seperti Republik Islam Iran, atau fondasi ras/suku bangsa seperti negara Afrika Selatan. Hanya bedanya, jika India dan Pakistan membuat bahasa yang sama menjadi berbeda demi identitas negara bangsa yang berbeda. Kemudian Cina, demi identitas sebagai negara bangsa menyamakan bahasa-bahasa yang berbeda dalam wilayahnya. Adapun Israel, menghidupkan bahasa yang sudah punah demi identitasnya berbeda dengan identitas negara-negara yang berbahasa Arab, seperti Arab Saudi, Palestina dan lain-lain; berbeda dengan negara yang menggunakan bahasa Parsi, seperti Republik Islam Iran.

Apa yang dilakukan Israel relatif sama dengan yang dilakukan Indonesia. Indonesia memaksa secara politis bahasa yang tidak pernah “mengandung” untuk melahirkan bahasa baru yang diberi nama bahasa Indonesia. Antara bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu memiliki perbedaan yang mendasar baik menyangkut aspek fonologis, leksikal, maupun gramatikal. Bahwa bahasa

Indonesia berasal dari bahasa Melayu merupakan fakta sejarah yang tidak mungkin diingkari. Namun, antara asal dengan turunannya bukanlah satu entitas yang sama, sebagaimana seorang anak tentu tidak merupakan individu yang sama dengan kedua orang tuanya. Nama Indonesia untuk bahasa Indonesia merupakan hasil pergulatan pemikiran para pemuda pergerakan kemerdekaan Indonesia yang berlangsung secara dialektikal dari tahun 1926 sampai tahun 1928. Oleh karena itu, apabila ada anak-anak bangsa Indonesia yang berpikir untuk menjadikan bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia, sebagai bahasa internasional, maka pikiran itu merupakan langkah mundur. Upaya tersebut merupakan pembalikan arah perputaran jarum jam sejarah pembentukan nasionalisme keindonesiaan.

Pandangan bahwa bahasa Indonesia merupakan nama baru dari bahasa Melayu sebenarnya merupakan titik masuk untuk membangun solidaritas kawasan, terutama solidaritas dari Indonesia, untuk memberikan dukungan pada keberadaan bahasa Melayu yang menjadi bahasa kebangsaan negara tetangga yang justru posisinya sekarang memprihatinkan. Namun, sejauh mana konsep itu berterima dari sudut pandang keindonesiaan kita sebagai negara bangsa yang majemuk dibahas berikut ini.

D. Melayu Mahawangsa Kurang Realistis bagi Indonesia

Konsep Melayu Mahawangsa (Melayu Raya) merupakan konsep yang terkait dengan geokultural, yaitu konsep yang memandang kebudayaan negara-negara serumpun: Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Laos, Vietnam, dan Filipina merupakan satu kesatuan budaya, yaitu budaya Melayu Mahawangsa (Melayu Raya). Dalam konteks negara bangsa, konsep ini merupakan konsep yang mengabaikan keberadaan wilayah-wilayah yang termasuk di dalamnya sebagai negara bangsa yang berdiri sendiri dengan kekhasan budayanya. Dengan kata lain, bagi Indonesia, konsep itu bertentangan dengan konsep

kebudayaan nasional Indonesia yang tidak hanya dibangun di atas kebudayaan Melayu semata. Kebudayaan Indonesia merupakan akumulasi atau puncak-puncak dari beragam budaya lokal, seperti kebudayaan Jawa, Sunda, Madura, Batak, Minang, Bugis, Toraja, Papua, termasuk juga kebudayaan Melayu itu sendiri, dan seterusnya. Pendeknya, kebudayaan Indonesia merupakan puncak-puncak dari tidak kurang 659 kebudayaan lokal (berdasarkan jumlah bahasa lokal yang diidentifikasi sampai 2014). Konsep itu juga akan mengaburkan batas-batas serta keunikan budaya negara-negara yang diklaim dalam satu mata rantai budaya Melayu Mahawangsa tersebut. Konsekuensi lebih lanjut dapat mengaburkan pemilikan budaya asli antarnegara. Dengan kata lain, konsep itu dapat menjadi bentuk argumentasi pengaburan kepemilikan budaya suatu negara tatkala negara tetangganya mengakui budaya tertentu negara lain sebagai miliknya. Tidak akan ada lagi ruang untuk klaim kebudayaan milik salah satu dari negara-negara yang berada pada rantai konsep Melayu Mahawangsa itu, karena sudah “dipagari” bahwa semuanya merupakan satu kesatuan budaya, yang dalam hal itu budaya Melayu Mahawangsa.

Selain itu, konsep kebudayaan Melayu Mahawangsa dapat digunakan sebagai langkah diplomatis bagi upaya memuluskan jalan bagi keberterimaan bahasa Melayu sebagai nama bahasa yang akan diusung bersama menjadi bahasa pergaulan internasional oleh negara-negara yang nama bahasanya berbeda tetapi dipandang serumpun, terutama Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, nama bahasa Indonesia sudah final karena dari nama itu mencerminkan identitas keindonesiaan.

E. Letak Bahasa dan Budaya Melayu dalam Konteks Keindonesiaan

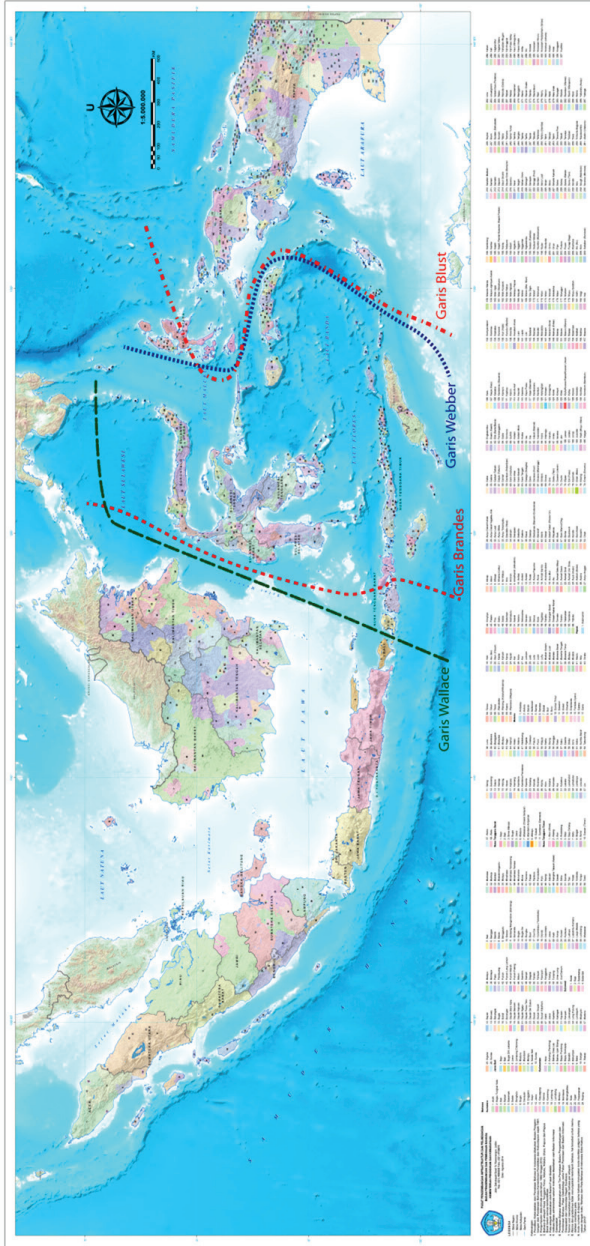
Pernyataan dalam UUD 1945 Pasal 36 dan penjelasannya jelas-jelas menyiratkan makna bahwa ketika Indonesia merdeka, semua bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa asing, merupakan bahasa daerah termasuk bahasa Melayu. Dalam konteks ini pula, kebudayaan Melayu yang salah satu unsurnya berupa bahasa Melayu, juga dikategorikan sebagai kebudayaan daerah dan secara bersama-sama dengan kebudayaan daerah lainnya menjadi unsur pembentuk dan pemer kaya kebudayaan Indonesia. Persoalan lain, lalu bagaimana dengan pelaksanaan Kongres Bahasa Melayu yang diselenggarakan tanggal 15-16 Juni 2015 yang merekomendasikan salah satunya masalah internasionalisasi bahasa Melayu? Kongres bahasa Melayu, mestinya didudukkan sebagaimana kongres bahasa Jawa, Kongres bahasa Sunda, Kongres bahasa-bahasa di Sulawesi Selatan dan lain-lain. yang pernah diselenggarakan oleh pemerintah daerah setempat. Dalam konteks keindonesiaan, Kongres bahasa Melayu dapat menjadi ajang bertukar pikiran untuk merumuskan langkah-langkah strategis bagi pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa daerah di Indonesia.

4.1.2 Kemelanesiaan dalam Konteks Keindonesiaan

Sebagai negara bangsa yang semangat nasionalismenya dibangun di atas fondasi bahasa, bukan atas dasar fondasi ras/suku bangsa atau agama, tidak jarang terjadi upaya yang memanfaatkan keberagaman bahasa sebagai bukti untuk membedakan diri satu sama lain. Bukan suatu kebetulan jika di wilayah yang diidentifikasi sebagai wilayah yang berbahasa non-Austronesia seperti di Papua (Kelompok Filum Trans Nugini), di Maluku (filum Papua Barat) terdapat kelompok separatis yang mencoba membangun identitas baru dan mendeklarasikan pembentukan

negara baru, yaitu RMS di Maluku dan OPM di Irian Barat (Papua). Padahal, jauh sebelum itu, pada tahun 1884, Brandes, seorang sarjana Belanda mengelompokkan semua bahasa di Indonesia ke dalam satu rumpun besar, yang disebutnya dengan rumpun Austronesia (Melayu Polinesia). Pendapat Brandes yang dipertahankan sebagai karya akademik untuk memperoleh derajat doktor tersebut diperkuat kembali oleh Blust (1978, 1982, 1984, 1993 dan 1996). Hanya saja, kedua pakar ini memiliki perbedaan dalam pengelompokan bahasa itu ke dalam subkelompoknya. Apabila Brandes membagi dua subkelompok Austronesia, yaitu Austronesia Barat dan Austronesia Timur, Blust memilah rumpun Austronesia itu ke dalam tiga subkelompok, yaitu Austronesia Barat, Tengah, Timur. Berbeda subkelompok, tetapi tetap dalam satu rumpun besar yang sama, yaitu sama-sama Austronesia (bandingkan Brandes, 1884 dengan Blust, 1978, 1982, 1984, 1993, dan 1996, serta Dyen, 1965 dan 1975). Patut ditambahkan bahwa pilahan Brandes, yang selanjutnya dikenal dengan garis Brandes, relatif sama dengan pilahan Wallace, dan dikenal dengan garis Wallace, yang dilakukan berdasarkan ciri-ciri flora dan fauna. Hanya bedanya, wilayah Brandes membelah Pulau Sumbawa (Sumbawa bagian barat dengan Sumbawa bagian timur), sedangkan Wallace membelah antara pulau Bali dengan Pulau Lombok. Adapun pilahan Blust relatif sama dengan pilahan Weber atas garis Wallace, seperti diperlihatkan pada peta berikut ini.

Peta 2. Peta Bahasa di Indonesia



Konsep Melanesia Raya mulai diperkenalkan dalam gerakan Melanesia Raya yang berlangsung di Manokwari 14 Desember 2010. Sebuah gerakan yang menuntut Papua merdeka dengan bendera Bintang Empat Belas. Gerakan ini diduga diinspirasi oleh pandangan yang berkembang dalam Konferensi Internasional tentang “Keberagaman Budaya Papua dalam Mozaik Kebudayaan Indonesia (*International Conference on Papuan Cultural Diversity in The Mosaic of Indonesian Cultural*)”, yang diselenggarakan pada tanggal 8-11 November 2010 di Jayapura. Menariknya, konferensi yang bertema kebudayaan Papua tersebut berubah menjadi kebudayaan Melanesia, karena semua subtema diarahkan pada budaya Melanesia.

Konferensi yang dihadiri tidak kurang dari 30 sarjana yang berasal dari berbagai negara, di antaranya Belanda, Jerman, Australia, Malaysia tersebut mencoba meredefinisikan identitas sebuah entitas kultural yang mereka sebut Melanesia. Kata yang berasal dari bahasa Yunani: *melan* ‘hitam’ dan *nesos* ‘pulau’ (pulau yang didiami oleh orang yang berkulit hitam). Dalam makalahnya yang berjudul: “Keragaman Budaya Papua dalam Konteks Tradisi dan Budaya Melanesia, Menuju Melanesianologi dan Papuanistik”, yang disajikan dalam Konferensi Internasional tersebut, Flassy dan Flassy (2010) menyatakan bahwa wilayah Papua sampai NTT merupakan wilayah budaya Melanesia dengan ciri-ciri budaya termasuk bahasa yang berbeda. Terdapat kecenderungan untuk menetapkan Melanesia sebagai sebuah komunitas wilayah berdasarkan ras dan budaya atau cara hidup tersendiri, seperti yang diungkapkan Narokobi (1980 dan 1984). Meskipun pandangan ini bertolak belakang dengan pandangan Nicholas dkk. (1989) yang menyatakan bahwa klasifikasi Melanesia atas komunitas tersendiri atas dasar ras kulit hitam kurang akurat karena mengabaikan luas wilayah, bahasa, sosial dan keanekaragaman genetika di wilayah tersebut. Pandangan ini sebenarnya sepadan dengan Pandangan Dyen (1962 dan 1965); Murdock (1964); dan Terrel (1981) yang

berdasarkan teori laju pertumbuhan leksikal menunjukkan bahwa di wilayah Melanesia terdapat keberagaman bahasa yang justru menuntun ke arah penetapan wilayah Melanesia sebagai asal persebaran Austronesia.

Dalam pandangan yang agak netral Flassy dan Flassy (2010) mencoba mengkomodasi pandangan Dyen tersebut dengan mencoba meredefinisi Austronesia atas Austronesia Indonesia (yang Melayu Polinesia) dengan Austronesia Melanesia. Dalam makalah yang disajikan pada konferensi tersebut Flassy dan Flassy mencoba memberi argumen dari tiga sudut, yaitu sudut Budaya dan falsafah Melanesia, sudut Melanesia sebagai universalia, dan sudut Melanesia sebagai hakikat. Melanesia dari sudut Budaya dan falsafah merupakan sebuah komunitas tersendiri dengan cara hidup tersendiri pula; Melanesia sebagai universalia dipandang bahwa Melanesia sebagaimana komunitas lainnya selalu berinteraksi dengan komunitas lain, sehingga identitasnya ada yang menyerupai identitas komunitas lainnya; dan yang menarik adalah Melanesia sebagai hakikat memandang bahwa, "...Melanesia merupakan satu kesatuan benua dengan Pulau New Guinea, yang tercabik-cabik atas Papua, New Guinea, West Nieuw Guinea yang sampai awal milinium ke-3 era 2000 adalah Papua New Guinea dan Provinsi Otonomi Khusus Papua-Indonesia. Flassy dan Flassy yakin kesatuan wilayah itu secara alami akan terpulihkan kembali, atau harus dipulihkan, atau akan disembuhkan secara tersendiri secara alami atau dipaksakan sebagaimana terjadi pada Timor Leste. Suatu kondisi yang masih terus diperjuangkan bagi Maluku, Papua Barat, Kanaki, bahkan Bougenville" (Flassy dan Flassy, 2010: 23).

Sebulan kemudian, tepatnya tanggal 14 Desember 2010, Kompas (15 Desember 2010) melaporkan munculnya gerakan Melanesia Raya, di Manokwari. Sebuah gerakan yang mendeklarasikan kemerdekaan bangsa Melanesia Raya pada tanggal 14 Desember 2010. Paham Melanesia terus disosialisasi,

melalui konsep kuliner Melanesia yang mencakupi Papua sampai NTT (Koran Tempo, 2 Mei 2014). Selanjutnya, Kompas (24 Maret 2014) memberitakan lima menteri luar negeri kelompok negara yang menamakan diri kelompok Melanesia bermaksud datang ke Papua untuk suatu tujuan yang oleh pemerintah Indonesia dicurigai memiliki motif politis. Bahkan baru-baru ini (Koran Tempo, 30 Mei 2015), tepatnya tanggal 29 Mei 2015, di Manokwari terjadi demonstrasi yang menuntut kemerdekaan negara Melanesia yang dilakukan Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Isu Melanesia, terus bergulir dan bahkan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan memfasilitasi Festival Melanesia yang akan dilangsungkan 26-30 Oktober 2015 berpusat di Kupang, NTT. Festival ini polanya sama dengan Perhelatan Tamadun Melayu di Tanjung Pinang 2013 lalu. Peristiwa di atas menggambarkan betapa sebuah identitas kebahasaan berperan dalam membangun semangat solidaritas kebangsaan sebuah komunitas. Pandangan Flassy dan Flassy di atas itulah, yang salah satunya, menginspirasi gerakan Melanesia Raya di Manokwari; yang kemudian berlanjut ke gerakan yang dilakukan Komite Nasional Papua Barat tanggal 29 Mei 2015, di Manokwari tersebut.

Persoalan bahasa memang merupakan persoalan yang sangat sensitif karena terdapat peran psikologis yang menjadi tempat bahasa bermain. Kasus konflik suku bangsa yang kulminasinya berujung pada eksodusnya sebagian besar minoritas Turki ketika pemerintah komunis Bulgaria tahun 1970 mencoba membangun kekuatan Bulgarisasi dengan mengambil nama Turki dan Muslim merupakan contoh persoalan bahasa ikut bermain dalam membina tatanan kehidupan yang harmoni. Kasus lain, misalnya Latvia yang sejak kemerdekaannya 1991, menghadapi persoalan yang berupa kebutuhannya untuk memperkenalkan kembali bahasa Latvia sebagai bahasa negara dan bahasa pengantar hubungan kemasyarakatan di samping memberi hak bahasa bagi minoritas yang lebih kecil, serta dengan tanpa mengurangi hak mereka yang

berbahasa Rusia; bahkan dalam bentuk yang ekstrim, bangsa Israel, ketika menemukan kembali tanah pijakan mereka dan memerdekakan diri sebagai sebuah negara bangsa, yang pertamanya mereka lakukan adalah menghidupkan bahasa Ibrani yang sudah mati demi sebuah identitas nasional mereka. Konflik antara Rusia dengan Ukraina yang berujung pada pencaplokan Krimea merupakan contoh lain dari faktor kesamaan bahasa turut bermain.

Pentingnya bahasa sebagai pembeda kelompok tergambar dari pengakuan tokoh Dewan Rakyat Papua, Nicolas Jouwe, dalam sebuah dialog pada Program “Nama dan Peristiwa”, TV-One, 18 Februari 2012, menyatakan bahwa orang-orang Papua sengaja dipengaruhi dengan menyebut mereka bukan orang Melayu Polinesia (Austronesia) tetapi mereka lebih dekat dengan bangsa Mikronesia, Polinesia, dan Melanesia.

A. Melanesia yang Non-Austronesia dan Kecelakaan Sejarah

Terdapat kecenderungan untuk mengidentifikasi bahasa-bahasa Melanesia merupakan kelompok non-Austronesia. Dalam buku yang berjudul *Bahasa-Bahasa di Indonesia (Languages of Indonesia)*”, yang diterbitkan dalam seri bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tahun 2006 oleh Summer Institute of Linguistics, cabang Indonesia, digambarkan bahwa di wilayah Indonesia terdapat 742 bahasa. Ketujuh ratus empat puluh dua bahasa itu, secara implisit, dikelompokkan paling tidak pada dua kelompok besar, yaitu kelompok Austronesia dan kelompok non-Austronesia. Untuk kelompok non-Austronesia di dalamnya terdapat kelompok bahasa yang berpusat di Nugini, yang oleh para ahli bahasa di kawasan itu disebut Filum Trans Nugini dan Papua Barat. Bahasa-bahasa tersebut banyak ditemukan di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat, sebagian di Maluku dan Maluku Utara, dan sebagian kecil di Nusa Tenggara (khususnya NTT). Dari 269 bahasa di wilayah Papua dan Papua Barat yang masih aktif dituturkan terdapat

53 bahasa yang disebut masuk dalam kelompok Austronesia, sisanya adalah masuk kelompok non-Austronesia (Trans Nugini dan Papua Barat); sedangkan di Maluku dan Maluku Utara, dari 129 bahasa yang masih aktif digunakan terdapat 17 bahasa yang diklasifikasikan sebagai kelompok bahasa-bahasa Papua Barat dan 1 bahasa yang diklasifikasikan sebagai bahasa Trans Nugini, sisanya termasuk kelompok Austronesia. Adapun di wilayah Nusa Tenggara Timur, dari 73 bahasa yang masih aktif dituturkan terdapat 16 buah bahasa yang diklasifikasikan sebagai kelas Trans Nugini, sisanya adalah bahasa Austronesia.

Adanya kelompok bahasa lain selain bahasa Austronesia di Indonesia oleh SIL bukanlah pandangan yang pertama kali, karena SIL sendiri mendasarkan pandangannya itu pada pandangan pakar-pakar sebelumnya, misalnya periksa Wurm (1978, 1982, dan 1983) atau Voorhoeve (1988 dan 1995). Penyebutan Trans Nugini dan Papua Barat, sebagai sebuah Filum tersendiri, dikontraskan dengan istilah Austronesia, yang oleh banyak pakar disebut kelompok bahasa yang dikategorikan sebagai rumpun. Dalam hierarki kesejarahan bahasa, konsep filum merupakan konsep yang perjalanannya waktunya lebih panjang dari konsep rumpun (*stock*). Artinya, apabila dibandingkan antara bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia dengan bahasa-bahasa di Papua (yang dikategorikan sebagai filum) relasi kesejarahan dan kekerabatannya sangat jauh. Tidak terdapat relasi historis yang dekat antara bahasa-bahasa yang dikategorikan sebagai filum tersendiri itu dengan bahasa-bahasa daerah lainnya di Indonesia yang masuk rumpun Austronesia. Dengan sendirinya pula relasi emosional antarkomunitas penuturnya tidaklah erat. Sebagai sebuah bangsa, tentu kedekatan emosional karena kesamaan sejarah dan kesamaan asal dapat menjadi modal psikologis yang amat besar bagi upaya konsolidasi kebangsaan negara bangsa.

Dalam pada itu, ketidakadaan relasi historis yang dekat antara bahasa-bahasa yang dikategorikan sebagai filum dengan bahasa-

bahasa daerah lainnya di Indonesia tersebut dapat menjadi titik krusial bagi upaya integrasi bangsa. Lebih-lebih, jika dihadapkan pada realita bahwa di wilayah yang ditengarai terdapat bahasa selain rumpun bahasa Austronesia tersebut ditemukan banyak gejala sosial yang mengarah pada disintegrasi bangsa, seperti gerakan OPM (Organisasi Papua Merdeka) dan gerakan RMS (Republik Maluku Selatan), yang sampai saat ini riak-riaknya masih terasa dalam denyut nadi kehidupan bangsa Indonesia.

Pandangan yang berupaya menjauhkan warga negara Indonesia yang terdapat di kawasan timur (Melanesia) dengan komunitas Indonesia lainnya yang menggunakan pendekatan sosiokultural psikologis di atas diduga sebagai upaya mengeliminir spirit penamaan Papua menjadi Irian (singkatan dari Ikut Republik Indonesia Anti Niderland) pemberian Presiden RI pertama. Bung Karno memberi nama tersebut dengan tujuan tertentu, salah satunya untuk mengikat secara emosional orang-orang di Papua terhadap saudara-saudaranya yang lain di Indonesia (tentu juga mengandung spirit menjauhkan secara emosional orang-orang Papua dengan penduduk di negara sebelah timur). Hal itu dapat dianalisis melalui spirit Bung Karno memberi nama Irian dengan pernyataan ketua Dewan Rakyat Papua: Nicolas Juwoe di atas. Oleh karena itu, adalah suatu kecelakaan sejarah ketika Pemerintah K.H. Abdurrahman Wahid mengganti nama Irian menjadi Papua. Kecelakaan sejarah tidak hanya berakhir sampai di situ, fasilitasi Direktorat Jenderal Kebudayaan untuk diselenggarakannya Festival Melanesia, yang wilayahnya meliputi Papua sampai NTT, persis wilayah yang diusulkan Flassy dan Flassy pada konferensi internasional di atas merupakan bentuk pengulangan kembali kecelakaan sejarah pada komunitas yang sama. Semoga kecelakaan sejarah seperti lepasnya Timor Timur tidak terulang pada masyarakat Papua. Dengan kata lain, mimpi Flassy dan Flassy dalam makalahnya itu, agar wilayah Melanesia terpulih kembali baik secara alami atau dipaksakan pulih seperti

Timor Timur tidak menjadi kecelakaan sejarah yang amat sangat fatal bagi bangsa Indonesia.

Selanjutnya, benarkah penutur yang tinggal di Kepulauan Melanesia itu berpenutur bahasa non Austronesia? Pandangan Dyen (1962 dan 1965) yang didukung oleh Murdock (1964) dan Terrel (1981) menyebutkan bahwa justru tanah asal bahasa Austronesia adalah di Kepulauan Melanesia, khususnya di Bismarck. Menurut Dyen, tingginya tingkat varian bahasa rumpun Austronesia di wilayah itu (dari 40 cabang utama **Austronesia**, terdapat 34 cabang di Melanesia) memberikan petunjuk bahwa di wilayah itulah nenek moyang berpenutur Austronesia berkembang pada tahap awal. Pandangan ini, tentu menampik kemungkinan bahwa orang-orang Melanesia berpenutur bahasa non Austronesia.

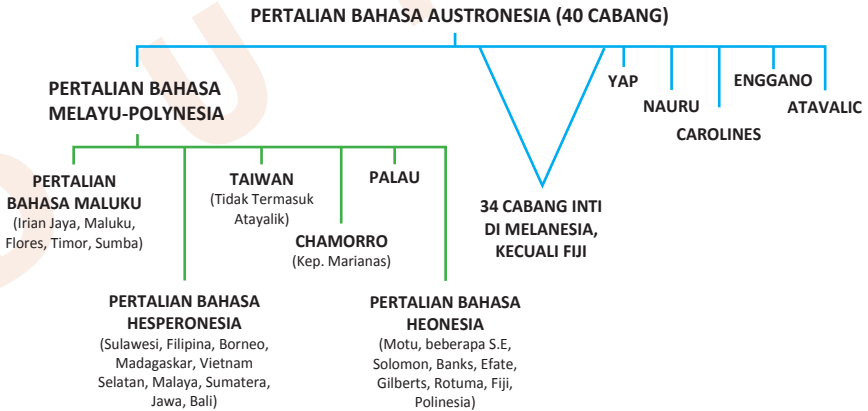
Austronesia
atau
Asutronesia?
yg mana yg
benar ya
pak?

Selain itu, Mahsun bersama Mulyanto telah melakukan penelitian yang bertujuan, salah satunya, membuktikan apakah bahasa-bahasa yang diklaim non Austronesia di Indonesia, yang terdapat dalam peta bahasa yang diterbitkan SIL (2006) benar adanya, dengan memadukan antara pendekatan linguistik dengan pendekatan genetika. Untuk itu, telah dilakukan analisis data linguistik dan data sera pada penutur bahasa Gresi dan Namblong (sebagai bahasa yang dikelompokkan non Austronesia) dan pembandingnya data dari penutur bahasa Tarfia dan Tobati (sebagai bahasa Austronesia). Hasilnya, baik dari segi linguistik maupun genetika, khususnya genetika virus hepatitis B, menunjukkan bahwa keempat penutur bahasa tersebut berasal dari penutur bahasa yang sama, yaitu penutur bahasa Austronesia. Selain dalam keempat bahasa itu masih memelihara unsur Austronesia Purba yang berupa penanda milik **nia* 'mempunyai, kepunyaan', juga dari segi genetis memiliki ciri genetika virus hepatitis B yang sama, yaitu hepatitis B, sub genotipe C6 (lebih lanjut dapat dibaca dalam Mahsun, 2010).

B. Tanah Asal Bahasa Austronesia: Melanesia, Indocina, atau Indonesia?

Dalam hal tanah asal bahasa purba Austronesia terdapat dua pandangan mendasar yang berbeda satu sama lain. Pandangan pertama dikemukakan Dyen (1962) dengan mendasarkan diri pada teori laju perkembangan leksikal dalam suatu bahasa. Menurut teori ini bahwa besarnya keragaman bahasa secara keseluruhan dapat menunjukkan panjangnya waktu perubahan. Artinya, di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat varian bahasa yang tinggi dapat dihipotesiskan wilayah itu menjadi wilayah asal dari sebuah bahasa. Berdasarkan teori ini, Dyen (1962 dan 1965) menyatakan bahwa keragaman leksikal yang tinggi di Melanesia bagian barat (khususnya di kepulauan Bismarck) daripada kawasan Austronesia lainnya menyebabkan wilayah ini dapat ditetapkan sebagai asal Protobahasa Austronesia. Pendapat Dyen didukung oleh Murdock (1964) dan Terrel (1981), seperti ditunjukkan berikut ini.

Gambar 3. Silsilah Bahasa-bahasa Austronesia Menurut Isidore Dyen
(Gambar dikutip dari Bellwood, 2000)

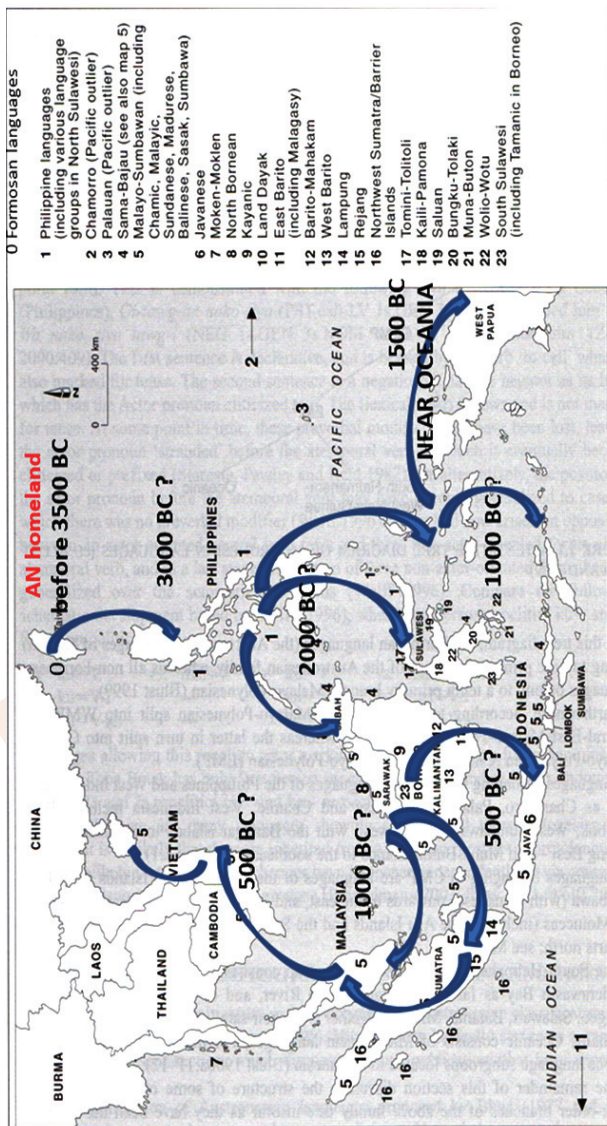


Bagan di atas memperlihatkan bahwa dari 40 cabang utama bahasa Austronesia, 34 cabang berada di wilayah Melanesia. Itu artinya, sangat mungkin tanah asal bahasa Austronesia Purba berawal dari Kepulauan Melanesia.

Namun, pandangan Dyen tersebut ditolak oleh beberapa pakar lain yang mendukung tanah asal orang Austronesia adalah Indocina. Beberapa pakar pendukung pendapat terakhir itu, di antaranya Blust (1977, 1978, 1982, 1993, dan 1995), Dahl (1973), Shutler dan Marck (1975), Foley (1980), Harvey (1982), Reid (1985), Bellwood (2000), Blundell (2009) dan pakar lainnya yang muncul belakangan. Blust (1982) menegaskan bahwa kata-kata dalam protobahasa Austronesia yang dapat disusun kembali untuk spesies mamalia berplasenta, seperti trenggiling, bovidae, monyet, hampir memastikan bahwa lokasi Austronesia berada di sebelah barat Garis Huxley, yaitu di Taiwan atau Daratan Sunda, seperti diperlihatkan dalam peta di samping.

Selain alasan yang bersifat linguistik, para penganut hipotesis Indocina sebagai tanah asal Austronesia mengajukan alasan non linguistik yang dapat membenarkan hipotesis mereka, yaitu Kepulauan Melanesia merupakan kepulauan yang lebih luas dibandingkan dengan Kepulauan Indocina. Sebagai wilayah yang luas, tidak mungkin terjadi ledakan penduduk (*population pressure*) yang dapat membuat mereka bermigrasi. Indocina sebagai kepulauan yang relatif kecil, sangat berpotensi terjadinya peristiwa ledakan penduduk yang dapat menyebabkan migrasi penduduk. Namun, patut dicatat bahwa Bellwood (2000), sebagai salah seorang pendukung teori asal Austronesia dari Indocina tersebut, masih memberi ruang adanya pemikiran lain. Hal itu ditegaskannya bahwa dia tidak menganggap pulau kecil itu sebagai tempat asal yang mutlak bagi orang Austronesia (Bellwood, 2000: 158). Artinya, hipotesis lain tentang tanah asal orang-orang Austronesia masih terbuka lebar.

Gambar 4. Migrasi Orang Austronesia
(Dikutip dari Nothofer, 2015)



Itu sebabnya, penulis buku ini justru membantah kedua hipotesis tersebut. Menurut penulis, bahwa tanah asal Austronesia justru berada di Indonesia, dalam hal ini di wilayah Papua. Ada dua bukti linguistik yang menunjukkan tanah asal Austronesia dari Indonesia, yaitu bukti linguistik berupa analisis lebih lanjut atas sistem kemampuan berpikir logis-verbal dan sistem kemampuan berpikir logis-matematis. Analisis sistem kemampuan berpikir logis-verbal berupa analisis lebih lanjut atas konstruksi genitif yang dijadikan dasar pengelompokan bahasa oleh Brandes (1884), sedangkan analisis sistem kemampuan berpikir logis-matematis berupa analisis sistem bilangan yang terdapat dalam bahasa-bahasa Austroensia tersebut yang belum dijadikan dasar dalam analisis Brandes. Selain analisis secara linguistik juga akan dikemukakan alasan non linguistik yang bertujuan untuk memberikan pandangan lain atas pandangan non linguistik yang dikemukakan oleh para pendukung Austronesia-Indocina serta pendukung Austronesia-Melanesia.

Analisis terhadap kedua sistem kemampuan berpikir tersebut lalu dihubungkan dengan hukum-hukum perubahan bahasa secara diakronis yang diusulkan Mahsun (2010), dan ditambah satu hukum perubahan baru, yang diambil dari konsep dalam linguistik generatif transformasi. Menurut Mahsun, secara diakronis, perkembangan bahasa-bahasa di dunia berlangsung atas dasar sebagai berikut:

1. Hukum perubahan struktur menganggap bahwa perubahan bahasa berlangsung dari konstruksi yang kompleks ke konstruksi yang sederhana (pendek).
2. Hukum generatif transformasional membedakan kalimat inti/asali (*cernel sentence*), dengan kalimat turunan, yang menyatakan bahwa kalimat/konstruksi dalam bentuk aktif merupakan kalimat inti/asali.

Tabel 5. Perubahan Bahasa Berdasarkan Teori Generatif Transformasi

Kalimat Inti/Asali	Kaidah Transformasi	Kalimat Transformasi
1. Lengkap	Pelesapan/delesi	Kalimat elips/minor
2. Sederhana	Penggabungan	Kalimat kompleks/ majemuk
3. Aktif	Pemasifan	Kalimat pasif
4. Pernyataan/ Stetmen	Tanya Perintah	Kalimat tanya Kalimat perintah
5. Positif	Pengingkaran	Kalimat ingkar
6. Runtut	Pembalikan	Kalimat inversi

3. Hukum perubahan gradual menganggap bahwa perubahan bahasa mengikuti perubahan yang memungkinkan secara fonologis.
4. Hukum kemampuan manusia untuk berpikir logis-matematis menganggap bahwa manusia memiliki perubahan berpikir logis-matematis dari yang sederhana ke yang lebih kompleks.
5. Hukum perendahan vokal yang menganggap bahwa perubahan vokal berlangsung dari vokal tinggi depan atau belakang menjadi vokal tengah atau dengan kata lain, vokal tengah berasal dari vokal tinggi dan vokal rendah.
6. Hukum konsonan bersuara menganggap bahwa konsonan tidak bersuara berasal dari konsonan bersuara.

Berdasar pada analisis keterhubungan antara hukum-hukum perubahan bahasa secara diakronis dengan sistem kemampuan berpikir logis-verbal dan logis-matematis tersebut ditetapkan asal penutur Austronesia.

Brandes (1884) melakukan pengelompokan bahasa-bahasa di Indonesia dengan mendasarkan diri pada penelusuran relasi kekerabatan melalui analisis konstruktif genitif (milik). Perbedaan mendasar yang terdapat pada dua subrumpun bahasa Austronesia di Indonesia menurutnya ialah konstruksi milik

di wilayah Austronesia Barat (Melayu Polinesia Barat) ditandai oleh konstruksi milik yang unsur termilik mendahului unsur pemiliknya, sedangkan pada bahasa-bahasa yang dikelompokkan ke dalam kelompok Austronesia Timur (Melayu Polinesia Timur), unsur pemiliknya mendahului unsur termilik. Tipe konstruksi yang terdapat di wilayah Austronesia Timur tersebut disebutnya sebagai konstruksi kompletif, yaitu konstruksi dengan susunan terbalik. Disebut terbalik karena patokannya adalah konstruksi yang terdapat di wilayah Austronesia Barat yang susunannya diawali oleh unsur termilik. Jadi, apabila pada bahasa-bahasa subrumpun Austronesia Barat konstruksi miliknya berstruktur: *baju saya*, maka pada bahasa-bahasa subrumpun Austronesia Timur, berstruktur: *saya baju*.

Apa yang disebut sebagai konstruksi terbalik oleh Brandes merupakan konstruksi milik/genitif dalam bentuk aktif, sedangkan konstruksi oposisinya merupakan konstruksi milik dalam bentuk pasif. Dengan kata lain, konstruksi yang ditemukan di wilayah yang dinyatakan Brandes sebagai kelompok penutur Austronesia Timur merupakan konstruksi miliki dalam bentuk aktif, sedangkan konstruksi miliki di wilayah Austronesia Barat merupakan konstruksi milik dalam bentuk pasif. Sebagai contoh, penanda yang berupa penghubung antara unsur yang diterangkan dengan unsur yang menerangkan, yang dalam konstruksi genitif disebut penanda miliki Austronesia **nia* 'mempunyai, kepunyaan', menjadi: *ni* dalam bahasa Tarfia, di Papua, bahasa Paiwan; menjadi: *na* bahasa Tagalog di Filipina, menjadi: *ne/e* dalam bahasa Jawa; menjadi: *de* pada bahasa Namblong di Papua; menjadi: *ge* dalam bahasa Gresi; menjadi: *ka* dalam bahasa Paze di Taiwan; menjadi: *nya* dalam bahasa Sumbawa; dan menjadi zero (hilang/dilesapkan) dalam bahasa Adaang di NTT (Kepulauan Alor). Masing-masing contoh dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 6. Konstruksi Milik dalam Beberapa Bahasa Austronesia

PAN	Paiwan	Tarfia	Tagalog	BJ	Fiji	Namblong	Gresi	Pazeh	BS	Adaang
*nia	<i>umaq ni maju</i> 'rumah kepunyaan dia'	<i>lk ni si-wim</i> 'kamu mempunyai hidung'	<i>lapis na sabata</i> 'pensil kepunyaan anak-anak'	<i>klambi ne Tono</i> 'baju kepunyaan Tono'	<i>na mata-qu</i> 'kepunyaan mata saya = mata kepunyaan saya'	<i>ngayo de yamó'</i> 'ayah mempunyai rumah'	<i>aya ge yap</i> 'ayah mempunyai rumah'	<i>rahan ka naki</i> 'saya mempunyai anak'	<i>balen Ali</i> 'rumah kepunyaan Ali'	<i>nimar obang</i> 'ayah rumah = ayah mempunyai rumah'

Catatan: PAN = Protobahasa Austronesia; BJ = bahasa Jawa; BS = bahasa Samawa

Oleh karena itu, berdasarkan hukum perubahan bahasa secara diakronis di atas, penutur Austronesia berasal dari Indonesia, tidak mungkin dari Indocina yang menyebar ke Indonesia melalui Filipina, karena baik di Indocina (Formosa) dan di Filipina menggunakan konstruksi pasif. Lalu di Indonesia, di manakah tanah asal Austronesia tersebut? Tanah asal penutur Austronesia awal adalah di Papua, yang menggunakan konstruksi: *ni* yang lebih menyerupai bentuk asal Austronesia Purba: **nia*.

Selanjutnya, dari sudut pandang kemampuan berpikir logis-matematis, bahasa-bahasa: Tarfia, Namblong, Gresi di Papua; bahasa: Pazeh (Taiwan); bahasa Kilivila di Papua New Guinea hanya mengenal sistem bilangan sampai bilangan lima (sistem kuinal). Adapun dua bahasa lainnya, yang dicontohkan berikut ini, yaitu bahasa Adaang di NTT, bahasa Bima di NTB mengenal bilangan pokok utama sampai sepuluh, dan contoh terakhir mengenal bilangan pokok sampai 20 puluh. Untuk itu, kesemuanya diperlihatkan dalam Tabel 7.

Terlepas dari perbedaan wujud leksikal yang digunakan untuk merealisasikan makna-makna yang menunjuk bilangan-bilangan di atas, karena unsur leksikal dalam semua bahasa di dunia sangat mudah berubah, terdapat hal yang menarik untuk di simak, yaitu kesamaan sistem yang digunakan dalam membentuk bilangan-bilangan tersebut. Sistem yang dimaksud yaitu sistem bilangan pokok utama maksimal. Sistem bilangan pokok utama maksimal,

Tabel 7. Sistem Bilangan dalam Beberapa Bahasa Austronesia

Bilangan	Bahasa										BS
	Tarfia	Namblong	Gresi	Pazeh	Thao	killivila	Adaang	Bima			
1	sukse (suwse)	tendu	kRai	ida/adang	tata	tala	nu	ica, sabua		saic	
2	arkOq	namuwan	namOn	dusa	tuSa	yu	alo, alOq	dua		dua	
3	tOr	nanRik	nanglik/ namOn kRai	uru	uru	tolu	tOu	telu		telu	
4	paw	namuwan- namuan	namOn namOn	supat	Spat	vasi	ut	mpat		mpat	
5	Rim	kienendi takuwap	mOn	xasep	tarima	lima	ivihin	;ima		;ima	
6	mana suwse	kienendi tendu	mOn kRai	xasepbuza	katuru	lima tala	talanj	nam		nam	
7	manarkOq	kienendi namuwan	mOn namOn	xasepbidusa	pitu	lima yu	iritO	pitu		pitu	
8	manatOr	kienendi nanRik	mOn nanglik	xasepbituru	kaSpat	lima tolu	turIO	baluq		baluq	
9	manapaw	kienendi namuwan- namuwan	mOn namOn namOn	xasepbisupat	tanaOu	lima vasi	tienu	siwaq		siwaq	
10	manarim	kienendi-nendi	tanamOn	isit	makOin	luwatala	airnu	sampuru		sapuluh	
11	manasuwse karni suwse	kienendi-nendi mesinendi tendu	tanamOn masiji hekRai	isidu ida	makOin inan tata	luwatala tala	airnu falinjnu	sampuru sabua, sampuru saica		saolas	
12	manarkOq karnikOq	kienendi-nendi mesinendi namuwan	tanamOn masiji henamOn	isidu dusa	makOin inan tuSa	lutala yu	airnu falinjalo	sampuru dua		dua olas	
13	manatOr karnitOr	kienendi-nendi mesinendi nanRik		isidu uru	makOin inan turu	luwata tolu	airnu falinjOu	sampuru tolu		tlu olas	

dalam buku ini dimaknai sebagai sistem bilangan yang mengenal bilangan pokok utama maksimal sampai jumlah tertentu dan untuk bilangan di atasnya dilakukan dengan menjumlahkan, mengurangi, mengalikan, atau membagi bilangan pokok utama tersebut (bandingkan dengan Widyamika, 1975). Berdasarkan sistem bilangan di atas, bahasa-bahasa tersebut dapat dipilah atas tiga kelompok yaitu: (a) kelompok yang mengenal bilangan pokok utama sampai bilangan lima, (b) kelompok yang mengenal bilangan pokok utama sampai bilangan 10, dan (c) kelompok bahasa yang mengenal bilangan pokok utama sampai angka 20 dan selanjutnya bilangan-bilangan berikutnya dilakukan dengan kelipatan 10.

Untuk bilangan di atasnya dilakukan dengan menjumlahkan bilangan pokok tertinggi (bilangan lima), dengan bilangan pokok lainnya, sebagai contoh bilangan 6 diperoleh dengan bilangan $5 + 1$; $7 = 5 + 2$ sampai bilangan 9. Bilangan 10 memiliki sebutan khusus, tetapi di atas bilangan 10, misalnya bilangan 11 diperoleh dengan $10 + 1$; $12 = 10 + 2$ dan seterusnya sampai bilangan 19. Bilangan 20 memiliki istilah khusus, dan bilangan di atasnya diperoleh dengan menjumlahkan bilangan pokok utama 20 dengan bilangan pokok yang lain, misalnya bilangan 21 diperoleh dari penjumlahan: $20 + 1$; $22 = 20 + 2$ dan seterusnya sampai bilangan 29, misalnya bahasa Samawa, untuk bilangan 21 = *dua pulu saiq*; bilangan 22 = *dua pulu dua*; 23 = *dua pulu telu* dan seterusnya. Adanya tiga tahap yang dialami dalam sistem bilangan pokok tersebut, yaitu setelah bilangan 5, setelah bilangan 10, dan setelah bilangan 20 dapat dihipotesiskan bahwa sistem berpikir matematis tahap awal dikuasai sampai bilangan 5 lalu tahap kedua sampai 10 dan tahap ketiga sampai 20, dan seterusnya mulai berpikir dengan bilangan di atasnya.

Berdasarkan data pada Tabel 7, sistem bilangan pokok pertama yang dikenal bahasa Tarfia sampai bilangan dua (*namon*), karena untuk bilangan 3 dan 4 dilakukan dengan masing-masing menjumlahkan bilangan $2 + 1$ (*namon kRai*) dan $2 + 2$ (*namon namon*). Bahkan untuk bahasa Dubu mengenal bilangan sampai

lima, tetapi setelah hitungan keenam sampai ke sembilan belas mereka menggunakan bagian tubuh yang berputar searah jarum jam (kiri ke kanan), seperti berikut ini.

- 1 : *nglo*
- 2 : *kre*
- 3 : *singri*
- 4 : *ngangar mage*
- 5 : *yane mage, yane*
- 6 : *tOklOmO* 'pergelangan tangan kiri'
- 7 : *yekae* 'antara pergelangan tangan dengan siku'
- 8 : *flOpa:lini* 'siku'
- 9 : *tungle* 'antara siku dengan bahu kiri'
- 10 : *te:rfini* 'bahu kiri'
- 11 : *mamu* 'susu kiri'
- 12 : *towe* ~ BSDJ: *təbeq* 'tengah dada'
- 13 : *gəde mamu* 'susu kanan'
- 14 : *gəde te:rfini* 'bahu kanan'
- 15 : *gəde tungle* 'antara bahu dengan siku kanan'
- 16 : *gəde flOpa:lini* 'siku kanan'
- 17 : *gəde yekae* 'antara siku dengan pergelangan tangan kanan'
- 18 : *gəde tOklOmO* 'pergelangan kanan'
- 19 : *gəde yane*
- 20 : *kre papo* - 2 + 0 > 20
- 21 : *kre nglo* - 2 + 1 > 21
- 22 : *krekre* - 2 + 2 > 22
- 23 : *kre singri* - 2 + 3 > 23
- 100 : *nglo papo papo* - 1 + 0 + 0 > 100 (hanya sampai seratus khusus di atas)

Apa yang ingin diungkapkan di sini adalah bahwa jumlah maksimal kata bilangan yang ditemukan dalam suatu bahasa mencerminkan kondisi berpikir logis-matematis. Bagi bahasa yang mengenal bilangan pokok utama sampai 2 berarti kemampuan berpikir logis-matematis baru mencapai angka dua. Begitu pula, bagi bahasa yang mengenal bilangan pokok utama maksimal 5, 10, 20 berarti mereka memiliki kemampuan berpikir logis matematis masing-masing sampai hitungan 5, 10, 20. Berdasarkan hukum perubahan kemampuan berpikir logis-matematis di atas, dapat dikatakan bahwa bahasa-bahasa yang mengenal sistem bilangan pokok terendah itulah yang menjadi cikal bakal penutur pertama sebuah bahasa. Dalam konteks itu, maka penutur Austronesia awal mestinya berasal dari Indonesia, yaitu dari Papua, bukan dari Indocina atau dari Melanesia. Dari Papua bergerak ke arah barat menuju Indocina dan ke arah timur menuju Kepulauan Melanesia. Mengapa dari Papua ke timur Melanesia, bukan sebaliknya dari Melanesia ke Papua (Irian Barat) lalu menyebar ke arah barat seperti yang dihipotesiskan Dyen? Data awal sistem milik yang ditemukan pada bahasa Fiji (lihat Tabel 6) menunjukkan bahasa tersebut masih memelihara penanda milik Austronesia Purba **nia* berupa bentuk yang sudah mengalami pembaharuan (inovasi) menjadi: *na* dalam konstruksi pasif. Konstruksi milik yang menjadi: *na* dalam bahasa-bahasa Austronesia modern ditemukan pula pada bahasa Ternate:

Ngana na ngun 'Kamu mempunyai hidung',

Ana na fala 'Dia mempunyai rumah'

Gufran na gura 'Gufran mempunyai kebun' dan lain-lain.

Hanya saja konstruksi milik pada bahasa Fiji telah mengalami proses topikalisasi, yaitu pengedepanan unsur penanda milik. Kasus yang sama dengan bahasa Fiji terjadi pula pada bahasa Fازه, sebuah bahasa Austronesia yang terdapat di Formosa, jika pemiliknya orang ketiga tunggal, contohnya: *ni maju a umaq*

'kepunyaan dia rumah, rumah kepunyaan dia'. Konstruksi bahasa Fازه dengan pemiliknya orang ketiga tunggal tersebut dapat pula muncul dalam bentuk: *umaq ni maju* 'rumah kepunyaan dia' (Nothofer, 2015).

Selain alasan linguistik di atas, alasan non linguistik yang memungkinkan Austronesia berasal dari Indonesia (Papua) yang menyebar ke Barat menuju Indocina dan ke Timur menuju Melanesia, ialah kondisi Papu yang muncul saat ini berupa konflik antarsuku bangsa, yang dikenal dengan perang antarsuku. Perang antarsuku merupakan salah satu bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa migrasi yang berlangsung pada masa lampau tidak semata-mata disebabkan oleh tekanan penduduk atas wilayah pemukiman yang sempit, tetapi migrasi dapat saja karena: (a) kurang tersedianya bahan makanan di wilayah yang luas atau (b) peperangan/konflik yang terjadi salah satunya karena perebutan akses atas sumber daya alam berupa kebutuhan untuk mempertahankan kehidupan.

Persoalannya sekarang, manakah di antara ketiga hipotesis itu yang terbukti kebenarannya? Kajian kekerabatan bahasa-bahasa Austronesia di Indonesia secara rinci dengan mengambil data dari wilayah ke wilayah: Indonesia ke Indocina dan ke Melanesia haruslah terus digalakkan. Kajian tersebut, jika Indonesia memang menjadi asal persebaran manusia Austronesia awal, yang sebarannya terluas di dunia dan tentu sudah pasti mencerminkan keunggulan peradabannya pada masa itu akan semakin membuktikan bahwa Indonesia memang telah menjadi pusat persebaran peradaban manusia yang unggul pada masa lampau.

Sekadar catatan, Santos (2009) menggambarkan bahwa Atlantis, benua yang hilang, sebagai pusat peradaban dunia dalam legenda Plato, dihipotesiskan berada di wilayah Indonesia. Patut ditambahkan bahwa kata Atlantis muncul dalam bahasa Yunani: *atlante* atau *telamon*. Istilah atlantis berasal dari kata *atlas* atau *telamon*. Kedua kata itu berasal dari akar kata Yunani: *tla* yang

berarti 'memikul, menyangga', yang oleh bangsa Aztec sering menghubungkan mitos tentang pilar langit dengan sosok Tlaloc, yaitu penguasa peradaban agung mereka (Santos, 2009: 179). Akar kata *tla*, juga ditemukan dalam bahasa-bahasa daerah di Indonesia, misalnya dalam bahasa Samawa dialek Jereweh ditemukan kata: *katlan* < imbuhan {ka-an} dibubuhkan pada akar kata: *tla*, menjadi *katlan* 'tenggelam'. Di daerah pegunungan, Tongo, tempat tambang emas PT Newmont Nusa Tenggara, terdapat legenda tentang *Desa Katlar* 'desa yang tenggelam'. Kata *katlar* berasal dari pemberian imbuhan {ka-} yang dalam bahasa Sumbawa bermakna keadaan, seperti: *kamomang* 'terapung', *kameler* 'terbawah arus', penambahan bunyi [r] pada akar kata: *tla* untuk menghindari tabrakan homonim dengan kata *tlan* (*tla* + *an*) yang sudah lebih dahulu ada dalam bahasa Samawa. Akar kata *tla* ditemukan juga dalam bahasa Jawa: *tlen* 'menelan', bahasa Indonesia *telan-menelan* dan lain-lain. Kesamaan yang terjadi pada beberapa bahasa tersebut tentu bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan tetapi merupakan sesuatu yang diwarisi dari sebuah asal yang sama. Berdasarkan hal itu, menarik untuk secara terus-menerus membuka lembar demi lembar sejarah keunggulan peradaban bangsa Indonesia melalui kajian yang serius tentang sejarah masa lampau Kepulauan Indonesia dari berbagai sudut, terutama sudut pandang bahasa yang sangat kaya di wilayah ini.

4.1.3 Otonomi Daerah Melalui Otonomi Bahasa

Dalam sejarah, berlaku hukum "apa yang terjadi pada masa lampau cenderung muncul kembali pada masa sekarang hanya dalam bentuk yang berbeda". Hukum perubahan sejarah di atas menarik untuk dicermati, direnungkan, lalu direfleksikan pada kondisi Indonesia saat ini. Apabila ditengok ke belakang, apa yang disebut Negara Kesatuan Indonesia (NKRI) yang terbentuk tanggal 17 Agustus 1945, sesungguhnya berasal dari beratus-ratus negara bangsa, yang tersebar di seluruh kawasan yang menjadi wilayah NKRI. Baik berupa kerajaan maupun kesultanan atau kedatuan-kedatuan.

Oleh karena itu pula, apa yang disebut sebagai bahasa daerah, sesungguhnya pada masa sebelum NKRI merupakan bahasa resmi negara-negara tersebut. Sebagai contoh, bahasa Jawa merupakan bahasa resmi untuk kerajaan di Jawa; bahasa Samawa menjadi bahasa resmi kesultanan Sumbawa; bahasa Bugis merupakan bahasa resmi kerajaan Bugis; bahasa Melayu merupakan bahasa resmi kesultanan Melayu dan seterusnya. Negara bangsa-negara bangsa itu terkena hukum sejarah yang pertama, yaitu menyatu dalam NKRI dengan satu bahasa resmi yang diberi nama bahasa Indonesia, sedangkan bahasa-bahasa yang menjadi bahasa resmi kerajaan/kesultanan pada masa sebelum NKRI, sesuai UUD 1945, merupakan bahasa daerah yang dipelihara dan dilindungi oleh negara. Kemudian era reformasi, yang ditandai dengan derasnya arus otonomi daerah, menurut hemat penulis merupakan bentuk pengulangan sejarah dalam bentuk yang berbeda. Artinya, hukum sejarah yang berikutnya berlaku untuk NKRI. Mengapa demikian? Karena otonomi daerah, yang ditandai dengan pemekaran wilayah –pembentukan daerah otonom baru: provinsi, kabupaten/kota, sampai kecamatan dan desa – sering menggunakan perbedaan bahasa/varian kebahasaan untuk pengakuan batas atau keberbedaan dengan induknya.

Dengan kata lain, otonomi daerah, yang salah satunya ditandai dengan pemekaran wilayah (pembentukan daerah otonom baru) sering menggunakan bahasa atau varian dialektal sebagai salah satu indikator penentu batas wilayah administratif daerah otonom baru yang diusulkan. Nothofer (2010) menyebutnya sebagai proses politisasi bahasa dalam era otonomi daerah di Indonesia. Dia mencontohkan, pengusulan pembentukan daerah otonom baru, Provinsi Banyumas, telah memanfaatkan isu bahasa untuk membedakan diri dengan komunitas Sunda dan Jawa, bahkan batas wilayah yang dicanangkan sebagai cikal bakal provinsi baru itu, oleh Nothofer disebut bersesuaian dengan batas dialek Banyumas. Begitu pula Adonara di NTT. Kasus Adonara, terkait dengan rencana

pemekaran NTT atas dua provinsi, yaitu provinsi induk NTT dan provinsi pemekaran: Flobamora—yang berusaha menyatukan Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Dalam rangka pemekaran daerah otonom Baru, ternyata masih kekurangan satu kabupaten untuk mencukup lima kabupaten sesuai persyaratan perundang-undangan. Untuk itu, salah satu kecamatan yang cukup maju di Flores Timur didorong untuk dimekarkan menjadi kabupaten, kecamatan itu adalah kecamatan Adonara. Salah satu argumen untuk pemekaran tersebut ialah bahwa Adonara merupakan satu daerah budaya tersendiri, dengan ciri bahasa yang berbeda dengan lainnya, yang dalam hal ini disebut sebagai bahasa Adonara. Dalam perkembangannya Adonara belum berhasil sebagaimana Lembata yang berhasil memisahkan diri dari Flores Timur. Pengakuan penutur akan keberadaan Adonara sebagai komunitas tutur tersendiri dimuat dalam peta bahasa yang dikeluarkan SIL (2006: 25), dengan nama bahasa Adonara. Apa yang menarik dari kasus Adonara itu ialah penyebutan isolek Adonara sebagai bahasa tersendiri bertentangan dengan fakta kebahasaan/linguistik, karena dari perhitungan dialektometri yang membandingkan isolek Adonara dengan isolek Lamaholot, ternyata memiliki hubungan dialektal. Artinya, Adonara merupakan dialek dari bahasa Lamaholot. Dalam konteks ini, kembali lagi variasi dialektal dianggap beda bahasa demi identitas.

Kasus lain yang terjadi adalah bahasa Kedang dan Omesuri. Di wilayah Kedang terdapat dua kecamatan baru yang dimekarkan, yaitu kecamatan Omesuri dan Buyasuri. Kedua kecamatan ini menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Kedang. Oleh karena Kedang ingin membentuk daerah otonom baru, yaitu menjadi kabupaten yang lepas dari kabupaten Lembata, kecamatan Kedang membelah menjadi dua kecamatan, yaitu kecamatan Omesuri dan Buyasuri dengan cara mengidentifikasi isolek Omesuri sebagai bahasa tersendiri, sehingga muncul nama dua bahasa yaitu bahasa Kedang dan bahasa Omesuri. Padahal isolek yang dituturkan di Omesuri itu adalah varian dari bahasa Kedang.

Kasus menarik lainnya ialah kasus bahasa Muna dan Buton. Baik penduduk di Muna maupun di Buton kedua-duanya menuturkan bahasa yang berbeda, tetapi kedua berkerabat dekat. Ketika ada rencana pemekaran wilayah dengan rencana pengusulan daerah otonom baru setingkat provinsi dengan nama Provinsi Buton Raya (Provinsi Kepulauan). Nama itu mendapat penolakan dari orang Muna, mereka mengusulnya dengan nama Provinsi Muna-Buton. Ada persoalan psikologis kebudayaan yang mengganggu hubungan Muna dengan Buton, sehingga dominasi suku bangsa tertentu sangat dihindari. Pemilihan Buton Raya sebagai nama calon provinsi itu dipandang sensitif dari aspek hubungan kultural kedua suku bangsa yang berkerabat tersebut.

Kasus lain yang serupa adalah kasus Pinrang Utara di Sulawesi Selatan. Daerah ini berada di perbatasan Sulawesi Barat dengan Sulawesi Selatan. Di wilayah Sulawesi Barat berbatasan dengan: Polewali, Mamasa; Sulawesi Selatan dengan: Toraja, Enrekang, dan Siderap. Untuk membentuk daerah otonom baru itu, Pinrang Utara baru memiliki empat kecamatan: Batulappa, Duampanua, Lembang, dan Patampanua. Melalui kegiatan seminar yang diselenggarakan tahun 2008 mereka mengidentifikasi diri sebagai suku tersendiri dan penutur bahasa tersendiri serta dideklarasikan oleh LSM: Kesarpati (Kerukunan Keluarga Besar Pattinjo) pada tanggal 12 Mei 2012. Padahal, mereka penutur dialek dari bahasa yang ada di Sulawesi Selatan.

Identifikasi diri sebagai komunitas tersendiri dengan memanfaatkan varian kebahasaan seperti digambarkan di atas, tidak hanya terjadi karena kehendak untuk membentuk daerah otonom baru, tetapi juga terjadi sebagai upaya mendapat akses ekonomi. Adalah komunitas Elang Dodo dan Rinti di Kabupaten Sumbawa (bagian Selatan), tempat yang menurut survei geologi merupakan tempat dengan kandungan emas yang terbesar. Sejak 1990-an pertambangan emas PT Newmont Nusa Tenggara sudah memulai mengeksploitasi emas dan tembaga di wilayah Barat Sumbawa (dulu

Kecamatan Jereweh), tepatnya di Batu Hijau (sekarang Kabupaten Sumbawa Besar). Dalam rangka pemberdayaan masyarakat lokal yang terdapat di lingkaran tambang, pihak perusahaan membentuk sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Olat Perigi. Yayasan itulah yang ditugasi untuk merencanakan, menyalurkan, dan memberdayakan masyarakat lingkaran tambang. Dana bantuan sosial perusahaan disalurkan melalui yayasan tersebut. Dalam perjalanannya, pihak perusahaan akan mulai melakukan perluasan wilayah eksploitasi ke wilayah Sumbawa Selatan, yang masuk dalam wilayah Kabupaten Sumbawa. Di wilayah Kabupaten Sumbawa itu masih hidup pranata sosial berupa masyarakat adat Kesultanan Sumbawa. Beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah disalurkan melalui lembaga adat tersebut.

Diduga munculnya kekhawatiran komunitas yang berada langsung sekitar lokasi pertambangan yang baru (Dodo-Rinti) tidak akan tersentuh secara maksimal karena pemberdayaannya dilakukan oleh lembaga adat, mereka membentuk masyarakat adat tersendiri, yang diberi nama komunitas adat Cek Bocek, yang dalam bahasa Sumbawa berarti remeh-temeh, rakyat jelata atau kawula dalam bahasa Jawa. Istilah itu digunakan untuk mendikotomikan diri dengan komunitas adat yang berdarah biru (konsep Jawa: Gusti), dalam dikotomi: Kawula – Gusti. Untuk memperkuat keberadaannya, mereka mendaftarkan diri ke Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sehingga keluarlah sertifikat pengakuan dari AMAN tersebut. Apa yang menarik dari kasus komunitas adat Cek Bocek ialah mereka mengidentifikasi diri sebagai penutur bahasa yang berbeda, dalam hal ini bahasa Bercu (Amrullah dan Muslim, 2013: 106-108). Kata ini merupakan kata yang berkorespondensi dengan varian bahasa Sumbawa lainnya: *berko* yang berarti begitu. Padahal, berdasarkan penelitian Mahsun (1994) isolek di wilayah itu menuturkan bahasa Samawa dialek Sumbawa Besar, subdialek Labangkar. Apa yang menarik dari peristiwa di Sumbawa tersebut dibandingkan dengan peristiwa lainnya yang digambarkan di atas.

Ternyata keberagaman bahasa mulai dari tataran keberagaman pada tataran subdialek, dialek, bahasa, sampai rumpun bahasa telah dimanfaatkan untuk membedakan diri satu sama lain. Perbedaan diri melalui bahasa tersebut cenderung mengarah pada disintegrasi sosial, bahkan disintegrasi bangsa.

Oleh karena itu, persoalan kebahasaan di Indonesia tidak semata-mata persoalan substansi kebahasaan sebagai sarana komunikasi, tetapi lebih dari itu menyangkut persoalan politis, identitas, dan jati diri bangsa. Dalam pada itu, keberagaman bahasa di Indonesia haruslah diasiasi secara lebih arif dalam satu strategi pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa yang bersifat holistik. Pelindungan bahasa tidak boleh dilakukan hanya dalam konteks melindungi bahasa dengan mengisolasiannya dari bahasa lain karena hanya akan memunculkan semangat kelokalan, etnosentris yang pada akhirnya, dapat mengarah pada terjadinya disintegrasi sosial bahkan mengarah pada disintegrasi bangsa.

4.2 Bahasa Asing dan Identitas Keindonesiaan

Pada seksi 2.4 di atas telah dijelaskan bahwa identitas berupa bahasa menjadi alat utama untuk ekspansi pengakuan keberadaan suatu negara bangsa yang telah mencapai kemajuan peradaban dan ekonomi. Itu sebabnya, negara bangsa yang telah mencapai keunggulan peradaban dan ekonomi cenderung melakukan penguatan identitas pada upaya penguatan bahasanya di luar negara. Sebagai contoh Jepang, Cina dan negara berbahasa Inggris. Mengapa bahasa? Bahasa merupakan pintu masuk untuk pemahaman serta penguatan berbagai aspek kultural yang menjadi identitas lain negara bangsa tersebut. Selain itu, bahasa merupakan sarana berpikir sekaligus pembentuk pikiran manusia itu sendiri. Itu sebabnya ketika sarana berpikir mampu diintroduksi dan dengan sendirinya akan membentuk pikiran manusia itu sendiri, maka tidak ada yang susah untuk dipengaruhi setelah itu. Bukankah segala tindakan manusia diawali dengan berpikir?

Di tengah-tengah keberagaman warga Indonesia akan identitasnya, karena strategi penguatan identitas yang keliru diterapkan, bangsa ini tengah mengalami ekspansi secara besar-besaran identitas negara lain, baik dilakukan oleh pihak luar maupun oleh pihak dalam yang secara tidak sadar, karena kekurangan pemahaman akan identitasnya. Kasus keluarga Paulina yang diceritakan *The New York Times* pada tanggal 25 Juli 2010, yang anak-anaknya lahir di Indonesia, hanya karena orang tuanya mengenyam pendidikan di Amerika Serikat dan Australia lalu tidak mengajarkan ketiga anaknya bahasa Indonesia atau bahasa daerah sebagai bahasa pertamanya. Kasus serupa, tidak hanya menimpa keluarga Paulina, tetapi masih banyak keluarga lainnya, terutama di kota-kota besar, yang bahasa pertamanya bukan bahasa Indonesia atau bahasa daerah, tetapi bahasa asing. *English First*, telah melakukan survei tentang Indeks Kemampuan Bahasa Inggris generasi muda Indonesia di 13 Provinsi berikut ini.

Tabel 8. Indeks Kemampuan Bahasa Inggris Remaja Indonesia di 13 Provinsi

No.	Provinsi	Indeks Kemampuan Bahasa Inggris (EPI)
1.	DKI	55, 40
2.	Bali	55, 20
3.	DIY	53, 24
4.	Sumatra Barat	52, 75
5.	Jawa Barat	52, 70
6.	Jawa Timur	51, 91
7.	Sumatra Utara	51, 78
8.	Jawa Tengah	51, 64
9.	Banten	51, 13
10.	Sumatra Selatan	49, 06
11.	Kalimantan Timur	48, 24
12.	Riau	47, 19
13.	Kepulauan Riau	46, 90

(Dikutip dari bahan Diskusi Panel yang diselenggarakan *English First*, 29 Januari 2015 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta).

Berdasarkan hasil survei itu digambarkan bahwa remaja Indonesia memiliki kemampuan yang meningkat sejak 7 tahun, yaitu naik 7, 96 poin. Menurut survei itu pula, indeks penguasaan bahasa Inggris seluruh kategori usia, remaja Indonesia terbaik untuk seluruh dunia.

Apabila kondisi itu dihubungkan dengan kemampuan bahasa Indonesia anak-anak remaja Indonesia, misalnya diambil dari hasil ujian nasional bahasa Indonesia untuk siswa SMP, SMA/SMK (karena mereka dapat dikategori remaja), maka hal itu sungguh sangat ironis. Sejak sistem ujian nasional diterapkan, mata pelajaran bahasa Indonesia, memberi kontribusi yang signifikan bagi kelulusan siswa. Hal itu disebabkan, selain pemahaman yang kurang terhadap hakikat keberadaan bahasa Indonesia sebagai jati diri dan identitas keindonesiaan juga diperparah oleh dua kondisi berikut ini. Pertama, anggapan bahwa bahasa asing lebih berprestise sosial tinggi dibandingkan bahasa Indonesia dan kedua, karena pola penyebarluasan bahasa negara-negara maju sangat terarah, terukur, dan masif. Bahkan dengan cara-cara mengubah cara pandang pun mereka tempuh, seperti dilakukan *English First* tersebut (lihat seksi 2.4). Tidak hanya bahasa Inggris yang upaya penguatannya di luar negeri dilakukan secara terencana, terarah, terukur, dan masif, tetapi juga bahasa Cina, Jepang juga turut melakukan hal seperti itu. Hanya, cara yang dilakukan adalah dengan menempatkan tenaga kerjanya sebagai pihak yang akan mengerjakan proyek-proyek bantuan pinjaman dari negara itu. Artinya, mereka tidak terikat dengan peraturan tenaga kerja yang mengharuskan tenaga kerjanya memiliki kemampuan berbahasa Indonesia, seperti persyaratan yang mereka kenakan ketika Indonesia mengirimkan tenaga kerja profesionalnya ke negara-negara tersebut yang diharuskan mampu berhasa mereka pada peringkat tertentu yang dipersyaratkan.

Apabila para remaja Indonesia benar-benar memiliki pandangan terhadap bahasa asing dan bahasanya sendiri seperti

digambarkan di atas, dapat dibayangkan dalam satu atau dua dasawarsa ke depan bahasa kebangsaan dan bahasa negara Indonesia akan mengalami nasib yang relatif sama dengan bahasa Melayu di Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Bangsa ini tentu tidak ingin demikian dan untuk itu diperlukan strategi yang komprehensif dalam bentuk rumusan politik kebahasaan yang bersifat holistik. Politik kebahasaan yang holistik tidak berarti bangsa ini harus anti bahasa asing. Bangsa ini harus banyak menguasai bahasa asing untuk keperluan pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan dengan tidak mengorbankan identitasnya. Dalam hal itu, ketiga jenis bahasa yang ada dalam masyarakat Indonesia: bahasa negara, bahasa daerah, dan bahasa asing haruslah dikelola secara proporsional sesuai kedudukan dan fungsinya serta dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

4.3 Isu Kebahasaan dan Perang Generasi Keempat

Seperti dijelaskan di atas bahwa sebagai negara bangsa yang nasionalismenya dibangun di atas fondasi bahasa, Indonesia menghadapi tantangan integrasi bangsa dari aspek kebahasaan. Keberagaman bahasa di Indonesia tidak jarang digunakan untuk membedakan diri satu sama lain, bukan malah dijadikan sebagai bukti empirik bagi keberagaman bangsa, yang karena itu lalu diupayakan menemukan benang merah yang mempertautkan satu sama lain, sebagai bukti ketunggalikaan. Munculnya paham kemelayuan, kemelanesiaan, dan keberagaman bahasa dalam hubungannya dengan pembentukan daerah otonom baru (otonomi daerah melalui otonomi bahasa), termasuk juga jargon, “Baik Bahasa Inggris maka Baik Pendapatannya, Baik Bahasa Inggris maka Baik Kualitas Hidupnya, Bahasa Inggris adalah Bahasa Masa Depan” yang dapat membentuk cara pandang tersendiri, dan selanjutnya, dapat menjadi pedoman penganutnya untuk bertindak/bertingkah laku. Apalagi, era sekarang adalah era perang generasi keempat, yaitu perang yang tidak lagi menuntut mobilisasi

peralatan tempur secara besar-besaran tetapi dilakukan melalui perang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya (perang informasi: Ipoleksosbud). Peperangan semacam ini tidak lagi mengandalkan konfrontasi secara langsung, melainkan melalui pemanfaatan segala jaringan yang ada baik politik, ekonomi, sosial, dan militer untuk meyakinkan para pengambil keputusan politik musuh bahwa tujuan strategis mereka tidak bisa diraih atau terlalu mahal jika dibandingkan dengan manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, pelibatan dua aktor atau lebih dengan kekuatan yang tidak seimbang dan mencakup spektrum perang yang luas merupakan karakter utama dari perang generasi keempat. Karakter utama lainnya adalah bersifat transnasional, tidak mengenal medan perang yang pasti, tidak membedakan sipil dan militer, tidak mengenal masa perang dan damai, serta tidak mengenal garis depan. Perang ini berakar pada prinsip bahwa kemauan politik yang lebih superior, bila digunakan dengan benar, dapat mengalahkan kekuatan ekonomi dan militer yang lebih besar. Itu sebabnya, semua organisasi dan jaringan baik bersifat transnasional, nasional, dan subnasional dimanfaatkan demi tersampainya pesan/informasi kepada khalayak sasaran. Fokusnya adalah mematahkan kehendak pembuat keputusan. Mereka menggunakan jalur yang berbeda untuk menyampaikan pesan yang berbeda kepada khalayak yang berbeda. Tujuan dari pesan itu adalah: (a) mematahkan semangat musuh (pembuat kebijakan), (b) mempertahankan kehendak rakyat mereka sendiri, dan (c) memastikan pihak yang netral tetap netral atau memberikan dukungan diam-diam terhadap alasan yang mereka gunakan. Singkatnya, perang generasi keempat bersifat Ipoleksosbud, jaringan terbentuk secara sosial dan membutuhkan waktu yang panjang. Perang ini merupakan antithesis dari teknologi tinggi dan perang singkat yang selama ini diintroduksi Pentagon (Mustarom, 2014).

Ada beberapa hal yang menjadi penanda perang generasi keempat, yaitu (a) menurunnya harmoni dalam masyarakat, (b)

menurunnya loyalitas kenegaraan dan meningkatnya loyalitas alternatif, terutama budaya, (c) hilangnya monopoli negara atas perang, (d) munculnya entitas non negara yang mampu menguasai loyalitas utama masyarakat, (e) peran dominan dari propaganda dan tekanan psikologis untuk megubah pikiran para pembuat kebijakan politik. Oleh karena satu-satunya yang dapat mengubah pikiran seseorang adalah informasi, maka informasi merupakan elemen utama dalam setiap perang generasi keempat.

Dalam bahasa militer, seperti dinyatakan Menteri Pertahanan RI, pada acara silaturahmi Pimpinan tujuh instalasi strategis negara dengan Menhan di Aula Dharma Canti, Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia, Sentul, 7 April 2015, perang generasi keempat adalah perang murah meriah. Ada beberapa tahap yang dilalui dalam perang murah meriah tersebut, yaitu:

1. Infiltrasi paham: ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Ipoleksosbud);
2. Cuci Otak melalui introduksi paham-paham tertentu, misalnya paham bahwa Melanesia adalah non Austronesia, bahasa Indonesia adalah nama lain dari bahasa Melayu; kebudayaan Melayu Mahawangsa; Baik bahasa Inggris maka Baik Pendapatannya, Baik bahasa Inggris maka Baik Kualitas Hidupnya, bahasa Inggris adalah Bahasa Masa Depan dan sebagainya;
3. Adu domba;
4. Perang saudara;
5. Pecah belah
6. Kuasai, yang tidak hanya berupa fisik tetapi dapat berupa penguasaan non fisik yaitu hal-hal yang menyangkut ipoleksosbud.

Dalam konteks politik kebahasaan, munculnya paham kewilayahan serta jargon-jargon yang bermuatan paham penguatan bahasa tertentu seperti digambarkan di atas, merupakan salah satu

bentuk perang generasi keempat yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Mengingat bahwa isu-isu kewilayahan: Kemelanesiaan, Kemelayuan, Budaya Melayu Mahawangsa dan isu lainnya yang serupa, merupakan paham yang memiliki motif tertentu, maka ketika paham itu mulai diinfiltrasikan pada warga negara Indonesia dan keberadaannya diterima, maka pada saat itu bangsa ini sudah tidak lagi mandiri. Sesuai dengan konsep maknawi yang dikandung kata **kemandirian**, yang merujuk pada suatu keadaan yang mencerminkan kemampuan berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak/orang lain. Kemampuan berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain, dalam konteks negara bangsa, dapat dimaknai bahwa negara bangsa itu berada dalam kondisi aman, tidak ada gangguan, baik dari segi militer maupun dari segi non militer, seperti yang terkait dengan gangguan Ipoleksosbud yang dapat mengakibatkan instabilitas keamanan negara.

Ditinjau dari tahap-tahapan perang generasi keempat di atas, maka keberadaan paham kewilayahan dari sudut pandang politik kebahasaan sudah mencapai tahap kedua dan mulai masuk tahap ketiga. Dikatakan mulai masuk tahap ketiga, karena paham itu sudah mulai disuarakan oleh warga negara Indonesia sendiri, sehingga yang akan berhadapan adalah sesama anak bangsa. Oleh karena itu, keberagaman bahasa di Indonesia perlu dikelola secara arif dalam satu kerangka kebijakan/politik kebahasaan yang bersifat holistik, yang tidak hanya memandang bahasa sebagai sarana komunikasi, tetapi bahasa juga menyangkut identitas negara bangsa. Sebagai identitas, maka di dalamnya mengandung harkat dan martabat bangsa. Untuk itu, dalam seksi-seksi berikut akan dipaparkan kerangka strategis penanganan masalah kebahasaan di Indonesia dalam rangka membangun kemandirian bangsa.



PENGUATAN PERAN BAHASA, MEMBANGUN KEMANDIRIAN BANGSA

5

Apabila dicermati dengan saksama judul bab ini mengantarkan pikiran bangsa Indonesia pada satu pertanyaan mendasar, apakah hubungan antara bahasa dengan ikhtiar membangun kemandirian bangsa? Untuk menjawab persoalan itu ada baiknya dipahami dulu apa yang dimaksud dengan kemandirian. Secara morfologis, kata *kemandirian* merupakan kata bentukan dari kata dasar *mandiri* yang bermakna ‘dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain’, dengan mendapat imbuhan {ke-an}, sehingga bermakna ‘hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain’.

Selanjutnya, suatu kondisi dapat dikatakan berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang/pihak lain menyangkut beberapa hal berikut. Pertama percaya diri, artinya percaya terhadap kemampuan dan apa yang dimilikinya. Kedua, karena terkait dengan kepercayaan, hal itu menyangkut cara pandang baik cara pandang terhadap keberadaan dirinya maupun cara pandang terhadap keberadaan dirinya dalam hubungannya dengan

orang/pihak lain. Ketiga, masalah cara pandang menyangkut cara berpikir. Dengan demikian, hakikat kemandirian adalah menyangkut cara seseorang atau negara bangsa dalam memandang diri serta yang dimilikinya serta cara memandang dirinya dalam hubungannya dengan orang atau pihak lain serta yang dimiliki oleh pihak lain. Yang dimiliki maksudnya di situ adalah menyangkut identitas, jati diri orang atau negara bangsa tersebut.

Sementara itu, bahasa berfungsi sebagai pembentuk cara berpikir manusia. Untuk itu bahasa sangat relevan dengan ikhtiar membangun kemandirian karena bahasa di samping menjadi sarana pembentuk pikiran manusia, bahasa pula menjadi sarana berpikir. Itu sebabnya, bahasa memiliki peran (a) sebagai sesuatu yang menjadi hal atau entitas yang dimiliki (sebagai identitas), (b) sebagai pembentuk pikiran, dan (c) sebagai sarana berpikir. Sebagai identitas, kepercayaan terhadap bahasa sebagai jati diri yang menandai keberadaan negara bangsa Indonesia haruslah diyakini secara sungguh-sungguh oleh setiap warga negara. Keyakinan yang sungguh-sungguh itu haruslah menjadi cara pandang bangsa. Dapat dibayangkan, sekiranya cara pandang tentang potensi yang dimiliki bahasa Indonesia untuk mempersatukan anak bangsa tidak tertanam dalam benak pikiran para pemuda perintis kemerdekaan, niscaya mereka tidak akan mengikrarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang dijunjung tinggi untuk mempersatukan beratus-ratus suku bangsa yang mendiami beribu-ribu pulau jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahasa Indonesia telah dipercaya sebagai identitas negara bangsa yang kelak akan dibangun (tujuh belas tahun kemudian). Tidak hanya sampai di situ, sekiranya para pemuda penggerak kemerdekaan itu yakin bahwa keberagaman bahasa daerah akan mengganggu persatuan Indonesia, niscaya mereka tidak akan menyatakan bahasa-bahasa daerah tersebut harus dilindungi dan dipelihara oleh negara.. Antara bahasa Indonesia dengan bahasa daerah bagaikan dua sisi dari mata uang. Bahasa Indonesia merefleksikan NKRI dan bahasa daerah merefleksikan Bhinneka Tunggal Ika.

Selanjutnya, oleh karena bahasa selain sebagai sesuatu entitas yang dimiliki (sebagai identitas), juga sebagai sarana dan pembentuk pikiran, tidak heran jika negara bangsa yang memiliki keunggulan peradaban/ekonomi selalu membangun kemandirian bangsanya melalui penguatan identitas yang membentuk pikiran mereka, yaitu bahasa nasional mereka. Dengan kata lain, mereka mengawali pembangunan kemandirian bangsanya melalui politik identitas, baru setelah kuat secara internal mereka mempelajari identitas bangsa lain dalam rangka pengembangan strategi dan diplomasi. Seperti contoh yang digambarkan pada seksi 2.4, Jepang membangun kejepangannya melalui penguatan peran bahasa Jepang sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kemudian setelah itu, mereka mempelajari identitas bangsa lain untuk mengembangkan strategi dan diplomasi dalam rangka memainkan peran pada kehidupan global. Untuk membuat warganya mampu berbahasa Indonesia misalnya, mereka membuka tempat-tempat pembelajaran di 38 lembaga. Sehubungan dengan itu, agar bangsa Indonesia memiliki kemandirian, maka penguatan terhadap bahasa Indonesia dan bahasa daerah perlu dirumuskan dalam suatu kebijakan nasional yang holistik. Seiring dengan itu, perlu dirumuskan pula kebijakan bangsa ini terhadap bahasa asing dalam rangka pengembangan strategi dan diplomasi dengan memanfaatkan potensi kebahasaan.

5.1 Membangun Kemandirian Bangsa Melalui Penguatan Peran BI

Seperti disebutkan di atas, bahwa bahasa Indonesia merupakan identitas negara bangsa Indonesia. Sebagai identitas maka kehadirannya akan menjadi penanda kehadiran negara. Artinya, kehadiran bahasa Indonesia dalam forum-forum atau peristiwa berbahasa yang sesuai dengan kedudukan dan fungsinya akan menjadi indikator kehadiran negara.

Berangkat dari pemahaman di atas, maka bangsa ini mestinya prihatin dan bersedih ketika menyaksikan pemakaian bahasa asing di luar ruang pada hampir seluruh wilayah NKRI, yang kurang terkendali. Berbagai jenis spanduk, papan nama yang terpampang di jalan-jalan, di tempat-tempat pemukiman, di area pendidikan dari satuan pendidikan terendah sampai satuan pendidikan tertinggi, menunjukkan ketidakhadiran negara melalui bahasa negaranya. Hal yang serupa tidak hanya terjadi di kota-kota besar, seperti di ibukota negara, tetapi juga sampai ke ibukota provinsi, ibukota kabupaten/kota, kecamatan, dan desa-desa. Sepertinya, anak bangsa ini sudah tidak risih dengan kondisi tersebut, padahal yang dikomunikasikan itu ditujukan ke anak-anak bangsa yang sudah memiliki bahasa negaranya sendiri. Bahkan ironisnya, penggunaan bahasa asing itu sering tidak dipahami oleh yang membacanya. Kondisi ini menggambarkan bahwa bangsa ini tengah dilanda krisis identitas. Bangsa ini nyaris gagal dalam membangun kemandiriannya melalui penguatan identitas yang berupa bahasa negara di negaranya sendiri. Tidak mandiri karena harus menggunakan bahasa lain untuk mengomunikasikan sesuatu pada sesama anak bangsa, padahal jauh sebelum merdeka para pemuda bangsa ini, tepatnya 28 Oktober 1928, telah menyepakati sebuah bahasa persatuan Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Kondisi di atas diperparah lagi dengan kurangnya keteladanan dalam penegakan identitas melalui pemakaian bahasa kebangsaan. Para tokoh panutan, pihak-pihak yang diharap menjadi contoh, belum mampu memainkan peran kepanutannya. Anak-anak bangsa ini hampir-hampir kehilangan tokoh panutannya dalam memantapkan identitas keindonesiaan. Padahal, melalui identitas kebahasaan berupa bahasa Indonesia itu telah mampu merevolusi mental para anak muda pencetus Sumpah Pemuda, dari mental ketergantungan, keterjajahan, keterberaian menjadi anak bangsa yang bermental mandiri, bebas merdeka dalam menentukan nasib bangsa, dan mental keberagaman dalam kesatuan.

Realita penampakan identitas keindonesiaan dalam wujud bahasa kebangsaan tersebut semuanya merupakan potret dari dunia pendidikan. Maraknya pemakaian bahasa asing yang digambarkan di atas merupakan wujud dari kegagalan dunia pendidikan dalam menanamkan pemahaman akan peran kesejarahan bahasa Indonesia dalam membangun negara bangsa. Kemudian, maraknya pemakaian bahasa Indonesia yang kurang tertib dari kaidah-kaidah kebahasaan yang sesuai dengan konteksnya menggambarkan dunia pendidikan kita juga gagal memahamkan kaidah pemakaian bahasa Indonesia secara baik dan benar. Bahkan hasil survei *The Organization of Economic Co-operation and Development*, melalui program PISA-nya (*Programme for International Student Assessment*) tahun 2012, menunjukkan bahwa hanya 1,5% siswa Indonesia yang mampu memecahkan soal-soal yang memerlukan pemikiran—itu pun hanya sampai level keempat, belum sampai level keenam—sedangkan sisanya 98,5% hanya mampu memecahkan soal yang bersifat hafalan (lebih jauh periksa seksi 5.1.2). Lemahnya kemampuan berpikir anak-anak Indonesia itu pun menunjukkan kegagalan dunia pendidikan dalam membelajarkan bahasa Indonesia. Bukankah bahasa, di samping sebagai sarana berpikir juga berperan sebagai pembentuk pikiran manusia. Artinya, pembelajaran bahasa Indonesia gagal membentuk pikiran manusia Indonesia.

5.1.1 Penguatan Bahasa Indonesia di Dalam Negara

Keberhasilan penguatan peran bahasa Indonesia di dalam negara menjadi indikator kehadiran negara di dalam negaranya sendiri. Dalam rangka penguatan bahasa Indonesia di dalam negara, peran dunia pendidikan sangat penting. Itu sebabnya, kebijakan penguatan peran bahasa Indonesia untuk membangun kemandirian bangsa dalam bidang kebahasaan perlu ancangan pembaruan seperti berikut.

A. Penguatan BI Melalui Jalur Pendidikan Formal

Dengan mempertimbangkan persoalan kebahasaan bahasa Indonesia di dalam negara seperti digambarkan di atas, yang semuanya merupakan potret dari dunia pendidikan, maka pembenahan pembelajaran bahasa Indonesia haruslah menjadi prioritas utama. Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa penguatan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan lebih terencana, terarah, dan terukur. Pembenahan dimaksud haruslah menyangkut keempat standar yang tercakup dalam kurikulum, yaitu standar kompetensi, standar isi, standar proses, dan standar penilaian.

Terkait dengan standar kompetensi, maka kompetensi lulusan yang harus diletakkan sebagai capaian pembelajaran bahasa Indonesia hendaknya ditujukan agar siswa memiliki kompetensi sikap positif terhadap keberadaan bahasa Indonesia sebagai identitas kebangsaannya dan mampu menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar untuk merefleksikan kemampuan berpikir sistematis, terkontrol, empirik, dan kritis. Dengan capaian kompetensi sikap positif, maka diharapkan anak bangsa ini akan selalu mengutamakan pemakaian bahasa Indonesia sesuai konteks dan situasi yang dipersyaratkan. Adapun pencapaian kompetensi kemampuan menggunakan bahasa Indonesia sebagai refleksi kemampuan berpikir sistematis, terkontrol, empirik, dan kritis yang ditandai oleh penggunaan bahasa Indonesia pada segala ranah, termasuk ranah pemakaian bahasa di luar ruang, terhindar dari ketidaktertiban. Ketidaktertiban dari kaidah gramatika kebahasaannya dan ketidaktertiban dari kaidah logika berpikirnya.

Untuk mencapai kompetensi lulusan di atas, diperlukan materi sebagai isi pembelajaran yang sesuai. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar isi sesuai standar kompetensi yang hendak dicapai. Secara garis besar, untuk pemenuhan kompetensi sikap positif, maka diperlukan materi-materi bahasa Indonesia yang berhubungan dengan peran kesejarahan bahasa Indonesia dalam membentuk keindonesiaan. Materi-materi itu, dapat

memperlihatkan peran BI dalam tiga fase historis terbentuknya nasionalisme, bangsa, dan negara Indonesia, seperti dikemukakan Anwar (2008) berikut ini:

- a. fase pembentukan konsep kebangsaan,
- b. fase pergerakan kemerdekaan, dan
- c. fase penanaman identitas.

Dalam materi sejarah BI pada fase pembentukan konsep kebangsaan dapat dimuat hal-hal yang terkait dengan:

- a. Uraian genetika-historis BI yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi historisnya, yang spirit/roh awalnya mulai terbentuk dengan kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara: Portugis (pertengahan abad XVI, dilanjutkan Belanda pada akhir abad ke-XVI).
- b. Uraian yang memberi penekanan bahwa imperialisme dapat berlangsung di Nusantara dalam waktu yang lama (3,5 abad) di satu sisi karena keberbedaan bahasa, ras, dan agama. Untuk itu perlu ada satu bahasa yang melintasi keberbedaan bahasa tersebut.
- c. Uraian yang berisi pengalaman bersama dalam keterjajahan mampu diekspresikan dengan baik sehingga muncul sikap kesamaan, senasib, dan sepenanggungan dengan satu medium utama, yaitu BI.
- d. Uraian yang memperlihatkan BI menjadi bahasa kebangsaan yang membentuk daya tahan nasionalisme keindonesiaan yang tangguh. Tekanan pada uraian ini dapat dilakukan dengan membandingkan peran BI tersebut dengan bahasa Romawi yang punya sejarah besar sebagai sebuah bangsa, namun mengalami kegagalan bahasa.
- e. Uraian yang memuat puncak capaian BI sebagai bahasa nasionalisme yang tergambar pada ekspresi awal munculnya gagasan kemerdekaan, seperti munculnya organisasi kepemudaan, propaganda melalui media, orasi tokoh

pergerakan telah menjadikan BI sebagai senjata utama dalam membangun kesadaran kebangsaan dan spirit perjuangan.

- f. Uraian yang memuat pernyataan bahwa Sumpah Pemuda (1928) telah menggunakan isu sentral yang sangat tepat: (1) ketanahairan, (2) kebangsaan, dan (3) kebahasaan. Uraian ini harus diberi tekanan dengan menganalogikan jika pilihan Sumpah Pemuda itu didasarkan pada komposisi ras dan agama, maka pilihan itu sangat rentan bagi ketahanan nasional.
- g. Uraian yang memuat bahwa bahasa Indonesia adalah pilihan jalan paling tepat dan mudah diterima.
- h. Uraian yang memuat bahwa pada fase ini BI telah menunjukkan gejala kuat sebagai spirit bangsa dalam pergerakan kemerdekaan, yang ditandai tiga hal: (1) berkembangnya pendidikan ber-BI, (2) berkembangnya media surat kabar ber-BI, dan (3) munculnya sastra fenomenal ber-BI.
- i. Uraian pada butir (h) di atas hendaknya didukung fakta yang menggambarkan laju penggunaan BI, seperti dikemukakan Kartodirdjo (1993), bahwa pada periode 1900–1928 siswa ber-BI berkembang 12 kali lipat: $125.444 > 1.513.088$ orang. Perkembangan itu juga dapat dipertegas dengan membandingkan jumlah orang yang masuk sekolah berbahasa Belanda hanya mencapai 65.106 orang.
- j. Uraian yang memuat BI sebagai spirit nasional muncul 1918 dan mencapai puncak fenomenal sebagai bahasa pemersatu 1928, dengan beberapa bukti:
 - (1) 1918 terdapat 40 surat kabar ber-BI,
 - (2) 1925 terdapat 200 surat kabar ber-BI,
 - (3) puncaknya 1928 muncul 400 surat kabar ber-BI baik harian, mingguan, bulanan (Ricklifs, 2005).
- k. Uraian yang memuat perkembangan BI sebagai spirit nasionalisme muncul pula melalui Balai Pustaka:

- (1) terjemahkan literatur barat ke dalam BI,
- (2) terbitkan karya sastra modern ber-BI,
- (3) 1920 muncul sajak berbahasa Indonesia: karya-karya M. Yamin,
- (4) 1921 muncul karya Sanusi Pane,
- (5) 1922 terbit pertama kalinya roman modern berbahasa Indonesia: Siti Noerbaja, dan
- (6) propaganda seniman, sastrawan, guru melalui penggunaan BI telah menjadi perekat keindonesiaan yang tersekat secara geografis, ras, bahasa, dan agama.

Dalam materi sejarah BI pada fase pergerakan kemerdekaan dapat dimuat hal-hal yang terkait dengan:

- a. Uraian yang memuat tentang tercetusnya Sumpah Pemuda 1928 merupakan awal dari fase BI menjadi alat utama dalam memaknai realitas dunia baru bagi nusantara.
- b. Uraian yang berisi tanggung jawab BI dalam mentransmisi terbentuknya harapan masyarakat nusantara untuk merdeka, seperti upaya memperkaya daya ungkap BI dengan menyerap kosakata bahasa nusantara atau bahasa asing, kemampuan kata dan komposisi kalimat yang mampu menangkap sentimen kebangsaan yang kuat dan meyakinkan rakyat untuk bereaksi. Untuk hal ini perlu kajian kosakata dan bangun komposisi kalimat bahasa-bahasa yang digunakan para pejuang kemerdekaan.
- c. Uraian yang memuat kemampuan BI menjadi identitas induk yang tumbuh dalam konteks sosial, yang berfungsi dalam interaksi politik untuk menciptakan sebuah realitas dinamik: (1) dari komunitas yang terberai dalam satu kesatuan kebangsaan, (2) dari komunitas terjajah yang mampu menyuarakan kemerdekaan, dan (3) dari komunitas yang tanpa identitas bersama menjadi komunitas dengan identitas pemersatu yang menjadi dasar berkembangnya interaksi dan relasi nasional.

- d. Uraian yang bertumpu pada pembuktian BI memenuhi pandangan Kroskirty (2000), bahwa penggunaan BI pada fase itu dapat dimaknai sebagai:
1. Kesengajaan untuk melakukan pembentukan nasionalisme bangsa Indonesia,
 2. Strategi manipulasi lemahnya struktur kesatuan nusantara, dan
 3. Kesadaran nyata dalam membentuk identitas bersama secara nasional; yang berbeda dengan negara yang membangun karakter nasionalismenya dengan fokus pada kebebasan individu untuk manipulasi sistem sosial secara fleksibel, yang termanipulasi dalam ras dan kasta.

Adapun dalam materi sejarah BI pada fase penanaman identitas hendaknya dimuat hal-hal yang terkait dengan:

- a. Uraian tentang kemampuan BI dalam menjamin diversitas sosial, seperti kenyataan memasuki era kemerdekaan masyarakat Indonesia terstruktur dalam struktur yang sangat kompleks, namun BI mampu menunjukkan peran yang signifikan sebagai identitas nasional.
- b. Hal itu dapat ditunjukkan dengan uraian pembuktian perkembangan jumlah pemakai bahasa Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun, misalnya dapat mengutip temuan Ricklefs (2005) yang menyatakan jumlah penduduk yang mampu membaca dalam BI meningkat tajam:
 1. tahun 1950 jumlah yang mampu membaca dalam BI: 500.000 orang,
 2. tahun 1956 menjadi 933.000 orang,
 3. awal tahun 1970-an menjadi 40,8% dari jumlah penduduk Indonesia saat itu,
 4. berdasarkan Sensus Penduduk 1980 jumlah penduduk yang mampu membaca dalam BI meningkat menjadi

61%, dan berdasarkan Sensus Penduduk 1990 jumlah penduduk yang mampu membaca dalam BI menjadi 80%.

- c. Uraian yang memuat bahwa masalah bahasa adalah masalah yang menyangkut identitas utama dari sebuah bangsa dengan menunjukkan bagaimana bangsa Israel demi sebuah identitas bagi negara tersebut mereka menghidupkan kembali bahasa Ibrani yang telah punah untuk dijadikan bahasa negara mereka, kasus Latvia yang menggalakkan pemakaian bahasa Lativi setelah negara itu berpisah dari Uni Soviet 1991, atau bagaimana bangsa Jepang membangun identitas nasionalnya setelah hancur dalam perang dunia kedua dengan menumbuhkan cinta tanah air melalui penerjemahan semua buku ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Jepang dan lain-lain.
- d. Uraian yang memuat koneksitas antara BI dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia, yang ditandai oleh kemampuan BI menjadi:
 1. bahasa terbaik untuk komunikasi antaretnik, ras, agama;
 2. bahasa terbaik menggambarkan realitas keindonesiaan;
 3. bahasa yang dapat menjadi refleksi sosial dan bangsa;
 4. bahasa yang dapat mencerminkan realitas demokrasi di Indonesia;
 5. bahasa yang mampu menjadi salah satu kreator tumbuhnya nasionalisme, yang karenanya fondasi-fondasi kenegaraan dicetuskan seperti: Sumpah Pemuda (1928), Proklamasi, UUD1945, dan cetusan ideologi bangsa Pancasila, yang semuanya menggunakan BI.

Luasnya cakupan materi Sejarah BI seperti dipaparkan di atas, persoalan yang muncul ialah kapankah materi itu mulai disajikan. Materi itu sebaiknya disajikan sejak sekolah dasar di tingkat atas (kelas V atau VI sampai ke tingkat perguruan tinggi). Hanya persoalan kedalaman materinya disesuaikan dengan tingkat atau jenjang pendidikannya.

Selanjutnya, terkait dengan standar isi yang berhubungan dengan pemenuhan kompetensi penggunaan bahasa Indonesia untuk merefleksikan kemampuan berpikir sistematis, terkontrol, empirik, dan kritis perlu mendapat perhatian secara sungguh-sungguh. Hal itu penting, karena hasil studi PISA, telah jelas-jelas menggambarkan kondisi memprihatinkan seperti ditunjukkan berikut ini.

Tabel 9. Persentase Pencapaian Level PISA Bahasa Tahun 2012

No.	Negara	Level/Peringkat							
		Below Level 1b	Level 1b	Level 1a	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5	Level 6
1.	Shanghai-China	0,1	0.3	2.5	11	25.3	35.7	21.3	3.8
2.	Hongkong-China	0.2	1.3	5.3	14.3	29.2	32.9	14.9	1.9
3.	Singapore	0.5	1.9	7.5	16.7	25.4	26.8	16.2	5
4.	Japan	0.6	2.4	6.7	16.6	26.7	28.4	14.6	3.9
5.	Korea	0.4	1.7	5.5	16.4	30.8	31	12.6	1.6
42.	Turki	0.6	4.5	16.6	30.8	28.7	14.5	4.1	0.3
47.	Thailand	1.2	7.7	24.1	36	23.5	6.7	0.8	0.1
56.	Tunisia	6.2	15.5	27.6	31.4	15.6	3.5	0.2	‡
57.	Indonesia	4.1	16.3	34.8	31.6	11.5	1.5	0.1	‡
64.	Qatar	13.6	18.9	24.6	21.9	13.5	5.8	1.4	0.2

Hasil PISA Indonesia tahun 2012 di atas tidak jauh berbeda dengan hasil PISA 2009 seperti terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 10. Persentase Pencapaian Level PISA Bahasa (Membaca) Tahun 2009

No.	Negara	Level/Peringkat							
		Below Level 1b	Level 1b	Level 1a	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5	Level 6
1.	Shanghai-China	0.1!	0.6	3.4	13.3	28.5	34.7	17	2.4
2.	Singapore	0.4	2.7	9.3	18.5	27.6	25.7	13.1	2.6
3.	Hongkong-China	0.2	1.5	6.6	16.1	31.4	31.8	11.2	1.2
4.	Korea	0.2	0.9	4.7	15.4	33	32.9	11.9	1
5.	Japan	1.3	3.4	8.9	18	28	27	11.5	1.9
42.	Turki	0.8	5.6	18.1	32.2	29.1	12.4	1.8	#
47.	Thailand	1.2	9.9	31.7	36.8	16.7	3.3	0.3	#
56.	Tunisia	5.5	15	29.6	31.5	15.1	3.1	0.2	#
57.	Qatar	17.8	22.4	23.2	18.3	11.1	5.4	1.5	0.2
64.	Indonesia	1.7	14.1	37.6	34.3	11.2	1.0!	#	#

Keterangan:

- ! : Interpret data with caution. Estimate is unstable due to high coefficient of variation
- † : Reporting standards not met
- # : Rounds to zero

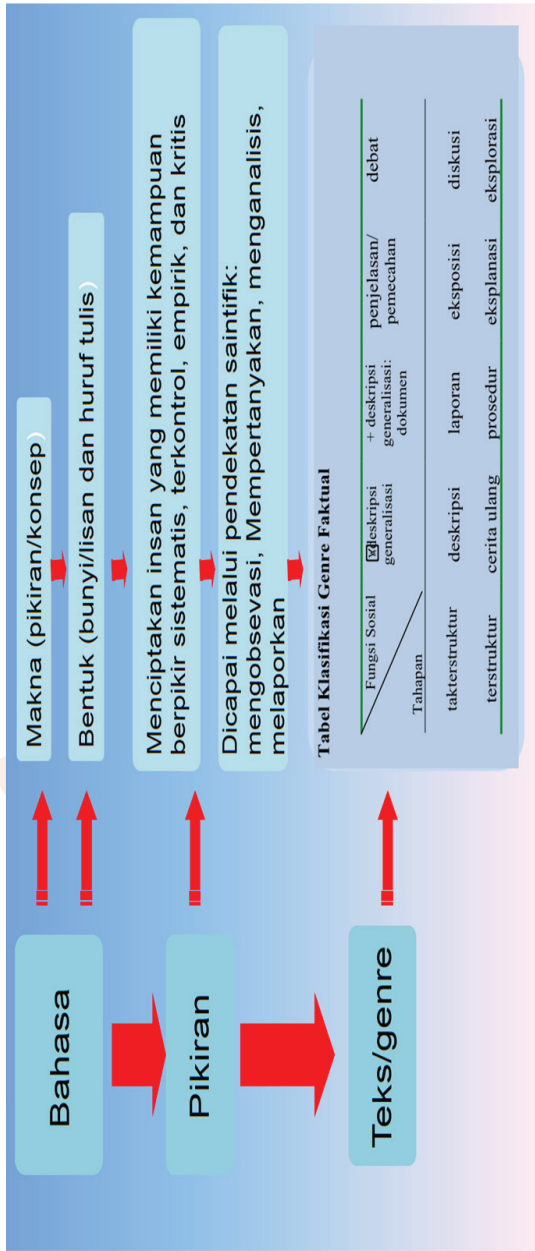
Baik hasil PISA tahun 2009 maupun 2012 kondisi siswa Indonesia tidak jauh berbeda, karena Indonesia berada pada posisi terendah setelah Qatar (urutan ke 64 dari 65 negara yang disurvei untuk tahun 2009) dan berada pada urutan di atas Qatar (urutan 57 pada tahun 2012) dan persentase kemampuan membaca siswa masih dominan pada peringkat menengah ke bawah, bahkan persentase yang relatif sama dan lebih besar berada pada peringkat/level: 1a dan peringkat/level: 2, sementara yang berada pada peringkat/level menengah ke atas sangat kecil: 1,5% (untuk level 4, tahun 2012) dan 1,0% (untuk level 4, tahun 2009). Untuk jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 11.

Tabel 11. Perbandingan Persentase Capaian PISA Bahasa Tahun 2012 dan 2009

Tahun	Peringkat/Level							
	Below Level 1b	Level 1b	Level 1a	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5	Level 6
2012	4.1	16.3	34.8	31.6	11.5	1.5	0.1	0.0
2009	1.7	14.1	37.6	34.3	11.2	1.0	0.0	0.0

Tabel di atas menggambarkan bahwa prestasi siswa Indonesia dominan berada pada peringkat/level menengah ke bawah (peringkat 3 ke bawah) dan sebagian kecil mencapai peringkat 4 (1,5% dan 1,0% untuk masing-masing tahun 2012 dan 2009). Tidak terdapat siswa yang mencapai peringkat 5 dan 6 untuk tahun 2012. Sementara itu, peringkat 3 ke bawah (peringkat: 3, 2, 1b, dan 1a) menunjukkan kemampuan menjawab soal-soal yang bersifat hafalan, karena jawaban atas pertanyaan sudah tersedia di dalam teks. Dengan mengingat teks yang dibaca sebelum menjawab pertanyaannya, siswa akan mampu mencapai skor untuk peringkat tersebut. Adapun peringkat keempat ke atas sudah menggambarkan kemampuan menjawab pertanyaan yang memerlukan pemikiran, karena untuk menjawab soal-soal itu dituntut kemampuan membuat inferensi terhadap hal-hal yang tidak dinyatakan secara eksplisit di dalam teks. Dengan kata lain, 98,5% dan 99% untuk masing-masing tahun 2012 dan 2009, siswa Indonesia hanya mampu menjawab soal yang bersifat hafalan. Kecil sekali persentase siswa Indonesia yang mampu menjawab soal yang memerlukan pemikiran. Persoalannya, mengapa anak-anak Indonesia tidak mampu mengembangkan pemikirannya, padahal, pembelajaran bahasa (Indonesia) sudah diajarkan sejak sekolah dasar? Bukankah bahasa selain sebagai sarana berpikir juga sekaligus berfungsi sebagai sarana pembentuk pikiran penuturnya. Dengan demikian, ada persoalan dalam pembelajaran bahasa Indonesia selama ini. Sebelum menjawab persoalan di atas ada baiknya ditunjukkan terlebih dahulu bahwa bahasa manusia memang berfungsi membentuk pikiran penuturnya berikut ini.

Gambar 5. Bahasa Sebagai Sarana Berpikir



Pada dasarnya, ada dua unsur utama pembentuk bahasa manusia, yaitu komponen makna, gagasan, atau pikiran dan komponen bentuk yang di dalamnya dapat berwujud deretan bunyi-bunyi, jika berupa bahasa lisan dan dapat berwujud deretan huruf-huruf, jika berupa bahasa tulis. Untuk jelasnya, dapat dilihat dalam Gambar 5.

Kedua unsur pembentuk bahasa manusia itu harus hadir, jika salah satu di antaranya tidak ada maka tidak akan membentuk bahasa. Apabila hanya unsur bentuk saja yang hadir, dengan tanpa kehadiran unsur makna, pikiran, maka tidak akan membentuk bahasa, misalnya: secara tiba-tiba ada orang melafalkan bunyi-bunyi: [nakma...] atau menulis huruf-huruf: <nakma...> , maka gabungan bunyi yang dilafalkan atau huruf yang dituliskan itu tidak akan membentuk bahasa dalam sistem leksikal bahasa Indonesia, karena gabungan dari bunyi atau huruf tersebut tidak mengandung makna, gagasan, atau pikiran; berbeda misalnya jika bunyi itu berupa: [makan...] atau dalam bentuk tulisan: <makan...> maka gabungan bunyi atau huruf itu dapat membentuk bahasa, karena memiliki makna, gagasan, atau pikiran. Hal yang sama, terjadi jika hanya komponen makna, gagasan, atau pikiran yang hadir, juga tidak akan membentuk bahasa, karena bagaimana dapat diketahui apa yang ada dalam pikiran seseorang tanpa diekspresikan dalam wujud bentuk-bentuk kebahasaan? Begitu pentingnya kedua komponen pembentuk bahasa itu, maka keduanya harus hadir jika akan membentuk bahasa. Namun demikian, di antara kedua komponen itu, ternyata komponen makna, gagasan, atau pikiran merupakan komponen yang sangat penting, misalnya tuturan bahasa Indonesia: *Eli menikahi Tono*, merupakan tuturan yang secara bentuk kebahasaan sudah memenuhi standar gramatika bahasa Indonesia, karena sudah memenuhi struktur dasar minimal sebuah kalimat, yaitu memiliki: Subjek (S), Predikat (P), dan Objek (O). Namun, karena struktur yang sudah benar dari segi bentuk itu tidak memiliki makna, gagasan, atau pikiran, maka tuturan itu

bukan bahasa. Mungkin sebagian orang akan mengatakan bahwa tuturan itu sudah mengandung makna, gagasan, atau pikiran, namun makna, gagasan, atau pikiran yang dikandung tuturan itu tidak lazim dalam sistem budaya orang Indonesia. Di Indonesia tidak lazim orang wanita yang menikahi laki-laki, tetapi sebaliknya yang lazim adalah laki-laki menikahi wanita. Artinya, komponen makna, gagasan, atau pikiran merupakan komponen utama pembentuk bahasa, sedangkan komponen bentuk kebahasaan hanya merupakan wujud ekspresi dari pikiran. Hal ini menjadi sepadan dengan fungsi hakiki bahasa sebagai sarana pembentuk pikiran manusia.

Apabila bahasa memiliki fungsi utama sebagai sarana pembentuk pikiran, berarti kondisi lemahnya siswa Indonesia dalam menjawab soal-soal yang membutuhkan pikiran, menggambarkan ada persoalan dalam pembelajaran bahasa, khususnya bahasa Indonesia, selama ini. Untuk menjawab hal itu ada baiknya ditinjau beberapa rumusan kompetensi dalam Kurikulum 2006 (KTS) berikut ini.

Dalam KTSP masih banyak ditemukan rumusan kompetensi dasar, misalnya rumusan KD untuk kelas I dan II:

Rumusan KD kelas I semester 1 berikut:

- a. KD-3.1: “Membaca nyaring suku kata, kata dengan lafal yang tepat”
- b. KD-3.2: “Membaca nyaring kalimat sederhana dengan lafal dan intonasi yang tepat”

Rumusan KD kelas II, semester 2:

- c. KD-7.1: “Membaca nyaring teks (15-20 kalimat) dengan memerhatikan lafal dan intonasi yang tepat”.

Kedua rumusan KD di atas jelas-jelas mencerminkan pembelajaran yang menekankan pada pencapaian kompetensi yang menitikberatkan pada penguasaan komponen bentuk bahasa, yang ditandai dengan penggunaan kata: “Membaca... dengan lafal...”.

Konstruksi “...membaca dengan lafal...” jelas-jelas menunjukkan komponen bentuk. Dengan demikian, jika kurikulumnya saja sudah berorientasi pada bentuk, maka wajar saja siswa tidak berkembang kemampuan berpikirnya, karena memang tidak ditujukan untuk itu. Persoalannya, lalu bagaimanakah wujud materi pembelajaran bahasa yang memberi penekanan pada penguasaan kompetensi pengembangan pikiran. Dalam konteks ini, perlu dilakukan uji coba pengembangan materi pembelajaran bahasa yang memberi penekanan pada pengembangan kemampuan berpikir. Materi pembelajaran tersebut haruslah tidak terikat pada jenis kurikulum. Artinya, perlu ada rancangan materi yang menganut semboyan: “Apa pun kurikulumnya, pembelajaran bahasa Indonesia yang berbasis pada pengembangan struktur berpikir solusinya”. Dengan materi semacam itu, maka guru tidak akan terombang ambing dengan kebijakan pengembangan kurikulum. Lalu materi pembelajaran bahasa yang bagaimanakah yang memiliki kelenturan dalam penerapannya itu?

Kalau berpijak pada satuan bahasa yang mengandung struktur berpikir yang lengkap dan memenuhi ciri-ciri berpikir ilmiah, maka materi dimaksud terdapat dalam satuan bahasa yang disebut teks. Teks dimaknai sebagai bahasa yang sedang menjalankan fungsinya. Mengingat fungsi bahasa itu sangat banyak, di antaranya dapat berfungsi untuk menggambarkan, menjelaskan, memerintahkan, mengalasikan, dan menceritakan maka setiap upaya pencapaian fungsi itu memiliki cara dan struktur berpikir tersendiri. Artinya, berbeda fungsi akan berbeda jenis teksnya. Teks yang digunakan untuk penggambaran situasi dengan struktur teks yang digunakan untuk penjelasan, pengalasan, penceritaan, dan pemberian perintah akan berbeda struktur berpikirnya. Sebagai contoh, bandingkan dua jenis teks berikut, yang satunya berupa teks naratif dan yang satunya teks prosedur/arahan. Keduanya, masing-masing merupakan wujud dari jenis teks yang berhubungan dengan fungsi penceritaan dan fungsi pemberian perintah/arahan.

Teks Anekdotal

Pemadaman Listrik Bergilir	Judul
Akhir-akhir ini masih sering terjadi pemadaman listrik bergilir. Semua tempat di sekitar rumah saya terjadi pemadaman listrik setiap minggunya.	Pengenalan
Saat saya sedang mendengarkan radio, listrik padam. Malam ini giliran listrik di rumah saya yang padam. Saya panik dan langsung meloncat dari tempat tidur untuk keluar dan lari dari dalam kamar. Ketika saya berada di dekat pintu, tiba-tiba ada wajah yang menakutkan berada di hadapan saya. Saya berteriak karena ketakutan.	Krisis
Saya mencoba memukul wajah yang menyeramkan itu. Waktu saya pukul, orang itu menangis dan minta ampun. Ternyata orang itu adik saya yang sedang menakut-nakuti dengan menggunakan senter di wajahnya.	Reaksi

Teks Prosedur/Arahan

Benda Pengantar Listrik	Judul
Menyalakan lampu dengan memanfaatkan energi listrik	Tujuan
Untuk mengetahui benda yang dapat mengantar listrik, perlu dilakukan percobaan. Sebelum percobaan dilaksanakan, bahan-bahan yang diperlukan, disiapkan terlebih dahulu. Bahan-bahan itu adalah: (a) baterai, (b) dua buah kabel, (c) bohlam, (d) benang, dan (e) tali plastik.	Daftar Bahan
Setelah bahan-bahan yang diperlukan terkumpul, maka lakukanlah langkah-langkah berikut. Pertama, hubungkan kedua kabel masing-masing pada kedua ujung baterai. Selanjutnya, hubungkan kedua ujung kabel ke bohlam. Bohlam akan menyala. Kedua, gantikan kabel itu dengan benang. Hubungkan kedua benang pada kedua ujung baterai. Kemudian hubungkan kedua benang itu ke bohlam. Bohlam tidak menyala. Selanjutnya, hal yang sama, ganti kedua benang itu dengan tali plastik. Kemudian hubungkan kedua tali plastik itu ke bohlam. Bohlam tidak menyala.	Urutan tahapan pelaksanaan
Dari percobaan tersebut, terlihat bahwa bohlam menyala ketika dihubungkan pada baterai dengan menggunakan kabel. Namun, bohlam tidak menyala ketika dihubungkan pada baterai dengan menggunakan benang dan tali plastik.	Pengamatan
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kabel dapat mengantar arus listrik, sedangkan benang dan tali plastik tidak dapat mengantar arus listrik.	Simpulan

Kedua jenis teks di atas memiliki struktur berpikir yang berbeda karena memang fungsi sosial yang hendak dijalankan berbeda. Apabila teks naratif memiliki struktur berpikir: pengenalan, masalah, dan pemecahan masalah, maka teks prosedur atau arahan memiliki struktur berpikir: tujuan yang hendak dicapai, kemudian diikuti oleh alat-alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan, urutan pelaksanaan, pengamatan, dan simpulan. Apabila semua jenis teks itu diajarkan maka siswa akan memiliki berbagai struktur berpikir sesuai dengan tujuan sosial berbahasa. Semakin banyak jenis teks yang dikuasai, semakin banyak struktur berpikir yang dikuasai untuk mengekspresikan kemampuan berpikirnya.

Selain penetapan standar isi, juga perlu ditetapkan standar proses, dalam hal ini metode pembelajarannya. Metode pembelajaran yang baik, paling tidak, sesuai dengan karakter materi (standar isi). Sebagai satuan bahasa yang memiliki struktur berpikir lengkap dan untuk menghasilkan teks itu memerlukan informasi (untuk teks jenis cerita) atau data (untuk teks, misalnya jenis deskripsi) maka dalam pembelajaran bahasa berbasis pada pengembangan struktur berpikir dapat menggunakan metode ilmiah (*saintifik*). Ada dua alasan utama mengapa pendekatan ilmiah relevan untuk pembelajaran bahasa berbasis pengembangan struktur berpikir, pertama karena semua jenis teks yang dihasilkan itu memerlukan data, sehingga tahapan ilmiah yang berupa: pengumpulan dan analisis data, serta penyajian hasil analisis dapat diterapkan; kedua, oleh karena tahapan kegiatan ilmiah menjadi dasar untuk membangun teks, maka langkah-langkah berpikir sistematis, terkontrol, empirik, dan kritis menjadi pegangan dalam melaksanakan tahapan ilmiah untuk memproduksi teks. Metode pembelajaran lanjutan yang dapat dipadukan dengan metode ilmiah tersebut adalah pembelajaran berbasis proyek. Siswa dapat ditugasi memproduksi jenis teks tertentu dengan mengajukan usulan proyek penyusunan jenis teks tertentu sesuai penugasan.

Beberapa persyaratan yang harus dilalui dalam pembelajaran berbasis proyek:

- a. Siswa diminta menentukan topik kegiatan yang akan dilakukan,
- b. Siswa merumuskan pertanyaan penuntun sebagai proses *inquiry*,
- c. Siswa menetapkan kerangka kerja (mendesain pelaksanaan proyek dalam satu usul kegiatan/proposal proyek), yang merupakan jabaran kegiatan dalam rangka menjawab masalah yang diajukan, yang dimulai dari penetapan:
 - i. Wujud informasi/fakta/data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan,
 - ii. Menetapkan sumber informasi/fakta/data,
 - iii. Menetapkan metode pengumpulan informasi/fakta/data,
 - iv. Menetapkan metode/teknik yang digunakan dalam menganalisis data: menafsirkan, mengevaluasi, mensintesis,
 - v. Menetapkan wujud penyajian hasil analisis sebagai kegiatan terakhir dalam rangka menginformasikan/mengkomunikasikan hasil kegiatan.
- d. Siswa membuat desain proyek dalam bentuk usul kegiatan (proyek proposal), yang memuat: topik kegiatan, masalah utama yang hendak dipecahkan, wujud dan sumber data/informasi/fakta, metode pengumpulan, analisis. Serta penyajian hasil;
- e. Menetapkan jadwal pelaksanaan tahapan-tahapan kegiatan tersebut;
- f. Melaksanakan kegiatan yang telah diusulkan dalam desain usul kegiatan (usulan proyek)
- g. Siswa melakukan refleksi terhadap langkah-langkah yang dilakukan untuk memperkuat pemahaman melalui penguatan dan perbaikan atas segala persoalan yang timbul dalam proses pemecahan masalah.

Selain menetapkan standar kompetensi, standar isi, standar proses, inovasi pembelajaran bahasa Indonesia sebagai ikhtiar kebijakan memperbaiki pendidikan, khususnya pendidikan bahasa Indonesia, juga perlu ditetapkan standar penilaian. Terkait hal itu, penilaian yang relevan untuk pembelajaran bahasa Indonesia berbasis pada pengembangan struktur berpikir dengan metode pembelajaran melalui pendekatan ilmiah berbasis proyek, adalah penilaian autentik.

Terdapat keterkaitan antara pembelajaran bahasa Indonesia berbasis pengembangan struktur berpikir dengan penilaian autentik. Apabila pada penilaian autentik penekanannya pada penilaian kinerja yang meminta peserta didik untuk mendemonstrasikan keterampilan dan kompetensi tertentu sebagai refleksi dari pengetahuan yang telah dikuasainya, maka hal yang serupa dijadikan dasar dalam pembelajaran berbasis pengembangan struktur berpikir. Pada pembelajaran berbasis pengembangan struktur berpikir yang menjadikan teks sebagai materi dasar pembelajaran, maka harus bersifat kontekstual. Pembelajarannya dilakukan dengan upaya memberikan konteks konkret pada berbagai kompetensi yang dibelajarkan, seperti dapat dilihat pada pilihan jenis teks tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Pada tahap-tahap awal seseorang memasuki dunia pendidikan, teks yang dipilih untuk diajarkan adalah teks cerita personal. Hal itu, dimaksudkan agar siswa memperoleh pengetahuan bagaimana cara memperkenalkan diri terhadap teman-teman barunya di kelas, walaupun dalam wujud sederhana. Begitu pula, pada kelas VII diajarkan teks laporan observasi, karena diharapkan peserta didik pada tingkat pendidikan itu sudah memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian walaupun dalam bentuk pengamatan sederhana. Artinya, pembelajaran teks yang bersifat kontekstual itu tidak mungkin hanya bersifat teoretis, melainkan harus berangkat dari konteks nyata yang disiasati melalui berbagai bentuk

pembelajaran, misalnya melalui pembelajaran berbasis proyek dengan pendekatan ilmiah. Dalam pada itu, pembelajaran teks yang bersifat kontekstual itu juga menekankan pentingnya kompetensi kinerja, yaitu kompetensi melakukan sesuatu yang secara nyata dibutuhkan bagi kebutuhan hidup peserta didik dalam masyarakat. Dengan demikian, terlihatlah keterkaitan antara penilaian autentik dengan pembelajaran berbasis pengembangan struktur berpikir yang menjadikan teks sebagai basis pembelajarannya. Keduanya menekankan pada kompetensi kinerja. Lebih jauh tentang pembelajaran bahasa Indonesia berbasis pada pengembangan struktur berpikir melalui metode pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah dan berbasis proyek serta tata cara penilaian autentik terhadap capaian hasil belajar dapat dilihat dalam Mahsun (2014).

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa menghadirkan negara dalam negara sendiri melalui penguatan identitas yang berupa bahasa negara, perlu diletakkan pada penguatan dunia pendidikan, khususnya pendidikan bahasa Indonesia sebagai basis utamanya. Penguatan tersebut dilakukan dengan mengembangkan materi, metode pembelajaran, dan sistem penilaian capaian hasil pembelajaran yang relevan dan fleksibel. Suatu pengembangan isi, metode, dan sistem penilaian yang tidak terikat pada jenis kurikulum tertentu melalui inovasi pembelajaran. Dalam konteks itu, perlu dikembangkan pembelajaran bahasa Indonesia yang berbasis pada pengembangan struktur berpikir, karena fungsi hakiki bahasa adalah sarana berpikir dan sarana pembentuk pikiran manusia.

B. Penguatan BI melalui Jalur Pendidikan Masyarakat

Pembinaan bahasa yang dilakukan Pusat Pembinaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dapat dikategorikan sebagai bentuk pendidikan masyarakat, karena sarannya adalah masyarakat tutur bahasa Indonesia. Sehubungan dengan itu, menarik untuk dicermati kondisi pemakaian bahasa di luar ruang

di wilayah Indonesia yang hampir-hampir tidak memperlihatkan kehadiran negara di ruang publik. Bertahun-tahun telah dilakukan penyadaran masyarakat melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik dan bahkan dalam bentuk tatap muka langsung berupa kegiatan penyuluhan bahasa dengan berbagai kelompok sasaran. Apabila kondisi pemakaian bahasa di luar ruang itu, dapat dijadikan indikator capaian pendidikan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa pembinaan bahasa melalui jalur tersebut belum membuahkan hasil sesuai yang diharapkan. Dari hari ke hari ruang publik kita banyak diwarnai pemakaian bahasa Indonesia yang kurang tertib, bahkan lebih dari itu masih banyak dijumpai pemakaian bahasa asing yang kurang pada tempatnya. Lalu di manakah letak kegiatan pembinaan bahasa selama ini.

Pembinaan bahasa Indonesia sebagai salah satu bentuk pendidikan masyarakat, dilaksanakan tidak berbasis pada hasil kajian. Segmen sosial yang disentuh tidak didasarkan atas hasil analisis situasi. Memang terdapat kajian yang berupa survei pemakaian bahasa di luar ruang, tetapi analisisnya lebih terfokus pada analisis dari aspek substansi kebasaaannya. Bentuk-bentuk kesalahan penggunaan bahasa itulah yang menjadi sasaran, sehingga produk akhir dari kegiatan itu berupa senarai padanan kata/istilah bahasa Indonesianya dari kata/istilah asing yang dijumpai dalam pemakaian bahasa di luar ruang. Ada kegiatan penyuluhan bahasa sebagai bentuk tindakan lanjutan dari hasil pemantauan pemakaian bahasa, tetapi sasarannya bukanlah orang atau pihak yang memproduksi bahasa-bahasa di luar ruang tersebut. Hal ini disebabkan hasil survei tidak mengidentifikasi segmen sosial yang memproduksi bahasa di luar ruang. Yang diidentifikasi adalah aspek kebasaaannya.

Analisis aspek kebasaaan memang sangat penting untuk penyiapan bahan pembinaan, tetapi yang tidak kalah penting ialah ke pihak manakah materi itu akan disampaikan. Antara

realita kebahasaan dengan pencipta realita tersebut bagaikan dua sisi dari mata uang. Keduanya penting dalam rangka pelaksanaan pendidikan kebahasaan melalui jalur pendidikan masyarakat.

Hal lain yang perlu diperhatikan ialah pendekatan pelaksanaan pembinaan atau pendidikan masyarakat tersebut. Jika pendekatannya hanya mengandalkan model tatap muka, dialog, yang berlangsung secara eksidental, tidak terencana, terarah, dan terukur maka kegiatan pendidikan/pembinaan itu bagaikan menggarami lautan. Untuk itu diperlukan inovasi pendekatan pelaksanaan pembinaan bahasa Indonesia yang lebih terencana, terarah, dan terukur dan lebih ke arah membangun partisipasi khalayak sasaran. Perlu kesadaran atas pentingnya bahasa Indonesia dalam membangun keindonesiaan. Materi-materi yang non substantif tetapi menyadarkan khalayak sasaran akan pentingnya peran bahasa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu disajikan. Pendeknya, materi-materi tentang peran kesejarahan bahasa Indonesia dalam membangun bangsa seperti yang disajikan untuk materi pada pendidikan formal haruslah disajikan sebagai materi pendamping materi substansi kebahasaan. Selain itu, materi tentang potensi disintegrasi bangsa dari aspek kebahasaan patut pula disajikan, seperti materi segmentasi kewilayahan Indonesia berdasarkan politik kebahasaan. Materi yang bersifat membangun kemauan yang kuat untuk bersikap positif terhadap bahasa negara ini penting untuk mengajak masyarakat mengawasi dan meluruskan pemakaian bahasa di sekitar mereka. Mereka mengidentifikasi persoalan kebahasaan yang ada di sekitar mereka dan mereka pula yang mencari pemecahannya. Model pendidikan masyarakat yang bersifat partisipatori memberi keleluasaan pada masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan berbahasa Indonesia mereka dalam kehidupan nyata. Dengan kata lain, membangun potensi kesadaran bernegara melalui kesadaran berbahasa negara secara tertib pada setiap warga masyarakat Indonesia merupakan model pendidikan masyarakat yang dipandang efektif.

5.1.2 Penguatan Bahasa Indonesia di Luar Negara

Sebagai sebuah negara bangsa yang berdaulat, keberadaan Indonesia tidak cukup hanya kuat di dalam negaranya sendiri, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari negara lain. Salah satu bentuk pengakuan itu adalah diterimanya keberadaan bahasa sebagai identitas dan jati diri bangsa. Wujud pengakuan tersebut adalah dibelajarkannya bahasa Indonesia di negara itu. Artinya, semakin banyak negara yang belajar bahasa Indonesia, berarti semakin banyak negara yang mengakui keberadaan Indonesia. Dengan kata lain, pembelajaran bahasa Indonesia di luar negara menjadi sarana diplomasi bagi bangsa Indonesia dalam rangka membangun kemandirian bangsa di mata dunia.

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan terhadap negara-negara yang membelajarkan bahasa Indonesia untuk warganya, melalui surat-menyurat dengan KBRI/KJRI pada tahun 2012 – 2013, diperoleh informasi bahwa terdapat 174 pusat pembelajaran bahasa Indonesia, yang tersebar di 45 negara. Tempat-tempat pembelajaran itu berupa universitas, KBRI/KJRI, lembaga kursus. Negara-negara yang menjadi tempat pembelajaran bahasa Indonesia menyebar di Benua Asia, Australia, Amerika, Eropa, Afrika dengan kondisi bervariasi. Beberapa di antaranya dapat dilihat dalam lampiran 2.

Selain dukungan banyaknya negara penyelenggara BIPA di luar negara, terdapat juga daya dukung lain yang dapat mempercepat keberterimaan bahasa Indonesia di luar negara, yaitu (a) tersedia perangkat hukum yang menjadi payung penyebaran bahasa Indonesia di luar negara (UU Nomor 24 Tahun 2009); (b) tersedia substansi dasar pengembangan bahan pembelajaran yang berupa sistem bahasa Indonesia standar yang mencakup ejaan, tata bahasa, kamus yang sudah mencapai 90.000 **lema** ditambah 350.000 kata dan istilah untuk 41 bidang ilmu, alat uji kemahiran berbahasa Indonesia (UKBI); (c) sistem bahasa Indonesia yang relatif sederhana, tidak mengenal kala seperti bahasa-bahasa Indo-Eropa;

apa
benar
ya pak?

(d) muncul organisasi profesi yang bergerak pada tataran non negara yang menyelenggarakan pembelajaran bahasa Indonesia di luar negara, seperti: ASILE dan *Westralian Indonesian Language Teacher Association* (WILTA di Australia), ACICIS (konsorsium pengajar BIPA di Australia), *Consortium of the Teaching of Indonesia* (COTI di Amerika), Himpunan Penguji Bahasa Indonesia (HIPUBI di Jepang); (e) program beasiswa bagi orang asing dari berbagai negara (Darmasiswa); (f) di dalam negara juga terdapat tidak kurang 93 lembaga penyelenggara BIPA yang tersebar di seluruh penjuru tanah air, yang berupa perguruan tinggi, lembaga kursus, organisasi profesi (APBIPA). Namun demikian, bukan berarti tanpa tantangan.

Berbagai tantangan yang dihadapi dalam upaya penyebarluasan bahasa Indonesia yaitu (a) sikap sebagian masyarakat Indonesia yang belum positif terhadap bahasa Indonesia, (b) didukung oleh sikap pemerintah belum menjadikan bahasa Indonesia sebagai prioritas dalam rangka pengembangan diplomasi halus (*soft diplomacy*); (c) kurangnya koordinasi antarpihak terkait dalam negeri dalam rangka internasionalisasi bahasa Indonesia sehingga keberadaan institusi resmi negara yang menangani masalah kebahasaan (Badan Bahasa) bukan merupakan satu-satunya pintu utama pengelolaan masalah kebahasaan; (d) kualitas dan kuantitas tenaga pengajar serta pendukungnya belum memadai; (e) pemberian beasiswa bagi warga negara asing serta persyaratan tenaga kerja asing belum menjadikan kemampuan berbahasa Indonesia sebagai salah satu persyaratan; (f) kuatnya kesan bahwa bahasa Indonesia merupakan salah satu varian/dialek bahasa Melayu (sama dengan bahasa Melayu di Thailand, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura), karena peran pakar asing yang lebih memilih topik kajiannya bahasa Melayu, menyebabkan marwah bahasa Indonesia tersubordinasi di bawah Melayu. Kesan ini diperkuat masih ada sebagian masyarakat Indonesia termasuk para pimpinan bangsa yang menerima pandangan itu, karena keterbatasan pemahaman.

Masih berjalannya kerja sama kebahasaan Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam (Mabbim), juga turut memperkuat kesan tersebut.

Dalam rangka mempertegas identitas keindonesiaan, yang salah satunya berupa bahasa nasional, bangsa Indonesia perlu belajar dari negara-negara yang tergabung dalam masyarakat Ekonomi Eropa (Uni Eropa), yang setiap negara menyatakan secara tegas tentang identitas mereka. Bahasa nasional negara-negara yang tergabung dalam masyarakat Uni Eropa diakui sebagai bahasa resmi. Artinya, setiap negara mempertegas kemandirian mereka sebagai sebuah negara bangsa. Dalam hubungan dengan itu, piagam kerja sama Asean yang sudah ditandatangani 2007 yang di dalamnya memuat bahasa kerja sama Asean adalah bahasa Inggris belum terlambat untuk ditinjau kembali. Sangat menarik untuk direnungkan, bagaimana Austria yang perbedaan bahasanya dengan bahasa Jerman hanya terjadi pada 23 kosakata yang menyangkut bidang makanan meminta agar diakui sebagai varian yang berbeda dengan bahasa Jerman sebagai persyaratan untuk masuk menjadi anggota Uni Eropa. Tuntutan Austria itu dimuat dalam piagam Uni Eropa, protokol Nomor: 10. Di samping itu, pemerintah perlu meninjau kembali kerja sama kebahasaan dengan negara tetangga Malaysia dan Brunei Darussalam, karena semakin kurang efektif.

Seiring dengan itu, pembenahan hal-hal yang bersifat substantif kebahasaan sebagai komponen utama dan penting bagi upaya memperlancar proses penyebarluasan bahasa negara, seperti materi pembelajaran BIPA yang sesuai kebutuhan dan peringkat pembelajar, media pembelajaran, alat evaluasi hasil pembelajar, kualitas tenaga pembelajar harus ditangani secara sungguh-sungguh.

Selain itu, perlu dirancang berbagai bentuk program kemitraan antarpemangku kepentingan BIPA untuk memfasilitasi lembaga BIPA di luar negeri, antara lain, melalui penyediaan dan pelatihan tenaga pengajar serta penyediaan perangkat pembelajaran, seperti

kurikulum, silabus, dan bahan ajar. Hal lain yang tidak kalah penting adalah payung hukum yang menyangkut kebijakan-kebijakan seperti peraturan perundang-undangan, pedoman, dan prosedur operasional standar sebagai landasan dan acuan pengembangan program BIPA.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah perlu difasilitasi terbentuknya lembaga yang menjadi wadah segala bentuk kegiatan yang menunjang upaya penyebarluasan bahasa negara melalui pembelajaran BIPA di berbagai negara, baik yang dikelola oleh pemerintah Indonesia melalui KBRI/KJRI maupun yang dikelola lembaga swasta negara setempat. Lembaga yang diusulkan tersebut secara konkret berbentuk institut bahasa Indonesia.

Perlu memaksimalkan peran (a) KBRI/KJRI/Atdikbud, (b) Perguruan tinggi di LN, (c) WNI yang menjadi *permanent resident* di LN, (d) Pemerhati studi Indonesia di LN, (e) WNI yang belajar, bertugas, dan bekerja di LN, (f) WNA peneliti tentang Indonesia (g) WNA yang belajar, bekerja, dan berwisata di Indonesia, (h) Perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia, (i) Media cetak dan elektronik asing yang berhaluan Indonesia, (j) Negara yang berpotensi menjadi investor di Indonesia, dan (k) Perwakilan Negara Asing (kedubes/konsulat) yang ada di Indonesia, serta (l) WNA yang menikah dengan orang Indonesia dan menjadi WNI sebagai agen penyebarluasan bahasa negara.

Kemudian, dalam hubungannya dengan munculnya kesan bahasa Indonesia ter subordinasi bahasa Melayu, perlu digalakkan kajian Indonesia dengan melibatkan para indonesianis, sehingga resonansi tentang bahasa Indonesia mampu menembus wacana akademik dunia. Termasuk dalam hal itu, adalah pembuktian tentang asal orang-orang Austronesia dari wilayah Indonesia, bukan dari Indocina atau Melanesia perlu digalakkan, karena seiring dengan itu hipotesis tentang lokasi atlantis, sebuah benua yang menjadi pusat peradaban dunia dalam legenda Plato, akan saling mendukung dengan bukti peradaban Austronesia awal.

5.2 Membangun Kemandirian Bangsa melalui Penguatan Peran Bahasa Daerah

Seperti disebutkan dalam uraian-uraian di atas bahwa berdasarkan pemetaan bahasa sampai 2014 diperoleh gambaran di Indonesia terdapat 659 bahasa daerah, seperti diperlihatkan pada peta dalam lampiran 1. Keberadaan bahasa-bahasa tersebut sebagian besar terancam kepunahan. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan bahasa-bahasa daerah itu terancam punah, yaitu:

- a. Sebagian besar bahasa itu memiliki penutur di bawah 1.000 jiwa. Bahasa-bahasa dalam kondisi ini banyak ditemukan di kawasan timur Indonesia, seperti NTT, Maluku, Maluku Utara, Halmahera, dan Papua, Papua barat;
- b. Globalisasi mendorong kelas menengah, baik di perkotaan maupun di perdesaan, merasa bergengsi menggunakan bahasa asing, sehingga cenderung meninggalkan bahasa ibu mereka, yang berupa bahasa daerah;
- c. Proses nasionalisasi bahasa negara, bahasa Indonesia, cenderung meminggirkan keberadaan bahasa-bahasa daerah;
- d. Pengembangan bahasa daerah, khususnya pengembangan daya ungkap (kamus), pengembangan tata bahasa, ejaan, masih belum mendapat perhatian dari pemerintah daerah seiring era otonomi daerah. Hal itu pula didorong kurangnya kemauan Pemda setempat untuk mendukung bahasa daerah sebagai materi muatan lokal pada pendidikan formal.

Kondisi bahasa daerah yang sebagian besar mengkhawatirkan itu perlu mendapat perhatian, karena keberadaan bahasa daerah sangat bermanfaat:

- a. Sebagai bukti untuk memahami kandungan makna semboyan negara bangsa “Bhinneka Tunggal Ika”, karena secara historis, bahasa-bahasa serumpun memelihara unsur-unsur kebahasaan yang memperlihatkan pertalian bahasa-bahasa tersebut satu dengan yang lainnya.

- b. Sebagai pembentuk pikiran penuturnya, bahasa-bahasa daerah yang menjadi bahasa pertama anak bangsa Indonesia dapat menyediakan bukti penjejakan cara pandang suku-suku bangsa pemilikinya. Pemahaman akan cara pandang suku-suku bangsa itu tidak hanya menjelaskan cara pandang terhadap keberadaan suku bangsa itu secara internal, tetapi juga memuat gambaran cara pandang suku bangsa itu terhadap suku bangsa lain yang berkontak dengannya. Bukti-bukti itu dapat ditemukan dalam terminologi yang menyangkut, misalnya stereotipe, ungkapan-ungkapan dan lainnya. Pemahaman atas cara pandang suku bangsa dengan sendirinya dapat menjadi pintu masuk memahami perilakunya. Sementara itu, pemahaman atas cara pandang yang memengaruhi perilaku dapat menjadi titik masuk bagi pemahaman antarsuku bangsa dalam rangka membangun komunikasi sosial menuju integrasi sosial dan integrasi bangsa.
- c. Menjadi sumber pendukung dan pemer kaya bahasa nasional/negara, terutama menyangkut pemer kaya daya ungkap yang mencerminkan kondisi sosial budaya dan ilmu pengetahuan tradisional. Semakin terbuka ruang bagi kontribusi bahasa daerah itu pada upaya mendukung dan memper kaya daya ungkap bahasa negara, semakin memunculkan kepercayaan penuturnya terhadap keberadaannya dalam NKRI. Kondisi ini dapat dijadikan modal sosial dalam membangun kebersamaan bangsa.
- d. Bahasa daerah yang kaya akan daya ungkap yang mengandung dimensi afektif, emosional, sistem tingkat tutur, sistem honorifik (bentuk hormat) dapat menjadi sarana penumbuhan budi pekerti anak bangsa. Dalam konteks ini, cerita-cerita lokal, dongeng-dongeng lokal, legenda dengan berbagai kearifan tokoh yang digambarkannya dapat menjadi sumber literasi sekolah yang menginspirasi siswa untuk berperilaku arif dan santun.

Kekayaan berupa modal sosial bangsa yang terpendam dalam potensi bahasa dan sastra daerah/lokal haruslah dilindungi, dibina,

dan dikembangkan. Perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa dan sastra daerah mestinya diletakkan dalam satu kerangka kebijakan politik bahasa nasional yang holistik. Kerangka kebijakan tersebut dapat memberikan arah bagi perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa dan sastra daerah dalam empat kerangka strategis, yaitu:

- a. perlindungan, pembinaan, dan pengembangan secara terarah, terencana, dan terukur melalui jalur pendidikan;
- b. perlindungan, pembinaan, dan pengembangan secara terarah, terencana, dan terukur melalui jalur penguatan partisipasi masyarakat. Jadi, perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa dan sastra daerah yang bersifat partisipatori;
- c. perlindungan, pembinaan, dan pengembangan secara terarah, terencana, dan terukur melalui jalur konservasi/dokumentasi;
- d. perlindungan, pembinaan, dan pengembangan secara terarah, terencana, dan terukur melalui kajian kekerabatan antarbahasa untuk menemukan keterhubungan satu dengan yang lainnya.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan berhubungan dengan kerangka kebijakan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa dan sastra daerah secara terarah, terencana, dan terukur melalui jalur pendidikan. Hal-hal tersebut adalah (a) pengidentifikasian bahasa-bahasa daerah yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan materi pembelajaran pada jenjang pendidikan formal, terutama terkait persyaratan keberadaan peserta didik; (b) pengembangan tenaga pendidik; (c) pengembangan substansi bahan pembelajaran.

Pengidentifikasian peserta didik sangat penting karena kondisi jumlah penutur bahasa daerah yang sangat bervariasi, ada yang jumlah penuturnya banyak dan ada yang jumlah penuturnya kecil. Bagi bahasa yang jumlah penuturnya kecil seperti kondisi sebagian besar bahasa-bahasa daerah di kawasan timur Indonesia tentu kurang tepat untuk dikembangkan sebagai materi pembelajaran melalui jalur pendidikan formal. Bahasa-bahasa daerah semacam

ini hanya dapat dilindungi, dibina, dan dikembangkan melalui jalur kebijakan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa dan sastra daerah yang bersifat partisipatori dan/atau jalur kebijakan konservasi/dokumentasi. Bagi bahasa-bahasa daerah yang penuturnya kecil dan tidak terkonsentrasi dalam satu wilayah geografis dapat digolongkan sebagai bahasa yang sangat kritis dan hanya dapat dilindungi melalui jalur kebijakan konservasi/dokumentasi, seperti bahasa Tandia yang penuturnya hanya tinggal 3 orang (2012) dan hidup terpisah dalam geografi yang berbeda.

Dalam kaitan dengan penyediaan tenaga kependidikan perlu dipertimbangkan keberadaan institusi kependidikan yang menghasilkan pendidik bahasa daerah serta kebijakan pengangkatan dan sertifikasi pendidik bahasa daerah. Sangat langka perguruan tinggi yang membuka jurusan bahasa daerah, sehingga mengakibatkan langkanya pengajar bahasa daerah. Hal itu telah mendorong pemerintah daerah kurang memberi perhatian bagi upaya perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa daerah yang terdapat di wilayahnya melalui jalur pendidikan formal. Oleh karena itu, perlu kebijakan penanganan masalah ketersediaan pendidik bahasa daerah dengan memanfaatkan sarjana bahasa Indonesia melalui pendidikan tambahan untuk keahlian dalam pembelajaran bahasa daerah, jika pembukaan jurusan bahasa daerah pada perguruan tinggi yang ada kurang memungkinkan untuk dilaksanakan.

Kemudian terkait dengan pengembangan substansi bahan pembelajaran hendaknya dilakukan tahapan-tahapan penyediaan: (a) pengembangan kurikulum dan (b) pengembangan materi yang dapat dilakukan melalui kajian variasi dialektal, kajian aspek kebahasaan bahasa daerah yang mencakup aspek fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Kajian dari aspek variasi dialektal ditujukan untuk menetapkan varian dari bahasa daerah itu yang akan disepakati sebagai bahasa standar. Adapun kajian dari aspek fonologi ditujukan untuk mengembangkan sistem ejaan standar/baku yang akan digunakan dalam sistem tata tulis;

kajian aspek morfologi, sintaksis, dan semantik ditujukan untuk mengembangkan tata bahasa standar/baku bahasa daerah tersebut. Dan, yang tidak kalah penting adalah kajian sistem leksikal untuk mengembangkan kamus standar bahasa daerah tersebut.

Patut ditambahkan bahwa dalam rangka pengembangan materi pembelajaran hendaknya memanfaatkan potensi bahasa sebagai sarana pengembangan kemampuan logika, etika, dan estetika siswa. Ketiga kebutuhan pengembangan diri manusia memang dapat disediakan bahasa. Melalui kemampuan berbahasa secara benar, sesuai struktur logika bahasanya akan membentuk struktur berpikir logis verbal pada siswa. Kalimat-kalimat yang urutannya mengikuti kaidah struktur yang benar, kemudian teks-teks yang dibangun mengikuti struktur teks yang benar juga akan melatih berpikir sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis pada siswa.

Adapun pemenuhan kebutuhan pengembangan etika dapat dilakukan dengan menyeleksi bahan pembelajaran berupa kosakata, kalimat yang mencerminkan varian yang sesuai dengan konteks situasi pemakaiannya. Sebagai contoh, oposisi kosakata halus dan biasa, bentuk hormat perlu diperkenalkan konteks situasi pemakaiannya, sehingga peserta didik mampu melakukan diksi kebahasaan yang disesuaikan dengan konteks pemakaiannya. Siswa dapat menentukan bentuk tuturan tertentu ketika berbicara dengan mitra wicara yang seusia dengannya dan ketika berbicara dengan mitra wicara yang lebih tua, memiliki posisi sosial yang lebih tinggi dari dirinya.

Kemudian untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kemampuan estetika, materi-materi kebahasaan yang berupa ekspresi sastra, sejenis pantun, cerita-cerita yang mengandung diksi yang kaya akan nilai-nilai estetis dan moral dapat menjadi bahan pembelajaran. Termasuk ke dalam materi pengembangan kemampuan estetika ini adalah materi “menulis indah”, yang dahulu pada tahun-tahun 1970-an ke bawah menjadi materi utama di jenjang pendidikan dasar. Materi ini perlu dihidupkan kembali,

mengingat majunya teknologi komunikasi (komputer, tablet dan lain-lain.), yang dapat menggeser kemampuan menulis dengan tangan. Saat ini cukup langka dijumpai tulisan tangan yang serapi orang-orang tua generasi 1945–1970-an.

Kebijakan politik kebahasaan yang bersifat partisipatori dimaksudkan sebagai kebijakan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa yang penuturnya kecil dan terkonsentrasi pada satu tempat atau beberapa tempat tetapi dalam jumlah yang lebih besar (100–1.000 jiwa). Kemudian penuturnya jarang yang berusia muda, tetapi di atas usia sekolah sehingga tidak dimungkinkan untuk ditempuh kebijakan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa melalui jalur pendidikan formal. Dalam rangka implementasi kebijakan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa bersifat partisipatori ini, kegiatannya didasarkan pada upaya menggugah kemauan penutur untuk melindungi, membina, dan mengembangkan bahasanya sendiri. Masyarakat turut memanfaatkan segala potensi sosial budaya untuk menggerakkan kembali fungsi sosial bahasa daerahnya. Dalam hal itu, pemerintah berperan memfasilitasi kegiatan masyarakat tersebut dalam bentuk penyediaan fasilitas baik yang menyangkut substansi maupun teknis.

Kemudian kebijakan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa melalui jalur konservasi/dokumentasi dimaksudkan sebagai kebijakan penanganan masalah kebahasaan dan kesastraan daerah yang sudah punah atau kritis. Sudah punah di sini, tentu dengan catatan masih tersedia dokumen tertulis tentang bahasa-bahasa tersebut, misalnya perlindungan terhadap bahasa Jawa Kuno yang masih menyimpan naskah tertulis. Sasarannya adalah mendokumentasikan bahasa itu dari aspek struktur kebahasaannya atau aspek sosial sesuai dengan jangkauan yang dapat dilakukan berdasarkan dokumen yang tersedia. Adapun bahasa yang dalam posisi kritis, misalnya bahasa yang jumlah penuturnya kecil, tidak terkonsentrasi dalam satu wilayah tutur atau dapat

saja terkonsentrasi pada beberapa wilayah tutur dengan jumlah penuturnya di bawah sepuluh jiwa. Dapat saja penuturnya di atas sepuluh tetapi di bawah seratus jiwa namun usia penuturnya berada pada usia lanjut. Terhadap bahasa-bahasa yang kondisi semacam ini hanya mampu dilindungi dalam bentuk pendokumentasian.

5.3 Membangun Kemandirian Bangsa melalui Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan

Kemandirian bangsa, yang dimaknai sebagai hal atau keadaan mampu berdiri di atas kekuatan sendiri, mempersyaratkan bahwa negara bangsa itu dapat tampil sebagai sebuah negara bangsa dengan keutuhannya, yang tidak hanya menyangkut keutuhan dari aspek teritorial, ekonomi, pertahanan, politik, sosial, budaya, tetapi juga menyangkut keutuhan sebagai sebuah komunitas negara bangsa yang memiliki identitas/jati diri. Salah satu identitas dan jati diri itu adalah bahasa, baik itu bahasa negara maupun bahasa daerah.

Sebagai negara bangsa dibangun di atas fondasi bahasa, maka pemanfaatan potensi kebahasaan untuk menegakkan kemandirian bangsa Indonesia perlu mendapat perhatian, yang dalam hal ini tidak hanya bahasa negara dan bahasa daerah, tetapi juga termasuk pemanfaatan potensi bahasa-bahasa asing strategis. Kebijakan penanganan segala potensi bahasa tersebut hendaknya ditempatkan pada kedudukan dan fungsi masing-masing jenis bahasa yang dirumuskan dalam UU Nomor 24 Tahun 2009.

Dalam hubungannya dengan bahasa negara, penguatan peran bahasa Indonesia baik di dalam negara maupun di luar negara haruslah diletakkan pada kerangka berpikir menghadirkan negara dalam negara itu sendiri dan menghadirkan negara di negara lain dalam tata pergaulan global. Strategi operasionalnya haruslah menyentuh aspek psikologis warga negara Indonesia yang dapat menumbuhkan keyakinan bahwa bahasa Indonesia tidak hanya sekadar sarana komunikasi, tetapi lebih penting dari itu adalah bahwa dalam bahasa Indonesia hadir keindonesiaan kita. Peran-peran historis

bahasa Indonesia dalam membangun keindonesiaan hendaknya senantiasa menjadi kompas dalam berperilaku setiap warga negara Indonesia. Begitu pula kehadiran bahasa Indonesia di luar negara membuktikan kehadiran negara dalam percaturan dunia global.

Seperti disebutkan pada seksi 2.4 bahwa negara-negara bangsa yang memiliki peradaban yang unggul dengan keunggulan ekonominya diawali dari politik identitas, yang selanjutnya identitasnya disebar ke luar negara setelah bangunan fondasi dalam negaranya sudah mapan. Oleh karena itu, kehadiran negara yang ditandai kehadiran bahasa negara di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mampu menjaga keutuhan teritorial, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan, serta pertahanan bangsa. Mengapa demikian, karena esensi adanya bahasa nasional, bahasa negara, yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 secara hakiki, memang diyakini mampu merevolusi mental dari mental keterberaian dalam keberagaman suku bangsa dan keberagaman tanah air yang didiami suku-suku bangsa itu menjadi mental satu kesatuan melalui sarana komunikasi yang berupa bahasa negara/nasional tersebut. Kebijakan utama yang dilakukan dalam rangka memperkuat kehadiran negara di dalam atau di luar negara, adalah melalui kegiatan pendidikan serta penguatan kebijakan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan melalui jalur partisipatori.

Selanjutnya, pada seksi 3.1 disebutkan bagaimana peran yang dimainkan bahasa daerah/lokal dalam membangun keindonesiaan. Melalui bahasa-bahasa lokal mampu dirunut secara maknawi bagi keberadaan semboyan negara Bhinneka dalam ketunggalikaan bangsa. Boleh jadi, kehilangan satu saja bahasa daerah, tentu yang memiliki peran penjelas yang memperantarai relasi kekerabatan bahasa-bahasa daerah yang lain, berarti kehilangan mata rantai yang sangat berharga bagi penjelasan makna kebhinnekaan dalam ketunggalikaan. Sebagai contoh, jika tidak ditemukan bukti-bukti kebahasaan dalam bahasa Namblong dan Kafoa di Papua betapa akan sulit menjelaskan keterhubungan antara bahasa Tarfia dan

bahasa Tobati dengan bahasa Gresi (periksa kembali seksi 3.1). Artinya, kajian-kajian strategis yang berhubungan dengan jumlah bahasa dan variannya, relasi kekerabatan antarbahasa daerah, interaksi antarkomunitas tutur bahasa daerah yang tercermin lewat bahasa, kesepadanan adaptasi sosial antarkomunitas tutur bahasa daerah yang tercermin dalam bahasa yang digunakannya, loyalitas bahasa dalam hubungannya dengan loyalitas kewarganegaraan masyarakat di wilayah perbatasan, cara pandang masyarakat tutur bahasa daerah dalam memandang keberadaannya dan keberadaan komunitas tutur bahasa daerah lain yang tercermin dalam bahasa yang digunakan mutlak dilakukan untuk merumuskan kebijakan pembangunan bangsa dari aspek kebahasaan.

Keberagaman bahasa merupakan kekayaan milik bangsa Indonesia sebagai rahmat Tuhan Yang Mahakuasa. Keberagaman potensi tersebut telah memberi wawasan dan pemahaman mengenai pentingnya kesatuan bangsa sebab selain merupakan rahmat, keberagaman tersebut juga berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. Dalam kondisi seperti itu, bahasa Indonesia berperan sebagai sarana pemersatu perbedaan tersebut sehingga dapat tercipta masyarakat yang harmonis, saling bertenggang rasa, dan hidup berdampingan secara damai. Sementara itu, bahasa-bahasa daerah/lokal yang dari segi pengelompokan merupakan bahasa yang diturunkan dari bahasa Austronesia, dapat menjadi bukti akan kebenaran semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, karena meskipun beragam suku bangsa yang ditandai oleh keberagaman bahasa lokal, namun sesungguhnya berasal dari satu asal yang sama. Dalam konteks itu, kajian kekerabatan bahasa seperti disebutkan di atas melalui penelusuran bahasa purba yang menurunkan bahasa-bahasa lokal itu dapat menjadi bahan untuk menyusun strategi pemanfaatan bahasa lokal sebagai sarana diplomasi antarsuku bangsa. Sebagai contoh bentuk-bentuk kekerabatan bahasa, yang menunjukkan keberagaman tetapi satu asal dapat ditemukan misalnya dalam peta kekerabatan kata-kata yang menjadi refleksi makna, masing-masing: lima, dua, dan **urat** pada peta berikut ini.

apa benar ya pak?

Makna ‘lima’ pada Peta 3 di atas memperlihatkan bahwa dalam bahasa-bahasa di Indonesia, ternyata kata bermakna lima dapat muncul dalam wujud yang bervariasi sesuai dengan kaidah perubahan bunyi yang dialami dalam masing-masing bahasa. Ada yang muncul sebagai: *lima*, *lime*, *limo*, *dima*, *dimo*, dan *rim*. Semua kata yang menjadi refleksi makna lima, sekalipun berbeda-beda wujudnya tetapi masih dapat dihubungkan pada sebuah asal yang sama, yaitu diturunkan dari bentuk Purba Austronesia **lima*. Artinya, berbeda tetapi satu asal.

Peta 4 menggambarkan bahwa makna ‘urat’ dalam bahasa-bahasa daerah dapat muncul dalam berbagai varian: *urat*, *otot*, *uyat*, *ughat*, *uat*, *oat*, *koat*, *ua*, *ughato*, *ureq*, dan *oraq*. Keberagaman varian yang menyatakan makna ‘urat’ tersebut mengikuti kaidah yang berlaku dalam masing-masing bahasa, sehingga karenanya dapat dihubungkan dengan kata asal dari bahasa Purba Austronesia **uRat*. Menarik untuk dijelaskan di sini, perubahan **uRat* dari bahasa Austronesia Purba menjadi bahasa Jawa Modern: *otot*. Perubahan itu terjadi dengan mengikuti kaidah bunyi Austronesia Purba: *R menjadi hilang dalam bahasa Jawa, misalnya: Bahasa Austronesia Purba: **ulaR*, menjadi bahasa Jawa Kuno: *ula* dan kemudian menjadi bahasa Jawa modern: *ulo*. Urutan vokal Austronesia Purba: **ua* menjadi bahasa Jawa: *o*, misalnya: {ka-an} + *ratu* > *karatuan* > *karaton*. Dengan demikian, kata Austronesia Purba: **uRat* > *uat* > *ot*, kemudian karena penutur bahasa Jawa kurang suka kata bersilabe satu lalu bentuk: *ot* diulang menjadi: *otot*. Proses pengulangan bentuk yang bersuku kata satu terjadi pula pada proses pembentukan kata: *loro* dalam bahasa Jawa.

Peta 4. Kata-kata Berkerabat yang Menjadi Refleksi Makna 'Urat'



Selanjutnya, makna ‘dua’, pada Peta 5, memiliki berbagai varian dalam bahasa daerah, yaitu: *loro, dua, due, duo, rua, roa, roah, ros, ru, rue*. Semua varian itu dapat dihubungkan pada sebuah kata bahasa Austronesia Purba: **Dua*. Perubahan menjadi berbagai varian itu sesuai kaidah perubahan bunyi yang berlaku dalam masing-masing bahasa daerah tersebut. Seperti halnya perubahan kata bermakna ‘urat’ di atas, yang mencolok terjadi adalah perubahan dari bentuk Austronesia Purba: **Dua* menjadi bahasa Jawa Modern: *loro*. Tahap-tahap perubahannya adalah bunyi Austronesia Purba: **D* menjadi bahasa Jawa: *r*, sehingga muncul bentuk bahasa Jawa Kuno: *rua*. Kemudian, urutan vokal Austronesia Purba: **ua*, menjadi: *o* (lihat juga proses perubahan kata Austronesia Purba: **uRat* di atas), sehingga muncul bentuk: *ro*, misalnya pada bentuk bahasa Jawa: *rolas* ‘dua belas’, *rongpuluh* ‘dua puluh’. Selanjutnya, penutur bahasa Jawa kurang suka kata bersilabe satu, lalu bentuk: *ro* diulang menjadi: *roro*. Bentuk ini dapat ditemukan pada penutur bahasa Jawa Salira, Banten. Kemudian dari bentuk: *roro* terjadi proses disimilasi, bunyi: *r* pada suku kata pertama saling memengaruhi dengan bunyi: *r* pada kata: *roro*, sehingga bunyi: *r* pada silabe pertama berubah menjadi: *l*, lalu muncullah bentuk dalam bahasa Jawa Modern: *loro*.

Selain peta kekerabatan bahasa, juga dalam konteks kebijakan bahasa untuk pembuktian semboyan bangsa “Bhinneka Tunggal Ika” dapat dilakukan melalui kajian strategi kesastraan. Hal ini dapat dilakukan karena, jika bahasa yang menjadi medium utama kegiatan bersastra dapat ditelusuri relasi kekerabatannya, maka dengan sendirinya ekspresi sastra daerah yang menggunakan bahasa daerah pun mampu dirunut kesatuasalnya meskipun berbeda. Kekerabatannya dapat dilihat dari aspek tema, penokohan, karakter, alur cerita dan semua aspek intrinsik sastra lainnya. Sebagai contoh, kisah tentang tema “kebodohan membawa malapetaka” muncul dengan nama dan tokoh yang berbeda pada masyarakat Jawa, Bali, dan Sasak. Cerita itu pada masyarakat

berpenutur bahasa Jawa dikenal dengan cerita *Joko Bodo*, pada masyarakat berpenutur bahasa Bali dikenal dengan cerita *I Blog*, sedangkan di masyarakat berpenutur bahasa Sasak dikenal dengan nama cerita *Loq Sekeq*. Nama cerita yang berbeda-beda itu diambil dari nama lokal. Dalam masyarakat Jawa, nama *Joko* adalah nama khas Jawa seperti: *Joko Tingkir*, *Joko Suryo* dan lain-lain., begitu pula nama awal yang dimulai dengan huruf/bunyi *I* merupakan nama khas daerah Bali, seperti: *I Made Suastika*, dan nama *Loq Sekeq* adalah nama khas daerah Sasak. *Loq* adalah kata sandang semacam: *si* dan *sang* dalam bahasa Indonesia, yang dalam bahasa Sasak disematkan pada nama perempuan. Kata *Sekeq*, dalam bahasa Sasak berarti satu. Artinya, nama itu adalah nama anak perempuan pertama. Yang menarik adalah, berbeda nama cerita dan tokoh cerita tetapi sama temanya. Kesamaan cara pandang dalam melihat fenomena kebodohan sebagai sesuatu yang tidak baik dan sering membawa malapetaka, sudah menjadi pandangan masyarakat Indonesia. Tidak mungkin sebuah gagasan ceritanya sama jika tidak karena kesatuasalan. Bahwa terjadi perbedaan nama, hanya karena disesuaikan dengan kondisi lokal. Oleh karena itu, kajian pemetaan dan kekerabatan sastra dapat menjadi ancangan kajian dalam rangka kajian strategi dan diplomasi kebahasaan.

Peta-peta kekerabatan bahasa termasuk sastra di atas dapat menjadi bahan dalam laboratorium Kebhinnekaan bahasa-bahasa di Indonesia. Laboratorium ini akan sangat bermanfaat bagi anak bangsa ini dalam memverifikasi pemahamannya akan konsep Bhinneka Tunggal Ika melalui bukti-bukti kebahasaan termasuk kesastraan yang sangat beragam di Indonesia. Selain itu, laboratorium dapat menjadi media pembelajaran masyarakat Indonesia pada umumnya secara faktual dan empirik bagi kondisi keberagaman bangsa Indonesia. Setiap daerah, melalui unit pelaksana teknis Badan Bahasa dapat mengembangkan laboratorium kebhinnekaan, di samping laboratorium tingkat nasional yang terdapat di pusat. Laboratorium yang terdapat di daerah memuat kondisi keberagaman yang terjadi di wilayah

daerah itu sendiri, sedangkan di tingkat pusat laboratorium itu memuat semua keberagaman daerah-daerah yang ada di Indonesia.

Paling tidak laboratorium itu memiliki dua ruang utama, sebagai ruang peragaan dan ditambah satu ruang simulasi kebhinnekaan dalam ketunggalikaan, yang menjadi tempat permainan kebhinnekaan dalam ketunggalikaan. Ruang peragaan yang pertama memuat peta-peta bahasa, peta-peta sastra yang menggunakan mediaum bahasa daerah disertai media visualnya. Visualisasi dapat berupa sarana digital yang jika ditekan tombol pada peta bahasa yang merujuk bahasa tertentu, akan muncul film singkat tokoh lokal bahasa itu yang bercakap dengan menggunakan bahasa daerah setempat dengan menggunakan pakaian adat. Kemudian, ketika ditekan tombol sastra akan muncul segala jenis ekspresi sastra yang menggunakan medium bahasa itu, yang jika ditekan pada pilihan jenis sastra tertentu akan muncul film singkat tentang wujud pementasan jenis sastra tersebut. Pada ruang peragaan kebhinnekaan itu juga tersedia kamus bahasa lokal dalam bentuk digital, kamus-kamus yang menuntun pada penjelasan nama-nama lokal pakaian adat yang digunakan baik oleh tokoh adatnya maupun yang digunakan untuk pementasan jenis sastra tersebut. Ruang kebhinnekaan itu, benar-benar dibuat untuk menciptakan suasana pemahaman akan keberagaman bangsa dari aspek kebahasaan dan kesastraan yang menggunakan medium bahasa itu. Dengan demikian, setiap orang yang masuk ke ruang itu benar-benar dibawa ke alam keberagaman bangsa Indonesia.

Ruang peragaan yang kedua memuat peta yang memberikan pemahaman tentang relasi kekerabatan bahasa dan ekspresi sastra yang menggunakan medium bahasa. Di ruang itu, dapat ditemukan peta kekerabatan antarbahasa di setiap wilayah berdasarkan wilayah kebahasaan yang memiliki relasi kedekatan, pohon kekerabatan bahasa, serta pohon kekerabatan sastra. Di dalam ruang itu pula, tersajikan pola penyebaran/migrasi suku-suku bangsa yang terdapat di Indonesia berdasarkan peta bahasa dan peta sastra. Dengan

demikian, setiap orang yang masuk ke ruang tersebut diharapkan akan terbangun kerangka berpikir bahwa suku-suku bangsa yang beragam itu sesungguhnya memiliki asal yang sama.

Adapun ruang ketiga, ruang simulasi. Ruang ini merupakan ruang tempat bermain, menguji ketangkasan seseorang untuk memprediksi bentuk-bentuk bahasa yang berkerabat pada suatu bahasa tertentu, sesuai permintaan dalam petunjuk permainan, dengan memanfaatkan pemahaman kaidah perubahan bunyi yang bersifat teratur dalam bahasa-bahasa daerah. Setiap orang dapat menguji ketangkasanya dengan yang lain yang nantinya, pihak yang tangkas dalam permainan simulasi itu akan mendapat skor tertinggi. Jadi, semacam permainan game, hanya saja bahannya adalah bahasa-bahasa berkerabat. Boleh jadi, perintah dalam simulasi itu tidak hanya menyangkut satuan leksikal yang berkerabat, tetapi juga dapat berupa perintah tentang kaidah yang mengatur perubahan suatu kata dalam satu bahasa daerah ke bahasa daerah lain; dapat pula perintah itu tentang tempat yang menjadi lokasi bahasa itu digunakan.

Apabila uraian di atas menggambarkan pola pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan dalam hubungannya dengan bahasa negara dan bahasa lokal, maka pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan yang berhubungan dengan kemampuan bahasa asing strategis ditujukan sebagai upaya memberikan kemampuan kepada negara melalui kegiatan kebahasaan untuk menyusun:

- a. strategi penguasaan informasi global (*pulling strategies*); dan
- b. strategi pemanfaatan informasi (*pushing strategies*) untuk memperkuat peran Indonesia dengan memanfaatkan dukungan kemampuan kebahasaan.

Hasil dari kajian strategi kebahasaan tersebut diimplementasikan dalam bentuk operasional diplomasi halus melalui diplomasi kebahasaan sebagai usaha-usaha aktif dalam membentuk opini/persepsi global terhadap Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, diperlukan serangkaian

disimulasi informasi positif tentang Indonesia ke berbagai negara dengan menggunakan berbagai bahasa sehingga pembentukan opini tersebut dapat berjalan efektif baik melalui saluran pemerintah ke pemerintah, pemerintah ke rakyat, maupun rakyat ke rakyat. Untuk mewujudkan hal itu perlu dilakukan langkah-langkah:

- a. penyediaan sarana-prasarana kanal dan simpul penyampaian informasi tentang Indonesia melalui informasi kebahasaan;
- b. penentuan kandungan informasi berpengungkit tinggi tentang Indonesia melalui informasi kebahasaan;
- c. penggalangan aktivitas (direktif maupun partisipatif) melalui aktivitas kebahasaan terkait dengan penyebaran informasi tentang Indonesia dan pengumpulan informasi tentang negara lain.

Pada akhirnya, seiring dengan mulai menguatnya pengakuan dan peran Indonesia dalam percaturan dunia sebagai akibat dari upaya-upaya di atas, dapat dilanjutkan dengan inisiatif menginternasionalkan bahasa Indonesia (sesuai amanat UU No. 24 Tahun 2009) melalui kegiatan: pembukaan/penguatan kelas-kelas pembelajaran bahasa Indonesia di negara-negara yang sudah memiliki pandangan positif tentang Indonesia, memfasilitasi semua kegiatan pembelajaran: mulai dari penyiapan sarana bahan ajar, pemberian beasiswa pada warga asing untuk menempuh pendidikan di Indonesia dengan syarat menguasai bahasa Indonesia pada level tertentu, sampai pada pengiriman tenaga pengajar. Dengan diterima dan dipelajarinya bahasa Indonesia oleh warga negara asing itu dapat menjadi salah satu indikator penerimaan dan pengakuan eksistensi Indonesia di dunia internasional. Hal ini pula merupakan salah satu bentuk diplomasi halus (*soft diplomacy*).

Selanjutnya, mengingat urgensi dan kompleksitasnya permasalahan bahasa dalam hubungannya dengan keindonesian, khususnya terkait dengan kajian strategi dan diplomasi kebahasaan, seperti diuraikan di atas, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah membentuk satu unit eselon dua dengan nama Pusat

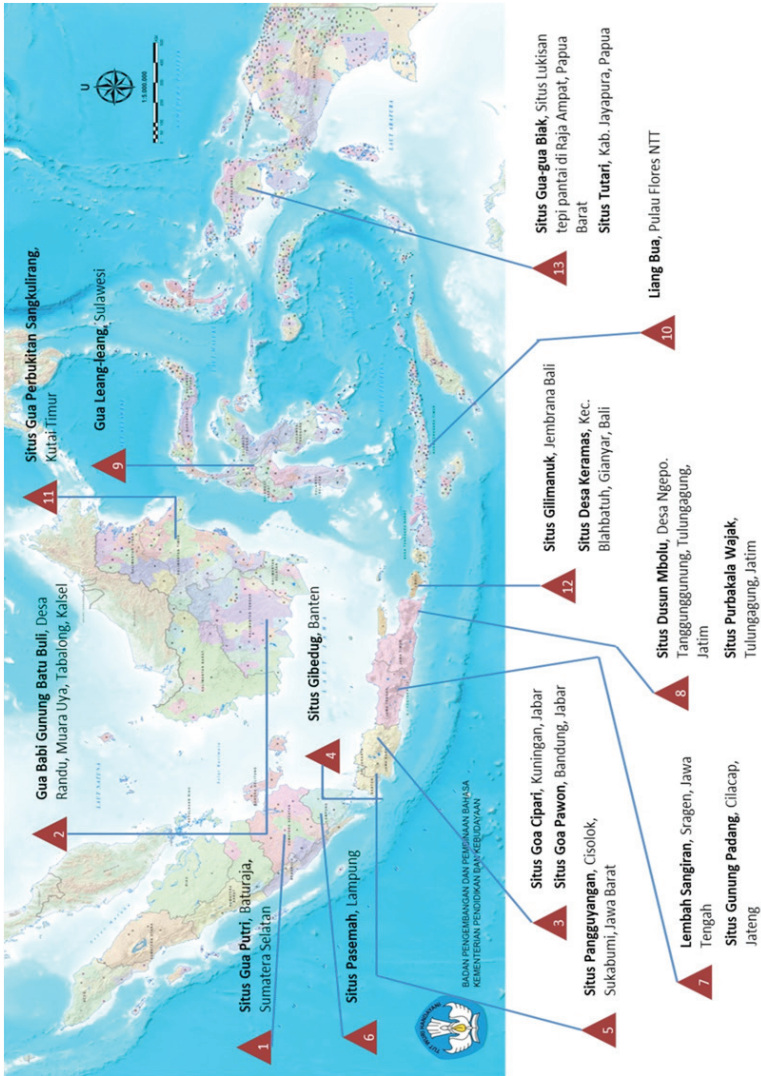
Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan dengan tugas utama melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, kajian strategi kebahasaan dan perdamaian, diplomasi kebahasaan, dan penguasaan bahasa asing strategis dalam rangka pemertabatan bangsa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang kajian strategi kebahasaan dan perdamaian, diplomasi kebahasaan, dan penguasaan bahasa asing strategis;
- b. penyusunan program kajian strategi kebahasaan dan perdamaian, diplomasi kebahasaan, dan penguasaan bahasa asing strategis;
- c. pelaksanaan pengumpulan dan penyeleksian informasi tentang Indonesia dalam rangka penyediaan sarana-prasarana kanal dan simpul penyampaian Informasi tentang Indonesia melalui informasi kebahasaan;
- d. pelaksanaan pengumpulan dan penyeleksian, serta penentuan informasi melalui kegiatan kebahasaan tentang negara lain dalam hubungannya dengan Indonesia;
- e. pelaksanaan pengumpulan, penyeleksian, dan penentuan informasi yang berdaya ungkit tinggi tentang Indonesia;
- f. penyebaran informasi yang berdaya ungkit tinggi tentang Indonesia melalui informasi kebahasaan dalam rangka pelaksanaan diplomasi kebahasaan/diplomasi halus (*soft diplomacy*);
- g. penggalangan aktivitas direktif maupun partisipatif mengenai penyebaran informasi tentang Indonesia dan pengumpulan informasi tentang negara lain melalui aktivitas kebahasaan
- h. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan kebahasaan bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa dunia strategis dalam rangka penyiapan SDM kebahasaan yang dapat mendukung penguatan peran Indonesia melalui penguasaan dan pemanfaatan informasi kebahasaan;

- i. pengembangan bahan dan alat evaluasi pembelajaran BIPA di luar negeri dalam rangka diplomasi kebahasaan;
- j. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur tentang pengumpulan, penyeleksian, dan penyebarluasan informasi melalui informasi kebahasaan serta tentang pelaksanaan pembelajaran BIPA di luar negeri;
- k. pelaksanaan penyebaran bahasa negara ke luar negeri;
- l. pelaksanaan pencegahan dan penangkalan konflik informasi kebahasaan melalui kemampuan kebahasaan;
- m. pengembangan dan penyelenggaraan laboratorium Bhinneka Tunggal Ika dengan memanfaatkan keberagaman bahasa dan sastra warisan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pembentukan karakter bangsa;
- n. selain itu, kewajiban untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara dalam komunikasi resmi pejabat negara (Perpres Nomor: 16 Tahun 2010), serta penggunaan bahasa Indonesia dalam pertemuan Internasional yang diselenggarakan di Indonesia menuntut adanya tenaga penerjemah yang berkompeten. Peran penerjemah tersebut tidak hanya penting pada saat berlangsungnya komunikasi antarpejabat negara, tetapi juga sangat penting bagi pertahanan dan keamanan negara, seperti upaya menerjemahkan dokumen kejahatan transnasional, misalnya penerjemahan dokumen terorisme yang dilakukan setelah terjadinya pengeboman di WTC tersebut.
- o. dalam dunia hukum juga jasa kebahasaan sangat berperan, seperti maraknya permintaan jasa ahli bahasa dari pihak penegak hukum, misalnya saksi ahli dalam kasus pencemaran nama baik, penafsiran ayat tertentu pada produk hukum. Dalam konteks kebahasaan, kajian analisis linguistik forensik semacam ini akan menjadi kecenderungan yang intens berlangsung pada masa-masa mendatang.

Peta 6. Sebaran Situs Purba di Indonesia



Kajian strategis yang tidak kalah penting lainnya adalah kajian tentang tanah asal penutur Austronesia. Kajian ini memiliki nilai strategis dalam memperkuat hipotesis selama ini yang mencanangkan asal peradaban manusia adalah dari Indonesia. Santos (2009), dalam bukunya *Atlantis: The Lost Continent Finally Found*, mengajukan sebuah hipotesis tentang tempat benua dalam legenda Plato itu adalah di wilayah Indonesia. Jika hal itu benar adanya, maka wilayah Indonesia merupakan tempat awal persemaian peradaban manusia di dunia. Pandangan itu, jika beranalog dengan teori laju perkembangan leksikal yang diajukan Dyen, maka dengan banyak ditemukan situs-situs purba di wilayah Indonesia, maka boleh jadi wilayah Indonesia merupakan tempat persemaian peradaban umat manusia, sebagaimana Dyen menyatakan bahwa di wilayah yang memiliki tingkat keberagaman bahasa, wilayah itu dapat dihipotesiskan sebagai pusat persebaran (lihat Peta 6).

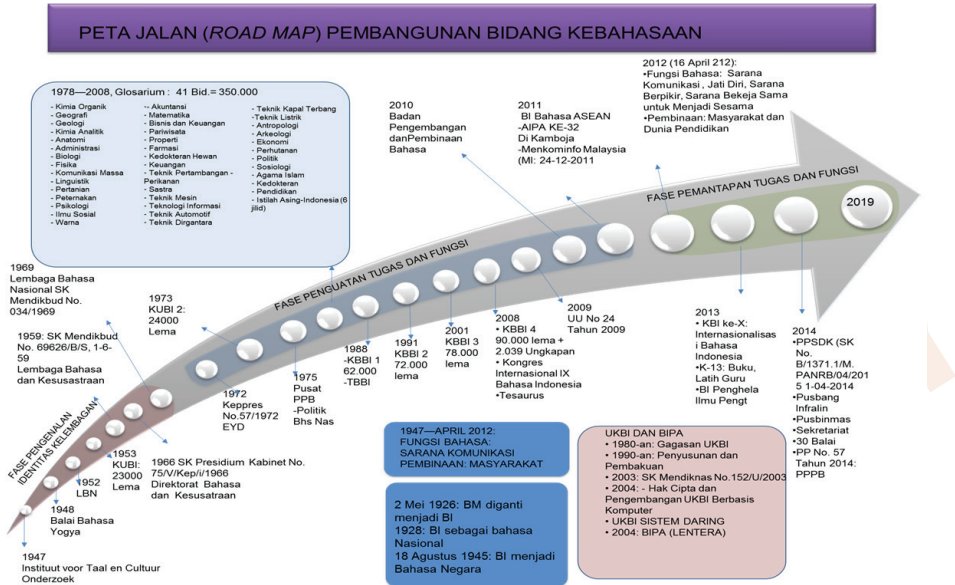
Bukti yang diajukan Santos memiliki kesesuaian dari segi data arkeologi. Hipotesis itu semakin kuat, jika fakta kebahasaan juga mendukung ke arah sana. Berdasarkan fakta kebahasaan tentang sistem konstruksi yang menggambarkan kemampuan berpikir verbal: konstruksi milik dan sistem berpikir matematis: sistem bilangan yang terdapat pada bahasa-bahasa di Indonesia menuntun ke arah penguatan hipotesis tanah asal penutur Austronesia berada di wilayah Papua, Indonesia. Oleh karena itu, kajian dari aspek linguistik tentang asal persebaran penutur Austronesia dapat saling mendukung dengan kajian arkeologi di wilayah Indonesia, termasuk kajian tentang situs Gunung Padang dan tentang Atlantis.

5.4 Penguatan Peran Lembaga Kebahasaan Negara

Pembentukan institusi resmi negara yang menangani masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari spirit para pendiri bangsa menjadikan bahasa sebagai fondasi dalam

membangun semangat nasionalisme keindonesiaan. Pernyataan yang tertuang Ikrar Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928), kemudian diikuti Kongres Bahasa Indonesia yang pertama, sepuluh tahun sesudah itu (1938), lalu secara eksplisit dinyatakan dalam UUD 1945, yaitu pada klausul yang menyatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara dan klausul yang menyatakan bahwa di daerah-daerah terdapat bahasa yang digunakan dan dipelihara penuturnya dipelihara juga oleh negara. Frase “dipelihara juga oleh negara” secara eksplisit negara mengamanatkan pembentukan sebuah institusi yang khusus menangani masalah kebahasaan dan kesastraan. Berangkat dari spirit itulah, maka tahun 1947 dibentuklah sebuah institut yang menangani Sastra dan budaya dengan nama “*Istituut voor Taal en Cultuur Onderzoek*”. Kemudian disusul dengan didirikannya Balai bahasa di Yogyakarta pada tahun 1948 dan pada tahun 1952 dibentuklah sebuah lembaga dengan nama Lembaga Bahasa Nasional dengan cabangnya di Yogyakarta, Denpasar, dan Makassar. Pada Tahun 1962, Lembaga Bahasa Nasional berubah nama menjadi Lembaga Bahasa dan Kesusasteraan. Pergantian nama tidak berhenti sampai di situ, tahun 1975, nama Lembaga Bahasa dan Kesustraan berubah menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, dan UU Nomor 24 Tahun 2009 mengamanatkan agar institusi kenegaraan yang menangani masalah kebahasaan berwujud Badan (eselon satu), maka nama Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa pun berubah menjadi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa). Institusi kebahasaan yang sekarang ada, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah memiliki tiga pusat, dan satu sekretariat yaitu (a) Pusat Pengembangan dan Pelindungan, (b) Pusat Pembinaan, (c) Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, dan (d) Sekretariat Badan, serta ditambah tiga puluh UPT yang membantu penanganan masalah kebahasaan dan kesastraan di tiga puluh provinsi. Untuk memperjelas perjalanan institusi kebahasaan negara dalam kiprahnya membangun bangsa dapat divisualkan dalam bentuk peta jalan berikut ini.

Gambar 6. Alir 1 Tonggak-tonggak Pembangunan Bidang Kebahasaan di Indonesia



Peta jalan di atas menggambarkan bahwa perjalanan lembaga kebahasaan negara dapat dikategorikan dalam tiga fase atau periode, yaitu fase pengenalan identitas kelembagaan mulai tahun 1947-1972, fase penguatan tugas dan fungsi mulai tahun 1972-2012, dan fase pemantapan tugas dan fungsi mulai 16 April 2012-sekarang. Fase pertama ditandai dengan terjadinya pergantian nama kelembagaan dan pada fase ini belum banyak aktivitas yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi. Dalam periode itu, misalnya sudah memiliki kamus bahasa Indonesia yang memuat 23.000 lema (1953), perintisan kerja sama kebahasaan dengan Malaysia, yang hasilnya berwujud Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan (1972). Selain itu, pada fase ini lembaga kebahasaan mengalami pergantian nama beberapa kali, mulai dari: *Istituut voor Taal en Cultuur Onderzoek* (1947), muncul: Balai Bahasa Yogyakarta (1948), berubah menjadi Lembaga Bahasa Nasional (1952), Lembaga Bahasa dan

Kesusatraan (1959), Direktorat Bahasa dan Kesusastraan (1966), dan Lembaga Bahasa Nasional (1969). Fase kedua ditandai dengan aktivitas yang sudah lebih menekankan pelaksanaan tugas dan fungsi, seperti pada periode ini disahkan EYD, perkembangan perkamusan dari 1973-2008, Perumusan Politik Bahasa (1975), pengembangan Tata bahasa Baku Bahasa Indonesia (1988), Pengembangan kata dan istilah untuk 41 bidang ilmu 1978-2008, mencapai 440.000 kata/istilah). Baik pada fase pertama dan kedua, fokus pembinaan bahasa Indonesia lebih diarahkan pada pembinaan pemakaian bahasa Indonesia dalam masyarakat dan penekanan pada fungsi bahasa sebagai sarana komunikasi. Pemakaian bahasa dalam dunia pendidikan kurang mendapat perhatian, karena berasumsi bahwa dunia pendidikan terdapat para pendidik yang mengawalinya. Kemudian fase ketiga, fase pematapan tugas dan fungsi ditandai dengan memperluas aspek pembinaan bahasa, yang tidak hanya memerhatikan pembinaan pemakaian bahasa dalam masyarakat tetapi juga memerhatikan pemakaian bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan. Hal yang terakhir ditandai oleh keterlibatan lembaga itu dalam menangani kurikulum bahasa Indonesia, penyusun buku ajar bahasa Indonesia (Kurikulum 2013). Selain itu, pada fase ini perhatian pada fungsi bahasa sebagai identitas, sarana berpikir dan pembentuk pikiran manusia, selain fungsi sebagai sarana komunikasi mendapat perhatian serius. Hal itu ditandai dengan terbentuknya Pusat pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (2014). Pada fase ini pula pematapan tekad menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan internasional mulai ditegaskan, misalnya melalui Kongres Bahasa Indonesia X, dengan mengambil tema: Penguatan Bahasa Indonesia di Dunia Internasional.

Kompleksitas masalah kebahasaan yang ditangani lembaga kebahasaan negara tersebut sudah selayaknya perlu dipertimbangkan agar lembaga ini menjadi lembaga yang langsung di bawah Presiden, sebagaimana lembaga negara yang berupa badan yang langsung di bawah presiden, seperti BNP, BNPB dan lain-lain.



PENUTUP: MENIMANG BAHASA MEMBANGUN BANGSA

6

Sebagai catatan penutup, uraian pada bagian ini ingin mengajak bangsa Indonesia untuk melakukan renungan introspektif-reflektif terhadap kondisi kebahasaan dalam hubungannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan fokus renungan pada “Menimang Bahasa Membangun Bangsa”. Frase “menimang bahasa” mengandung arti ‘mempertimbangkan baik-baik hal yang berhubungan dengan bahasa’. Persoalannya, mengapa bahasa harus dipertimbangkan dengan baik-baik? Ada apakah dengan bahasa bagi kehidupan berbangsa dan bernegara? Bahasa manakah yang harus dipertimbangkan baik-baik itu?

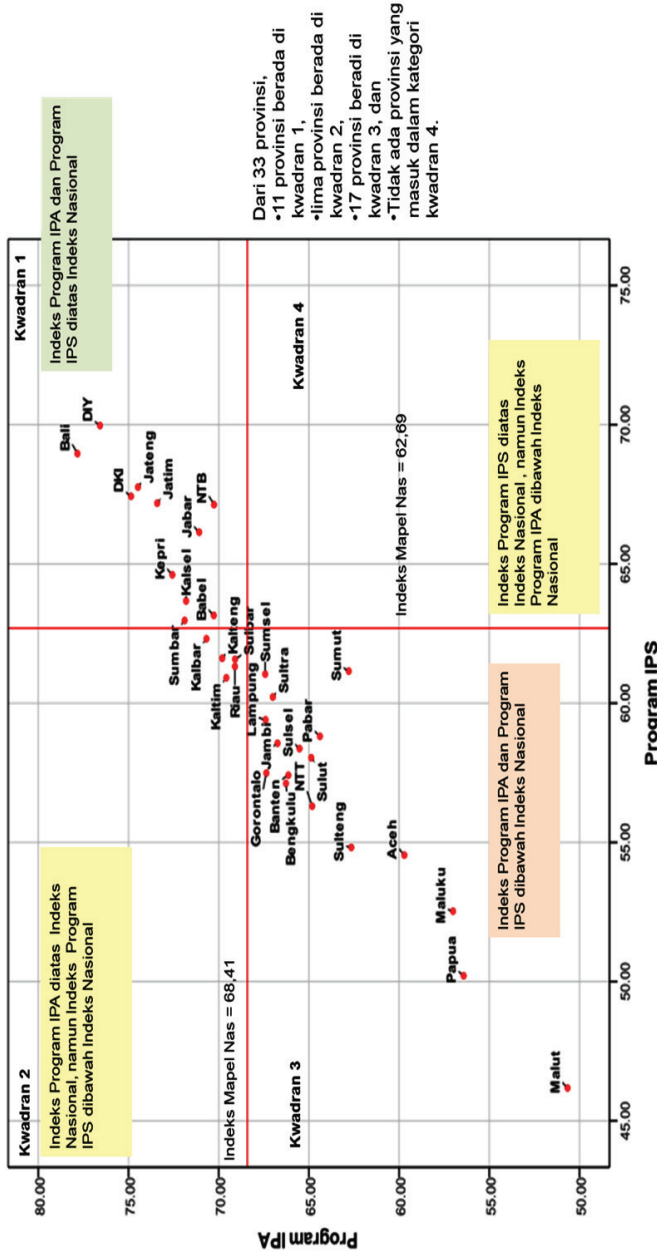
Sebagai negara bangsa yang dibangun di atas fondasi bahasa, sementara itu kondisi kebahasaan di Indonesia cukup kompleks, karena selain terdapat bahasa Indonesia, bahasa daerah, juga terdapat bahasa-bahasa asing, maka bahasa yang harus dipertimbangkan baik-baik adalah ketiga jenis bahasa tersebut. Manakah di antara bahasa itu yang berada pada prioritas tinggi dan

manakah yang berada pada prioritas di bawahnya? Sebagai negara kesatuan yang berbhinneka tunggal ika, maka prioritas utama yang dipertimbangkan adalah bahasa Indonesia yang merefleksikan pilar NKRI, diikuti bahasa daerah yang merefleksikan Bhinneka Tunggal Ika, kemudian disusul bahasa-bahasa asing.

Munculnya semacam paham kemelayuan dan kemelanesiaan, keduanya sangat terkait dengan masalah keindonesiaan dalam hubungannya dengan masalah kebahasaan. Paham kemelayuan terkait dengan posisi Indonesia dalam hubungan dengan identitas kebangsaannya, yang berupa bahasa Indonesia. Munculnya paham tentang internasionalisasi bahasa Melayu dan kebudayaan Melayu Mahawangsa menempatkan Indonesia berada pada posisi berkontestasi dalam menegakkan identitasnya berupa bahasa Indonesia di percaturan kehidupan global. Paham kemelayuan itu hendaknya dipertimbangkan dengan baik-baik karena di samping merupakan pukulan bagi integritas identitas kebangsaan juga dapat merasuk pada alam pikiran sebagian anak bangsa. Jangan sampai pemahaman yang sudah merasuk pada pikiran sebagian anak bangsa tersebut menjadi pedoman bertingkah laku untuk mengidentifikasi diri berbeda dengan sesama anak bangsa. Dalam wujud yang lebih ekstrim loyalitas pada negara bangsa dapat terkalahkan oleh loyalitas alternatif berupa loyalitas pada kesamaan dalam hal kemelayuannya. Era perang generasi keempat, hal itu sangat mungkin terjadi.

Selanjutnya, apabila paham kemelayuan terkait dengan pemanfaatan posisi bahasa negara untuk mendegradasi identitas keindonesiaan, maka paham kemelanesiaan terkait dengan pemanfaatan klaim keberbedaan rumpun bahasa untuk menggoyahkan keutuhan NKRI. Suatu hal yang patut direnungkan bahwa meskipun tataran kebahasaan yang dipersoalkan itu berbeda, yang satu mempersoalkan bahasa negara dan yang satu mempersoalkan bahasa daerah, keduanya memiliki kompleksitas masalah kebahasaan dalam hubungannya dengan masalah kebangsaan

Gambar 7. Sebaran Indeks Kompetensi Mata Pelajaran BI Ujian Nasional untuk Jurusan IPA dan IPS



Dari 33 provinsi,
 •11 provinsi berada di kwadran 1,
 •lima provinsi berada di kwadran 2,
 •17 provinsi berada di kwadran 3, dan
 •Tidak ada provinsi yang masuk dalam kategori kwadran 4.

yang relatif sama. Apabila di wilayah Timur memiliki titik api di Papua, Papua Barat, dan Maluku, di Sumatra titik apinya berada di Aceh. Dua wilayah ini memiliki tipe topografi politis yang sama, yaitu wilayah yang berbatasan dengan negara lain.

Dalam konteks itu patut dipertimbangkan rendahnya hasil belajar bahasa Indonesia di kedua wilayah ini, jangan hanya dimaknai semata-mata sebagai persoalan substansi kebahasaan, tetapi lebih dari itu merupakan persoalan kebahasaan yang terkait dengan masalah kebangsaan. Sebaran indeks kompetensi mata pelajaran bahasa Indonesia pada ujian nasional 2014 untuk jurusan IPA dan IPS.

Grafik di atas memberikan gambaran wilayah-wilayah yang skornya di bawah 70, sebagian besar menyebar pada wilayah yang menjadi tempat munculnya paham kemelanesiaan: Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT (Sumba) dan paham Kemelayuan: Aceh, Sumut, Bengkulu, Jambi, Lampung, Riau, Sumsel. Kondisi ini, mestinya tidak hanya dimaknai semata-mata karena kemampuan akademik siswa, tetapi mungkin saja berhubungan dengan semangat nasionalisme. Dugaan ini didasarkan pada kenyataan, bahwa di Papua atau di Aceh nama bahasa Indonesia tidak begitu populer di kalangan siswa, mereka lebih mengenal nama bahasa Melayu. Menarik untuk dikaji, adakah unsur kesengajaan untuk tidak menyebut nama bahasa Indonesia, sebagaimana Flassy dan Flassy berupaya membedakan antara Austronesia atas Austronesia-Melanesia dengan Austronesia-Indonesia.

Dalam era perang generasi keempat dengan karakter yang digambarkan pada bab IV, boleh jadi loyalitas kebangsaan beralih ke loyalitas alternatif, yang dapat melampaui batas-batas negara bangsa. Itu sebabnya, penguatan identitas keindonesiaan, yang salah satunya berupa bahasa negara hendaknya ditanamkan sejak dini, karena bahasa selain sebagai sarana berpikir juga berfungsi membentuk pikiran penuturnya. Oleh karena itu pula, menjadi dapat dipahami jika negara yang memiliki peradaban dan ekonomi

maju diawali dengan memperkuat identitas. Jepang, ketika hancur dari Perang Dunia II, berusaha bangkit dengan politik identitas melalui penerjemahan semua ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Jepang. Setelah mereka mencapai kemajuan peradaban dan ekonomi, mereka membuka diri selebar-lebarnya untuk memahami identitas negara bangsa lain, termasuk membuka 38 tempat pembelajaran bahasa Indonesia dengan satu perhimpunan pengujian kemampuan berbahasa Indonesia di negaranya.

Kebijakan negara untuk membelajarkan bahasa asing setelah memasuki pendidikan SMP dan sederajat merupakan kebijakan yang sangat arif, karena usia dini, PAUD dan sekolah dasar, dapat digunakan sebagai usia emas penanaman identitas keindonesiaannya melalui salah satunya pembelajaran bahasa Indonesia. Jangan sampai, anak-anak bangsa ini sejak kecil dijauhkan dari identitas kebangsaannya dan karena itu dia hidup terasing dari dirinya sendiri. Kasus keluarga Paulina yang lahir dan dibesarkan di Indonesia namun dia tidak mampu berbahasa Indonesia jangan sampai terjadi pada keluarga-keluarga lainnya di Indonesia. Namun demikian, bangsa ini tidak boleh anti dan alergi terhadap bahasa asing. Bahasa asing sangat penting bagi kehidupan global. Semakin banyak bahasa asing yang dikuasai, semakin luas pergaulan dunia yang dapat dimasuki. Hanya persoalannya, manakah yang perlu diprioritaskan untuk ditanamkan terlebih dahulu dan manakah yang diprioritaskan kemudian. Di sinilah renungan “menimang bahasa membangun bahasa” diberlakukan.

Untuk memperluas dan memperbanyak negara bangsa lain yang mengakui identitas Indonesia, melalui pengakuan terhadap keberadaan bahasa Indonesia, peran pemerintah dalam menggalakkan program pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing perlu diperkuat. Penguatan itu tidak hanya melalui pembukaan pusat-pusat pembelajaran di luar negara, tetapi semakin memperbanyak jumlah sasaran baik orang maupun negara yang mendapat bantuan beasiswa untuk belajar di Indonesia.

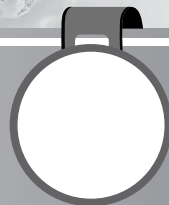
Tentu, dengan persyaratan kemampuan berbahasa Indonesia, sebagaimana jika warga negara Indonesia harus memiliki skor TOEFL pada tingkat tertentu sebagai persyaratan mendapat beasiswa di negara yang berbahasa Inggris. Begitu pula, pemerintah jangan ragu-ragu dalam menerapkan salah satu persyaratan kemampuan berbahasa Indonesia bagi pekerja asing yang bekerja di Indonesia.

Terkait dengan keberagaman bahasa daerah perlu ditempuh kebijakan/politik yang menyangkut perlindungan, pembinaan, dan pengembangan dengan prioritas yang tidak hanya memberi jaminan bagi keberadaan bahasa itu saja, tetapi haruslah dilakukan dalam rangka menemukan relasi keterhubungan bahasa-bahasa tersebut dengan sesamanya sebagai bahasa-bahasa yang berkerabat. Informasi tentang relasi keterhubungan antarbahasa daerah dapat menjadi titik masuk membangun komunikasi sosial antarpenutur bahasa daerah menuju integrasi sosial dan integrasi bangsa. Kebijakan semacam itu akan menjauhkan munculnya semangat lokalitas, yang justru dapat mengganggu stabilitas nasional.

Dalam rangka implementasi kebijakan tersebut, institusi negara yang menangani masalah kebahasaan, dalam hal itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, perlu ditingkatkan perannya. Kompleksitas masalah kebahasaan dalam hubungannya dengan keindonesiaan menuntut lembaga itu dapat memberi kontribusi pada berbagai aspek kehidupan berbangsa. Itu sebabnya, sudah selayaknya dipertimbangkan agar institusi tersebut dapat ditingkatkan statusnya menjadi sepadan dengan status badan yang langsung di bawah presiden, seperti badan-badan lainnya, misalnya Badan Nasional Penanggulangan Teroris dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.



DAFTAR PUSTAKA



- Amrullah dan Muslim. 2013. *Menemukan Kembali Sejarah Komunitas Elang Dodo Sumbawa*. Diedit oleh Ichsan Malik. Insos Books: <http://insosbookspress.com//>
- Anwar, Ahyar. 2008. "Bahasa Indonesia dan Realitas Indonesia". Makalah Kongres Bahasa Indonesia ke-IX, di Jakarta.
- Billwood, Peter. 2000. *Prasejarah Kepulauan Indo-Malaysia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Blundell, David (Ed.). 2009. *Austronesian Taiwan: Linguistic, History, Ethnology, and Prehistory*. Berkeley: The Regents of the University of Berkeley.
- Blust, R. 1978. "Eastern Melayo-Polynesian: A Subgrouping Argument". Dalam S.A. Wurm dan L. Carrington (ed.) *Second International Conference on Austronesian Linguistik*. Fascicle 1: 181-234.
- . 1982. "The Linguistik Value of the Wallace Line". Dalam *BTVL* 138: 231-250
- . 1984. "The Austronesian Homeland: A Linguistic Perspective". Dalam *AP* 26: 45-67.
- . 1993. "Centrale and Centrale-Eastern Malayo-Polinesian". Dalam *OL* 32: 241-293.

- _____. 1996. "Beyond the Austronesian Homeland: the Austric Hypothesis and its Implication for Archeology" . Dalam W.H. Goodenough (ed.) *Prehistoric Settlement of the Pacific, Hlm.: 117-140*. Philadelphia: American Philosophical Society.
- Brandes, J.L.A. 1884. *Bidrage tot de Verglijkende Klankleer der Westersche Afdeeling van de Maleisch-Polynesische Taalfamilie*. Utrecht: P.W. van de Weijer.
- Chauchard, Paul. 1983. *Bahasa dan Pikiran*. Diterjemahkan oleh A. Widyamartaya. Yogyakarta: Penerbit Yayasan Kanisius.
- Clark, Herbert H and Clark, Eve V. 1977. *Psychology and Language: An Introduction to Psycholinguistics*. N.Y. Harcourt, Brace Jovarovich.
- Dahlan, Ahmad. 2014. *Sejarah Melayu*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
- Dyen, Isidore. 1962. *The Lexicostatistical Clasification of the Malayopolynesian*. Language 38: 38-46.
- _____. 1965. "A Lexicostatistical Classification of the Austronesian Languages", dalam *International Journal of American Linguistics. Memoir, 19 (Jil. 31, No.1)*.
- _____. 1975. *Linguistic Subgrouping and Lexicostatistic* . The Hague: Mouton
- Dempwolff, Otto. 1934. *Vergleichende Lautlehre des Austronesischen Wortchatzes I ll: Induktives Aufban Einer Indonesischen Uprache*. Hamburg, C. Boysen.
- Dewan Bahasa dan Pustaka. 1991. *Kamus Dewan Edisi Baru*. Kualalumpur: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Flayssy, Don A.L. dan Flassy, Marlina. 2010. "Keberagaman Budaya Papua-Melanesia dalam Konteks Tradisi dan Budaya Melanesia Menuju Melanesianologi dan Papuanistik". Makalah yang disajikan Konferensi Internasional Keberagaman Budaya Papua-Melanesia dalam Mozaik Kebudayaan Indonesia, di Jayapura, 8-11 November 2010.
- Foley, William A. 1997. *Anthropolgical Linguistics: an Introduction*. Malden, USA: Blackwell Publishers Inc.
- Glazer, Nathan and Daniel P. Moynihan (ed.). 1975. *Ethnicity: Theory and Experience*. Cambridge, Massachusetts, and London, England: Harvard University Press.

- Halliday, M.A.K. 1972. *Language Structure and Language Function*. Dalam John Lyons. 1972: 140-165.
- Harris, Peter dan Ben Relly. 2000. *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator*. Jakarta: International IDEA.
- Hendrik, M.J. Maier. 1991. "Forms of Censorship in the Dutch Indies: the Marginalization of Chinese-Malay Literature". Dalam **Indonesia, Volume Special Issue**.
- Huntington, Samuel P. 2001. *Benturan Antarperadaban dan Masa Depan Politik Dunia*. Yogyakarta: Adipura.
- Ibrahim, Abdul Kadir. 2013. *Tanah Air Bahasa Indonesia*. Depok: Komodo Books.
- Kluckhohn, FR, dan F.L. Strodbeck. 1961. *Variation in Value Orientations*. Evanston III. Row Peterson and company.
- Kuan Yew, Lee. 2013. *One Man's View of The World*. Singapore: Straits Times Press.
- Kridalaksana, Harimurti. 2010. *Masa-Masa Awal Bahasa Indonesia*. Jakarta: Laboratorium Leksikologi dan Leksikografi, FIB, UI.
- Labov, William. 1994. *Principles of Linguistics Change*. Volume 1: Internal Factors. Cambridge Blackwell Publishers.
- Lewis, M. Paul. 2009. *Ethnologue: Languages of The World (Sixteenth Edition)*. Dallas, Texas: SIL International.
- Murdock, G. 1964. *Genetic Classification of the Austronesian Languages: A Key to Oceanic Culture History*, 3: 117-126.
- Mustarom, K. 2014. *Perang Generasi Keempat (4GW): Mengubah Paradigma Perang*. www.syamina.org.
- Mahsun. 1994. "Penelitian Dialekgeografis Bahasa Sumbawa". Yogyakarta: Disertasi untuk Doktor UGM.
- _____. 2006. *Bahasa dan Relasi Sosial*. Yogyakarta: Gama Media.
- _____. 2009. "Linguistik dan Studi tentang Kemanusiaan". Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap Bidang Linguistik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, 24 Januari 2009.

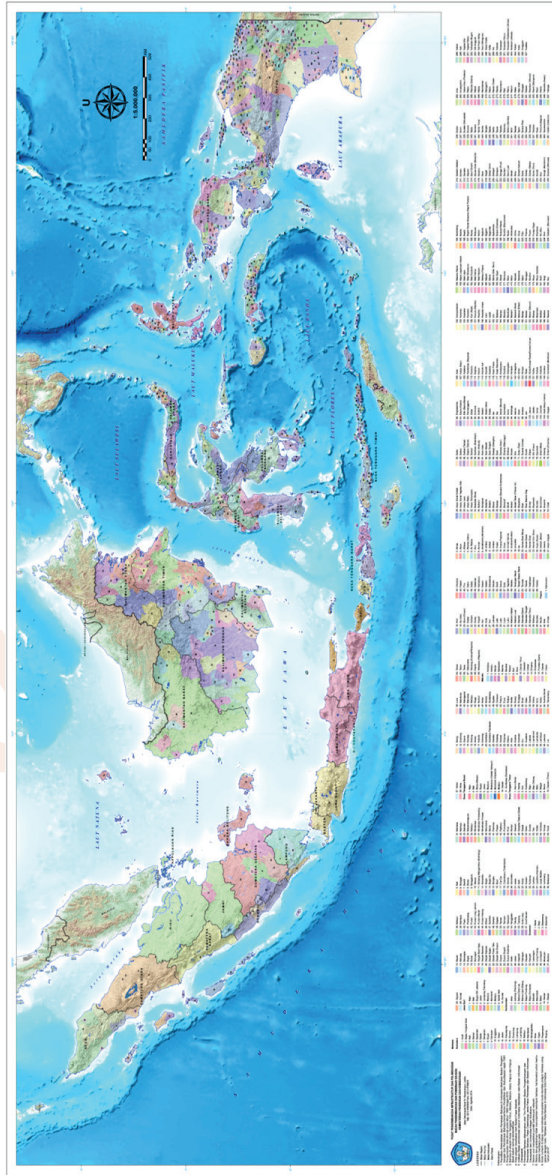
- _____. 2010. *Genolinguistik: Kolaborasi Linguistik dengan Genetika dalam Pengelompokan Bahasa dan Populasi Penuturnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. 2014. *Teks dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia: Kurikulum 2013*. Jakarta: RajaGrafindo.
- McMahon, April M.S. 1994. *Understanding Language Change*. New York: Cambridge University Press.
- McCormick, Christopher. 2015. "English Proficiency Index: Country Fact Sheet (Indonesia). Bahan Diskusi Panel yang Diselenggarakan English First, tanggal 29 Januari 2015, di Hotel Grand Hyatt, Jakarta.
- Nothofer, B. 1975. *The Reconstruction of Proto-Malayo-Javanic*. S'Gravenhage-Martinus Nijhoff.
- Nothofer, Bernd. 2010. "Dialek Banyumas dan Basa Cerbon: Penggunaan Dua varian Bahasa Jawa sebagai Lambang Jati diri dalam Perjuangan Pembentukan Daerah Otonom. Makalah pada Seminar Internasional yang diselenggarakan oleh FKIP Universitas Mataram.
- _____. 2015. "Linguistik Diakronis". Bahan Pelatihan Metode Penelitian Bahasa, di badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, di Jakarta.
- OECD. 2014. *What 15-Year-Old-Knows and what They Can Do with What They Know*. PISA 2012.
- Ophuijsen, C.A. Van. 1901. *Kitab Logat Melajoe*. Woordenlijst voor de Spelling der Maleische taal. Batavia.
- Ophuijsen, C.A. Van. 1910. *Maleische Spraakkunst*. Diterjemahkan T.W. Kamil. 1983. Tata Bahasa Melayu. Seri ILDEF. Jakarta: Djambatan.
- Parsons, Talcott. 1977. *Social System and the Evolution of Action Theory*. New York: The Free Press A Division of MacMillan Publishing Co.
- Pusat Bahasa. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Santos, Arysio. 2009. *Atlantis: The Lost Continent Finally Found*. Seri Terjemahan Indonesia. Jakarta Selatan: PT Ufuk Publishing House.

- SIL. 2006. *Bahasa-Bahasa di Indonesia (Languages of Indonesia)*. Edisi Kedua. Jakarta: SIL Internasional Cabang Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudaryanto. 1990. *Mengungkap Fungsi Hakiki Bahasa*. Yogyakarta: Duta Wacana Press.
- Soedjatmoko, dalam Kathleen Newland dan Kemala C. Soedjatmoko (Peny.). 1994. *Menjelajah Cakrawala: Karya visioner Soedjatmoko*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Terrel, J. 1981. *Linguistics and the Peopling of the Fasific Island*. **Journal of the Polynesian Society**, 90: 225-258.
- Voorhoeve, C.L., 1988. "The Languages of the North Halmahera Stock". *PL Seris A-76:181-209*.
- _____, 1994. "Contact-Induced Change in the non-Austronesian Languages in the North Maluccas, Indonesia". Dalam T. Dutton dan D. Tryon (Ed.). *Language Cantact and Change in the Austronesian Wold*, 649-674.
- Wang, Shuhan C. , Jackson, F.H., Mana, M., Liau, R., & Evans, B. 2010. *Resource Guide to Developing Linguistic and Cultural Competency in the United State*. College Park, MD: National Foreign Language Center at the University of Maryland. Retrieved from: <http://www.nflc.org/publication/>
- Whorf, B.L. "Science and Linguistics". Dalam J.B. Carroll (ed.). 1966. *Language, Thought and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee Whorf*. Cambridge Mass: MIT Press.
- Wurm, S.A. 1978. "The Emerging Linguistic Picture and Linguistic Prehistory of the Southwestern Pacific". Dalam W.C. McCurmack dan S.A., Wurm. *Approaches to Language: Antrophological Issues*, 191-221. The Hague: Moutton.
- Wurm, S.A. 1982. *Papuan Language of Oceania*. Tubingen: Gunter Naar Verlag. Wurm, S.A. 1983. "Linguistic Prehistory in the New Guinea Area". *JHE* 12: 25-35.

Daftar Rujukan Tambahan

- Kompas, 15 Desember 2010. Narapidana Politik Tersangka Perusakan: di Manokwari Delapan Aktivis Ditangkap Aparat Kepolisian
- Kompas, 10 Desember 2011. 169 Bahasa Etnis terancam Punah
- Kompas, 12 Januari 2014. Kelompok Melanesia: Polda Papua Larang Pengawasan
- Kompas, 2 Mei 2014. Diplomasi Budaya Melanesia Lewat Kuliner
- Kompas, 27 November 2014. Garis Wallace Makin Dipertegas
- Kompas, 18 Februari 2015. Papua: Operasi Militer Keliru Malah Perkuat Separatis
- Kompas, 24 Maret 2015. Kerusakan Yahukimo: Kepala Polda Papua Usulkan Pembubaran KNPB
- Koran Tempo, 30 Mei 2015. Kericuhan Papua, Aktivis Ditangkap, Warga Dikeroyok: Sebelumnya Terjadi Demo Mengusung Isu Negara Rumpun Melanesia
- Kompas, 27 Februari 2015. DPD dan senat Malaysia Jalin Kerja Sama
- Kompas, 13 Desember 2014. Bahasa Melayu Terkendala Geopolitik
- Kompas, 15 Juni. Kebahasaan: Melayu Didorong Jadi Bahasa Internasional
- Kompas, 17 Juni 2015. Kongres Bahasa Melayu: Mendesak, Penyusunan Standar Baku

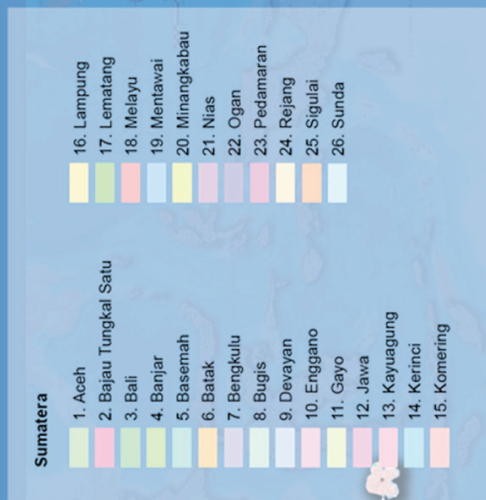
BAHASA-BAHASA DI INDONESIA
PETA BAHASA DI INDONESIA



BAHASA-BAHASA DI SUMATERA

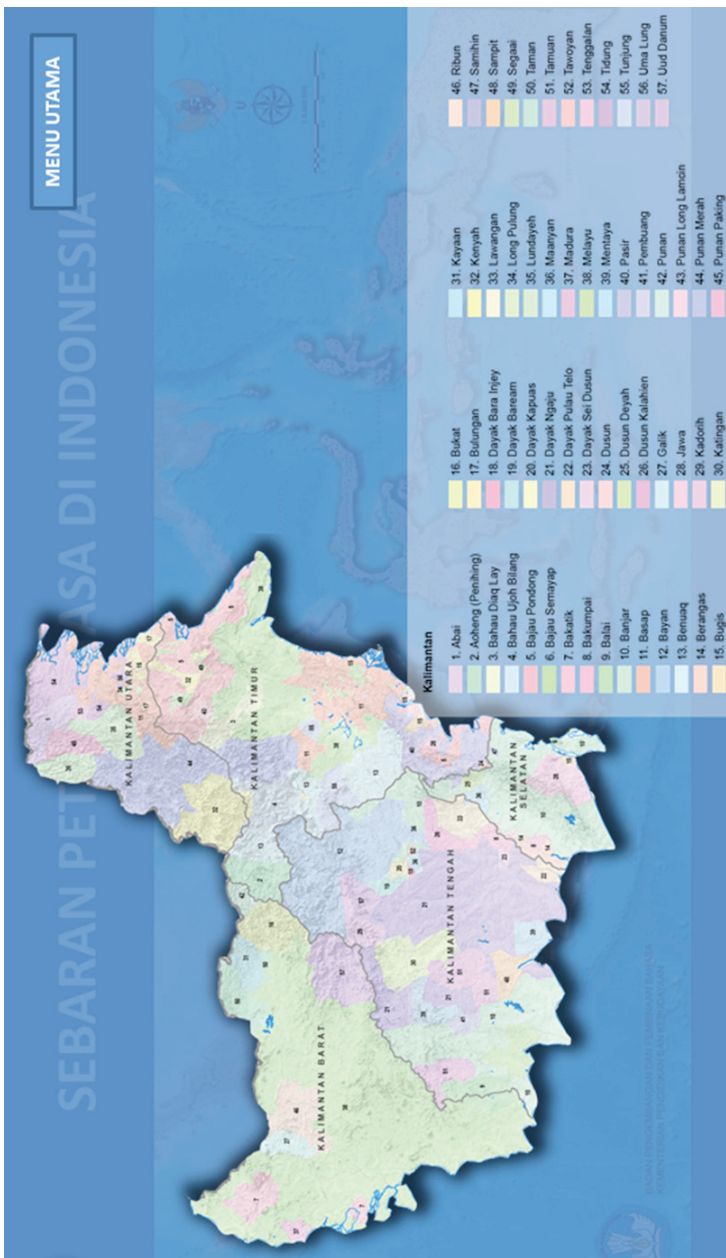
MENU UTAMA

SEBARAN PETA BAHASA DI INDONESIA



BAHASA-BAHASA DI KALIMANTAN

MENU UTAMA



BAHASA-BAHASA DI JAWA DAN BALI



BAHASA-BAHASA DI NTB

MENU UTAMA

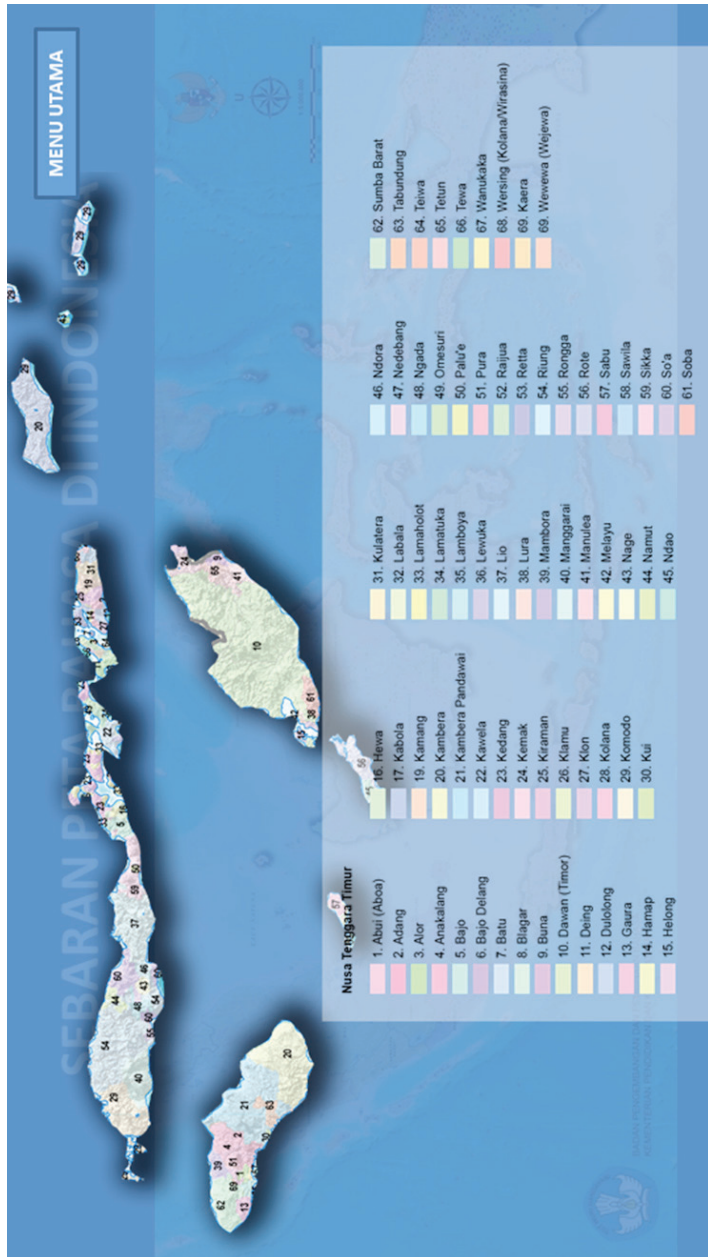
SEBARAN PETA BAHASA DI INDONESIA



Nusa Tenggara Barat

1. Bajo
2. Bali
3. Bima (Mbojo)
4. Bugis
5. Jawa
6. Madura
7. Makassar (Dialek Selayar)
8. Mandarin Ampenan
9. Melayu
10. Sasak
11. Sumbawa (Samawa)

BAHASA-BAHASA DI NTT



BAHASA-BAHASA DI SULAWESI

MENU UTAMA

SEBARAN PETA BAHASA DI INDONESIA



BAHASA-BAHASA DI MALUKU



LAMPIRAN 2

Lembaga Penyelenggara BIPA di Luar Negeri

No.	Negara	Lembaga Penyelenggara BIPA
1.	Jepang: 38 lembaga	Asahi Culture Center, Asia Bunka Kaikan, Asia University , Chinese Asian Languages School (Osaka), Chukyo Women's University , Chuo University , Daito Bunka University (Daito Bunka Daigaku), Ferris University, IC Nagoya, Kanda University of International Studies, Keio University, Kobe City University of Foreign Studies, Kokushikan University, Kyoto Daigaku, Kyoto Gaikokugo Senmon Gakko, Kyoto Sangyo University, Kyorin University , Kyushu International University, Meio University, Nanzan University, Faculty of Foreign Studies , Nihon Daigaku, Obirin University, Osaka University of Foreign Studies, Ritsumeikan Asia Pacific University, Senshu University, Setsunan University, Shukutoku University, Sophia University, Takushoku University, Tenry University (Tenry Daigaku), Tokyo Daigaku, Tokyo Nogyo Daigaku, Tokyo University of Agriculture and Technology, Tokyo University of Foreign Studies, Wako University
2.	Thailand: 6 lembaga	Rajamangala University of Technology (RMUTP), Universitas Chulalongkorn, Universitas Mahidol, Universitas Prince Songkklanakharin, Universitas Ramkham-haeng, Universitas Thaksin
3.	Cina: 4 lembaga	Beijing Institute of Foreign Languages, Peking University, Guangdong University of Foreign Studies, Guangzhou Institute of Foreign Languages
4.	Filipina: 3 lembaga	University Philippines, Ateneo de Manila, Sekolah Indonesia Davao
5.	Hongkong: 1 lembaga	Hongkong University
6.	India: 1 lembaga	Sekolah Indonesia New Delhi
7.	Korea Selatan: 5 lembaga	Hankuk University of Foreign Studies, Junior College of Foreign Studies, Pusan University of Foreign Studies, Woosong University , Young San University
8.	Myanmar: 2 lembaga	Indonesian School, Yangoon University of Foreign Studies
9.	Singapura: 3 lembaga	Indonesia Cultural Center, Universiti Teknologi Nanyang, University of Singapore

10.	Australia: 36 lembaga	Adelaide University, Charles Sturt University (CSU), Australian National University, University of Sydney, New South Wales University (NSW), Northern Territory University (NTU), Queensland University of Technology, Flinders University, Griffith University, La Trobe University, Macquarie University, Monash University, Murdoch University, Curtin University, Deakin University, University of Melbourne, University of New England, University of Queensland (UQ), University of Southern Queensland (USQ), University of Tasmania, University of Technology Sydney (UTS), University of the Sunshine Coast, University of Western Australia (UWA), University of Western Sydney (UWS), Victoria University of Technology (VUT), University of New England, Cowan University, Australian Defence Force School of Languages, Braemar College, Doncaster Secondary College, Edith Narre Warren South Colege, Royal Australian Air Force School of Languages, Royal Melbourn Institute of Technology (RMIT), School of Languages Indonesian Professional Learning Services, Scotch College, St Columba College
11.	Amerika Serikat: 12 lembaga	Arizona State University , Cornell University, Ohio University, North Illinois University, University of California at Barkeley, University of California at Los Angeles, University of Hawaii at Manoa, University of Michigan, University of Washington, University of Wisconsin-Madison, Yale University, University of Florida
12.	Jerman: 17 lembaga	Universitas Bremen, Fachhochschule Konstanz, Humbolt-Universitat zu Berlin, Institut fuer Ethnologie Universitaet Muenster, Suedosta-sienwissenschaften, Universitas Bielefeld, Universitas Bonn, Universitas Frankfurt, Universitas Freiburg, Universitas Gottingen, Universitas Hamburg, Universitas Koln, Universitas Munchen, Universitas Nortingen, Universitas Passau (Bayern), Ruprecht-Karls-Universitaet Haeidelberg
13.	Italia: 7 lembaga	Instituto per L'Orientale (Roma), ISIAO Milano, ISIAO Roma, CESMEO di Torino, Instituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente, Universita degli Studi "L'Orientale" Universita degli Studi Bologna
14.	Belanda: 6 lembaga	Instituut voor Indonesische Coursusen (Leiden) InterConsultancy Bureau Universitas Leiden, Koninklijk Instituut voor de Tropen, Universitas Leiden, Leidse Onderwijs Instellingen (Institut Pendidikan Kodya Leiden), School of South East Asian and Oceanic Language and Culture, Volkuniversiteit (Leiden)

15.	Inggris: 3 lembaga	Aston University, University of London, University of Exeter
16.	Prancis: 4 lembaga	Institut of d'Eltude Politique de Paris, Institut National Des Langues Et Civilisations Orientales (INALCO), Universite de La Rochelle,Univerite Le Havre
17.	Vatikan: 3 lembaga	Pontificia Instituto di Studi Orientali, Pontificia Universita Gregoriana, Pontificia Universita Urbaniana
18.	Rusia : 4 lembaga	Universitas Moscow, Russian Academy of Sciences, The State University of Saint Petersburg,Universitas Vladivostok
19.	Serbia: 1 lembaga	Fakultas Filologi Universitas Beograd
20.	Ukraina: 1 lembaga	University of Shevchenko, Kiev
21.	Polandia: 3 lembaga	Collegium Civitas dan Universitas Vistula, Fakultas Studi Oriental Universitas Warsawa, Institut Etnologi dan Antropologi Budaya Universitas Warsawa
22.	Azerbaijan: 2 lembaga	Universitas Asia Baku, Azerbaijan University of Languages
23.	Bulgaria: 1 lembaga	Universitas Sophia
24.	Uzbekistan: 2 lembaga	Tashkent Institute of Oriental Studies Tashkent State University of World Languages
25.	Ceko: 1 lembaga	Universitas Teknik Ceko
26.	Selandia Baru: 1 lembaga Arab Saudi: 3 lembaga	Victoria University of Wellington Sekolah Indonesia Jeddah, Sekolah Indonesia Madinah, Sekolah Indonesia Riyadh
27.	Mesir: 2 lembaga	Universitas Ain Syams, Suez Canal University, Ismailia
28.	Suriah: 1 lembaga	Sekolah Indonesia Damaskus
29.	Maroko: 1 lembaga	Universitas Mohamed V
30.	Sudan: 1 lembaga	International University of Africa
31.	Papua New Guinea: 1 lembaga	University of Papua New Guinea

32.	Senegal	KBRI Dakkar
33.	Chile	KBRI Santiago
34.	Vietnam	KBRI Ho Chi Minh
35.	Suriname	KBRI Paramaribo
36.	Argentina	KBRI Buenos Aires
37.	Srilanka	KBRI Kolombo
38.	Kamboja	KBRI Phnom Penh
39.	Laos	KBRI Vientiane
40.	Timor Leste	KBRI Dili
41.	Kaledonia Baru	KJRI Noumea
42.	Afsel	KJRI Capetown
43.	PNG	KJRI Vanimo
44.	Slovakia	KBRI Bratislava
45.	Kanada	KJRI Toronto

(Dikutip dari bahan presentasi BIPA 2013)

LAMPIRAN 3

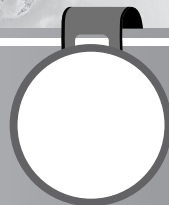
DAFTAR KOSAKATA JERMAN-AUSTRIA DALAM KESEPAKATAN UNI-EROPA

No.	Austria (Österreich)	Jurnal Resmi Masyarakat Eropa (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften)	Bahasa Indonesia
1	<i>Beiried</i>	<i>Roast Beef</i>	daging penutup/tanjung (sapi)
2	<i>Eierschwammerl</i>	<i>Pfifferlinge</i>	sejenis jamur (<i>Cantharellus</i>)
3	<i>Erdäpfel</i>	<i>Kartoffeln</i>	kentang
4	<i>Faschiertes</i>	<i>Hackfleisch</i>	daging cincang/giling
5	<i>Fisolen</i>	<i>Grüne Bohnen</i>	buncis
6	<i>Gammeln</i>	<i>Grieben</i>	ampas dari lemak hewani yg dipanaskan
7	<i>Hüferl</i>	<i>Hüfte</i>	daging pinggul (sapi)
8	<i>Karfiol</i>	<i>Blumenkohl</i>	kembang kol
9	<i>Kohlsprossen</i>	<i>Rosenkohl</i>	kubis brussel
10	<i>Kren</i>	<i>Meerrettich</i>	sejenis lobak pedas
11	<i>Lungenbraten</i>	<i>Filet</i>	daging has
12	<i>Marillen</i>	<i>Aprikosen</i>	buah aprikot
13	<i>Melanzani</i>	<i>Aubergine</i>	terong
14	<i>Nuß</i>	<i>Kugel</i>	daging bagian pinggang
15	<i>Obers</i>	<i>Sahne</i>	krim/kepala susu
16	<i>Paradeiser</i>	<i>Tomaten</i>	tomat
17	<i>Powidl</i>	<i>Pflaumenmus</i>	selai (buah) prem
18	<i>Ribises</i>	<i>Johannisbeeren</i>	sejenis buah bundar kecil (merah, hitam, atau putih) seperti buah beri, <i>ribes</i>
19	<i>Rostbraten</i>	<i>Hochrippe</i>	daging iga
20	<i>Schlögel</i>	<i>Keule</i>	daging pendasar dan gandik/ daging paha
21	<i>Topfen</i>	<i>Quark</i>	sejenis krim keju muda
22	<i>Vegerlsalat</i>	<i>Feldsalat</i>	sejenis tanaman selada <i>Valerianella locusta</i>
23	<i>Weichseln</i>	<i>Sauerkirschen</i>	buah ceri asam

Diambil dari lampiran Aksesori Traktat Austria-UE (*Aus dem Anhang zum Beitrittsvertrag Österreich-EU*)



TENTANG PENULIS



Prof. Dr. Mahsun, M.S., lahir 25 September 1959 di Jereweh-Sumbawa. Meraih gelar Sarjana Sastra dari Fakultas Sastra Universitas Jember tahun 1983, Gelar Magister Sains (*cum laude*) dari UGM (1991) dan Doktor (*cum laude*) juga dari UGM (1994) dalam bidang Ilmu Perbandingan Bahasa. Dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap bidang Linguistik di Universitas Mataram pada 24 Januari 2009 dengan Pidato Pengukuhan yang berjudul: “Linguistik dan Studi tentang Kemanusiaan”. Pernah mengikuti program *Short-Term Research Fellowship* pada Johann Wolfgang Goethe-Universität di Frankfurt am Main, Jerman selama semester musim dingin, Oktober 1991 s.d. Februari 1992, dengan beasiswa dari *der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD)*, mengikuti program riset bersama Prof. Bernd Nothofer dan Prof. Peter K. Austin di Melbourne University, Australia dalam rangka *Sasak and Sumbawa Project* 1998. Menjadi peneliti Utama pada Proyek Riset Unggulan Terpadu, Dewan Riset Nasional, Menristek, dan BPPT 1997/1998 s.d.

1999/2000, dengan judul: ***“Pengembangan Materi Muatan Lokal yang Berdimensi Kebihinnekatunggalikaan dan Pengajarannya: Penyusunan Materi Pelajaran Bahasa Sasak dengan Memanfaatkan Variasi Bahasa yang Berkerabat”***; Menjadi ***Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Wilayah NTB, pada Proyek Pengembangan Buku dan Minat Baca***, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Depdikbud RI, sejak 1996/1997 s.d. 1999/2000.

Setelah berhasil menyelesaikan penelitian yang didanai melalui Program Riset Unggulan Terpadu V, Mahsun kembali dipercaya menjadi peneliti utama pada Program Riset Unggulan Kemasyarakatan dan Kemanusiaan VI, dengan judul: ***“Kesepadanan Adaptasi Linguistik dengan Adaptasi Sosial pada Masyarakat Tutur Bahasa Sasak, Bali, dan Sumbawa di Pulau Lombok-NTB: Ke Arah Pengembangan Model Resolusi Konflik di Wilayah Pakai Bahasa yang Berbeda”***. Program riset yang dikelola Menteri Negara Riset dan Teknologi RI dan dilaksanakan tahun 2005 s.d. 2006 tersebut merupakan riset yang didesain untuk menemukan model acuan dalam tindakan yang bersifat prepentif dan deteksi dini terhadap kemungkinan munculnya kondisi disharmoni pada komunitas yang berbeda bahasa atau varian, misalnya masyarakat di wilayah transmigrasi, serta berupaya memberi rekomendasi bagi penentuan kebijakan pembinaan sosial/kemasyarakatan melalui pembinaan sosial budaya pada masyarakat multikultural.

Tahun 2006 Mahsun dipercaya untuk mengambil alih sebagai koordinator (akademik) Program Penelitian Kekerabatan dan Pemetaan Bahasa-Bahasa di Indonesia, Pusat Bahasa, yang terbengkalai analisisnya selama 13 tahun. Atas ketekunan dan kemampuannya memberdayakan sumber daya manusia yang berada di 22 Balai/Kantor Bahasa di seluruh Indonesia, Mahsun bersama teman-temannya itu mampu mempersembahkan Peta Bahasa-Bahasa di Indonesia kepada Pemerintah (Presiden RI) pada Acara Puncak Peringatan Hardiknas tahun 2009 di Gedung Sabuga, Bandung. Selain itu, Mahsun bersama Prof. Dr. dr. Mulyanto,

ahli Hepatika, Universitas Mataram, menjadi peneliti Ahli pada Program Penelitian “Bahasa Genom” yang dilaksanakan Pusat Bahasa (2008-2009). Berdasarkan hasil penelitian itu Mahsun menggagas lahirnya subdisiplin ilmu baru, yang merupakan Ilmu Antarbidang Genetika dengan Linguistik, yang disebutnya dengan **Genolinguistik**. Buku yang monumental ini diterbitkan oleh Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta (2010).

Berbagai buku dalam bidangnya telah diterbitkan, di antaranya: *Indonesia dalam Perspektif Politik Kebahasaan* (Jakarta: PT RajaGrafindo); *Teks dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia: Kurikulum 2013* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013); *Genolinguistik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010); *Dialektologi Diakronis: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995); *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya* (Jakarta: PT RadjaGrafindo, Cetak ulang ke-7, 2014); *Bahasa dan Relasi Sosial* (Yogyakarta: Gama Media, 2006); *Morfologi Bahasa Sumbawa Dialek Jereweh* (Yogyakarta: Gama Media, 2006); *Pemetaan dan Distribusi Varian-Varian Bahasa Mbojo* (Yogyakarta: Gama Media, 2006); *Kajian Dialektologi Diakronis Bahasa Sasak di Pulau Lombok* (Yogyakarta: Gama Media, 2006); *Kajian Dialektologi Diakronis di Wilayah Pakai Bahasa Sumbawa* (Yogyakarta: Gama Media, 2006); *Morfologi* (Yogyakarta: Gama Media, 2007); *Linguistik Historis Komparatif* (Yogyakarta: Gama Media, 2007); *Dialektologi* (Yogyakarta: Gama Media, 2007).

Menulis berbagai makalah untuk disajikan baik pada forum nasional maupun internasional. Hingga kini Mahsun menjadi Guru Besar Tetap bidang Linguistik pada Program S1 dan Program Magister Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Mataram dan Pembimbing Program Doktor Linguistik, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta; serta pernah menjabat Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB sejak 25 Februari 2004 s.d. 13 Januari 2010; menjabat sebagai dekan FKIP Universitas Mataram untuk periode 2010 s.d. 2014; dan sejak April 2012 sampai sekarang diberi amanah sebagai Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

INDONESIA dalam PERSPEKTIF POLITIK KEBAHASAAN

Bahasa dinyatakan secara tegas di dalam buku ini sangat potensial membentuk negara bangsa. Negara Indonesia dijadikan contoh praktik terbaik dalam memilih bahasa, bukan agama atau ras, untuk membangun nasionalisme warga negara. Dari perspektif politik kebahasaan, sebagai pangkal ketahanan negara, bahasa tidak luput dari potensi ancaman akan penghancuran baik oleh pihak internal negara bangsa maupun oleh pihak eksternal, antara lain, dengan gendang perang generasi keempat atau dengan sebutan yang lebih populer “*poxy war*”. Buku ini juga mengurai berbagai simpul sumber potensi konflik sosial yang mengarah disintegrasi sosial, menuju disintegrasi bangsa dengan memanfaatkan kondisi keberagaman bahasa. Isu-isu kemelayuan dan kemelanesian merupakan beberapa contoh yang memanfaatkan keberbedaan bahasa untuk membentuk loyalitas alternatif baru dalam membangun identitas yang berbeda. Berbagai bukti linguistik awal yang memperkuat tanah asal persebaran rumpun bahasa Austronesia dari Indonesia, bukan dari Indocina atau Melanesia seperti diyakini selama ini, disajikan secara logis argumentatif dalam buku ini. Uraian tentang hal itu menjadi titik masuk kerja ilmiah pembuktian kebenaran Indonesia sebagai tanah asal penutur Austronesia dan pada akhirnya akan membuktikan bahwa Indonesia memang wilayah tempat awal bersemainya peradaban manusia, sebagaimana hipotesis tentang Atlantis.

Kepada para pembaca, karya akademis penulis ini lebih mengajak untuk mencegah dan menangkal segala ancaman tersebut guna mengekalkan fondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang pada saat buku ini terbit diperingati genap berusia 70 tahun. Untuk itu, terlebih dahulu disuguhkan prawacana yang meringkas isi bab-bab buku ini. Diawali dengan ajakan merenung tentang keberadaan bahasa sebagai penanda keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan yang layak mengemban amanah kekhalfahan di muka bumi, lalu dilanjutkan uraian tentang hubungan bahasa dengan negara bangsa, bahasa bagi bangsa Indonesia, isu-isu kebahasaan yang terkait integrasi bangsa, sampai pada uraian gagasan penguatan peran bahasa dalam membangun kemandirian bangsa Indonesia. Akhirnya, penulis menutup wacana politik kebahasaan ini dengan semacam renungan introspeksi dan refleksi di bidang pendidikan sebagai basis utama untuk menyiapkan generasi emas bangsa.

Sungguh, dengan buku ini, pembaca seolah-olah diajak berkeliling menjaga keutuhan negara bangsa Indonesia. Buku ini akan melengkapi khazanah ilmu pertahanan yang dapat diakses oleh tidak hanya pembaca berpendidikan militer, tetapi juga yang berlatar sipil. Siapa pun yang hati nuraninya terpenggil meneruskan perjuangan bangsa Indonesia sudah selayaknya membaca buku ini.

Digahayu Republik Indonesia.



Jl. Raya Leuwisanggung No. 112
Kel. Leuwisanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956
Telp 021-84311162 Fax 021-84311163
Email: rajapersn@rajawindo.co.id
www.rajawindo.co.id

RAJAWALI PERS
DIVISI BUKU PERCHURAN TINGGI
ISAN 978-979-769-857-7

